



**PENGARUH KOMUNIKASI, STRUKTUR
BIROKRASI DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP
SUMBERDAYA DAN DISPOSISI DALAM
MENINGKATKAN KINERJA IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN**
(Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo)

DISERTASI

Oleh

DWI PUTRANTO RIAU
NIM 130930101003

**PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PENGARUH KOMUNIKASI, STRUKTUR
BIROKRASI DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP
SUMBERDAYA DAN DISPOSISI DALAM
MENINGKATKAN KINERJA IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN**
(Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo)

DISERTASI

Digunakan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Administrasi (S3) dan mencapai gelar Doktor

Oleh

DWI PUTRANTO RIAU
NIM 130930101003

**PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Nanik Iyatiningsih dan Almahum bapak Misrianto serta Kakak dan Adik-adik yang tercinta;
2. Istriku Yayuk Setyawati, SH dan anak-anakku Adhiyaksa Akbar Putranto, Syafrhizal Widya Putranto serta Aisha Alvanitadewi Ramadhania yang tercinta;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai SD kelas 4 di Tanjung Uban Kepulauan Riau, SD Mojo 2 sampai SMA di Surabaya dan S1 Teknik Sipil ITS serta S2 Manajemen Pembangunan Kota Arsitektur ITS;
4. Almamater Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (terjemahan Surat Al-Mujadalah ayat 11)

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri (terjemahan Surat Ar Ra'ad ayat 11)¹

Kesuksesan akan didapatkan dengan kesungguhan dan kegagalan terjadi akibat kemalasan. Bersungguh-sungguhlah maka kamu akan mendapatkan dengan segera apa yang kamu cita-citakan (sholahuddin As-Supardi. Wafat 764 H)²

¹ Departemen Agama Republik Indonesia.1998. *AlQuran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo.

² Akbar Zainudin, *Man Jadda Wajada Art of Excelent Life*. 2010. PT. Gramedia. Jakarta

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Dwi Putranto Riau

NIM :130930101003

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ Pengaruh Komunikasi, Struktur Birokrasi dan Dukungan Publik terhadap Sumberdaya dan Disposisi dalam Meningkatkan Kinerja Implementasi Kebijakan. (Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Nopember 2016
Yang menyatakan,

Dwi Putranto Riau
NIM 130930101003

DISERTASI

**PENGARUH KOMUNIKASI, STRUKTUR BIROKRASI DAN
DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP SUMBERDAYA DAN
DISPOSISI DALAM MENINGKATKAN KINERJA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
(Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo)**

Oleh

**DWI PUTRANTO RIAU
NIM 130930101003**

Promotor:

Promotor : Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

Ko-Promotor 1: Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Ko-Promotor 2: Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma, MA, Ph.D

PENGESAHAN

Disertasi berjudul “Pengaruh Komunikasi, Struktur Birokrasi dan Dukungan Publik terhadap Sumberdaya dan Disposisi dalam Meningkatkan Kinerja Implementasi Kebijakan (Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Nopember 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Penguji Utama

Dr. Akhmad Toha, M.Si
NIP. 19571227 198702 1 002

Penguji Luar/Tamu

Penguji Anggota

Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si
NIP. 19610905 198601 1 002

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 19650312 198103 1 003

Penguji Anggota

Promotor

Dr. Edy Wahyudi, M.M
NIP. 19750825 200212 002

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 19520727 198103 1 003

Co-Promotor 1

Co-Promotor 2

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 19580510 198702 2 001

Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma, MA, Ph.D
NIP.19500428 197903 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP 19580810 198702 1 002

RINGKASAN

Pengaruh Komunikasi, Struktur Birokrasi dan Dukungan Publik terhadap Sumberdaya dan Disposisi dalam Meningkatkan Kinerja Implementasi Kebijakan.(Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo); Dwi Putranto Riau; 130930101003; 2016: 386 halaman; Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pemanfaatan bangunan gedung merupakan tahap yang harus dilakukan pemeriksaan laik fungsi karena menyangkut keselamatan penghuninya, sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang bangunan gedung bahwa setiap bangunan gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung (SLF) sebelum dimanfaatkan. Kota Probolinggo sebagai daerah yang sudah menerapkan pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung sejak penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008. Kinerja implementasi Sertifikat Laik fungsi bangunan gedung tidak berjalan sesuai tujuan perda.selama tahun 2008 – 2014 dari jumlah IMB yang dikeluarkan rata-rata 400 izin per tahun hanya 44 SLF yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal birokrasi yaitu komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, disposisi dan eksternal birokrasi yaitu dukungan publik.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif dengan jenis studi *explanatory research*. Tahap pertama penelitian dilakukan analisis data kuantitatif dengan menggunakan SEM (*Structural Equation Modeling*) Amos versi 21 untuk menganalisis korelasi 6 variabel dengan merekonstruksi model Edward III dan konstruksi 2 model empiris. Pada tahap kedua analisis data kualitatif melalui *indept interview* dan forum diskusi group (FGD) guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif.

Komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik berpengaruh terhadap disposisi. Pada struktur birokrasi, dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap sumberdaya. Pada sisi lain komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disposisi dan sumberdaya. Artinya komunikasi yang tidak konsisten dilakukan dan komunikasi yang tidak ditransmisikan kepada semua stakeholder tidak mampu meningkatkan peran disposisi dan sumberdaya. Meningkatkan peran sumberdaya dalam meningkatkan kompetensi SDM, jumlah peralatan dan kewenangan yang kuat. Pada variabel disposisi mengoptimalkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan SLF, melakukan mutasi staf sesuai kompetensi dan memberikan insentif kepada staf dalam pelaksanaan SLF-BG. Meningkatkan Kinerja implementasi kebijakan SLF-BG belum merata pada seluruh pemohon/pengguna bangunan gedung dan ketepatan kebijakan SLF-BG belum berguna/benilai bagi pemilik bangunan gedung sesuai dengan tujuan

penyelenggaraan bangunan gedung yaitu bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pengaruh simultan tidak langsung bahwa Sumberdaya berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui disposisi. Disposisi berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui sumberdaya. Struktur birokrasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya atau disposisi.

Dukungan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui sumberdaya. Artinya kurangnya dukungan publik tidak akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang tidak dimediasi oleh sumberdaya. Dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui disposisi. Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya dan disposisi. Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi SLF melalui disposisi dan sumberdaya.

Dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan SLF melalui sumberdaya dan disposisi. Dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan SLF melalui disposisi dan sumberdaya. Komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui sumberdaya atau disposisi. Artinya komunikasi yang kurang intensif dilakukan tidak meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan tidak dimediasi oleh sumberdaya atau disposisi. Komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui disposisi dan sumberdaya. Artinya komunikasi yang kurang intensif dilakukan tidak meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan tidak dimediasi disposisi dan sumberdaya

SUMMARY

Influence Communication, Structure Bureaucracy and Public Support to Resource and Disposition in Improving Performance Policy Implementation. (Certification Feasibility Study Function Building in Probolinggo City); Dwi Putranto Riau; 130930101003; 2016: 386 pages; Doctoral Program Administrative Sciences Faculty of Social and Political Sciences, University of Jember.

Utilization of building a stage that must be examined is eligible function because it involves the safety of the occupants, according to the law No. 28 of 2002 and Government Regulation No. 36 of 2005 on buildings that each building must have a Certificate of Eligible Function building (SLF) before being used. Probolinggo city as an area that already apply Eligible Certificate execution function of the building since the establishment of Regional Regulation No. 4 of the Certificate of implementation 2008. Performance Eligible buildings function does not work for the purpose perda. During the years 2008-2014 of the number of IMB issued an average of 400 permits per year only 44 SLF issued. It is caused by internal factors, namely bureaucratic communication, resources, bureaucratic structure, disposition and external bureaucracy that is public support.

This study uses the type of quantitative research methods with the kind of explanatory research studies. The first phase of research conducted quantitative data analysis using SEM (Structural Equation Modeling) Amos version 21 to analyze the correlation 6 variables to reconstruct Edward III and the construction of two empirical models. In the second stage of analysis of qualitative data through interviews and forums indept group discussion (FGD) in order to strengthen the results of quantitative research.

Communication, bureaucratic structures and public support have a significant effect on the performance of policy implementation functions acceptance certificate of the building. Communications, resources, bureaucratic structures and affect the disposition of public support. In the structure of the bureaucracy, public support significant effect on resources. On the other hand the communication does not significantly influence the disposition and resources. This means that communication is not consistently performed and communications transmitted to all stakeholder is not able to increase the role of dispositions and resources. Enhancing the role of resources in enhancing the competence of human resources, the amount of equipment and strong authority. In variable optimizing disposition strong commitment in implementing the SLF, transferring the staff according to its competence and provide incentives to staff in the implementation of the SLF-BG. Improving Performance SLF-BG policy implementation have not been evenly on the entire applicant / user of the building and the appropriateness of the policy has not been useful SLF-BG / appreciating for the building owner in accordance with the objectives of the buildings are buildings which meet the administrative and technical requirements.

Simultaneous indirect influence that the Resource affect the performance of SLF policy implementation through disposition. Disposition effect on the performance of policy implementation functions acceptance certificate of the building through a resource. The bureaucratic structure affect the performance of the implementation SLF through resource or disposition.

Public support had no significant effect on the performance of SLF policy implementation through resource. That is the lack of public support will not improve performance certificate acceptance policy implementation functions of buildings that are not mediated by resources. Public support a significant effect on the performance of SLF policy implementation through disposition. The bureaucratic structure significantly influence performance through the implementation of the SLF and disposition of resources. The bureaucratic structure significantly influence performance SLF implementation through disposition and resources.

Public support significant impact on SLF policy implementation and resource through disposition. Public support significant impact on policy implementation SLF and resource through disposition. Communication no significant effect on the performance of SLF policy implementation through resource or disposition. This means that less intensive communications do not increase the acceptance certificate policy implementation performance of buildings and building function is not mediated by resources or disposition. communication not affect the performance of SLF policy implementation and resource through disposition. This means that less intensive communications do not improve performance certificate acceptance policy implementation functions of buildings and not mediated disposition and resources

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berkah dan nikmat yang tak ternilai, sehingga disertasi dalam rangka ujian terbuka dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih baik secara langsung maupun tidak langsung kepada semua pihak atas dorongan moral dan semangatnya dalam penyelesaian penyusunan disertasi yang berjudul “Pengaruh Komunikasi, Struktur Birokrasi dan Dukungan Publik terhadap Sumberdaya dan Disposisi dalam Meningkatkan Kinerja Implementasi Kebijakan. (Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo)”. Secara khusus, penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Jember, Dekan FISIP, Direktur Pascasarjana FISIP, Kepala Prodi Doktor Ilmu Administrasi, dan sivitas akademika Universitas Jember;
2. Promotor, Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan bimbingan dan perbaikan materi disertasi ini;
3. Co-promotor 1, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si yang memberikan masukan dalam perbaikan disertasi ini;
4. Co-Promotor 2 : Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma, M.A, Ph.D yang telah meluangkan waktu dan masukan terhadap perbaikan materi statistik disertasi ini;
5. Dosen Penguji Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup dan Terbuka Program Doktor Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember yang memberikan masukan dalam penyusunan disertasi ini;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kasi Penataan Ruang, dan teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dan Inspektorat Kota Probolinggo, Pihak Kontraktor dan Konsultan Bangunan Gedung di Kota

Probolinggo, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan masyarakat pemilik bangunan gedung;

7. Budi Prastowo, ST, MT, Kasi Standarisasi Direktorat Bina Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Balai Tata Bangunan Balitbang Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Konsultan perorangan Bangunan Gedung, Dr. Ir. Jimmy S Juwana, dan staf di Seksi Turbinbaga, Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
8. Ibu dan Almarhum Bapak, Kakak dan adik-adik serta istri dan anak-anak yang telah ikhlas serta mendoakan dalam memotivasi penyelesaian studi penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga dengan bantuan dan perhatiannya mendapat balasan dari Allah Swt. sebagai amal saleh bagi kita semua. Amin.

Penulis menerima saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan disertasi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga disertasi ini dapat bermanfaat.

Probolinggo, Nopember 2016

Penulis

GLOSSARY

1. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.
2. Publik adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.
3. Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.
4. Kebijakan publik mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal dan pernyataan Pejabat Publik didepan publik.
5. Kebijakan publik yang terkodifikasi adalah segenap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah.
6. Pernyataan pejabat publik adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat publik didepan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa.
7. Formulasi Kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan publik tertentu.
8. Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi Kinerja Kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja implementasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan.
10. Revisi Kebijakan publik adalah suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu kebijakan publik tertentu, baik karena kebutuhan publik, maupun antisipasi kondisi di masa depan.
11. Kinerja organisasi meliputi dimensi atau unjuk kerja dan dimensi hasil atau prestasi kerja. Kinerja Kebijakan/program sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam kebijakan atau program telah dilaksanakan oleh suatu institusi (organisasi) sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan atau program tersebut.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan publik kepada pelaku kebijakan publik agar dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian, dari seseorang kepada orang lain melalui cara lisan, tertulis, maupun bahasa nonverbal dengan tujuan orang lain tersebut mengeinterpretasikannya sesuai dengan maksud yang dikehendaki.

16. Struktur Birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal dengan cara pembagian pekerjaan, garis komando, cakupan kendali, formalisasi aturan dan standar operasional prosedur.
17. Dukungan Publik adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam tindakan ikut serta sekumpulan individu dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
18. Sumberdaya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang meliputi sumberdaya manusia, keuangan, peralatan, informasi dan kewenangan.
19. Disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan
20. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Sertifikat Laik Fungsi adalah Sertifikat yang diberikan pada suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebelum bangunan gedung dimanfaatkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.

MANFAAT PENELITIAN

Temuan Studi ini membuktikan kebenaran 20 hipotesis dari 27 hipotesis, dan 7 hipotesis tidak signifikan serta adanya temuan baru yaitu dukungan publik berpengaruh langsung terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF-BG, berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja melalui disposisi, dan melalui sumberdaya dan disposisi atau sebaliknya.

a. Manfaat Teoritis

Dalam studi ini menguji hubungan faktor internal birokrasi (Komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan disposisi) dan eksternal Birokrasi yaitu dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dengan kasus di Kota Probolinggo. Konsep studi ini mengandung muatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Suriasumantri (2000) bahwa setiap konstruk atau teori selalu memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

1) Perspektif Ontologi

Konsep Kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dapat dirasakan eksistensi atau keberadaannya pada Dinas Pelaksana SLF bangunan gedung di Kota Metro, besar, sedang dan kecil. Indikasi adanya konsep kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung disebabkan aktivitas Dinas Pelaksana bangunan gedung (Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang) tersebut. Untuk diketahui, apakah hasil SLF sudah sesuai dengan IMB yang dikeluarkan atau target sudah sesuai yang ditetapkan peraturan daerah bangunan gedung.

Konsep Kinerja implementasi kebijakan bangunan gedung “apakah hasil SLF sudah sesuai dengan IMB yang dikeluarkan dan sesuai target perda bangunan gedung” hal ini menjadi penting bagi Dinas Pelaksana bangunan gedung sebagai eksistensi terkait pelaksanaan yang dilakukan untuk mengambil sejumlah Keputusan ini.

Apabila dari hasil kinerja yang dilakukan tidak sesuai dengan target yang dihasilkan maka Dinas Pelaksana bangunan gedung harus memperbaiki dengan mengerahkan kekuatan potensi sumberdaya (SDM, dana, peralatan, informasi dan kewenangan) dan memperkuat dukungan publik.

2) Perspektif Epistemologi.

Melalui prosedur ilmiah ditemukan pada studi ini bahwa kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan dipengaruhi langsung oleh struktur birokrasi, dukungan publik, sumberdaya dan disposisi.

Kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung dipengaruhi tidak langsung oleh struktur birokrasi melalui sumberdaya dan disposisi, dukungan publik melalui disposisi melalui sumberdaya, sumberdaya melalui disposisi dan disposisi melalui sumberdaya.

3) Perspektif Aksiologi.

Temuan studi ini berguna memperbaiki kekurangan model sebelumnya yaitu model Edward III dengan menambahkan, menguji, pengaruh langsung

eksternal birokrasi yaitu variabel dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan.

Memperbaiki studi sebelumnya yaitu studi Silvia Yulita R (2013) tentang kesiapan masyarakat untuk bangunan gedung fungsi usaha dalam menerima implementasi SLF dan studi Endah Harisun (2013) kesiapan Dinas PU dalam memperkuat faktor Internal Birokrasi dalam implementasi SLF, masyarakat dan jasa konstruksi. Studi Winda Paramitha (2012) dan Misroji (2014) yg sama dengan Edward III tentang Internal birokrasi dalam implementasi SLF, perlu tambahan variabel dukungan publik.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan temuan studi, manfaat praktis temuan ini pada Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan Implementasi SLF bagaimana Dinas melaksanakan kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan target kinerja.

1) Dinas Pelaksana SLF.

Temuan studi ini dapat menjadi bahan introspeksi bagi Dinas Pekerjaan Umum. Karena, selain memiliki kekuatan juga terdapat kekurangan. Kekuatan yang dimaksud ialah temuan-temuan positif dan negatif yang signifikan, berkaitan dengan kinerja implementasi kebijakan SLF.

Dalam faktor komunikasi Dinas Pelaksana SLF bangunan gedung memperkuat sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Menerapkan SLF bangunan gedung pada semua fungsi bangunan gedung. Faktor struktur birokrasi hanya menugasi satu seksi dalam implementasi SLF. Pada Faktor dukungan publik Dinas pelaksana mempermudah persyaratan penerbitan SLF. Faktor sumberdaya dengan menambah dan meningkatkan kompetensi administrasi dan teknis tentang SLF, menambah peralatan untuk pemeriksaan SLF dan meningkatkan kewenangan aktor implementasi SLF. Dalam faktor kinerja implementasi SLF pemerataan pada semua pengguna bangunan gedung dan implementasi SLF berguna bagi keselamatan penghuni bangunan gedung.

2) Dinas/Lembaga Pendukung SLF.

Menjadi pedoman bagi kecamatan dan dinas pelayanan perijinan satu atap untuk menyiapkan data IMB agar implementasi SLF berjalan secara cepat, tepat dan akurat.

3) Masyarakat Pengguna Bangunan Gedung

Kinerja Implementasi SLF sudah sesuai tujuan perda dalam penerbitan SLF bangunan gedung memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penghuni atau pengguna bangunan gedung fungsi hunian, usaha, keagamaan, sosial dan budaya serta khusus.

4) Peneliti

Temuan studi yang ada sebagian memperkuat temuan teori yang ada dan temuan studi sebelumnya. Namun, terdapat temuan yang tidak signifikan. Oleh karena itu, akan menjadi lebih menarik bila dilakukan studi lanjutan untuk menjawab temuan-temuan yang tidak signifikan berkaitan dengan kinerja Implementasi Kebijakan SLF.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA.....	xii
GLOSSARY.....	xiv
MANFAAT PENELITIAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Batasan Penelitian.....	15
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	15
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Tinjauan Pustaka.....	17
2.2 Landasan Teori.....	29
2.3 Administrasi Negara/Publik.....	29
2.4 Paradigma Administrasi Publik.....	35
2.5 Implementasi Kebijakan Publik.....	37
2.5.1 Model George C. Edward III.....	42

	2.5.2 Model Van Horn dan Van Meter	47
	2.5.3 Model Merilee S. Grindle	50
	2.5.4 Model Mazmanian dan Sabatier.....	55
	2.6 Variabel Penelitian.....	60
	2.6.1 Komunikasi	61
	2.6.2 Sumberdaya	63
	2.6.3 Disposisi	67
	2.6.4 Struktur Birokrasi	70
	2.6.5 Dukungan Publik	74
	2.6.6 Kinerja Implementasi Kebijakan	78
	2.7 Hubungan Antara Variabel Penelitian.....	83
	2.8 Kerangka Konseptual dan Hipotesa Penelitian	87
	2.8.1 Kerangka Konseptual	87
	2.8.2 Hipotesa Penelitian.....	89
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN.....	96
	3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian.....	96
	3.2. Ruang Lingkup Penelitian	98
	3.2.1 Fokus Penelitian	98
	3.2.2 Lokusi Penelitian	99
	3.3. Variabel Penelitian.....	99
	3.3.1 Identifikasi Variabel	99
	3.3.2 Definisi Operasional Variabel	100
	3.4. Instrumen Penelitian.....	107
	3.5. Analisis Statistik.....	109
	3.6. Pengujian Hipotesis.....	110
	3.7. Alat Analisis Data.....	112
	3.7.1. Struktural Equation Model – AMOS	114
	3.7.2. Model Rekursif dan Nonrekursif	116
	3.7.3. Analisis Kualitatif	116
	3.8. Penyelesaian Struktural Equation Model dengan	

	AMOS.....	117
	3.8.1. Ukuran Sampel.	117
	3.8.2. Tahapan Analisis SEM	117
	3.9. Populasi serta Rancangan Teknik Pengambilan Sampel	118
	3.9.1 Populasi dan Sampel Data Kuantitatif	119
	3.9.2 Sampel Data Kualitatif.....	119
	3.10. Metode Pengambilan Data dan Alat Pengambilan Data .	123
	3.11. Waktu Penelitian	124
BAB 4	DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	125
	4.1. Gambaran Umum Kota Probolinggo.....	125
	4.1.1 Kondisi Administratif	125
	4.1.2 Kependudukan	126
	4.1.3 Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat	127
	4.1.4 Kondisi Ekonomi	128
	4.1.5 Kondisi Pekerjaan Umum	128
	4.1.6 Kondisi Perumahan	129
	4.1.7 Kondisi Tata Ruang	130
	4.1.8 Kondisi Bangunan Gedung	131
	4.2. Gambaran Umum Kebijakan Bangunan Gedung	134
	4.2.1 Kebijakan Bangunan Gedung Di Pusat.....	134
	4.2.2 Kebijakan Bangunan Gedung di Kota Probolinggo.....	161
	4.3. Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo	169
	4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	169
	4.3.2 Organisasi	169
	4.3.3 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	170
	4.3.4 Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum	175
	4.3.5 Nilai IKM dan IHM Dinas PU Kota Probolinggo	178
	4.3.6 Data IKM dan IHM Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang	179
	4.3.7 Perbaikan Pelayanan Bidang Cipta Karya dan Tata	

	Ruang.....	183
BAB 5	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	185
5.1	Hasil Penelitian	185
5.1.1	Deskripsi Responden	185
5.1.2	Uji Validitas dan Reliabilitas	186
5.1.3	Analisis Statistik Diskriptif Variabel	188
5.2	Analisis Model Implementasi Kebijakan SLF	195
5.2.1	Model Edward III.....	196
5.2.2	Model Emperis1 (Variabel Intervening Sumberdaya dan Disposisi)	209
5.2.3	Model Empiris 1 Tanpa Intervening.....	224
5.2.4	Perbandingan Antara Model Empiris 1	228
5.2.5	Model Empiris 2	231
5.2.6	Perbandingan Antara Model Edward III, Emperis 1 dan Model Emperis 2.....	246
5.3	Hasil Penelitian Data Kualitatif Melalui Indept Interview	255
5.3.1	Komunikasi.....	255
5.3.2	Sumberdaya.....	256
5.3.3	Struktur Birokrasi	261
5.3.4	Dukungan Publik	265
5.3.5	Disposisi	267
5.3.6	Kinerja Implementasi Kebijakan SLF	269
5.3.7	Rangkuman Hasil Data Kualitatif	274
5.4	Analisis terhadap Implementasi Kebijakan SLF	276
5.4.1	Analisis Implementasi Kebijakan Perda Bangunan Gedung.....	276
5.5	Analisis terhadap Variabel yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SLF	281
5.5.1	Analisis Pengaruh Variabel Komunikasi	281

5.5.2 Analisa Pengaruh Faktor Sumberdaya.....	287
5.5.3 Analisa Faktor Struktur Birokrasi.....	291
5.5.4 Analisis Dukungan Publik.....	296
5.5.5 Analisis Pengaruh Disposisi.....	299
5.5.6 Perbandingan Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Hubungan Antara Variabel.....	301
5.6 Temuan Hasil Penelitian Kinerja Implementasi SLF-BG.	305
5.6.1 Temuan Model Penelitian.....	305
5.6.2 Rekomendasi Model Implementasi Kebijakan SLF.....	309
5.6.3 Proposisi Penelitian.....	311
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	313
6.1 Kesimpulan	313
6.2 Kontribusi Penelitian	316
6.2.1 Implikasi Teoritik.....	316
6.2.2 Implikasi Kebijakan.....	318
6.3 Rekomendasi	320
6.4 Keterbatasan Studi	321
DAFTAR PUSTAKA	323
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. DATA VALIDITAS DAN RELIABILITAS	331
B. OUTPUT SEM AMOS	337
C. TABEL FREKUENSI	361
D. DATA SOP SLF dan DATA SLF-BG	367
E. DOKUMENTASI PENYELENGGARAAN BG	371
F. KUISIONER DAN INDEPT INTERVIEW	381

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Roadmap Penelitian Terdahulu dengan Rencana Disertasi	25
Tabel 2.2 Perbandingan OPA, NPM dan NPS	36
Tabel 2.3 Model-model Implementasi Kebijakan.....	41
Tabel 2.4 Hubungan Antara Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi	59
Tabel 2.5 Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Moynihan	76
Tabel 2.6 Tipe Evaluasi Kebijakan (Kinerja Implementasi Kebijakan).....	82
Tabel 2.7 Pertanyaan Tentang Desain Struktur Organisasi	68
Tabel 2.8 Definisi Jenis Variabel	90
Tabel 2.9 Hubungan Variabel, Dasar Teori dan Studi Terdahulu.....	92
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian.....	105
Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R	110
Tabel 3.3 Populasi Studi Penelitian.....	120
Tabel 3.4 Data IMB Tahun 2014.....	121
Tabel 3.5 Jumlah Sampel.....	122
Tabel 3.6 Informan Penelitian	123
Tabel 3.7 Jadwal waktu Penelitian	124
Tabel 4.1 Pembagian Kecamatan dirinci Per Kelurahan	125
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Probolinggo	127
Tabel 4.3 Indikator Makro Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.	128
Tabel 4.4 Data Kinerja Layanan PU Tahun 2010-2013	129
Tabel 4.5 Data Kinerja Layanan Perumahan Rakyat Tahun 2009- 2013.....	130
Tabel 4.6 Perbandingan Penggunaan Lahan tahun 2007 dan RTRW Tahun 2008-2029	130
Tabel 4.7 Kondisi Bangunan Gedung Kota Probolinggo.....	131
Tabel 4.8 Jumlah Bangunan Gedung Fungsi Keagamaan	132

Tabel 4.9 Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB dibawah 70 m2	132
Tabel 4.10 Jumlah Bangunan Gedung Tahun 2008	133
Tabel 4.11 Perkembangan Jumlah IMB dan SLF yang dikeluarkan....	133
Tabel 4.12 Perkembangan Jumlah BG Tahun 2008-2014	133
Tabel 4.13 Prosentase IMB dan SLF s.d Tahun 2014	134
Tabel 4.14 Pengaturan Kementerian PU Bidang PBL	132
Tabel 4.15Perbandingan Model SLF beberapa kota di Indonesia.....	159
Tabel 4.16 Pasal dan Ayat SLF di Perda Bangunan Gedung	164
Tabel 4.17 Jumlah SDM Yang Menangani SLF	175
Tabel 4.18 Anggaran Implementasi SLF	176
Tabel 4.19Peralatan Dalam Implementasi SLF	176
Tabel 4.20 Hasil IKM Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang DPU ...	179
Tabel 4.21 Hasil IHM Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang DPU...	181
Tabel 4.22 Hasil Perhiungan GAP Bidang Cipta dan Tata Ruang ...	181
Tabel 5.1 Karakteristik Demografi dan Status BG Responden	185
Tabel 5.2 HasilValiditas	186
Tabel 5.3 Hasil Uji Realibilitas	187
Tabel 5.4 Frekuensi Komunikasi	188
Tabel 5.5 Frekuensi Sumberdaya	189
Tabel 5.6 Frekuensi Struktur Birokrasi	191
Tabel 5.7 Frekuensi Dukungan Publik.....	192
Tabel 5.8 Frekuensi Disposisi	193
Tabel 5.9 Frekuensi Kinerja Implementasi Kebijakan SLF	194
Tabel 5.10 RegressionWeight	197
Tabel 5.11Statistik Chi Kuadrat & p-value	198
Tabel 5.12 CFI & Indeks Incremental	198
Tabel 5.13 Indeks fit RMSEA	198
Tabel 5.14 Correlation	199
Tabel 5.15 Interpretasi nilai korelasi	199
Tabel 5.16 Pengujian Hipotesis variabel langsung	200

Tabel 5.17 Indirect effect	201
Tabel 5.18 Standarized indirect effects	202
Tabel 5.19 Total effects	204
Tabel 5.20 Squared Multiple Correlations	204
Tabel 5.21 Indirect effect	205
Tabel 5.22 Standarized indirect effects	205
Tabel 5.23 Nilai Critical Ratio (CR)	206
Tabel 5.24 Total Effect-Estimate.....	207
Tabel 5.25 Total Effect-Standard Errors	207
Tabel 5.26 Nilai Critical Ratio (CR)	207
Tabel 5.27 Hubungan Variabel Tidak langsung Model Edward III ...	208
Tabel 5.28 Observation Farthest from Centroid	211
Tabel 5.29 Regression Weight	211
Tabel 5.30 Statistik Chi-Kuadrat dan p-value untuk menilai fit model .	212
Tabel 5.31 CFI & Indeks Incremental	213
Tabel 5.32 Indeks Fit RMSEA	213
Tabel 5.33 Correlation	210
Tabel 5.34 Pengujian Hipotesis Variabel Langsung	214
Tabel 5.35 Indirect effect	215
Tabel 5.36 Regression Weight	216
Tabel 5.37 Standarized indirect effects	217
Tabel 5.38 Total effects	218
Tabel 5.39 Squared Multiple Correlations	214
Tabel 5.40 Indirect effect	220
Tabel 5.41 Indirect effect- Standar Errors.....	220
Tabel 5.42 Nilai Critical Ratio (CR)	220
Tabel 5.43 Total effects – Estimate	221
Tabel 5.44 Total effects –Standar Errors	222
Tabel 5.45 Nilai Critical Ratio (CR)	222
Tabel 5.46 Pengaruh Tak Langsung Model Empiris 1	223

Tabel 5.47	Regression Weight	225
Tabel 5.48	Regression Weight	226
Tabel 5.49	Regression Weight	227
Tabel 5.50	Perbandingan Variabel Langsung dan Tidak Langsung Model Empiris 1.....	228
Total 5.51	Observation Farthest from Centroid	232
Tabel 5.52	Regression Weight	233
Tabel 5.53	Standard Regression Weight	234
Tabel 5.54	Squared Multiple Correlations	234
Tabel 5.55	Statistik Chi-Kuadrat dan p-value untuk menilai fit model.....	235
Tabel 5.56	CFI & Indeks Incremental	235
Tabel 5.57	Indeks Fit RMSEA.....	235
Tabel 5.58	Correlations.....	236
Tabel 5.59	Pengujian Hipotesis Variabel Langsung.....	237
Tabel 5.60	Indirect effect	238
Tabel 5.61	Standard Indirect effect	239
Tabel 5.62	Total Effects	240
Tabel 5.63	Squared Multiple Correlations	241
Tabel 5.64	Indirect effect	242
Tabel 5.65	Indirect effect- Standar Errors.....	242
Tabel 5.66	Nilai Critical Ratio (CR)	242
Tabel 5.67	Total effects – Estimate	243
Tabel 5.68	Total effect- Standar Errors.....	243
Tabel 5.69	Nilai Critical Ratio (CR)	244
Tabel 5.70	Regression Weight	245
Tabel 5.71	Perbandingan p-value dengan dan tanpa variabel disposisi.....	246
Tabel 5.72	Perbandingan Model Edward III, Model Empiris 1 dan 2...	246
Tabel 5.73	Hasil Model Empiris Pengaruh Langsung Temuan.....	250

Tabel 5.74 Hasil Model empiris Pengaruh Tak Langsung Temuan	251
Tabel 5.75 Square Multiple Correlation (SMC) Model Empiris 1..	252
Tabel 5.76 Rangkuman Hasil Indept Interview dan FGD	274
Tabel 5.77 Implementasi Perda Yang belum ditindaklanjuti	276
Tabel 5.78 KetidakesuainPerwali SLF & Perda BG	278
Tabel 5.79 Evaluasi Indikator Kualitas Pelayanan Publik SLF	280
Tabel 5.80 Perbandingan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Hubungan Variabel.....	301
Tabel 5.80 Perbandingan Model Edward III dan Model Empiris Pengaruh Langsung.....	306
Tabel 5.81 Perbandingan Model Edward III dan Model Empiris Pengaruh Tidak Langsung	307

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tiga Elemen Sistem Kebijakan	31
Gambar 2.2	Proses Kebijakan Publik Menurut Easton.....	31
Gambar 2.3	Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson	32
Gambar 2.4	Proses Kebijakan Publik Menurut Dye.....	32
Gambar 2.5	Skema Tahapan Implementasi Kebijakan	40
Gambar 2.6	Model Implementasi Kebijakan Edward III	43
Gambar 2.7	Model Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Meter.....	47
Gambar 2.8	Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.....	51
Gambar 2.9	Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier.....	56
Gambar 2.10	Landasan Teori Penelitian	87
Gambar 2.11	Kerangka Pikir Penelitian	89
Gambar 2.12	Model Edward III	91
Gambar 2.13	Model Konsep1(Intevening Sumberdaya dan Disposisi).....	91
Gambar 2.14	Model Konsep2 (Intervening Disposisi).....	91
Gambar 3.1	Aplikasi Model Edward III	106
Gambar 3.2	Model Empiris1/Aplikasi Model Edward III(Intervening Sumberdaya dan Disposisi).....	106
Gambar 3.3	Model Empiris2/Aplikasi Model Van Meter (Intervening Disposisi).....	106
Gambar 3.4	Relasi Antar Variabel Model Pengukuran dalam Model Struktural	114
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kota Probolinggo.....	126
Gambar 4.2	Penggunaan Lahan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028.....	131
Gambar 4.3	Pengaturan Bangunan Gedung.....	137
Gambar 4.4	Potret Kondisi Keandalan Bangunan Gedung.....	139

Gambar 4.5	Potret Penertiban Bangunan Gedung	140
Gambar 4.6	Urusan Pemerintahan	141
Gambar 4.7	Bangunan Gedung Kearifan Lokal	141
Gambar 4.8	Karakteristik dan Potensi bencana dari Setiap Wilayah...	142
Gambar 4.9	Skema Umum Penyelenggaraan Bangunan Gedung.....	142
Gambar 4.10	Skema Penyelenggaraan BG pada Umumnya.....	143
Gambar 4.11	Skema Penyelenggaraan BG Tertentu	144
Gambar 4.12	Tata Cara Penerbitan SLF	147
Gambar 4.13	Tata Cara Pemeriksaan Berkala BG	147
Gambar 4.14	Tata Cara Perpanjangan SLF	148
Gambar 4.15	Usulan Bagan Alur Penerbitan SLF.....	154
Gambar 4.16	Grafik Pengukuran IKM DPU tahun 2013	178
Gambar 4.17	Grafik Pengukuran IHM DPU tahun 2013	179
Gambar 4.18	IKM, IHM dan GAB Bidang Cipta Karya	182
Gambar 4.19	Diagram Importance Perfomance Bidang CK dan TR.....	182
Gambar 5.1	Hasil Aplikasi Model Edward III	197
Gambar 5.2	Model Empiris 1/ Hasil Aplikasi Model Edward III.....	209
Gambar 5.3	Model Empiris 1/ Hasil Aplikasi Model Edward III (Intervening Disposisi).....	224
Gambar 5.4	Model Empiris 1/ Hasil Aplikasi Model Edward III (Intervening Sumberdaya).....	226
Gambar 5.5	Model Empiris 1/ Hasil Aplikasi Model Edward III (Intervening sumberdaya dan Disposisi).....	227
Gambar 5.6	Model Empiris 2/ Hasil Aplikasi Model Van Meter (Intervening: disposisi)	231
Gambar 5.7	Model Emperis 2/ Hasil Aplikasi Model Van Meter (tanpa Intervening : Disposisi)	245
Gambar 5.8	Temuan Model Implementasi SLF-BG	307
Gambar 5.9	Rekomendasi Model Implementasi SLF-BG	309

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik menurut Anderson (dalam Winarno, 2007 : 18) sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Menurut Irfan (2000) *public police* diartikan sebagai kebijaksanaan negara, sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003:50) *public policy* adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dibidang bangunan gedung, amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam ketentuan umum bahwa penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung; dan PP 36 tahun 2005 pasal 72 ayat (3) pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF). UU 28 tahun 2002 pasal 3 bahwa pengatuan bangunan gedung bertujuan mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa keandalan bangunan gedung adalah keadaan

bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan. Sertifikat Laik fungsi dikeluarkan oleh pemerintah daerah setelah pemeriksaan bangunan gedung laik secara fisik memenuhi syarat aspek keselamatan, yaitu ketahanan konstruksi dan pengamanan kebakaran; aspek kesehatan, yaitu bahan bangunan yang mempertimbangkan kesehatan, penggunaan sanitasi (air bersih, sampah dan drainase); aspek kenyamanan, yaitu sirkulasi udara, sinar dan tidak mengganggu pandangan; dan aspek kemudahan, yaitu memiliki sarana dan prasarana terkait dengan sarana alat pemadam kebakaran, parkir, tangga/eskalator, dan sarana tata udara.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan bangunan gedung perlu dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, seimbang, dan serasi dengan kepastian lingkungannya.

Kondisi yang ada saat ini masih banyak bangunan gedung yang runtuh, sebagian atau seluruhnya sebagai dampak terjadinya bencana alam, seperti: angin kencang, gempa bumi, tanah longsor, dan perubahan fungsi yang diakibatkan oleh kegagalan struktur dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya pemeriksaan keandalan bangunan gedung baik yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. Persyaratan administrasi bangunan gedung sesuai dengan penjelasan undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu bangunan gedung harus memiliki surat tanah yang berupa sertifikat hak milik, izin mendirikan bangunan (IMB), dan status kepemilikan bangunan gedung (SKBG) yang juga diperkuat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintah daerah bidang perumahan dan

kawasan permukiman, yaitu penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Persyaratan teknis bangunan gedung yang berupa keandalan bangunan gedung dan penyelenggaraan bangunan gedung harus tertib dengan mengikuti ketentuan peraturan bangunan gedung.

Dalam rangka menjamin keselamatan pengguna bangunan gedung bahwa bangunan gedung sebelum dimanfaatkan diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF), berfungsi sebagai pengendalian pemerintah kota terhadap kekuatan konstruksi bangunan gedung sebelum dihuni atau dimanfaatkan. Pada tahun 2010 telah ditegaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bahwa bangunan gedung harus sudah memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Hal tersebut juga telah menjadikan topik bahasan rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Cipta Karya, pada tanggal 4 Februari 2008, yang salah satu hasilnya mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan audit bangunan gedung, utamanya di kota metro, besar, dan sedang, terutama untuk bangunan pemerintah dan bangunan pelayanan umum, serta bangunan yang dilestarikan.

Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan daerah bahwa setiap bangunan gedung yang dimiliki masyarakat harus memiliki persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi bangunan gedung adalah status hak tanah, status kepemilikan bangunan gedung (SHBG), dan izin mendirikan bangunan gedung. Persyaratan teknis bangunan gedung yaitu tata bangunan dan keandalan bangunan gedung. Pada keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan. Persyaratan keandalan bangunan gedung ini hasilnya berupa Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF-BG). Disamping itu, pemerintah daerah juga berwenang untuk menerbitkan perizinan bangunan gedung, yaitu sebelum mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebelum membongkar bangunan harus memiliki surat persetujuan dan pembongkaran bangunan serta sebelum memanfaatkan bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF).

Peraturan Daerah tentang bangunan gedung yang telah disusun pemerintah daerah di Indonesia sampai dengan bulan November 2013 sebanyak 183 Perda, yang terdiri atas: Perda Bangunan Gedung Provinsi DKI Jakarta, 182 Perda Bangunan Gedung Kabupaten/Kota, 36% dari total jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berjumlah 502 kabupaten/kota. Dalam perda bangunan gedung pemerintah kota/kabupaten diberi kewenangan kebijakan pemanfaatan bangunan gedung dalam menerbitkan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Probolinggo sebagai salah satu kota sedang di Indonesia dengan segala kompleksitas kotanya, tidak lepas dari permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung. Amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung dan ditindak lanjuti oleh pemerintah kota dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang bangunan gedung yang memberikan wewenang kepada Walikota dan ditindaklanjuti kepada SKPD Perizinan dan Pembinaan Bangunan Gedung untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik fungsi bangunan gedung untuk melaksanakan amanah perda bangunan gedung dalam mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan bangunan gedung.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan bangunan gedung begitu cepat. Pesatnya pembangunan gedung-gedung bertingkat tersebut, hendaknya dibarengi dengan persyaratan-persyaratan teknis yang memadai, sehingga tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang membahayakan pemakai gedung. Pemerintah Kota Probolinggo sudah selangkahnya segera terlibat secara proaktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pemeliharaan bangunan gedung yang adaterkait penyelenggaraan bangunan gedung dengan menindaklanjuti pelayanan administrasi berupa izin mendirikan bangunan gedung dengan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Pelayanan administrasi kepada masyarakat membutuhkan kualitas pelayanan publik yang prima dan urgen. Konsekuensi dari pelayanan tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan baik bagi pemerintah sebagai pihak

penyedia layanan maupun masyarakat sebagai pihak penerima layanan (McKevitt, 1998, Kumorotomo, 1996, Potter, 1988).

Dalam memberikan pelayanan, aparatur pemerintah harus senantiasa meningkatkan profesionalisme sesuai dengan tugas pokoknya, terutama dalam memberikan layanan masyarakat (*public service*). Pelayanan publik harus diutamakan karena hakekatnya dibentuknya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Konseptual pelayanan publik menurut Syvertsen (dalam Nurmandi, 2010) adalah menyangkut penyediaan dan distribusi barang dan jasa oleh pemerintah/pemerintah daerah kepada masyarakat. Pengertian ini senada dengan pendapat Lay (2002) dalam Ratminto dan Atik (2005) yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah istilah yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada warga negaranya atas dasar kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan perda bangunan gedung yang sudah menerapkan dukungan/partisipasi publik yaitu Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dalam pemeriksaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah kota Denpasar, Surakarta, Semarang, Surabaya, Batam, Palembang, Probolinggo, Bontang, Pandeglang, Gresik, Lamongan, Ngawi, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir. (14 kab/kota). Sementara itu yang sudah menerapkan dan mengimplementasikan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) sampai dengan tahun 2015 adalah Jakarta, Probolinggo, Bandung, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, dan Batam.

Probolinggo sebagai kota sedang di Indonesia yang sudah menerapkan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) sejak tahun 2008 dijadikan sebagai *pilot project* dalam implementasi perda bangunan gedung. Hal ini seiring dengan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) subbidang Cipta Karya yang lingkup penilaian pada 4 subbidang yaitu pembinaan bangunan gedung, air minum, pengembangan permukiman, dan penyehatan lingkungan permukiman. Penilaian pembinaan bangunan gedung mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan dengan 3 subbidang lainnya karena salah satu penyumbang nilai tertinggi adalah implementasi Sertifikat laik fungsi

bangunan gedung. Penghargaan Kota Probolinggo di bidang Pekerjaan Umum subbidang Cipta Karya antara tahun 2007 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut: Rangking 2 PKPD-PU Tahun 2007 dan 2008 Pembinaan Bangunan Gedung; Rangking 3 PKPD-PU Tahun 2010 subbidang Cipta Karya; Rangking 2 PKPD-PU Tahun 2011 subbidang Cipta Karya; Rangking 1 PKPD-PU Tahun 2012 subbidang Cipta Karya, Penghargaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam Satu Dasawarsa UU Bangunan Gedung Tahun 2012; Rangking 1 PKPD-PU Tahun 2013 subbidang Cipta Karya; dan Rangking 2 PKPD-PU Tahun 2014 subbidang Cipta Karya.

Potret kondisi penyelenggara perizinan bangunan gedung di daerah pada umumnya berdasarkan hasil survai JICA – PU 2012 untuk 9 lokasi penelitian di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan responden bahwa sarjana: 63%, D3: 6%, SMA/Sederajat: 29%. Kompetensi aparatur birokrasi terhadap pelatihan terkait bangunan gedung adalah tidak pernah dilakukan pelatihan administrasi : 65%; tidak pernah dilakukan pelatihan teknis: 85%; kemampuan aparatur meneliti dokumen IMB adalah tidak paham pengecekan dokumen IMB (Struktur): 52% ; pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan: 51%. Dari Penelitian ini akan dapat diberlakukan kesimpulan pada kab/kota di Indonesia bahwa 65 % aparatur tidak pernah melakukan pelatihan administrasi bangunan gedung, 85 % tidak memiliki kompetensi teknis, 52 % tidak paham pengecekan dokumen struktur IMB. 51 % Penyelenggara bangunan tidak melakukan pengawasan pelaksanaan bangunan gedung. Dengan tidak dilakukan pelatihan Aparatur terhadap administrasi bangunan gedung, aparatur tidak memiliki kompetensi teknis, tidak paham pengecekan struktur IMB dan tidak dilakukan pengawasan mengakibatkan IMB yang dikeluarkan tidak sesuai dengan perda dan pedoman teknis bangunan gedung serta pelaksanaan bangunan gedung dilapangan tidak sesuai dengan IMB yang dikeluarkan.

Dalam perjalanan penyelenggaraan Perda Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yang disahkan Maret 2008, kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung belum terlaksana sesuai dengan amanah perda. Pada awal tahun 2008 implementasi perda

sudah diterapkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada 5 Bangunan gedung hunian, 5 Bangunan Gedung Pemerintah Kota, dan 5 Bangunan gedung Umum. Pada tahun 2008 sampai dengan 2014, SLF yang dikeluarkan kebanyakan untuk Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Umum dengan total 45 SLF. Pada tahun 2014, IMB yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Peizinan sebanyak 450 bangunan gedung. Sementara itu, sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan hanya sekitar 8 SLF bangunan gedung yang terdiri atas 7 SLF bangunan gedung umum dan 1 SLF bangunan gedung hunian yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo. Setiap tahun jumlah SLF yang dikeluarkan tidak sesuai dengan banyaknya IMB yang dikeluarkan. Selama tahun 2008-2014 jumlah IMB yang dikeluarkan sebanyak 2.734 atau rata-rata pertahun 391, sedangkan SLF yang dikeluarrkan sebanyak 45 atau rata-rata pertahun 6. Jumlah bangunan gedung di kota Probolinggo sebanyak 55.343 yang memiliki IMB sebesar 9.400 (16,98 %), sedangkan yang memiliki SLF hanya 45 (0,08 %).

Dari gambaran diatas bahwa pemerintah kota Probolinggo gagal mengimplementasikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Berbagai indikasi menjadi penyebab faktor kegagalan program dan kegiatan implementasi kebijakan SLF adalah internal birokrasi dan eksternal birokrasi.

Dalam implementasi kebijakan SLF faktor keberhasilan dan kegagalan internal birokrasi adalah empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan sesuai model Edward III. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu *communication, resources, disposition*, dan *bureucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Komunikasi ini sangat penting dalam menyampaikan pesan kebijakan kepada stakeholder internal birokrasi dan eksternal birokrasi. Menurut Edward III (1984) keputusan kebijakan dan perintahnya harus diterapkan kepada orang yang tepat dan dikomunikasi kepada orang yang jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana. Persyaratan utama bagi implementasi kebijakan yang efektif menurut Edward III (1984) bahwa para pelaksana kebijakan harus

mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan kebijakan harus disalurkan (*transmission*) kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus akurat diterima dengan jelas (*clarity*), juga perintah kebijakan harus konsisten (*consistency*).

Komunikasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung selama tahun 2008-2014 lebih kurang 35 acara yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum melalui penyampaian informasi kepada publik secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung yaitu diseminasi, pertemuan warga dan dialog interaktif lewat radio maupun informasi tidak langsung melalui spanduk atau banner. Komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas PU selama tahun 2008 dilakukan di 5 kecamatan, sedangkan pada tahun 2009-2014 dilakukan bersama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan mengikuti sosialisasi IMB. Sedangkan sosialisasi tidak langsung melalui banner, leaflet dan spanduk dilakukan pada acara Morning on Panglima Sudirman (MPS). Komunikasi implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dari atasan langsung kepada staf kurang dilakukan. Hal ini akan mengakibatkan kebijakan dilapangan tidak konsisten dengan kebijakan di perda dan perwali sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Dalam melaksanakan suatu program agar berhasil mencapai tujuan kebijakan, maka struktur birokrasi memegang posisi yang penting. Pada struktur birokrasi ini adanya pembagian tugas dan fungsi serta pelimpahan kewenangan. Dengan adanya pelimpahan kewenangan itu adalah agar organisasi itu dapat berfungsi secara efisien (Stoner dkk, 1997:47).

Struktur organisasi birokrasi atau penyelenggara pelayanan publik bangunan gedung yang menangani implementasi sertifikat laik fungsi sejak tahun 2008 di bidang Penataan Kota dan Pengawasan Bangunan Seksi Penataan Bangunan mengalami perubahan seiring dengan perubahan momenklatur dan struktur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum. Pada tahun 2012 implementasi sertifikat laik fungsi dilaksanakan Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang dengan pelaksana 2 seksi yaitu Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan yang juga

menangani proyek bangunan gedung Pemkot dan seksi Penataan Ruang yang menangani rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan.

Perubahan struktur organisasi ditingkat seksi mengakibatkan implementasi kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung tidak berjalan. Pada tahun 2008-2011 dilaksanakan diseksi Penataan Bangunan yang khusus menangani rekomendasi IMB dan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung berjalan dengan baik. Namun, antara tahun 2012-2014 pelaksanaan sertifikasi laik fungsi dilakukan seksi penataan bangunan dan lingkungan yang juga menangani pembangunan bangunan gedung pemerintah kota. Hal ini mengakibatkan beban kerja seksi penataan bangunan dan lingkungan menjadi besar karena melaksanakan dua kegiatan dan mengakibatkan pelaksanaan SLF tidak berjalan sesuai kinerja.

Sumber daya aparatur yang menangani penyelenggaraan bangunan gedung khususnya rekomendasi IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) sangat kurang dan kompetensi dibidang bangunan gedung kurang. Sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan pada tahun 2006-2008 bidang Penataan Kota dan Pengawasan Bangunan terdiri atas Kabid: (S2 Teknik), Kasi (STM), staf 1 (STM) dan 2 (SMA). Tahun 2009 terdiri atas: Kabid (STM), Kasi (STM) dan staf 1 (STM) , 2 (SMA). Tahun 2010-2011 terdiri atas: Kabid (SM Teknik), kasi (SLTA), dan staf 1 (STM), 2 (SLTA). Tahun 2012-2013 terdiri atas: Kabid (S2 Teknik), Kasi (S1 Planologi), staf 1 (SM Teknik), 3 (STM). Kondisi personel yang ada dalam penyelenggaraan bangunan gedung membutuhkan pemberdayaan SDM yang merupakan salah satu cara pengembangan karyawan melalui *employee involment* yaitu memberi wewenang, tanggung jawab yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan pengambilan keputusan (Herrenkohl, et al, 1999).

Mutasi yang sering dilakukan terhadap pemimpin puncak (kepala dinas) dan madya (kepala bidang) mengakibatkan kebijakan implementasi pemanfaatan bangunan gedung dengan produk sertifikat laik fungsi tidak berjalan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Kepala bidang Tata Kota dan Pengawasan

Bangunan sudah berganti 5 kali dan seksi Pengawasan Bangunan sudah berganti 4 kali, sedangkan pergantian kepala Dinas Pekerjaan Umum sudah mengalami pergantian 3 kali. Belum berkembangnya organisasi birokrasi dalam implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi dipengaruhi oleh elemen-elemen birokrasi yang saling berhubungan dan membentuk mata rantai satu dengan yang lain.

Dana memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Fasilitas pendukung birokrasi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan bangunan gedung kurang memenuhi sesuai target tujuan perda yaitu bangunan gedung harus memiliki sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Dana yang dianggarkan dalam APBD Dinas Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan bangunan gedung pos penerbitan sertifikat laik fungsi hanya cukup untuk operasional sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Honor Tim TABG, sedangkan peralatan untuk memeriksa bangunan gedung hanya mempunyai *hammer test* dan belum mempunyai alat yang layak seperti inframerah/profometer untuk melihat tulangan di dalam beton bangunan. Dalam hal ini perlu dilakukan pengadaan peralatan untuk mendukung operasional sertifikasi laik fungsi bangunan gedung.

Disposisi atau kecenderungan sikap dari implementor sebagai faktor yang penting dalam implementasi kebijakansertifikat laik fungsi bangunan gedung. Edwards III menekankan bahwa sikap atau disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan.

Komitmen birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi merupakan tingkat sejauh mana seorang pemimpin satuan kerja Pemerintah Daerah, karyawan atau staf memihak pada suatu organisasi tertentu dan mewujudkan tujuan-tujuannya atau visi dan misi, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Arfan Ikhsan, dkk.: 2000).

Efektivitas dari suatu organisasi sangat ditentukan oleh peran seorang *leader guiding* yang akan membawa anggota organisasi dan kelompok ke arah pencapaian tujuan, visi, dan misi dari suatu organisasi (Thompson, 2000). Seorang *leader* memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahannya, sehingga nantinya pengikutnya bisa menerima dan mengimplementasikan tujuan dan sasaran dari suatu organisasi. Seorang *leader* dalam suatu organisasi adalah person yang menyusun target dan memberikan arahan terhadap pencapaian target dan tujuan dari suatu organisasi.

Disamping faktor internal yang melekat pada organisasi birokrasi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan bangunan gedung terhadap pelayanan Sertifikat Laik Fungsi, bangunan gedung juga mempunyai faktor eksternal, yaitu dukungan publik dalam menerima penerapan aturan tersebut. Pakar Implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) mempertimbangkan peran serta publik dalam implementasi kebijakan. Implementasi akan berjalan relatif lebih lancar apabila publik diberi kesempatan untuk mengakses proses kebijakan, atau paling tidak dalam salah satu prosesnya seperti penentuan agenda atau evaluasi kebijakan.

Dukungan publik dalam implementasi kebijakan sertifikasi laik fungsi (SLF) bangunan gedung sangat kurang sekali. Hal ini dapat dilihat dari kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang tidak sebanding dengan IMB yang dikeluarkan. Pandangan masyarakat tentang SLF sangat kurang dibanding dengan IMB. Selama ini, masyarakat mengurus perizinan bangunan hanya IMB dan tidak mengetahui bahwa sebelum bangunan dimanfaatkan/dihuni harus memiliki SLF. Masyarakat tidak tahu bahwa pengurusan SLF tidak dipungut biaya sedangkan persyaratan pengkaji teknis menjadi beban masyarakat. Hal ini tidak menjadi beban bila bangunan gedung yang dibangun sudah memiliki konsultan pengawas dan menerapkan manajemen konstruksi (MK)

Dukungan publik dalam peraturan perundang-undangan bangunan gedung dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002 Bab. V Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dalam penyelenggaraan

bangunan gedung, partisipasi masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung. Pemantauan dilakukan secara objektif dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak menimbulkan gangguan dan atau kerugian bagi pemilik dan atau pengguna bangunan gedung, masyarakat, dan lingkungan. Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada pemerintah kota terhadap indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.

Dukungan masyarakat dalam menerima aturan bahwa bangunan gedung sebelum ditempati diharuskan mempunyai izin pemanfaatan bangunan gedung yang berupa Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung perlu ditingkatkan dengan sering melakukan komunikasi berupa sosialisasi dan konsultasi publik. Untuk bangunan fungsi hunian tidak masalah bagi masyarakat karena tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, tetapi bagi bangunan gedung fungsi usaha dan tertentu, masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung apabila bangunan gedung tersebut tidak memakai konsultan pengawas, disamping persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung yang cukup banyak. Usaha jasa konstruksi merupakan faktor yang juga menentukan terkait dengan implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yaitu kesiapan usaha jasa konstruksi yang bekerjasama dengan pihak birokrasi di pemeriksaan keandalan bangunan gedung.

Pelaksanaan Pasal 68 Perda Nomor 4 Tahun 2008 Kota Probolinggo tentang Bangunan Gedung bahwa setelah 5 tahun bangunan gedung yang ada harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung belum terpenuhi. Pelaksanaan perda yang merupakan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) yang harus dipersiapkan dan direncanakan secara baik. Selama 5 tahun, implementasi perda belum ada peraturan pelaksanaan berupa peraturan walikota, hanya Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pada tahun 2013 telah

terbit Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 tentang SLF-BG tetapi dalam implementasinya belum terlaksana sampai dengan tahun 2014.

Dampak kesenjangan Komunikasi, struktur birokrasi, dukungan publik, sumberdaya dan disposisi terhadap program dan kegiatan pelaksanaan SLF-BG berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF-BG. Komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik dalam penelitian ini berperan sebagai variabel bebas apakah berpengaruh secara langsung dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan SLF-BG ataukah melalui faktor sumberdaya dan disposisi. Faktor sumberdaya dan disposisi berperan sangat vital karena kurangnya sumberdaya dan tidak kuatnya disposisi implementor sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja implementasi SLF-BG. Bagaimana pengaruh faktor komunikasi, struktur birokrasi, dan dukungan publik terhadap faktor sumberdaya dan disposisi serta dampaknya pada kinerja implementasi kebijakan SLF-BG baik secara parsial/langsung maupun secara total/simultan yang selamaini terjadi pada pelaksanaannya di kota Probolinggo.

Apabila variabel sumberdaya diletakkan di variabel bebas bersama-sama variabel komunikasi, struktur birokrasi, dukungan publik, dan variabel intervening disposisi yang merupakan kecenderungan sikap/komitmen pimpinan penyelenggara bangunan gedung apakah akan berpengaruh besar terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF-BG baik secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan model implementasi kebijakan SLF-BG yang belum optimal dan ideal karena faktor internal birokrasi yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan disposisi serta faktor eksternal dukungan publik terhadap peningkatan kinerja implementasi kebijakan SLF-BG perlu dicarikan model implementasi kebijakan SLF-BG dengan mencari hubungan pengaruh antara faktor variabel bebas komunikasi, struktur birokrasi, dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi SLF-BG melalui sumberdaya dan disposisi.

Penjelasan diatas memberikan gambaran terhadap pengaruh internal birokrasi yaitu variabel bebas komunikasi, struktur birokrasi dan variabel intervening sumberdaya serta disposisi terhadap kinerja implementasi kebijakan

yang sudah dimodelkan oleh Edward III. Dari model teori Edward III, peneliti mencoba merekonstruksi model ini dengan menambah variabel bebas dukungan publik yang merupakan variabel wajib dalam proses SLF.

Hasil penelitian terdahulu terhadap implementasi SLF-BG hanya meneliti kesiapan pengelola bangunan pusat perbelanjaan dalam menyambut penerapan SLF (Silvia Y.R: 2013); mengetahui sistem yang berlaku di Dinas PU dalam menganalisis pemahaman masyarakat dan pelaku jasa konstruksi terhadap pemberlakuan SLF (E. Harisun: 2013). Dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara khusus masyarakat umum atau masyarakat yang memiliki bangunan gedung yang memiliki IMB dan mengajukan SLF-BG. Dalam penelitian ini, masyarakat dan jasa konstruksi dimasukkan dalam variabel dukungan publik.

Demikian pula dengan studi terdahulu yang menganalisis pengaruh kinerja implementasi kebijakan hanya terbatas pada variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (L. Pasaribu,2012; Winda P,2012; Misroji, 2014). Dalam penelitian ini tidak menyertakan variabel dukungan publik dan membahas kebijakan yang tidak berkaitan dengan kinerja implementasi kebijakan SLF-BG.

Dalam pandangan peneliti terhadap studi terdahulu belum ada kajian yang membahas variabel independen dukungan publik bersama variabel independen komunikasi dan struktur birokrasi terhadap variabel dependen intervening sumberdaya dan disposisi serta variabel dependen kinerja implementasi Kebijakan SLF-BG secara parsial dan simultan.

Berdasarkan kerangka uraian diatas, penelitian ini diberi judul “ Pengaruh Komunikasi, Struktur Birokrasi dan Dukungan Publik terhadap Sumberdaya dan Disposisi dalam Meningkatkan Kinerja Implementasi Kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ada berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh komunikasi, struktur birokrasi, dan dukungan public secara parsial terhadap sumberdaya dan disposisi dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kota Probolinggo ?
2. Bagaimanakah pengaruh komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik secara simultan terhadap sumberdaya dan disposisi dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kota Probolinggo ?
3. Bagaimanakah model implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang selama ini masih kurang optimal dan ideal dalam meningkatkan kinerja implementasi sertifikat laik fungsi di Kota Probolinggo ?

1.3 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang menjadi fokus utama sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 kota Probolinggo tentang Bangunan Gedung.
2. Kurang optimalnya komunikasi, sumberdaya (anggaran, personel, peralatan, informasi/data yang akurat dan kewenangan), struktur birokrasi, disposisi dan dukungan publik dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung.
3. Kesiapan peran birokrasi penyelenggara bangunan gedung dalam mendorong peningkatan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai sehingga harus ke arah yang sesuai dengan rumusan masalah. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. mengkaji dan menganalisis pengaruh komunikasi, struktur birokrasi, dan dukungan publik secara parsial terhadap sumberdaya dan disposisi dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo;
2. mengkaji dan menganalisis pengaruh komunikasi, struktur birokrasi, dan dukungan public secara simultan terhadap sumberdaya dan disposisi dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kota Probolinggo;
3. mengkaji dan menganalisis model implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang ideal berdasarkan hasil pengaruh faktor komunikasi, struktur birokrasi, dan dukungan publik terhadap sumberdaya dan disposisi dalam meningkatkan kinerja implementasi sertifikat laik fungsi di Kota Probolinggo.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan penyelenggaraan bangunan gedung terutama implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Indonesia dan di Kota Probolinggo.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademis dan cakrawala berfikir serta pengalaman berharga bagi peneliti.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi bagi sivitas akademika dan memberikan masukan, baik berupa informasi maupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam implementasi kebijakan dan referensi bagi penelitian lebih lanjut.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi hasil penelitian terdahulu yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam berpikir dan juga sebagai gambaran untuk melakukan pengembangan penelitian baik pada tempat yang berbeda maupun dalam penyempurnaan metode-metode yang dipergunakan. Untuk penelitian terdahulu, penulis melakukan pencarian melalui jurnal-jurnal. Namun, penelitian yang berkaitan dengan sertifikat laik fungsi bangunan gedung masih minim sekali. Yang ada hanya penelitian tentang kebijakan izin mendirikan bangunan tetapi masih mempunyai persamaan terkait produk yang diterbitkan pemerintah daerah karena pemberlakuan SLF. Hasil penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. *The Influence Of Population Administrative Policy Implementation On The Quality Of Id Card Service*, DAUD M. LIANDO, Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia, fdl_unpad@yahoo.com tahun 2011.

Model teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan *Van Meter dan Van Horn (1975)* dengan enam komponen yang mempengaruhi implementasi kebijakan. *penelitian ini menggunakan teori Zeithaml, et.al. (1990)* yang menyederhanakan layanan kualitas menjadi lima dimensi. Teori Mazmanian dan Sabatier (1983) adalah teori yang paling lengkap dalam ‘meramu’ berbagai variabel dengan mensintesis 17 variabel. Variabel tersebut dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: (1) *Tractability of the problem* atau tingkat kesulitan masalah yang harus dipecahkan melalui implementasi suatu kebijakan; (2) *Ability of statute to structure*

implementation atau kemampuan kebijakan dalam merespon masalah yang akan dipecahkan; (3) *Non Statutory variable* atau variabel non kebijakan. kelompok variabel yang ketiga disebut sebagai variabel konteks atau lingkungan kebijakan.

Fokus penelitian menganalisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan kecenderungan pelaksana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan sangat ditentukan oleh faktor komunikasi. Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk adalah lemahnya peran masyarakat dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Untuk itu diperlukan komunikasi secara terus-menerus bagi implementor di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan. yang bersifat horizontal.

2. ***Evaluasi Kesiapan Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Pusat Perbelanjaan di Solo***, Silvia Yulita Ratih dalam jurnal FTSP UNS VOL 14 NO 1 TAHUN 2013.

Teori yang digunakan adalah Undang-undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang bangunan gedung yang mengatur tentang keandalan bangunan gedung yang terdiri dari aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui kesiapan pengelola bangunan pusat perbelanjaan di Surakarta menyambut penerapan SLF dan untuk mengetahui bagaimana kondisi bangunan pusat perbelanjaan pusat grosir ditinjau dari penerapan SLF. Hasil penelitian menunjukkan para pengelola pusat perbelanjaan siap jika diterapkan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Untuk PGS semua persyaratan proses perizinan untuk mendirikan bangunan sudah dipenuhi yang didalamnya termasuk syarat-

syarat teknis, yaitu persyaratan utilitas yaitu pemadam kebakaran, plumbing, dan persyaratan teknis yang lain, sehingga secara keseluruhan kondisi pusat perbelanjaan PGS Solo ditinjau dari kesiapan administrasi dan teknis sudah siap diterapkan SLF.

3. ***Sentralisasi, Strategi Organisasi, dan Kinerja Pelayanan Publik.***

Rhys Andrews, George A. Boyne, University of Cardiff; Hukum Jennifer, University of Glamorgan; Richard M. Walker, University of Hong Kong dan Cardiff University, on December 18, 2007.

Model teori yang digunakan adalah pengambilan keputusan dipusatkan dan kualitas manajemen strategis telah diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dan sarjana sebagai penentu kinerja pelayanan publik yang mudah rentan terhadap kontrol politik dan manajerial. Mantra New Public Management (khususnya preferensi umum untuk struktur organisasi desentralisasi, lihat Osborne dan Gaebler, 1992) sangat dipengaruhi perkembangan tersebut.

Teori klasik dari manajemen strategis oleh Miles dan Snow (1978) berpendapat bahwa organisasi akan tampil lebih baik jika struktur mereka mengikuti strategi. Salah satu fungsi inti bagi manajer publik adalah penciptaan struktur yang tepat yang dapat memberikan stabilitas sistem dan dukungan kelembagaan untuk sejumlah elemen internal organisasi lainnya, seperti nilai-nilai dan rutinitas (O'Toole and Meier 1999). Untuk teori organisasi, tingkat relatif dari sentralisasi dalam sebuah organisasi yang ditandai dengan hirarki kewenangan dan tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan, karena aspek-aspek struktur mencerminkan distribusi kekuasaan di seluruh organisasi (Carter dan Cullen 1984; Glisson dan Martin 1980; Hage dan Aiken 1967, 1969).

Fokus penelitian ini menunjukkan bahwa sentralisasi mungkin memainkan peran penting dalam menentukan jumlah output organisasi. Efeknya mungkin terkait dengan cara yang berbeda untuk langkah-langkah alternatif kinerja pelayanan, misalnya Whetten (1978) menemukan bahwa

sentralisasi memiliki efek positif pada output tenaga kerja AS, lembaga salah satu yang negatif pada persepsi staf tentang efektivitas.

Moynihan dan Pandey (2005) mengungkap hubungan negatif antara sentralisasi dan persepsi efektivitas dalam 83 pelayanan manusia dan kesehatan AS. Menurut Wolf (1993), survei lengkap kasus efektivitas birokrasi tidak menemukan hubungan yang signifikan antara sentralisasi dan kinerja dalam berbagai badan-badan federal AS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak terdesentralisasi atau terdesentralisasi yang memiliki efek independen terhadap kinerja pelayanan publik. Namun, dapat dibayangkan bahwa biaya seharusnya dan manfaat sentralisasi untuk kinerja pelayanan membatalkan satu sama lain bahwa pengambilan keputusan yang cepat dapat diimbangi oleh kebutuhan untuk membangun dukungan keputusan dalam organisasi publik yang bertanggung jawab oleh berbagai pihak.

4. *Pengaruh Komunikasi dan Sumberdaya Manusia terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Lasma Lusiana Pasaribu, 2012.*

Metode yang digunakan adalah metode Survei. Tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi dan sumberdaya terhadap kinerja implementasi kebijakan serta untuk mengukur besarnya pengaruh komunikasi dan sumberdaya manusia terhadap kinerja implementasi Kebijakan.

Analisis penelitian menggunakan SPSS dengan hasil uji t bahwa komunikasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan, karena t hitung lebih besar dari t tabel. Variabel bebas komunikasi dan sumberdaya manusia secara bersamaan diuji melalui uji F mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat kinerja implementasi kebijakan, karena F hitung lebih besar dari F tabel.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) hendaknya menciptakan komunikasi yang efektif diantara pegawai agar informasi yang ditransmisikan menjadi lebih relevan dan terbuka, sehingga tujuan organisasi tercapai; 2)

hendaknya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan cara meningkatkan kualitas, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang ada; 3)bagi pegawai Kantor Kecamatan Gambir Jakarta Pusat: a)perlu mematuhi segala ketentuan kerja yang berlaku atau disepakati bersama; b)perlu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat dengan kepentingan/tujuan organisasi; c)perlu meningkatkan komunikasi secara efektif yang menjadi tanggung jawabnya, melalui peningkatan wawasan, pola pikir, kemampuan kerja, memberikan pelayanan yang baik, disiplin kerja yang tinggi, dan lain-lain.

5. *Kajian Sistem Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara*, Endah Harisun yang dibimbing oleh Prof. Ir. B. F. Sompie, MS dan IR. J.P. Rantung, MSi, MM. Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING Vol. 3, No. 1, Maret 2013 ISSN 2087-9334 (14-22)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem yang berlaku pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, menganalisis pemahaman masyarakat dan pelaku jasa konstruksi terhadap pemberlakuan SLF bangunan gedung, dampak yang dihadapi terhadap pemberlakuannya. untuk mengetahui korelasi antara pemahaman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan terhadap dampak yang dirasakan dengan adanya kewajiban sertifikasi laik fungsi bangunan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi laik fungsi bangunan belum berjalan sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kota belum siap terhadap pemberlakuan Permen PU Nomor 25 Tahun 2007. Pada satu sisi pentingnya pemahaman dari masyarakat dan pelaku jasa konstruksi tentang SLF sangat berpengaruh terhadap dampak yang akan dirasakan pada pemberlakuan peraturan menteri PU tersebut.

Penelitian yang dilakukan terhadap pemahaman masyarakat dan pelaku jasa konstruksi berdasarkan analisis, terlihat bahwa masyarakat dan pelaku usaha jasa konstruksi kurang mengetahui dan memahami Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Demikian juga dampak yang

dirasakan dengan diperlakukannya sertifikasi laik fungsi bangunan khususnya bagi masyarakat dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan dan sanksi yang diberlakukan dalam peraturan menteri tersebut tidak berpengaruh pada masyarakat.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin masyarakat dan pelaku jasa konstruksi memahami Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang pedoman SLF bangunan gedung, masyarakat dan pelaku jasa konstruksi akan lebih mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh peraturan menteri tersebut. Demi tertatanya suatu kondisi bangunan gedung yang laik fungsi, pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi-sanksi baik yang ringan berupa sanksi administratif maupun sanksi terberat berupa pembongkaran.

6. *Analisis terhadap Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur. Winda Paramita*

Penelitian ini menganalisis faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana bidang pendidikan. Model analisis kebijakan implementasi menggunakan model Edward III dengan memperhatikan faktor yang berperan penting yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini mempertanyakan keakuratan secara mendalam, tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variabelnya. Metode penelitian menggunakan perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor dalam kategori sedang. Artinya bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan optimal, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk mandiri dalam penanggulangan bencana. Dengan demikian pengurangan resiko bencana dapat ditanggapi.

7. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai ‘Depok Cyber City’ pada Diskominfo Kota Depok. Misrojidan pembimbing Muhammad Cholifihani, Ph.D.*

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2011-2016 yang tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011, tertera salah satu Program Unggulan Daerah yaitu *Depok Cyber City*.

Konsep *‘Depok Cyber City’* bertujuan untuk mempermudah masyarakat Depok, mulai dari anak TK sampai ibu rumah tangga, mengakses informasi apa saja dan dari mana saja yang terkait dengan informasi publik.

Untuk mengukur dapat atau lancar dan tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini penelitian kuantitatif dengan pendekatan positivis. Populasi sekaligus respondennya adalah seluruh pimpinan dan pegawai di Diskominfo Kota Depok yang berjumlah 34 orang.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel komunikasi, sumber daya manusia, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi dapat menjelaskan variabel dependen implementasi kebijakan penyebaran informasi publik mengenai *Depok Cyber City*. Uji hipotesis dilakukan dengan t-test untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan F-test.

Hasil penelitian ini menunjukkan memang terdapat pengaruh yang signifikan variabel komunikasi, sumber daya manusia, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik tentang *Depok Cyber City* simultan sebesar 91,7% sedangkan sisanya 8,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Namun, berdasarkan uji t, hanya faktor

disposisi yang tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan t-hitung dari faktor ini sebesar 0,099, sementara t-tabelnya sebesar 1,691.

Ketiga faktor lainnya memberikan pengaruh yang signifikan dan faktor komunikasi memiliki signifikansi tertinggi yakni sebesar 3,252 disusul faktor sumberdaya sebesar 2,637 dan struktur birokrasi sebesar 1,798.

8. *Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Kinerja Organisasi Dinas Daerah di Kota Bekasi (Studi Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bekasi. Dr. Mohamad Jufri, Drs. M.Si.*

Peneelitian ini mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan dan kualitas sumber daya aparatur terhadap kinerja organisasi Dinas Daerah di Kota Bekasi. Pengaruh implementasi kebijakan diukur melalui dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana dan lingkungan eksopol terhadap kinerja organisasi Dinas Daerah di kota Bekasi.

Metode penelitiannya survei dengan kuantitatif dan analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah Struktural Equation Model (SEM) program Analysis of moment Structure (AMOS). Penelitian ini melihat target dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan terhadap operasional dinas pendidikan, mekanisme kerja antar unit kerja, pelayanan bidang kesehatan, pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelayanan angkut sampah dan izin trayek. Masalah ini diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan dan kualitas sumber daya aparatur yang belum berjalan secara optimal di Dinas Daerah Kota Bekasi.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Roadmap Penelitian Terdahulu dengan Rencana Disertasi dengan Metode Kuantitatif

No	Penelitian jurnal	Fokus jurnal	Rencana Disertasi
1	<p><i>The Influence Of Population Administrative Policy Implementation On The Quality Of Id Card Service</i>, DAUD M. LIANDO, Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia, fdl_unpad@yahoo.com tahun 2011</p> <p><u>Metode kuantitatif, deskriptif dan verifikatif</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus menganalisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan. • Variabel tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan kecenderungan pelaksana. • Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan sangat ditentukan oleh faktor komunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. • Implementasi kebijakan yang diterapkan adalah model hybrid yaitu gabungan antara kebijakan Topdown dengan bottom up. Top down karena kebijakan pemerintah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2002 dan PP No. 36 Tahun 2005 tentang bangunan gedung. Sedangkan bottom up sesuai dengan Perda No 4 tahun 2008 tentang bangunan gedung yang mengatur tentang potensi lokal.
2	<p><i>Evaluasi Kesiapan Penerapan Sertifikat Laik fungsi bangunan Pusat Perbelanjaan di Solo</i> Silvia Yulita Ratih dalam jurnal FTSP UNS VOL 14 NO 1 TAHUN 2013</p> <p><u>Metode kuantitatif dengan statistic deskriptif</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bertujuan untuk mengetahui kesiapan pengelola bangunan pusat perbelanjaan di Surakarta menyambut penerapan SLF. • Untuk PGS semua persyaratan proses izin mendirikan bangunan sudah dipenuhi dimana didalamnya termasuk syarat-syarat teknis yaitu persyaratan utilitas dan administarsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui kesiapan pemilik bangunan gedung untuk penerapan SLF dan perpanjangan SLF yang sudah habis masa berlakunya. • Mengetahui partisipasi publik yang terlibat dalam penerapan SLF yaitu pemilik BG ber IMB.
3.	<p><i>Sentralisasi , Strategi Organisasi, dan Kinerja Pelayanan Publik</i>. Rhys Andrews, George A. Boyne, University of Cardiff; Hukum Jennifer, University of Glamorgan; Richard M. Walker, University of Hong Kong dan Cardiff University, on december 18, 2007.</p> <p><u>Metode Kuantitatif</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • studi ini menunjukkan bahwa sentralisasi mungkin memainkan peran penting dalam menentukan jumlah output organisasi, efeknya mungkin terkait dengan cara yang berbeda untuk langkah-langkah alternatif kinerja pelayanan. • pengambilan keputusan tidak terdesentralisasi atau terdesentralisasi memiliki efek independen terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam struktur di SKPD bidang pembinaan bangunan gedung pengambilan kebijakan dilakukan secara sentralisasi dengan saran melalui bottom up dari staf dan pelaksana lapangan serta kasi dan kabit. • Strategi yang dilakukan sesuai dengan Renstra SKPD Pembina bangunan gedung yang

		<p>kinerja pelayanan publik. Namun, dapat dibayangkan bahwabiaya seharusnya dan manfaat sentralisasi untuk kinerja pelayanan membatalkan satu sama lain.</p>	<p>merupakan penjabaran RPJMD. Didalam Renstra SKPD tercantum visi dan misi organisasi serta program yang dilaksanakan selama 5 tahun sesuai dengan visi dan visi kepala daerah.</p>
4.	<p><i>Pengaruh Komunikasi dan Sumberdaya Manusia Terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial DiKecamatan Gambir Jakarta Pusat, Lasma Lusiana Pasaribu, 2012</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan adalah metode Survey. • Tujuan penlitian adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi dan sumberdaya terhadap kinerja implementasi kebijakan serta untuk mengukur besarnya pengaruh komunikasi dan sumberdaya manusia terhadap kinerja implementasi Kebijakan. • Analisis penelitian menggunakan SPSS dengan hasil uji t bahwa komunikasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan, karena t hitung lebih besar dari t tabel. Variabel bebas komunikasi dan sumberdaya manusia secara bersamaan diuji melalui uji F mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat kinerja implementasi kebijakan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dan Sumberdaya termasuk sumberdaya manusia • Metode penelitian kuantitatif • Penelitian terhadap kinerja Implementasi SLF berdasarkan pengaruh internal birokrasi (komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi dan eksternal birokrasi yaitu dukungan publik) • Menggunakan analisa statistik SPSS 21 untuk menghitung Realibilitas dan validitas data serta SEM Amos 21 untuk menghitung pengaruh parsial dan simultan antara variabel eksogen dan endogen.
5.	<p><i>Kajian Sistem Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, Endah Harisun yang dibimbing oleh Prof. Ir. B. F. Sompie, MS dan IR. J.P. Rantung, MSi, MM.</i> <i>Metode kuantitatif . Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING Vol. 3, No. 1, Maret 2013 ISSN 2087-9334 (14-22)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sistem yang berlaku pada DPU Kota Ternate, menganalisa pemahaman masyarakat dan pelaku jasa konstruksi terhadap pemberlakuan SLF bangunan gedung • untuk mengetahui korelasi antara pemahaman SLF terhadap dampak yang dirasakan dengan adanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui mengapa penerbitan SLF tidak sesuai dengan jumlah IMB yang dikeluarkan. • Mengetahui kendala yang dihadapi birokrasi daerah dan dukungan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota dalam penerapan SLF.

		kewajiban sertifikasi laik fungsi bangunan tersebut.	
6.	<i>Analisis terhadap factor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan Penanggulangan bencana bidang pendidikan di kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur. Winda Paramita (tesis Juni 2012)</i>	<ul style="list-style-type: none"> mengenai analisis factor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan Penanggulangan bencana bidang pendidikan.model analisis kebijakan implementasi menggunakan model Edward III. Maka metode penelitian yang digunakan menggunakan perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa semua faktor dalam kategori sedang artinya bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan optimal. Sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mandiri dalam penangulangan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis 4 faktor dari teori Edward III dan 1 faktor Dukungan Publik teori Mazmanian Sabatier serta Model implementasi Kebijakan Van Horn-Van Meter. Metode Penelitian Kuantitatif untuk memperkuat kesimpulan ditambah Indepth Interview. Analisis Statistik digunakan untuk mengukur Realibel dan Validitas dengan SPSS 21 dan Analisis uji hipotesis model stuktural menggunakan AMOS 21
7	<i>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai 'Depok Cyber City' pada Diskominfo Kota Depok. Misroji dan pembimbing Muhammad Cholifihani, Ph.D. (12 Juli 2014)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam (RPJMD) Kota Depok tahun 2011-2016 yang tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan positivis. Populasi sekaligus respondennya adalah seluruh pimpinan dan pegawai di Diskominfo Kota Depok yang berjumlah 34 orang. Hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan variabel komunikasi, SDM, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan simultan sebesar 91,7 persen. uji t, hanya faktor disposisi yang tidak memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi implementasi Kebijakan SLF yang tertuang pada Perda No. 4 Tahun 2008 tentang bangunan gedung. Penelitian kuantitatif dengan hasil kesimpulan ditambah indepth interview. Analisis Statistik digunakan untuk mengukur Realibel dan Validitas dengan SPSS 21 dan Analisis uji hipotesis model stuktural menggunakan AMOS 21

		<p>pengaruh yang positif terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. ketiga faktor lainnya memberikan pengaruh yang signifikan, faktor komunikasi memiliki signifikansi tertinggi yakni sebesar 3,252, disusul faktor sumberdaya sebesar 2,637, dan struktur birokrasi sebesar 1,798.</p>	
8	<p><i>Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Daerah Di Kota Bekasi (Studi Perda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bekasi.</i> Dr. Mohamad Jufri, Drs. M.Si.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan dan kualitas sumber daya aparatur terhadap kinerja organisasi Dinas Daerah di Kota Bekasi • Metode penelitian survey dengan kuantitatif dan menganalisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah Struktural Equation Model (SEM) program AMOS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis dan mengkaji birokrasi daerah (komitmen organisasi dan kepemimpinan, aparatur) dan Partisipasi Publik terhadap implementasi kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung serta Kinerja organisasi. • Analisis Statistik yang digunakan adalah SEM program AMOS v21.

Sumber : Data diolah, tahun 2015

Hasil penelitian diatas mempunyai kelemahan masing-masing, secara umum kelemahan tersebut adalah : (1) belum ada penelitian yang memfokuskan atau menjadikan implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung sebagai kebijakan publik; (2) belum ada yang secara khusus memfokuskan model Edward III dengan faktor variabel independen komunikasi, struktur birokrasi, dengan faktor variabel intervening sumberdaya dan disposisi ditambah dukungan publik dan variabel dependen kinerja implementasi sebagai bidang kajian; (3) belum ada yang secara khusus mengkaji faktor variabel intervening disposisi (model Van Meter dan Van Horn) dengan variabel independen komunikasi,sumberdaya,struktur birokrasi, dukungan publik dan variabel kinerja implementasi kebijakan sebagai bidang kajian;(4) belum adanya evaluasi dan tindak lanjut dari implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di kabupaten/kota di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

Pada sebuah penelitian ilmiah, perlu dilakukan ketentuan-ketentuan berpikir secara sistematis, logis, dan metodologis. Dasar ini dipakai sebagai penyusunan landasan teori sebagai pijakan peneliti dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

Singarimbun dan Effendi (1989:34) menjelaskan bahwa “ konsep yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial”. Konsepsi dasar merupakan landasan teori yang akan dipakai untuk menentukan langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian sosial diperlukan landasan teori sebagai dasar memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, landasan teori yang dipergunakan adalah sebagai berikut.

1. Administrasi Negara/Kebijakan Publik
2. Implementasi Kebijakan Publik
3. Birokrasi Pemerintahan
4. Partisipasi/Dukungan Publik
5. Kinerja Birokrasi

2.3 Administrasi Negara/ Publik

Istilah administrasi yang berkembang di Indonesia berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda) yang artinya mengarah pada pengertian sempit yaitu kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, agenda, arsip, dan sebagainya (di Indonesia sama dengan istilah tata usaha atau *clerical work*). Istilah *administration* (bahasa Inggris) diartikan lebih luas sebagai suatu proses yang umumnya ada pada semua kelompok, pemerintahan, swasta, sipil, militer, besar dan kecil.

Menurut Murdyastuti (2009:5) administrasi adalah manajemen dari suatu organisasi secara keseluruhan (*administration is the over all management of an organization, “ administration is geetting things”, as wanted by the owner or*

the entrepreneur of the entire organization as a whole). Disini nampak jelas adanya hubungan administrasi, organisasi, dan tugas pokok organisasi. Administrasi merupakan jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu. (*administration behavior or "administration" as a special type of social behaviour*) yang menentukan sikap serta kondisi mental tertentu (*special type of human behaviour*).

Menurut Siagian (1987) administrasi diartikan sebagai seluruh proses kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap kerjasama sekelompok manusia yang diarahkan, dipimpin, dan diawasi dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

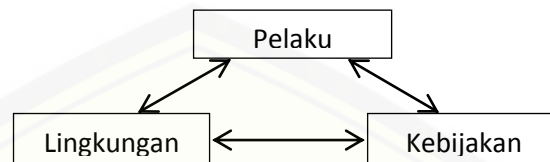
Administrasi publik sangat erat kaitannya dengan kebijakan. Bidang kajian kebijakan amat penting bagi administrasi publik dan perkembangannya. Administrasi publik mengalami perubahan cara pandang yang mencakup fokus dan lokus. Frederickson (1996:19) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan sebuah profesi dan bidang studi. Sering kali administrator publik terlalu fokus pada profesi, sehingga tidak terlatih mempelajari peran mereka dalam masyarakat. Hendaknya peran administrator publik mendorong dan melibatkan warganya dalam pemerintahan.

Kebijakan Publik (*public policy*) menurut Islami Irvan (2000), diartikan sebagai kebijaksanaan negara dan tentu masih banyak lagi para ahli yang mencoba mengajukan ide-ide tentang arti kata *public police*. Sama halnya dengan arti *public policy*, pengertian dari kata tersebut juga berbeda-beda, diantaranya, menurut Mustopadijaja (2003:5) *public policy* diartikan sebagai berikut :

“ suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan”.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen

pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*.

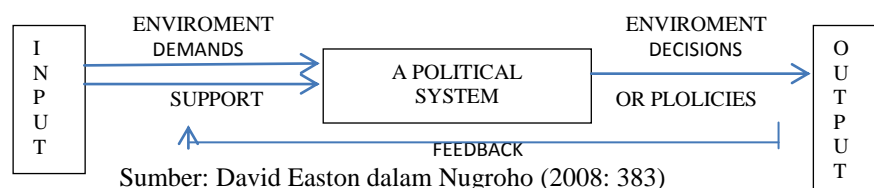


Sumber: Thomas R. Dye dalam Dunn (2000:110)

Gambar 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000: 111) menyatakan, “Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuat kebijakan tidak tepisahkan di dalam prakteknya”.

Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton (dalam Nugroho, 2008: 383) yang menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini, Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri atas input, *throughput*, dan output, seperti digambarkan sebagai berikut.



Sumber: David Easton dalam Nugroho (2008: 383)

Gambar 2.2 Proses Kebijakan Publik Menurut Easton

Model proses kebijakan publik dari Easton mengasumsikan proses kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Model Easton ini tergolong dalam model yang sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para akademisi lain seperti Anderson, Dye, Dunn, Patton, dan Savicky.

Menurut James A. Anderson, dkk. (dalam Tilaar dan Nugroho, 2005:186) proses kebijakan melalui tahap-tahap/*stages* sebagai berikut.



Gambar 2.3 Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson, dkk

Stage 1: Policy agenda, yaitu those problems, among many, which receive the serious attention of public officer.

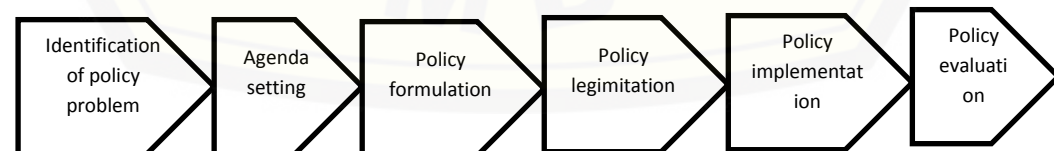
Stage 2: Policy formulation, yaitu the development of pertinent and acceptable proposal courses of action for dealing with problem.

Stage 3: Policy adoption, yaitu the development of support for a specific proposal so that policy can legitimated or authorized.

Stage 4: Policy implementation, yaitu application of the policy by the government's administrative machinery to problem.

Stage 5: Policy evaluation, yaitu effort by the government to determine whether the policy was effective and why, and why not.

Pakar lain, Dye mengemukakan tahap proses kebijakan yang hampir mirip dengan model Anderson, dkk. tersebut. Menurut Thomas R. Dye (dalam Tilaar dan Nugroho, 2008:189) proses kebijakan publik adalah sebagai berikut.



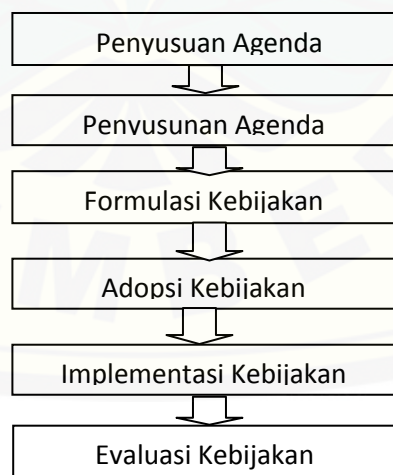
Sumber: Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008: 189)

Gambar 2. 4 Proses Kebijakan Publik Menurut Dye

Di model Dye terlihat bahwa proses kebijakan Anderson, dkk. mendapatkan satu tambahan tahap sebelum *agenda setting*, yaitu identifikasi

masalah kebijakan. Dalam hal ini, Dye melihat tahapan prapenentuan agenda (*agenda setting*) yang terlewatkan oleh Anderson, dkk..Selain itu, Dye juga menggantikan tahap *policy adoption* dengan *policy legitimation*. Namun dalam hal ini pergantian ini tidak memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson, dkk. dan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.

Menurut Winarno (2014:35-38) proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Menurut Charles Lindblom (1986) dalam Winarno (2014:35) tujuan pembagian seperti ini adalah memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Menurut William Dunn (1999: 24-25) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut.



a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu

untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy option*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah, untuk masuk ke dalam agenda kebijakan dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi dan agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan segera bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementory*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran dan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dari beberapa tahapan kebijakan publik yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintahpusat, provinsi, dan daerah harus sesuai rencana dan keinginan masyarakat, karena pendapat dan keinginan masyarakat seringkali tidak sama. Yang menjadi ukurannya adalah kepentingan masyarakat (*public interest*), karena memang pemerintah mendapat kekuasaan dari rakyat, pada gilirannya pemerintah harus melakukan kegiatan sesuai dengan kehendak rakyat untuk kepentingan rakyat. Hal ini seperti yang diungkapkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Subarsono, 2005 : 3) bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek sosial yang ada dimasyarakat, ketika kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktek-praktek yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2.4 Paradigma Administrasi Publik

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik muncul pemikiran Denhardt dan Denhardt (2004) tentang pergeseran paradigma administrasi publik yang dimulai dari model administrasi tradisional (*Old Public Administration/OPA*) ke model manajemen baru (*New Public Management/NPM*) dan *New Public Service* yang lebih modern dengan mengusung nilai-nilai ekonomi dalam sektor publik, profesional, dan hasil yang maksimal serta mengarah pada kepuasan publik. Gambaran pergeseran paradigma

menurut Denhardt dan Denhardt (2004), perbedaan OPA, NPM dan NPS dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Perbandingan OPA, NPM dan NPS

No	Aspek	Old Public Administration (OPA)	New Public Management (NPM)	New Public Service (NPS)
1	Dasar Teoritis dan fondasi Epistemologis	Teori Politik	Teori Ekonomi	Teori Demokrasi
2	Rasionalitas dan model perilaku manusia	<i>Rationalistic Synoptic (administrative man)</i>	Teknis dan rasionalitas ekonomi (economic man)	Rasionalitas strategis atau rasionalitas formal (politik, ekonomi dan organisasi)
3	Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik mewakili kepentingan agregat individu	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai.
4	Responsivitas birokrasi publik	<i>Client dan constituen</i>	<i>Customer</i>	<i>Citezens</i>
5	Peran Pemerintah	<i>Rowing (designing and implementing policies focusing on a single, politically difined obyective)</i>	<i>Steering (acting as a catalyst to unleash marked forces)</i>	<i>Serving (negotiating and brokering interest among citizen an community groups creating shared values)</i>
6	Pencapaian tujuan	Badan Pemerintah	Organisasi privat dan non -profit	Koalisi antar organisasi publik, non profit dan privat
7	Akuntabilitas	Hierarki administrative dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)	Multiaspek-pelayanan publik harus didasarkan pada hukum, nilai masyarakat, norma politik, standar profesional dan keinginan rakyat.
8	Diskresi administrasi	Diskresi terbatas	Diskresi diberikan secara luas	Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung jawab.
9	Struktur organisasi	Birokratis yang ditandai dengan topdown	Desentralisasi orgnisasi dengan control utama berada pada agen	Struktur kolaboratif dengan kepemimpinan yang berbagi secara internal dan eksternal
10	Asumsi terhadap motivasi pegawai dan adminsitrator	Gaji dan keuntungan, proteksi	Semangat entrepreneur	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat.

Sumber : Denhardt dan denhardt (2004, 28-29), Tahun 2015

Sesuai dengan paradigma diatas, penelitian ini berbasis pada *New Public Servise* (NPS) dengan Konsep kepentingan publik dengan hasil dialog berbagai nilai. Dengan peran pemerintah, pelayanan atau *servicing (negotiating and brokering*

interest among citizen an community groups creating shared values) dalam mencapai tujuan keselamatan manusia yang mendiami bangunan gedung dan akuntabilitas. Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrasi dengan pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik yang dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap tersebut harus dilalui dan dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Bila menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, tiga tahapan kebijakan harus saling melengkapi.

Kamus Webster dalam Wahab (1991:50) implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk menyediakan sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, 2010:86.

Dalam perencanaan formulasi kebijakan yang dibuat eksekutif bersama legislatif tidak membutuhkan kendala yang berarti, tetapi dalam implementasi yang dilaksanakan eksekutif pelaksanaan kebijakan memerlukan tenaga yang ekstra. Perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Riant Nugroho (2008 : 432) dalam *Public Policy Teori Kebijakan-Analisis kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajemen Dalam Kebijakan Publik* bahwa kebijakan sebagai *The Fifth Estate*-Metode Penelitian Kebijakan memberikan kontribusi konsep mencapai 60% dari keberhasilan, khususnya di zaman sekarang yang data dan informasi tentang masa depan sudah bisa diakses. Jika kita sudah mempunyai konsep yang baik, 60 % keberhasilan sudah ditangan. Namun, yang 60 % itu akan hangus jika 40% implementasinya tidak konsisten dengan konsep. Banyak juga peneliti yang menemukan bahwa dari konsep-konsep

perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi antara 10-20% saja. Dari sini kita melihat bahwa implementasi kebijakan itu memang krusial.

Mazmanian dan Sabatier (1983:4) menjelaskan makna implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman itu mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Lebih lanjut dijelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Bertumpu pada pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan operasional yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, Widodo, Joko MS (2010:88) dalam Analisis Kebijakan Publik menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefits*), serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*targets groups*).

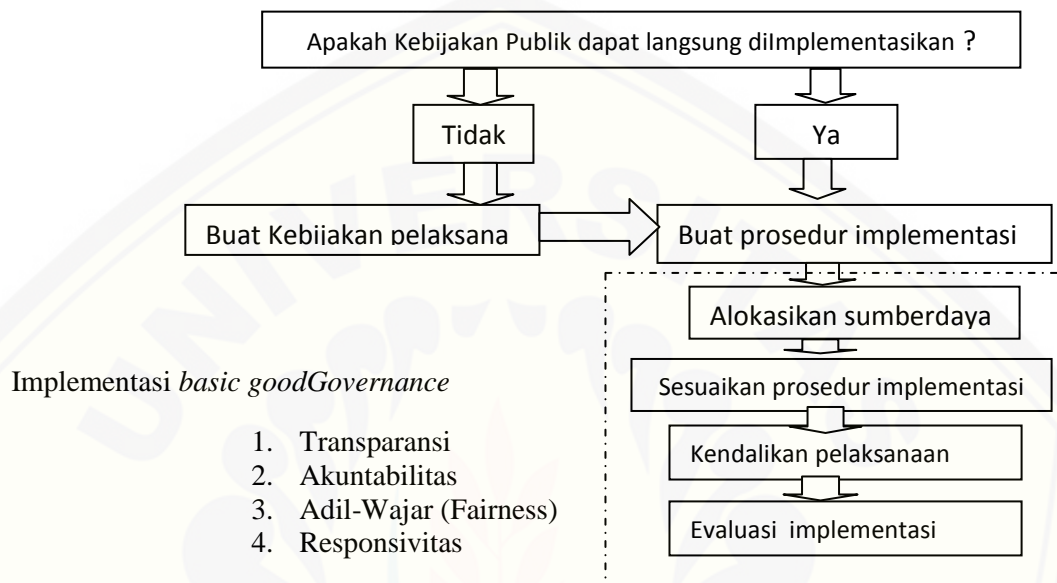
Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah adalah kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bias langsung operasional yaitu Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Rencana kebijakan adalah 20 % keberhasilan, 60% implementasi, dan sisanya 20 % adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep akan sering muncul. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi kebijakan.

Sebagaimana dikemukakan Peter DeLeon dan Linda deLeon (2001) pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Peneliti yang menggunakan pendekatan ini antara lain Graham T. Allison dengan studi kasus misil Kuba (1971, 1999). Pada generasi ini implementasi berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Generasi kedua tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas kebawah” (*top-downner perspective*). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983), Ropert Nakamura dan Frank Smallwood (1980), dan Paul Berman (1980). Pada saat yang sama muncul pendekatan *bottom-upper* yang dikembangkan oleh Michael Lipsky (1971,1980), dan Benny Hjern (1982,1983). Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcom L. Goggin (1990) yang memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan konjensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut.

Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Pelaksanaan implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dan ketika kebijakan dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi, ketika kebijakan implemmentasi sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah

mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Dalam rangka menyederhanakan, ada beberapa panduan yang diperlukan untuk melakukan implementasi kebijakan yang dapat dilihat dalam Gambar 2.5 di bawah ini.



Gambar 2.5 Skema Tahapan Implementasi Kebijakan (Riant Nugroho, 2008:462)

Dari Gambar 2.5 tersebut tampak bahwa inti permasalahan implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Di sini juga tampak adanya keharusan *implementasi good governance* khususnya pada elemen “penyesuaian prosedur implementasi dengan sumber daya yang dipergunakan”.

Agar implementasi dapat mencapai tujuan, implementasi kebijakan perlu dimonitor dan dievaluasi bukan saja oleh lembaga internal pemerintah seperti Inspektorat dan DPRD tetapi oleh lembaga eksternal yaitu BPK dan juga sangat penting adalah oleh masyarakat yaitu LSM, media massa, dan lain-lain.

Dalam implementasi kebijakan, ada satu hal penting yang ditambahkan yaitu diskersi, atau ruang gerak bagi individu pelaksana dilapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus, misalnya apabila kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi lapangan. Diskersi adalah kehormatan

fungsional para pelaksana implementasi kebijakan. Karena kebijakan adalah mati dan kehidupan masyarakat adalah hidup, dalam pelaksanaan kebijakan pada tingkat tertentu, selalu diperlukan penyesuaian kebijakan dengan implementasi. Thoha (1992:62), mengatakan bahwa peran birokrasi menjadi mengemuka karena dalam masyarakat sudah berkembang penguasa-penguasa politik yang telah mendelegasikan urusan-urusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pada birokrasi dan bahkan menggantungkannya pada infrastruktur birokrasi. Oleh karena posisi yang strategis dan mempunyai keahlian profesional dalam fungsinya, serta mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kebijakan erat sekali, maka peranan birokrasi dalam “*public policy*” sangat menentukan.

Fungsi pemerintahan negara termasuk pemerintahan daerah dimanapun berada, sekurang-kurangnya melakukan fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan masyarakat, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*). Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan dalam LAN RI (2004:7) bahwa dalam *public governance* peran sektor negara/pemerintah tetap penting. Namun, bukan sebagai pemberi layanan barang dan jasa, melainkan berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat. Paradigma utama *governance* adalah pemberdayaan masyarakat.

Agar kebijakan dapat dilakukan oleh pelaksana dengan baik perlu dicari model implementasi oleh pembuat kebijakan publik. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh: (1) Charles O. Jones, (2) Donald Van Meter dan Char Van Horn, (3) George Edward. III, (4) Merilee S Grindle, (5) Daniel Mazmaien dan Paul A. Sabatier, dan (6) Hogwood, Brian W dan Lewis A. Gun.

Model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh pakar ada persamaan dan perbedaan yang dapat dikemukakan dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Model-model Implementasi Kebijakan.

No	Pakar						
	Dimensi	Jones	Edward	Van Meter	Sabatier	Grindle	Hogwood
1	Organisasi/Struktur	✓	✓	✓			✓
2	Interprestasi/Perception	✓		✓			✓

3	Aplikasi/Penerapan	✓		✓	✓	✓	
4	Komunikasi		✓	✓			✓
5	Resource/Sumberdaya		✓	✓			✓
6	Disposisi/perilaku		✓				
7	Ukuran/Tujuan			✓			
8	Lingkungan				✓	✓	
9	Pengend masalah/otoritas				✓		✓
10	Kausalitas						✓
11	Minimalis Ketergantungan						✓

Sumber : Arifin Sofjan (2009:13), Tahun 2015

Diantara model-model implementasi kebijakan diatas terdapat model yang bersifat pendekatan *Top-Down* yang menggunakan logika berfikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘kebawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Irfan (2012:37) menggunakan bahasa Sabatier (1986), bahwa pendekatan *top-down* dilakukan oleh para peneliti dengan langkah sebagai berikut: *they started with police decision (usually statue) and examined the exten to wich its legally-mandate objectives were achieved over time and why*”. Pendekatan ini sering kali juga disebut “*policy centered*” karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuannya atau tidak (cf. Hogwood and Gunn, 1984).

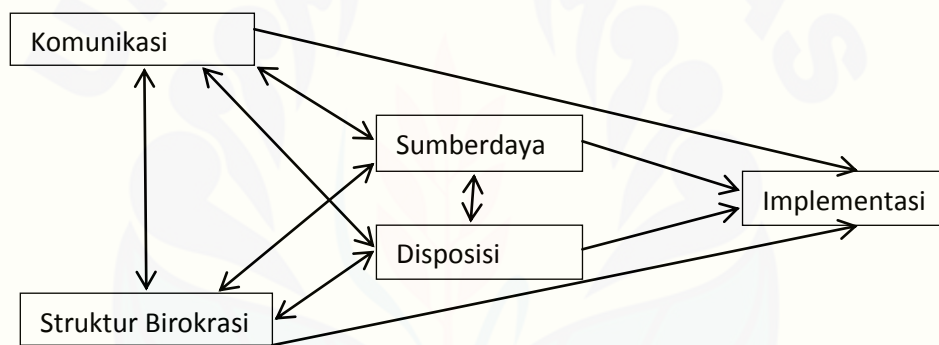
Dari Model Tabel 2.3 diatas, peneliti akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan dalam implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang bersifat *top-down* karena merupakan amanah undang-undang dan dilaksanakan perda dengan menggunakan model George C. Edward III (1980), Van Horn dan Van Meter (19750 dan Sabatier dan Mazmanian (1983).

2.5.1 Model George C. Edward III

Model kebijakan George Edward III diambil peneliti berdasarkan pertimbangan fenomena lapangan penelitian dimana dimensi organisasi atau struktur organisasi yaitu pelimpahan kewenangan pelaksanaan kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan

Tata Ruang. Adanya pelimpahan kewenangan itu adalah agar organisasi itu dapat berfungsi secara efisien (Stoner dkk, 1997:47). Struktur organisasi yang dipakai pada penelitian ini sebagai indikator implementasi kebijakan, sedangkan sumberdaya/*resource* pada indikator ditekankan pada sumberdaya finansial, manusia, dan peralatan.

George Edward III mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110), seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.6 Pengaruh langsung dan tidak langsung Implementasi Model George C. Edward III (1980 : 148)

Menurut George C. Edwards (1980: 10) komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, harus jelas, dan akurat serta konsisten. Dalam hal ini Edwards III menyatakan: “*Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear accurate, and consistent*”.

Dalam hal ini Edwards (1980) menjelaskan, jika pembuat keputusan/*decision maker* berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendaknya, maka harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi/*discretion* pada para implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini tidak perlu dilakukan jika terdapat

aturan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang perlu dilakukan. Namun, aturan yang terlalu kaku juga dapat menghambat implementasi karena akan menyulitkan adaptasi dari para implementor. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang ditransmisikan kepada agen pelaksana yang tepat, jelas, dan konsisten, tetapi tidak menghalangi adaptasi dari para agen pelaksana tersebut.

Mengenai sumber daya, Edwards III (1980: 11) menjelaskan bahwa hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah:

“Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide service”.

Tanpa memandang seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapa akuratnya perintah tersebut ditransmisikan. Jika implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards III sebagaimana disebutkan di atas meliputi staf, informasi, otoritas, dan fasilitas.

Selain komunikasi dan sumber daya, Edwards III memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Edwards III (1980: 89) menyatakan:

“If implementors are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when implementors’ attitudes or perspectives differ from the decisionmakers’, the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated”.

Dalam hal ini, Edwards III menekankan bahwa sikap atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan. Dicontohkan oleh Edwards III, bahwa banyak negara bagian dan sekolah-sekolah di AS yang tidak mengalokasikan dana bagi anak berkebutuhan khusus meskipun aturan tentang

alokasi dana tersebut telah dituangkan dalam *Title I of the Elementary and Secondary Education Act of 1965*. Pelanggaran ini disebabkan oleh sikap negara-negara bagian dan sekolah-sekolah tersebut tidak berminat/*not interested* dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di atas.

Untuk mengatasi kebuntuan implementasi karena adanya resistensi dari pelaksana, Edwards III menawarkan dua alternatif solusi. Alternatif pertama adalah dengan pergantian personel, sedangkan alternatif kedua adalah dengan memanipulasi insentif. Alternatif pertama menurut Edwards III cenderung lebih sulit daripada alternatif kedua. Hal ini seperti pendapat Edwards III (1980: 107) yang menyatakan :

“Changing the personnel in government bureaucracies is difficult, and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementors’ dispositions is to alter the dispositions of existing implementors through the manipulation of incentives. Since people generally act in their own interest, the manipulation of incentives by high-level policymakers may influence their actions”.

Alternatif kedua ini sering kita jumpai dalam manajemen organisasi. Organisasi yang mengutamakan kinerja seperti di dalam perusahaan seringkali memberikan kenaikan gaji yang berbeda antar karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja lebih bagus akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang memiliki kinerja di bawahnya.

Faktor keempat yang dikemukakan Edwards adalah struktur birokrasi. Edwards III (1980: 125) menyatakan bahwa dua subvariabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi. Mengenai SOP, Edwards III (1980: 225) menjelaskannya sebagai berikut.

“The former develop as internal responses to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia”.

Jika kita *rephrase*, SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks. SOP ini sering kita jumpai dalam pelayanan masyarakat pada organisasi-organisasi pelayanan publik. Standarisasi SOP sudah menjadi isu lama pada organisasi swasta/*private sector*, dan kemudian diimplementasikan pula pada organisasi-organisasi pelayanan publik. Contoh yang dapat kita lihat adalah pelayanan perizinan di UPT Pelayanan satu atap yang sekarang bahkan sudah memiliki standar waktu pelayanan untuk masing-masing item pelayanan. Di satu sisi, SOP ini memberikan sisi positif yaitu kejelasan bagi publik dalam standar pelayanan yang dapat mereka harapkan, sedangkan di sisi lain standar pelayanan yang mekanistik dapat pula membuat publik merasa dibeda-bedakan. Sebagai contoh standar pelayanan untuk pelayanan IMB di UPT Pelayanan Terpadu membeda-bedakan pemohon besar dan kecil yang akan mendahulukan pemohon besar. Mengenai fragmentasi, Edwards III (1980:125) menjelaskan:

“The latter results primarily from pressures outside bureaucratic units as legislative committees, interest groups, executive officials, state constitutions and city charters, and the nature of broad policies influence the organization of public bureaucracies”.

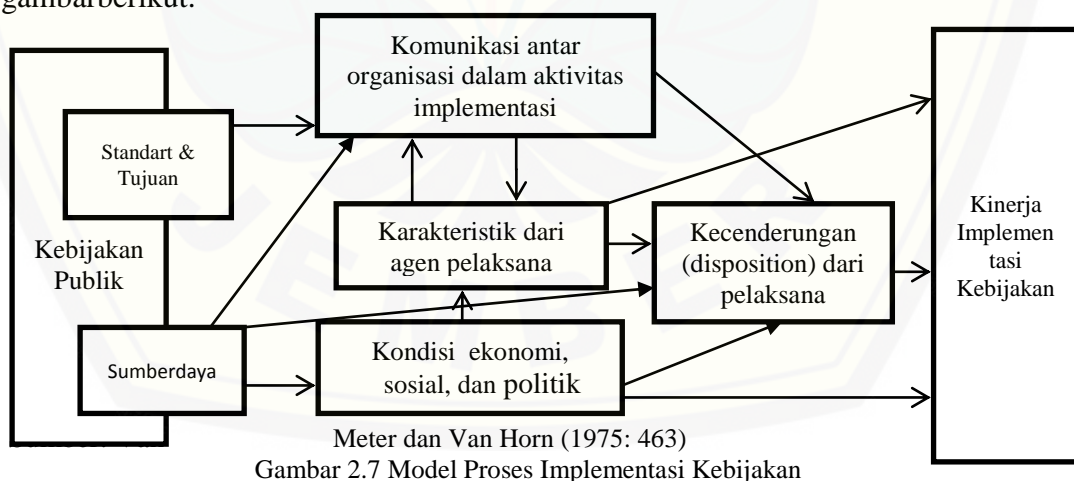
Dalam bahasa yang lebih singkat, Edwards III (1980: 134) mendefinisikan fragmentasi sebagai *“...the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units”*. Dengan kata lain, fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan pada beberapa unit organisasi. Edwards III (1980: 134) memberikan ilustrasi bagaimana fragmentasi membuat Pemerintah AS menjadi tidak efisien. Dicontohkan bahwa pada masa pemerintahan Carter, Presiden Carter yang mengadakan reformasi pelayanan publik menyatakan: *“There are too many agencies, doing too many things, overlapping too often, coordinating too rarely, wasting too much money – and doing too little to solve real problems”*

2.5.2 Model Van Horn dan Van Meter

Donald Van Meter & Carl van Horn (1975) dalam *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*, berkaitan dengan Model ini menganggap bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005: 99) terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : “(1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik”. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan public, sebagai berikut.

- a) Komunikasi antar organisasi dalam aktivitas implementasi.
- b) Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.
- c) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- d) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

Hal tersebut dengan asumsi bahwa : Standar dan tujuan sudah jelas dan tegas. Sumber daya untuk implementasi sudah tersedia, seperti yang tertuang pada gambar berikut.



Penjelasan variabel-variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut (Subarsono, 2005: 99) sebagai berikut.

- (1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan

kabur, akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

- (2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya nonmanusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
- (3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- (4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- (6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Bila melihat teori yang diajukan oleh Edwards III seperti terlihat di atas, variabel (1) standar dan sasaran kebijakan dapat kita masukkan dalam variabel “komunikasi” dalam model Edwards III. Hal ini karena dari penjelasan yang ada menunjukkan bahwa diperlukan adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi maupun konflik. Variabel (2)

sumber daya sejalan dengan variabel “sumber daya” pada model Edwards III, yaitu mencakup SDM dan non-SDM. Variabel (3) hubungan antar organisasi dapat kita masukkan dalam variabel “struktur organisasi” dari model Edwards III. Variabel (4) karakteristik agen pelaksana /badan-badan pelaksana hal ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. (Winarno, 2014:166); variabel (6) disposisi implementor, dapat kita masukkan pada variabel “disposisi” dalam model Edwards III.

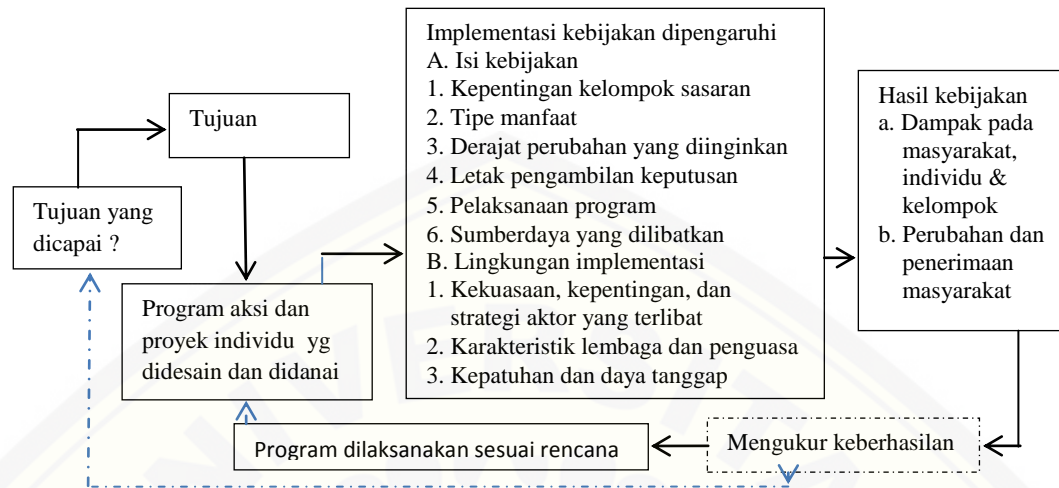
Dari variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang agak berbeda barangkali adalah variabel (5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi, yang tidak terdapat dalam model Edwards III. Pada variabel (5) ini terlihat bahwa model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn juga mempertimbangkan faktor eksternal. Dilihat dari teori sistem kebijakan dari Dye yang melibatkan tiga elemen dalam sistem kebijakan, maka faktor sosial, politik, dan ekonomi dapat kita masukkan dalam elemen lingkungan kebijakan/*policy environment*. Di lain pihak, barangkali timbul pertanyaan mengapa Edwards III tidak memasukkan elemen lingkungan kebijakan dalam teorinya? Menurut peneliti, Edwards III tidak memasukkan elemen lingkungan kebijakan karena beliau memfokuskan teorinya pada aktor-aktor kebijakan yang mengimplementasikan kebijakan itu sendiri (implementor kebijakan) sehingga tidak memfokuskan pembahasan pada apa yang terdapat di luar implementor kebijakan. Di lain pihak, penelitian dalam disertasi ini menggunakan pendekatan eksternal yaitu pemilik bangunan gedung ber IMB sehingga variabel pada model Edwards III perlu ditambah dari variabel Van Horn dan Van Meter tentang faktor eksternal dalam penelitian ini.

Ada satu hal yang terlihat menonjol pada gambar model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu model ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan akan menuju “kinerja”. Kebanyakan ahli yang mengemukakan model proses kebijakan (Easton, Anderson, Patton & Savicky,

dan Dunn) tidak memasukkan “kinerja kebijakan” dalam model proses kebijakan. Hal ini dikemukakan oleh Nugroho (2008: 388), bahwa uniknya para akademisi tersebut tidak memasukkan “kinerja kebijakan”, melainkan langsung pada evaluasi kebijakan. Salah satu kemungkinannya adalah para akademisi tersebut menilai bahwa “kinerja kebijakan” adalah proses yang “pasti terjadi” dalam kehidupan publik, bahkan tanpa harus disebutkan. Dalam penelitian sangat dibutuhkan hasil akhir kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung yaitu sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

2.5.3 Model Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2005: 93) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa item. Disebutkan oleh Subarsono (2005: 93), bahwa variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran, seperti tertuang pada gambar berikut.



Sumber: Grindle dalam Subarsono (2005: 93)

Gambar 2.8 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Model Grindle ini dijelaskan oleh Suwitri (2008: 86-89) dengan memerinci lagi Variabel Konten ke dalam 6 unsur, sebagai berikut.

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*interest affected*)

Theodore Lowi (dalam Grindle, 1980) mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dimaksud untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut.

2. Jenis manfaat yang dapat diperoleh (*type of benefits*)

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak.

3. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan (*extent of change envisioned*)

Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan

manfaatnya bagi masyarakat (*target groups*) cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya.

4. Kedudukan pengambil keputusan (*site of decision making*)
Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya.
5. Pelaksana-pelaksana program (*program implementors*)
Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program.
6. Sumber-sumber yang dapat disediakan (*resources committed*)
Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik.

Di samping konten variabel, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh variabel konteks. Variabel ini meliputi 3 unsur, sebagai berikut.

1. Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors involved*) Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya.
2. Karakteristik rejim dan institusi (*institution and regime characteristics*)
Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan *who gets what* atau 'siapa mendapatkan apa'
3. Kesadaran dan sifat responsif (*compliance and responsiveness*)
Agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para implementor harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari *beneficiaries*.

Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi.

Melihat penjelasan model Grindle ini, kita dapat mencermati bahwa model Grindle ini memiliki aspek yang hampir mirip dengan model Van Meter dan Van Horn. Aspek yang sama adalah bahwa baik model Van Meter dan Van Horn maupun model Grindle sama-sama memasukkan *elemen lingkungan kebijakan* sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengikutsertakan ‘kondisi sosial, politik, dan ekonomi’ sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dan Grindle mengikutsertakan variabel besar ‘konteks kebijakan’ atau ‘lingkungan kebijakan’.

Kelebihan dari model Grindle dalam variabel lingkungan kebijakan adalah model ini lebih menitikberatkan pada politik dari para pelaku kebijakan. Unsur pertama dari variabel lingkungan yaitu *power, interest and strategies of actors involved* menjelaskan bahwa isi kebijakan sangat dipengaruhi oleh peta perpolitikan dari para pelaku kebijakan. Aktor-aktor penentu kebijakan akan berusaha menempatkan kepentingan mereka pada kebijakan-kebijakan yang melibatkan minat mereka, sehingga kepentingan mereka terakomodasi di dalam kebijakan. Unsur kedua dari Grindle yaitu *institution and regime characteristics* maupun unsur ketiga yaitu *compliance and responsiveness* memiliki kesamaan dengan faktor disposisi dari model Edwards III. Pada unsur kedua (karakteristik lembaga dan rejim) ini dijelaskan oleh Suwitri (2008: 88) bahwa “implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok- kelompok yang kepentingannya dipengaruhi”. Dalam hal ini, contoh yang terjadi adalah ketika terdapat resistensi terhadap suatu kebijakan dari suatu kelompok yang kepentingannya terancam akan menimbulkan konflik. Cara penanganan konflik pada rejim yang otoriter tentu akan berbeda dengan cara penanganan pada rejim yang demokratis. Bahkan pada rejim yang demokratis sendiri terdapat berbagai macam cara penyelesaiannya. Robbins dan Judge (2008: 181) menyebutkan terdapat enam cara penyelesaian konflik: bersaing (tegas dan tidak kooperatif), bekerjasama (tegas dan kooperatif), menghindar (tidak tegas dan tidak

kooperatif), akomodatif (tidak tegas dan kooperatif), dan kompromis (tengah-tengah antara tegas dan kooperatif). Unsur ketiga dari variabel lingkungan dari model Grindle, yaitu *compliance and responsiveness* selain merujuk pada disposisi. Perbedaan dengan model Edwards III dalam hal ini adalah Grindle memfokuskan pada disposisi penguasa/rezim/pembuat kebijakan, sedangkan Edwards lebih menekankan pada disposisi implementor. Suwitri (2008: 76) menyatakan “ proses pemilihan alternatif yang memuaskan itu bersifat objektif dan subjektif, dipengaruhi oleh *dispositions* (Edwards III, 1980:89), *compliance and responsiveness* (Grindle, 1980: 11) dari perumus kebijakan”. Selain disposisi, *compliance and responsiveness* juga merujuk pada politik. Suwitri (2008: 88-89) menyatakan “.Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi”. Pelibatan politik dalam unsur ini agaknya masih berkaitan dengan unsur pertama yang menyebutkan unsur kekuasaan, minat, dan strategi aktor-aktor, karena jika suatu isu melibatkan kepentingan dan minat dari pembuat kebijakan dan atau implementor kebijakan tersebut, maka responsivitas dari pembuat kebijakan maupun implementor semestinya lebih tinggi.

Pada variabel konten atau isi kebijakan, Grindle juga memandang bahwa implementasi kebijakan masih melibatkan politik. Pada unsur pertama hingga keempat yaitu *interest affected, type of benefits, extent of change envisioned, dan site if decision making*, kita dapat melihat bahwa peran politik masih kuat. Sebagai contoh pada unsur pertama, Suwitri (2008:86) menyatakan “jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik”. Peran politik juga masih dapat ditelusuri pada unsur kedua hingga keempat.

Pada variabel konten/isi kebijakan, Grindle juga memiliki kesamaan pandangan dengan Edwards III maupun Van Meter dan Van Horn. Pada unsur kelima yaitu *program implementers* disebutkan oleh Suwitri (2008:88) bahwa “Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut”. Hal ini sebangun dengan faktor sumber daya yang

dikemukakan oleh Edwards III maupun Van Meter dan Van Horn. Lebih lanjut, Grindle membedakan ‘sumber daya’ dari model Edwards III maupun Van Meter dan Van Horn. Unsur keenam yaitu *resources committed* dinyatakan oleh Suwitri (2008: 88) sebagai “Tersedianya sumber-sumber secara memadai.”. Dengan demikian dua unsur (unsur kelima dan keenam) dari model Grindle dapat kita simpulkan sama dengan faktor sumber daya sebagaimana dikemukakan Edwards III maupun Van Meter dan Van Horn, tetapi Grindle membedakan sumber daya sebagai SDM dan non SDM.

2.5.4 Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005: 94) dan Tilaar dan Nugroho (2008: 215), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, sebagai berikut.

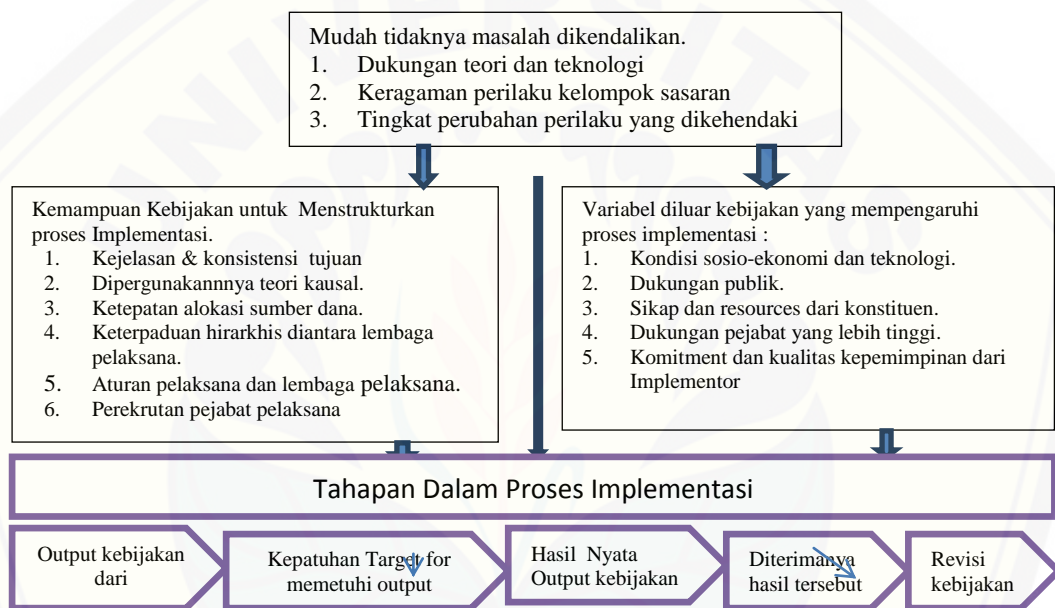
a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problem*).

Kategori *tractability of the problem* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2005: 95-96): “(1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan (2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan”.

b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*). Kategori *ability of statute to structure implementation* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2005: 97-98) sebagai berikut. (1) Kejelasan isi kebijakan. (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana. (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

- c. Variabel di luar kebijakan/variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Kategori *nonstatutory variables affecting implementation* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2005: 98-99) mencakup hal-hal berikut. (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. (2) Dukungan publik terhadap kebijakan. (3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*). (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Hal-hal di atas seperti tertuang pada Gambar 2.9 berikut.



Gambar 2.9 Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier.

Sebagaimana Van Meter dan Van Horn maupun Grindle, Mazmanian dan Sabatier juga memasukkan variabel lingkungan kebijakan sebagai variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Perbedaan utama antara model ini dengan model Grindle adalah, selain variabel konten/isi kebijakan yang oleh Mazmanian dan Sabatier dikelompokkan sebagai kemampuan statuta untuk menstrukturisasi implementasi (*ability of statute to structurize implementation*), mereka juga memperluas variabel yang mempengaruhi kebijakan menjadi tingkat kesulitan masalah (*tractability of the problem*) dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi/*nonstatutory variables affecting implementation*.

Pada variabel tingkat kesulitan masalah (*tractability of the problem*), Mazmanian dan Sabatier memperhitungkan tingkat kesulitan teknis (*technical difficulties*), keberagaman kelompok sasaran (*diversity of target group behavior*), persentase kelompok sasaran terhadap total populasi (*target group as a percentage of the population*), serta tingkat perubahan perilaku yang diharapkan (*extent of behavioral change required*). Unsur keempat yaitu tingkat perubahan perilaku yang diharapkan (*extent of behavioral change required*) memiliki kesamaan dengan salah satu unsur dari variabel isi kebijakan dari Grindle yaitu *extent of change envisioned*.

Pada *nonstatutory variable*, unsur pertama yaitu *socioeconomic conditions and technology* memiliki kesamaan dengan variabel Van Meter dan Van Horn yaitu keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan utamanya adalah Mazmanian dan Sabatier menyebutkan kata ‘teknologi’ sebagai satu kesatuan dengan sosioekonomi. Sebagaimana Grindle, Mazmanian dan Sabatier juga memperhatikan politik. Pada unsur kedua yaitu *public support* maupun unsur keempat yaitu *support from sovereigns* memperlihatkan bahwa dukungan publik (*bottom*) maupun dukungan dari penguasa (*top*) ikut menentukan implementasi. Tanpa dukungan dari kedua pihak (*top* dan *bottom*) maka implementasi akan menghadapi kendala. Dukungan dari atas maupun bawah ini melibatkan proses politik. Publik yang memiliki kepentingan lebih cenderung akan mendukung suatu kebijakan yang mengutamakan kepentingan mereka. Demikian juga penguasa juga akan cenderung mendukung kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Unsur kedua yaitu *attitudes and resources of constituency groups* memiliki kesamaan dengan faktor disposisi dari model Edwards III. Perbedaannya barangkali adalah Edwards III memfokuskan pada sikap/*attitude* dari implementor, sedangkan Mazmanian dan Sabatier lebih fokus pada sikap dari konstituen/pemilih. Pada unsur kelima yaitu *commitment and leadership skill of implementing officials*, model Mazmanian dan Sabatier juga memfokuskan pada komitmen dan kemampuan kepemimpinan dari implementor. Keunggulan model ini adalah barangkali hal ini (kepemimpinan) belum dibahas pada model-model sebelumnya.

Pada variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi implementasi (*ability of statute to structure implementation*), model Mazmanian dan Sabatier memiliki beberapa kesamaan dengan model Edwards III. Unsur pertama yaitu *clear and consistent objectives* bersesuaian dengan faktor komunikasi dari model Edwards III. Kejelasan dan konsistensi tujuan merupakan salah satu faktor yang dimaksudkan oleh Edwards III dalam faktor komunikasi. Tanpa tujuan yang jelas dan konsisten, agen-agen implementor akan menemui kesulitan mengimplementasikan kebijakan. Unsur kelima yaitu *decision rules of implementing agencies* juga serupa dengan faktor komunikasi dari model Edwards III. Unsur kelima ini juga menuntut adanya kejelasan aturan/*rules* dari agen-agen pelaksana. Kesesuaian antara model Mazmanian dan Sabatier dengan model Edwards III juga dapat kita lihat pada unsur ketiga yaitu *initial allocation of financial resources*, maupun unsur keenam yaitu *recruitment of implementing officials*. Baik unsur alokasi dana maupun unsur rekrutmen petugas implementasi memiliki kesamaan dengan faktor sumber daya dari model Edwards III, Van Meter dan Van Horn, maupun Grindle. Mirip dengan model Grindle, model Mazmanian dan Sabatier juga memisahkan SDM dan non SDM dari faktor sumber daya. Unsur lain yang sesuai dengan model Edwards III adalah unsur keempat yaitu *hierarchical integration within and among implementing institutions*, unsur ini serupa dengan faktor struktur birokrasi dalam model Edwards III. Integrasi hierarkis di dalam dan di antara lembaga implementor merupakan hal yang mutlak diperlukan agar --seperti dikatakan Edwards III-- implementasi kebijakan tidak saling *overlap*.

Di samping hal-hal yang kita dapati dari model-model lain, terdapat unsur-unsur yang tidak kita dapati di variabel ini (kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi kebijakan). Hal yang agak berbeda tersebut adalah pada unsur kedua yaitu *incorporation of adequate causal theory*. Model ini menuntut adanya kajian ilmiah maupun empiris agar sebuah kebijakan dinilai layak dikatakan mampu menstrukturisasi implementasi. Dengan adanya landasan teori kausal yang kuat maupun kajian ilmiah dan bukti empiris, sebuah kebijakan sudah melewati *fit and proper test* sebelum menjadi kebijakan yang memungkinkan

untuk dilaksanakan. Selain itu, perbedaan dengan model lain juga terdapat pada unsur ketujuh yaitu *formal access by outsiders*. Keunggulan model Mazmanian dan Sabatier adalah bahwa model ini juga memperhitungkan *peran serta publik* dalam implementasi kebijakan. Implementasi akan berjalan relatif lebih lancar apabila publik diberi kesempatan untuk mengakses proses kebijakan, atau paling tidak dalam salah satu prosesnya seperti penentuan agenda atau evaluasi kebijakan. Barangkali karena sebab itulah beberapa kajian mengkategorikan model Mazmanian dan Sabatier ini memiliki pendekatan *bottom-upper*, atau pendekatan kebijakan dari bawah (publik) ke atas (penentu kebijakan).

Setelah membahas model-model dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dari beberapa pakar, peneliti mendapatkan benang merah yang faktor-faktornya ekuivalen antar satu model/teori dengan model/teori lain. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa model utama yang digunakan penelitian ini adalah model Edwards III ditambah faktor external yaitu lingkungan kebijakan (*police environment*) dari model Grindle yaitu kepentingan kelompok sasaran dan model Mazmanian dan Sabatier yaitu dukungan public (*partisipasi public*), maka peneliti mengemukakan sintesis dari model Van Meter dan Van Horn, Grindle, serta Mazmanian dan Sabatier berdasarkan model dasar Edwards III. Sintesis hubungan antar model-model tersebut dapat diilustrasikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Hubungan antara Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

No	Faktor/Variabel	Edward III	Van Meter dan Van Horn	Grindle	Mazmanian dan Sabatier
1	Komunikasi	Komunikasi	Standar dan tujuan Kebijakan	-	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan dan konsistensi tujuan Aturan keputusan dari implementor
2	Sumberdaya	sumberdaya	sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana program Sumber yang disediakan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan alokasi sumber daya Rekrutmen agen pelaksana
3	Disposisi	Disposisi	- Disposisi -Karakteristik agen pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik lembaga dan penguasa Kepatuhan dan daya tanggap 	<ul style="list-style-type: none"> Dipergunakannya teori kausal. Dukungan pejabat yang lebih tinggi. Komitment dan kualitas dari pejabat pelaksana
4	Struktur birokrasi	Struktur birokrasi	Hubungan antar organisasi.	Letak pengambil keputusan	<ul style="list-style-type: none"> Keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana.

No	Faktor/Variabel	Edward III	Van Meter dan Van Horn	Grindle	Mazmanian dan Sabatier
5	lingkungan kebijakan/ <i>policy environment</i> .	-	Kondisi sosial, ekonomi dan politik	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan kelompok sasaran • Tipe manfaat • Derajat perubahan • Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi. • <i>Dukungan publik</i>. • Sikap dan resources dari konstituen.

Sumber : diolah, Tahun 2015

Dari Tabel 2.4 di atas, penulis menyimpulkan terdapat lima faktor yang secara umum mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi dan lingkungan kebijakan (dukungan publik). Variabel komunikasi dalam model-model Edward III, Van Meter dan Van Horn serta Mazmanian dan Sabatier adalah ekuivalen atau setara. Sedangkan dalam model Grindle komunikasi absen. Variabel sumberdaya dalam model Edward III, Van Meter dan Van Horn serta Mazmanian dan Sabatier adalah ekuivalen atau setara. Model yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah model Edward III dengan alasan karena model Edward III sesuai dengan kondisi pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dengan variabel komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya, disposisi, implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Konstruksi penulis pada teori Edward III adalah menambah variabel bebas dukungan publik diambil dari teori Mazmanian dan Sabatier. Variabel dukungan publik diambil dengan alasan karena studi implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melibatkan pemilik bangunan gedung dan konsultan perencana/pengawas dan kontraktor pelaksana bangunan gedung.

2.6 Variabel Penelitian

Dari berbagai permasalahan penelitian dan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung peneliti menyimpulkan lima faktor yang akan dipakai sebagai variabel dalam penelitian ini dalam pembuktian apakah kelima faktor tersebut

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung. Kelima faktor variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, disposisi, dan Implementasi Kebijakan yang merupakan variabel dari Edward III. Variabel keenam dukungan publik adalah dari model Van Meter Van Horn, Grindle dan Mazmain dan Sabatier sedangkan Model hubungan variabel mengadopsi dari Model Van Meter dan Van Horn (Model Emperis 1) dengan variabel disposisi sebagai variabel intervening/antara dan model Edwar III (Model Emperis 2) dengan variabel intervening/antara adalah sumberdaya dan disposisi menuju ke variabel kinerja implementasi kebijakan.

2.6.1 Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 17 & 97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1) Dimensi penyampaian/transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Policy decisions and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors”.

2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas

sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

“If policies are to be implemented properly, implementation directives must not only be received, but they must also be clear. If they are not, implementors will be confused about what they should do, and they will have discretion to impose their own views on the implementation of policies”.

3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. *Contradictory decisions confuse and frustrate administrative staff and constrain their ability to implement policies effectively.*

Menurut Robbins (2008: 5) komunikasi meliputi ”transfer maupun pemahaman makna”. Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2001: 145) *“communication is the transfer of information and understanding from one person to another person”* (Komunikasi adalah pemindahan informasi dan pemahaman dari satu orang ke orang lain). Menurut Edwin B. Flippo dalam Mangkunegara (2001: 145), *“Communication is the act of inducing others to interpret an idea in the manner intended by the speaker or writer”* (Komunikasi adalah aktivitas yang menyebabkan orang lain menginterpretasikan suatu ide yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis). Menurut Suwanto (1999: 165) komunikasi adalah “proses memberi dan menerima informasi sampai pada pemahaman makna”. Malcom Goggin (1990: 32) dalam Communication Theory untuk memahami hubungan antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk menjelaskan implementasi. Implementasi dipandang sbg fungsi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.W. Hogwood and Lewis A. Gunn (1978) dalam Riant Nugroho (2004: 443) syarat kesembilan komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi.Model Nakamura & Smallwood(1980) *implementers bargain with policy makers over goals and or means to achieve goals* atau

pelaksana tawar-menawar dengan pembuat kebijakan atas tujuan dan atau sarana untuk mencapai tujuan. *implementers support policy makers goals and negotiate administrative means among themselves to achieves goals* atau pelaksana mendukung tujuan para pembuat kebijakan dan bernegosiasi sarana administrasi di antara mereka sendiri untuk mencapai tujuan.

Menurut Usman (2008: 389) komunikasi adalah “proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun bahasa nonverbal”. Berdasarkan pendapat Robbins (2008: 5), Keith Davis dalam Mangkunegara (2001: 145), Edwin B. Flippo dalam Mangkunegara (2001: 145), Suwanto (1999: 165), dan Usman (2008: 389) dan teori komunikasi bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian, dari seseorang kepada orang lain melalui cara lisan, tertulis, maupun bahasa nonverbal dengan tujuan orang lain tersebut mengeinterpretasikannya sesuai dengan maksud yang dikehendaki.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi berdasarkan pendapat Edwards III (1980: 17) komunikasi memiliki beberapa dimensi, antara lain: dimensi 1) transmisi (*transmission*) pesan kepersonil yang tepat; 2) kejelasan (*clarity*) pesan; dan 3) konsistensi (*consistency*) pesan sesuai peraturan.

2.6.2 Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98)

menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan

“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”

2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa “*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*”. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan:

Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.

4) Sumberdaya Informasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 102) Sumberdaya informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasikan Kebijakan SLF. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. disamping itu, informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

5) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Sumber daya/*resources* menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary adalah :

“1) a supply of something that a country, an organization or an individual has and can use, especially to increase wealth, 2) a thing that gives help, support or comfort when needed, 3) the ability to find quick, clever and efficient ways of doing things”.

Menurut www.businessdictionary.com (diakses tanggal 25 Maret 2011), manajemen sumber daya/*resource management* adalah,

“The process of using a company's resources in the most efficient way possible. These resources can include tangible resources such as goods and equipment, financial resources, and labor resources such as employees”.

Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn. *The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework*, (1978:465) Kebijakan memberikan lebih dari tujuan standar terhadap resiko yang untuk menilai pelaksanaan : mereka juga membuat sumber daya yang tersedia yang memudahkan administrasi mereka (*Policies furnish more than standards objectives against which to judge implementation : they also make available resources which facilitate their administration*).

Mazmaniandan Sabatier (1983:545), berpendapat bahwa

“ Financial resources available to the implementing agency . money is obviously necessary to hire the staff and conduct the technical analyses involved in the development of the regulation, the administration of permit program , and the monitoring compliance”.

Artinya, sumber pendanaan untuk lembaga pelaksana. uang jelas diperlukan untuk mempekerjakan staf dan melakukan analisis teknis yang terlibat dalam pengembangan regulasi, izin Administasi program, dan kepatuhan pemantauan.

Menurut James Lester (*contingency theory*), keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi dua faktor, yaitu komitmen dan kapasitas pemda. W. Hogwood and Lewis A. Gunn (1978) dalam Riant Nugroho (2004: 442) syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu, dan ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.

Model Elmore, R. Elmore (1979), M. Lipsky (1971), B. Hjern & D. O'Porter (1981) pembuat kebijakan, policy managers mengakses dan mengerakan resources untuk reformasi. Kebutuhan sumberdaya politik, keuangan, sumberdaya untk mempertahankan reformasi. Menurut Edwards III (1980: 13) macam-macam sumber daya yaitu:

“Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services”.

Dari definisi Oxford dan pendapat Edwards III (1980: 13) disimpulkan bahwa variabel sumberdaya yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas dimensi: 1) sumberdaya manusia, 2) dana/anggaran, 3) peralatan, 4) informasi/data, dan 5) kewenangan.

2.6.3 Disposisi

Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary *disposition* adalah “1) a person’s natural qualities of mind and character, 2) a tendency, 3) the way something is placed or arranged”. Dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa disposisi hampir sejalan maknanya dengan sikap/*attitude*. Sikap/*attitude* menurut Robbins dan Judge (2008: 92) adalah “pernyataan evaluatif—baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan—terhadap objek, atau peristiwa. Ketika saya berkata, “Saya menyukai pekerjaan saya,” saya sedang mengungkapkan pemikiran saya tentang pekerjaan”.

Dari definisi Oxford, dan kategorisasi dari Robbins dan Judge (2008: 93) serta Edwards III (1980: 90-114), disposisi dapat diartikan sebagai *pernyataan evaluatif seseorang terhadap suatu keadaan yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, tindakan, serta terpengaruh oleh pandangan kelompok, kesulitan pergantian personel, serta insentif*. Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para

pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn. *The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework*, (1978:472) :

“Each of the components of the model must be filtered through the perceptions of implementor within the jurisdiction where the policy is delivered. The elements of the implementors response effect their ability and willingness to carry out the policy: their cognition (comprehension, understanding) of the policies, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response”.

Mazmanian dan Sabatier (1983) menggunakan teori kausal, yaitu dukungan pejabat yang lebih tinggi, komitmen dan kualitas dari pejabat pelaksana. Menurut James Lester (*contingency theory*), keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu komitmen dan kapasitas pemda. Merilee S. Grindle *compliance and responsiveness* memfokuskan pada disposisi penguasa/rezim/pembuat kebijakan.

W. Hogwood and Lewis A. Gunn (1978) dalam Riant Nugroho (2004: 443) syarat kesepuluh bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Model Nakamura & Smallwood (1980), *Discretionary experimentation : implementers refine goals and means for policy makers* potensial breakdowns cooptation, unaccountability, ambiguity atau pelaksana memperbaiki tujuan dan berarti bagi para pembuat kebijakan, pemilihan, tidak akuntabilitas, dan kemenduaan.

Robbins dan Judge (2008: 93) mengungkapkan terdapat tiga komponen utama dari sikap yaitu: a) Komponen *kognitif* : segmen opini atau keyakinan dari sikap. b) Komponen *afektif* : segmen emosional atau perasaan dari sikap. c) Komponen *perilaku* : niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Edwards III (1980: 90-114) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari disposisi pelaksana.

a. Efek dari Disposisi

Edwards III (1980:90) menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang jatuh dalam zona ketidakpedulian (*zone of indifference*) karena orang-orang yang seharusnya melaksanakan perintah memiliki perbedaan pandangan/ketidaksetujuan dengan kebijakan yang dilaksanakan. Sebagai akibat dari disposisi implementor ini terdapat kemelesetan/*slippage* antara kebijakan dan implementasi. Edwards III menyebutkan bahwa salah satu permasalahan yang menyebabkan ketidakpedulian adalah *parochialism*. *Parochialism* timbul sebagai akibat orang yang bekerja dan menghabiskan sebagian besar karirnya di suatu lembaga pemerintah. Seringkali orang-orang dalam organisasi tersebut berusaha mempertahankan *status quo* dari organisasinya dan berseberangan dengan kebijakan yang ada. Kepentingan organisasi sebagai wujud dari *parochialism* ini seringkali didahulukan daripada kebijakan yang ada. Dikarenakan terdapat perbedaan cara pandang dari masing-masing organisasi, maka disposisi dari organisasi tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan pada organisasi itu.

b. Masalah Staf di Birokrasi

Edwards III (1980: 98) menunjukkan bahwa permasalahan lain timbul bila ternyata staf pelaksana yang seharusnya mengimplementasikan kebijakan ternyata tidak mau mengimplementasikan kebijakan sesuai perintah yang sebenarnya. Ditambah lagi posisi staf tersebut ternyata tidak bisa / sulit digantikan. Edwards III memberi contoh kasus untuk permasalahan ini adalah permasalahan pergantian personel yang sulit dilakukan dikarenakan adanya perjanjian politik, atau sistem kepegawaian di pemerintah yang lebih mudah mempromosikan daripada memecat.

c. Insentif

Mengganti personel pelaksana implementasi (implementor) adalah pekerjaan yang sulit, karena itu Edwards (1980: 107) memberikan alternatif lain yaitu dengan memberikan insentif tambahan untuk memberikan motivasi bagi implementor dalam melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor yang menjadi

perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri atas hal-hal berikut.

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Dari definisi Oxford, dan kategorisasi dari Robbins dan Judge (2008: 93) serta Edwards III (1980: 90-114) maka disposisi dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif seseorang terhadap suatu keadaan yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, tindakan, serta terpengaruh oleh pandangan kelompok, kesulitan pergantian personel, serta insentif. Dari pendapat Robbins dan Judge (2008: 93) dan pakar lainnya diatas serta Edwards III (1980: 90-114) dapat disimpulkan Edwards III (1980: 90-114) dimensi dalam variabel disposisi adalah: 1) Kecendrungan/komitmen implementor, 2) Pengangkatan personel, 3) Insentif personel.

2.6.5 Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Pendapat Ripley at all (1973: 10), mengatakan “ *bureaucratic structure as those “characteristic, norm, and recurring paterns of relations inside the inside the executive agencies that have either potential or actual relation to what they do in thr way of policy”*”.

Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn. (1978: 471), berpandangan “*this component as consisting of both the formal structural features of organizations and the informal attributes of their personnel*”.

W. Hogwood and Lewis A. Gunn (1978) dalam Riant Nugroho (2004: 443) syarat kedelapan bahwa tugas–tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-

aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III, dua permasalahan utama dari struktur birokrasi adalah prosedur operasional standar (SOP = *Standard Operating Procedure*) dan fragmentasi.

1) *Standard Operating Procedures* (SOP)

Menurut Edwards III (1980: 125) SOP adalah respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Edwards III (1980: 141) juga menjelaskan bahwa SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi.

2) Fragmentasi

Edwards III (1980: 134) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan pada beberapa unit organisasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil.

Menurut Max Weber dalam Usman (2008: 141) organisasi adalah struktur birokrasi. Karena itu definisi ‘struktur birokrasi’ erat kaitannya dengan definisi ‘organisasi’. organisasi berasal dari bahasa latin yaitu *organum* yang berarti alat, bagian, atau anggota badan. Robbins (2008: 214) mendefinisikan struktur organisasi sebagai “*menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal*”.

Menurut Robbins (1990: 29-40) terdapat empat macam teori mengenai organisasi.

Tipe 1: *Classical school* / aliran klasik, meliputi Frederick Taylor, Henry Fayol, Max Weber, dan Ralph Davis. Aliran ini berlandaskan pada prinsip-prinsip sederhana dan universal yang rasional dan mekanistik. Fokus utama pada aliran ini adalah *division of labor* / pembagian kerja dan wewenang yang terpusat.

Tipe 2: *Human relation school* / aliran hubungan manusia, meliputi Elton Mayo, Chester Barnard, Douglas McGregor, dan Warren Bennis. Aliran ini berlawanan dengan pendekatan rasional-mekanistik dan memilih pendekatan hubungan manusia. Fokus utama pada aliran ini adalah pada organisasi yang demokratis.

Tipe 3: *Contingency approach* / pendekatan kesalingtergantungan, meliputi Herbert Simon, Katz dan Kahn, Woodward dkk., dan Aston Group. Aliran ini mengambil pengetahuan yang didapat dari tipe 1 dan 2 yang dipadukan dalam *framework* konteks situasional. Pandangan kesalingtergantungan ini melihat bahwa tidak ada satu cara paling baik / *one best way* dalam pengorganisasian, sehingga dikembangkan identifikasi variabel lain..

Tipe 4: *Political approach* / pendekatan politik meliputi James March dan Herbert Simon, serta Jeffrey Pfeffer. Aliran ini mengembangkan pendekatan kontinjensi/kesalingtergantungan dengan pengetahuan dari kebiasaan dalam pembuatan keputusan dan dari ilmu politik.

Robbins dan Judge (2008: 215) memberikan beberapa pertanyaan dan jawaban dalam mendesain struktur seperti pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Pertanyaan tentang Desain Struktur Organisasi

No	Pertanyaan kunci	Jawaban diberikan melalui
1	Sampai sejauh mana aktivitas dipecah melalui pekerjaan-pekerjaan yang berbeda?	Spesialisasi pekerjaan
2	Atas dasar apa pekerjaan akan dikelompokkan?	Departementalisasi
3	Kepada siapa individu dan kelompok memberikan pertanggungjawaban mereka?	Rantai komando
4	Berapa banyak orang yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif?	Rantai kendali
5	Di mana wewenang pengambil keputusan berada?	Sentralisasi atau desentralisasi

6	Sejauh mana aturan dan ketentuan untuk mengatur dan mengarahkan karyawan dan manajer diperlukan?	Formalisasi
---	--	-------------

Sumber : Robbins dan Judge, Tahun 2008

Dari pendapat Max Weber dalam Usman (2008: 141), Robbins dan Judge (2008: 215), dan Edwards III (1980: 125-141) dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal dengan cara pembagian pekerjaan, garis komando, cakupan kendali, formalisasi aturan, dan *Standard Operating Procedure*.

Dari pendapat Max Weber dalam Usman (2008: 141), Henry Fayol dalam Robbins (1990: 35-37), Robbins dan Judge (2008: 215), dan Edwards III (1980: 125-141), dapat disimpulkan bahwa variabel struktur organisasi dengan dimensi: 1) Fragmentasi; 2) Koordinasi, dan 3) standar operasional prosedur.

2.6.5 Dukungan Publik

Dukungan publik atau tingkat partisipasi masyarakat adalah tindakan ikut serta sekumpulan individu dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dilahirkan dari konsep pemberdayaan masyarakat. Partisipasi dalam peraturan perundangan-undangan diartikan sebagai “peran serta” atau keikutsertaan. Dalam pembangunan yang demokratis partisipasi terdapat tiga tradisi partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial dan partisipasi warga (Gaventa dan Valderama, 1999). Partisipasi dalam pembangunan yang demokratis melibatkan interaksi individu organisasi politik dengan negara yang diungkapkan melalui tindakan melalui tindakan terorganisir melalui pungutan suara, kampanye, protes dengan tujuan untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Partisipasi sosial dalam konteks pembangunan diartikan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai pewaris pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan disemua tahapan siklus pembangunan (Stiefel dan Wolfe, 1994). Dalam hal ini partisipasi sosial ditempatkan diluar lembaga pemerintahan. Sedangkan partisipasi warga diartikan sebagai kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam

pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dipelbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka (Gaventa dan Valderama, 1999). Pada konsep tersebut masyarakat/publik dilibatkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah termasuk dalam perbaikan pelayanan publik.

Dari berbagai pendapat ini, partisipasi menurut Erman I Rahim (2004) bahwa partisipasi dalam Kebijakan Publik ada dua pengertian, yaitu: (1) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai dukungan rakyat dengan ukuran masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga, dalam sosiologi ini adalah mobilisasi masyarakat dalam pembangunan; dan (2) partisipasi masyarakat merupakan kerjasama yang erat antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Dari pengertian ini, partisipasi publik/masyarakat adalah keterlibatan seseorang dalam sesuatu kegiatan mulai dari menentukan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dengan dilandasi kesadaran akan tujuan itu.

Menurut The British Council dalam Hikmawati (2013, 73) ada 21 teknik partisipasi publik adalah penilaian masyarakat, indikator masyarakat model daya dukung setempat, dan lain-lain. Moynihan (2003) melihat partisipasi masyarakat memiliki dua tujuan, sebagai berikut.

- (1) Partisipasi masyarakat hendaknya memberikan akses kepada masyarakat dalam mengambil keputusan. Masyarakat hendaknya memiliki akses yang sama kepada pengambilan keputusan. Tidak sebaliknya, akses terhadap pengambilan keputusan hanya dimiliki oleh masyarakat secara terbatas.
- (2) Partisipasi masyarakat mendorong pemerintah menyediakan ruang diskusi dengan masyarakat dan menyerap semua masukan dari masyarakat sehingga keputusan yang diperoleh berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan tujuan partisipasi tersebut Moynihan (2003) membagi partisipasi masyarakat menjadi beberapa tingkatan berdasarkan akses masyarakat terhadap pengambilan keputusan dan masukan masyarakat yang menjadi pertimbangan

dalam pengambilan keputusan. Bagi Moynihan (2003), akses masyarakat terhadap pengambilan keputusan hendaknya tanpa dibatasi oleh kriteria tertentu. Untuk itu *Moynihan* membagi akses ini menjadi dua, yaitu sempit dan luas. Sempit jika akses terhadap pengambilan keputusan hanya dimiliki oleh masyarakat dengan kriteria tertentu, seperti jabatan, keahlian, kewenangan, dan lainnya. Luas jika akses terhadap keputusan dimiliki oleh masyarakat yang lebih luas yang tidak dibatasi oleh kriteria tertentu.

Berdasarkan masukan masyarakat yang menjadi pertimbangan, Moynihan (2003) memperingkatkan partisipasi masyarakat menjadi tiga tingkatan, yaitu: (1) palsu; (2) parsial; dan (3) penuh. Pada tingkat palsu, ada usaha untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, walaupun partisipasi masyarakat masih bersifat simbolistik. Pada tingkat ini keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan sama sekali partisipasi masyarakat. Pada tingkat parsial terjadi konsultasi antara Pemerintah dengan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masukan dari masyarakat hanya sedikit menjadi pertimbangan pemerintah. Pada tingkat penuh terjadi diskusi antara Pemerintah dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Berikut gambaran tingkat partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh Moynihan berdasarkan akses dan masukan masyarakat yang tertuang dalam tabel berikut..

Tabel 2.4 Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Moynihan

No.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Akses Masyarakat	
		Sempit	Luas
1	Palsu	Keputusan dibuat oleh pemerintah secara tidak transparan. Partisipasi masyarakatnya simbolistik yang hanya melibatkan masyarakat dengan kriteria tertentu.	Keputusan dibuat oleh Pemerintah secara tidak transparan. Partisipasi masyarakat hanya simbolistik yang tidak hanya melibatkan masyarakat dengan kriteria tertentu.
2	Parsial	Keputusan dibuat oleh Pemerintah dengan sedikit pengaruh dari masukan masyarakat. Masyarakat yang ikut berpartisipasi adalah masyarakat yang terpilih. Masyarakat lain tidak memiliki akses untuk ikut	Keputusan dibuat oleh Pemerintah dengan sedikit pengaruh dari masukan masyarakat. Melalui proses diskusi yang terbatas dengan masyarakat. Masyarakat yang ikut berpartisipasi adalah

No.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Akses Masyarakat	
		Sempit	Luas
		berpartisipasi dalam mengambil keputusan.	masyarakat yang lebih luas daripada masyarakat yang terpilih.
3	Penuh	Keputusan dibuat oleh Pemerintah dengan masyarakat yang terpilih. Masyarakat lain tidak memiliki akses untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan.	Keputusan dibuat oleh Pemerintah dengan pengaruh yang kuat dari masyarakat. Melalui proses diskusi yang instensif dengan masyarakat. Masyarakat yang tidak hanya yang terpilih tetapi lebih luas dan beragam.

Sumber: Moynihan (2003), Tahun 2015

Moynihan melihat partisipasi ideal hendaknya dicapai pada tingkat partisipasi penuh dengan akses pada pengambilan keputusan yang luas. Apa yang disampaikan oleh Arnstein (1969) dan Moynihan (2003) tersebut merupakan cita-cita partisipasi masyarakat untuk dicapai.

Menurut Kiviniemi (1986) mengatakan adanya *non governmental actor* yang ikut berinteraksi dalam proses implementasi membuat implementasi menjadi sangat dinamis. Faktor ini disebut sebagai faktor lingkungan dalam proses implementasi.

Interaksi dalam proses implementasi dengan lingkungannya menghasilkan empat kategori atau tipologi implementasi, yaitu *cooperation* (kerjasama), *conformity* (dukungan), *counter action* (tindakan tandingan), dan *detachment* (pemutus hubungan). Dalam analisis ini dapat digambarkan tipologi implementasi sebagai akibat (hasil) interaksi antara kebijakan dengan stakeholder non-pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Tipe Reaksi Lingkungan terhadap Implementasi Kebijakan

Resource of the actors	Value of the actors	
	<i>Pro-Policy</i>	<i>Contra-Police</i>
<i>Strong</i>	Co-operation	Counter-action
<i>Weak</i>	Conformity	Detachment

Sumber : Kiviniemi (1986:260)

Hipotesis yang dapat dibuat dari tipologi implementasi adalah peluang dihasilkannya kinerja implementasi yang baik adalah ketiga suatu kebijakan

yang diimplementasikan mendapat dukungan dari stakeholder non-pemerintah. Kondisi demikian akan menghasilkan tipe implementasi *cooperation* dan *conformity*. Sebaliknya, kinerja implementasi yang buruk akan terjadi pada implementasi *counter-action* dan *detachment*. Dua tipe implementasi tersebut terjadi dalam konteks lingkungan dimana stakeholder non-pemerintah tidak mendukung kebijakan diimplementasikan oleh pemerintah. Dari Hipotesis ini implementasi SLF adalah implementasi kerjasama (*cooperation*) dengan pemohon harus memberikan persyaratan yang diminta. implementasi SLF akan berjalan dengan sukses bila mendapat dukungan (*conformity*) dari publik.

Faktor pengaruh luar/lingkungan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Menurut pendapat Mazmanian dan Sabatier (1983), variabel dukungan publik adalah suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan *insentif* biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang *bersifat dis-insentif* seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik. Dari pendapat ini, variabel dukungan publik terdiri atas dua indikator, yaitu kebijakan mendapat dukungan publik dengan insentif yaitu pada kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung mendapat dukungan publik karena tanpa biaya, sedangkan kurang mendapat dukungan publik karena pada bangunan umum perlu adanya biaya untuk konsultan pengawas bangunan serta penyiapan dokumen seperti *as built drawing*, dan lain-lain.

2.6.6 Kinerja Implementasi Kebijakan

Dalam mencapai tujuan organisasi, ditetapkan target-target atau sasaran tertentu. Realisasi pencapaian target ini ini disebut dengan hasil kerja/prestasi/kinerja atau performance. Istilah “kinerja” itu merupakan terjemahan dari kata “*performance*” yang sepadan dengan kata-kata: “*accomplishment, execution, achievement*” (Webster's Dictionary, 1979 : 1332). “*Performance refers to the degree of accomplishment of the tasks that make up an employee's job*” (Rue, 2000 : 401). Maksudnya, kinerja merujuk pada tingkat penyelesaian tugas yang merupakan pekerjaan seseorang pegawai.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dikbud, 1995 :503), kinerja diartikan sebagai : “1. Sesuatu yang dicapai; 2. Prestasi yang diperlihatkan; 3. Kemampuan kerja (tentang peralatan)”. Dengan demikian, berdasarkan etimologis dan kamus, kinerja tersebut dapat diartikan sebagai tingkat prestasi (hasil yang dicapai). Mengenai tingkat prestasi tersebut dapat dilakukan oleh individu (kinerja individu), dapat dilakukan oleh kelompok (kinerja kelompok), dan dapat dilakukan oleh organisasi (kinerja organisasi). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga Implementasi Kebijakan : Perspektif administrasi publik dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi (organisasi) bertalian dengan seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai misi atau visi institusi. Di samping itu, dikenal pula kinerja kebijakan/program, yaitu sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam kebijakan atau program telah dilaksanakan oleh suatu institusi (organisasi) sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan atau program tersebut.

Mahsum (2009 : 25) mendefinisikan bahwa “Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi

organisasi “. Selanjutnya, Bernadin dan Russel pada Ruky (2006:15) memberikan definisi tentang performace sebagai berikut :

“ Perfomance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period”.
(prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu).

Menurut Mahmudi (2007), “ kinerja organisasi diperoleh dari kinerja individu dan kinerja kelompok”. Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil dari fungsi-fungsi kegiatan tertentu selama kurun waktu. Merujuk pada pengertian diatas, maka kinerja meliputi dimensi usaha atau unjuk kerja dalam mencapai hasil dan hasilnya sendiri. Dalam beberapa peraturan, juga telah mengartikan kinerja organisasi pemerintah antara lain, sebagai berikut.

a) Sesuai dengan SK LAN : 239/2003 bahwa:

“Kinerja Implementasi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan kementerian/lembaga yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan”.

b) Sesuai Permen PAN/09/2007 bahwa:

“Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan”.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi meliputi dimensi usaha atau unjuk kerja dan dimensi hasil atau prestasi kerja.

Dalam konteks paradigma Manajemen Publik Baru (*New Public Management*) dan paradigma Pelayanan Publik Baru (*New Public Service*), dasar penilaian kinerja tidak semata-mata pada proses yang ditempuh, perlakuan kepada bawahan atau kepada masyarakat dan bagaimana akuntabilitas berjalan di dalam organisasi, tetapi lebih luas lagi yaitu berkenaan dengankualitas pelayanan, keterkaitan dengan misi dan visi atau nilai-nilai yang diperjuangkan organisasi,

kesesuaian apa yang implementasi kebijakan publik dikerjakan organisasi publik dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat atau user, dan sampai seberapa jauh suatu organisasi publik telah belajar memecahkan masalah dan memperbaiki situasi yang dihadapinya, termasuk merancang masa depannya. Dengan kata lain, penilaian harus ditujukan tidak hanya pada cara yang ditempuh suatu lembaga pemerintahan, tetapi juga ditujukan pada pencapaian tujuan lembaga pemerintahan yang didasarkan pada visi dan misi serta harapan masyarakat.

Ripley dan Franklin dalam bukunya yang berjudul “Birokrasi dan Implementasi Kebijakan’ (*Policy Implementation and Bureaucracy, 186:89*) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditujukan dari tiga faktor yaitu :

1. perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *street level bureaucrats* terhadap atasan mereka;
2. keberhasilan implementasi diukur dari “*kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan*”;
3. implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang “*memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan*”.

Secara sederhana ketiga faktor diatas merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan sehingga kurang hilangnya salah satu faktor mempengaruhi sekali terhadap kinerja kebijakan tersebut.

Sebaliknya Jam Marse mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan, sebagai berikut.

1. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

3. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

(Solichin, 1997:19)

Ketiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan sebelumnya harus sudah dipikirkan dalam merumuskan kebijakan, sebab tidak tertutup kemungkinan kegagalan didalam penerapan kebijakan sebgaiian besar terletak pada awal perumusan kebijakan oleh pemerintah sendiri yang tidak dapat bekerja maksimal dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Menurut Wiiliam N. Dunn (1999: 608-610) dalam Riant Nugroho (2008: 472-473), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment).Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.Evaluai memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya.meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada *kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik*.Secara umum Willian N Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik adalah sebagaimana terlihat di dalam Tabel 2.5berikut.

Tabel 2.5 Tipe Evaluasi Kebijakan (Kinerja Implementasi Kebijakan Publik)

No.	Katagori	Pertanyaan	Ilustrasi
1	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit Pelayanan
2	Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Cost-benefit Ratio; Manfaat bersih; Unit Biaya
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah	Biaya tetap, Efektifitas tetap
4	Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Criteria Pareto; Kriteria Kaldor-Hicks; Kriteria Rawls

No.	Kategori	Pertanyaan	Ilustrasi
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warga negara
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program public harus merata dan efisien

Sumber: William N. Dunn(1999; h 609), Tahun 2015

Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang kinerja implementasi kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung yang merupakan variabel tergantung (*dependent variable*) atau variabel pokok yang dijelaskan variabel-variabel bebas (*independent variable*) yaitu internal birokrasi yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya, disposisi dan eksternal birokrasi yaitu dukungan/partisipasi publik. Kinerja implementasi kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung menggambarkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan yaitu sertifikat laik fungsi bangunan gedung (pengakuan pemerintah terhadap konstruksi bangunan gedung dalam aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan) dan apakah hasil-hasil kebijakan (*policy outcomes*) yang diperoleh secara nyata mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (*policy goals*). Menurut Erwan AP. (2012 : 67) derajat kinerja implementasi kebijakan menggambarkan berbagai perbandingan antara *policy outcomes* dengan *policy goals*. Semakin tinggi *policy outcomes* maka semakin tinggi pula kinerja implementasi kebijakan yang berhasil diraih oleh kebijakan implementasi kebijakan. ($\text{Kinerja Implementasi} = \text{Policy Outcomes} / \text{Policy goals}$)

2.7 Hubungan Antara Variabel

Meningkatnya kinerja implementasi kebijakan tergantung faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Faktor Komunikasi, struktur birokrasi, dukungan publik, sumberdaya, dan disposisi mempengaruhi implementasi kebijakan.

Edward III (1980:148-149) dalam Winarno (2014:212-214) mengatakan komunikasi-komunikasi yang detail mungkin mengurangi semangat dan kebebasan para pelaksana, menimbulkan penggantian tujuan dan memboroskan sumber-sumber yang tersedia, seperti keterampilan-keterampilan staf, kreativitas dan penyesuaian. Dengan demikian, dampak dari komunikasi-komunikasi pada implementasi tidak hanya langsung, tetapi juga dirasakan melalui kaitan-kaitan dengan sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan dan struktur-struktur birokrasi”.

Faktor sumberdaya juga mempengaruhi secara tidak langsung implementasi. Sumberdaya berinteraksi dengan komunikasi dengan beberapa cara. Staf yang tidak memadai dapat menghalangi transmisi petunjuk-petunjuk kebijakan. Kurangnya informasi dari pejabat tinggi seringkali merupakan sebab kekaburan dalam perintah-perintah implementasi. SOP merupakan bagian dari reaksi kurangnya sumberdaya.

Sumberdaya mungkin mempengaruhi peran disposisi dalam implementasi. Bila sumberdaya banyak, individu-individu dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam implementasi akan relatif kurang bersaing untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan pribadi dan organisasi mereka. Disposisi para pelaksana akan berpengaruh pada bagaimana para pelaksana menafsirkan pesan-pesan komunikasi yang mereka terima. Cara pelaksana menafsirkan pesan komunikasi ini pada akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana mereka menyusun kembali pesan-pesan komunikasi untuk kemudian diteruskan kepada pejabat dibawahnya. Pengaruh disposisi tersebut terhadap komunikasi yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

Disposisi para pelaksana akan berpengaruh pada bagaimana para pelaksana menafsirkan pesan-pesan komunikasi yang mereka terima. Cara pelaksana menafsirkan pesan komunikasi ini pada akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana mereka menyusun kembali pesan-pesan komunikasi untuk kemudian diteruskan kepada pejabat dibawahnya. Struktur birokrasi secara hirarkhis akan berpengaruh pada efektivitas komunikasi organisasi yang

dijalankan. Setiap orang mempunyai orientasi nilai-nilai tertentu, maka orientasi ini akan berpengaruh pada cara seseorang mempersepsi sebuah pesan komunikasi. Disini pengaruh disposisi terhadap komunikasi yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Disposisi para pelaksana kebijakan juga akan berpengaruh pada penggunaan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan. bila suatu program mempunyai misi utama yang berbeda dengan badan-badan pelaksana, maka pelaksanaan program akan cenderung distorsi. Disposisi akan menyebabkan fragmentasi birokrasi karena unit-unit organisasi berebut sumber-sumber dan otonomi. kondisi seperti ini seringkali menjadi sumber pemborosan yang tidak perlu.

Struktur birokrasi pemerintahan yang terpecah akan meningkatkan probabilitas kegagalan-kegagalan komunikasi. Semakin banyak orang yang harus menerima perintah-perintah implementasi, maka semakin besar pula kemungkinan-kemungkinan pesan didistorsi. fragmentasi membatasi dengan jelas kemampuan para pejabat tinggi untuk mengkoordinasikan semua sumber yang tersedia bagi suatu yurisdiksi. Ketidakefisienan yang melekat dalam fragmentasi dan didalam SOP akan berakibat pada pemborosan sumber-sumber yang langka.

Fragmentasi mempengaruhi disposisi dalam beberapa hal. Pertama pembentukan banyak badan dengan tanggung jawab yang sempit akan mendorong pengembangan perilaku perokial diantara birokrasi.. perilaku ini pada gilirannya, akan mengakibatkan pertentangan birokrasi dan kurangnya kerjasama. Kedua, semakin terbukanya akses bagi kepentingan-kepentingan swasta. Hal ini akan meningkatkan kesempatan-kesempatan bagi kepentingan-kepentingan tersebut untuk menekan para pelaksana agar bertindak atas dasar disposisi pribadi daripada perintah-perintah atasan mereka

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:474-477) dalam Winarno (2014:169-172) mengatakan bahwa ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan (*standard and objectives polices*) mempunyai dampak yang tidak langsung pada kecendrungan-kecendrungan (*disposition*) para pelaksana melalui kegiatan pelaksanaan.

Hubungan (*linkages*) antara sumber sumber kebijakan (*resources policy*) dengan tiga komponen lainnya yaitu komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (*interorganizational communication and enforcement activities*), kecenderungan pelaksana-pelaksana (*disposition*) dan kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik (*economic, social, and political conditions*). Tipe dan tingkatan *resources* yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi *interorganizational communication and enforcement activities*. Bantuan teknik dan pelayanan-pelayanan lain hanya dapat ditawarkan jika ditetapkan oleh keputusan kebijakan dan semangat para pelaksana dapat dicapai hanya jika *resources* yang tersedia adalah cukup untuk mendukung kegiatan tersebut.

Kaitan antara *resources* dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana menunjukkan bahwa tersedianya *resources* keuangan dan lainnya mungkin menimbulkan tuntutan-oleh para warganegara swasta dan kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisasi untuk berperan serta dalam implementasi program yang berhasil. Bila *resources* terbatas, kelompok-kelompok masyarakat akan memilih jalan menentang kebijakan dan sebaliknya akan mendukung segala macam kebijakan.

Menurut van Meter dan van Horn hipotesis bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan-badan pelaksana disposisi para pelaksana dan pencapai itu sendiri. Kondisi-kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi dalam mendukung struktur birokrasi, vitalitas dan keahlian yang ada dalam badan-badan administrasi maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki. kondisi lingkungan akan mempengaruhi disposisi para pelaksana. Bila masalah-masalah dapat diselesaikan program begitu berat dan warga negara swasta dan kelompok kepentingan dimobilisir untuk mendukung suatu program, maka besar kemungkinan para pelaksana menerima tujuan., ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan. atau sebaliknya, maka besar kemungkinan pelaksana menolak program tersebut. Beberapa karakteristik dari badan pelaksana mempunyai pengaruh terhadap disposisi para personil yang

ada didalamnya. sifat jaringan kerja organisasi komunikasi, tingkat pengawasan hirarkis dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi indentifikasi individu terhadap tujuan-tujuan dan sasaran organisasi. Disposisi individu pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh ikatan-ikatan formal dan tidak formal dari badan itu dengan badan pemebntuk kebijakan atau pelaksana kebijakan.

Kemungkinan pengaruh yang interaktif antara komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana serta karakteristik-karakteristik badan pelaksana. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan tindakan lanjut memberikan badan-badan tambahan vitalitas dan keahlian, yaitu memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan program.

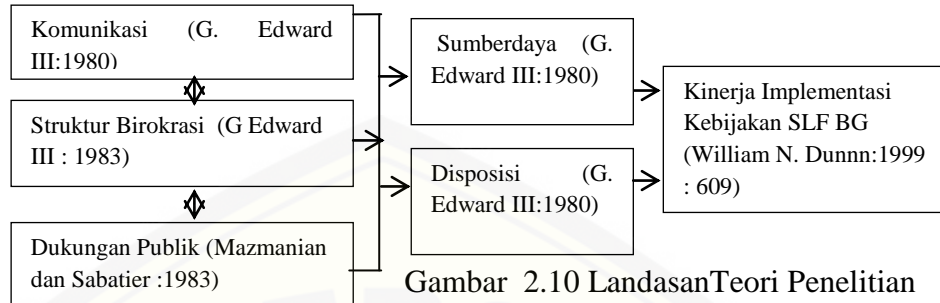
Model yang dikemukakan van Meter dan van Horn menjelaskan keempat variabel (*standar and objectives, interorganizational and enforcement activities, characterisstics of implementing agencies dan disposition*) yang berpengaruh pada proses implementasi kebijakan. Pengaruh ini pada dasarnya adalah pada tingkat sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan (*standar and objectives policy*) ditransmisikan kepada para pelaksana dengan jelas, tepat, konsisten dan dalam cara yang tepat pada waktunya.

2.8 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.8.1 Kerangka Konseptual

Pada rencana penelitian disertasi ini membahas kinerja organisasi dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas, strategi yang dibahas sesuai Rencana Strategis (Renstra) SKPD Pembina Bangunan Gedung yang merupakan pelaksanaan RPJMD Pemerintah Daerah selama 5 tahun, Komitmen SKPD Pembina bangunan gedung yang dibahas pada rencana disertasi kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung adalah pemberdayaan personel birokrasi dalam satu tim dalam memberikan pelayanan secara prima dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dukungan Publik sangat diperlukan dalam tata kelola pemerintahan (*governance*) dengan keikutsertaan/partisipasi publik (masyarakat, TABG dan usaha jasa konstruksi) dalam pengambilan

keputusan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Landasan teori penelitian yang digunakan sesuai dengan Gambar 2.10 berikut.



Gambar 2.10 LandasanTeori Penelitian

Keterkaitan antara personel atau pejabat birokrasi atau sumberdaya manusia dengan kinerja program implementasi Kebijakan sesuai dengan teori Soedarmayanti (2001:7) yang mengemukakan bahwa:

“Kualitas sumberdaya manusia/aparatur secara mikro dalam arti lingkungan suatu unit kerja, maka kualitas sumberdaya manusia/aparatur yang dimaksud adalah kualitas tenaga kerja, pegawai atau karyawan sangat penting peranannya dalam mencapai keberhasilan kinerja organisasi/lembaga atau departemen dimaksud”.

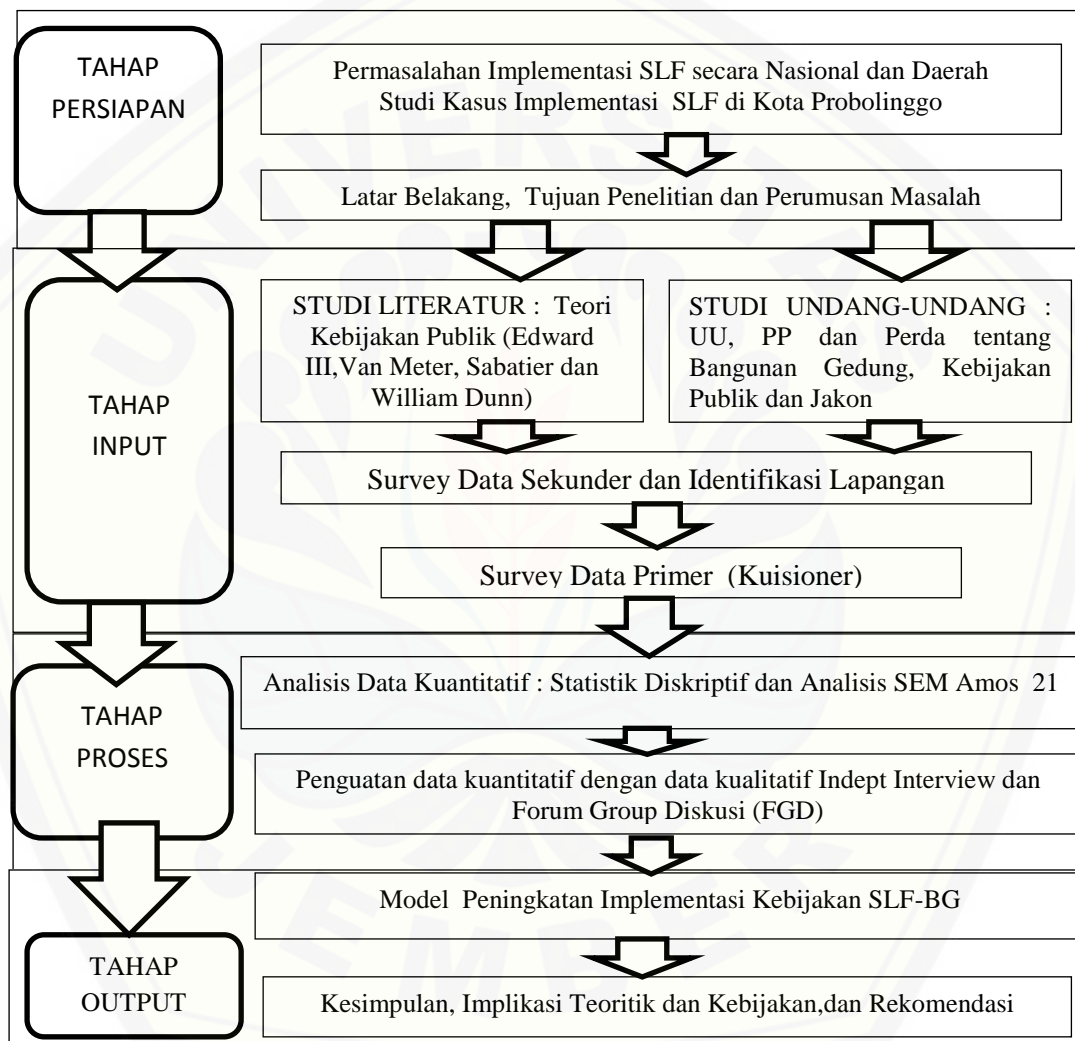
Hubungan antara kualitas sumberdaya aparatur, implementasi kebijakan terhadap kinerja birokrasi menurut pendapat Wahab (2002:13) menjelaskan:

“keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan dibutuhkan kemampuan sumberdaya manusia yang berkualitas baik *skill* maupun keahlian khusus lainnya untuk melaksanakan program sehingga dapat meningkatkan kinerja program dalam organisasi”.

Sumberdaya manusia sangat memegang peranan yang utama dalam menentukan keberhasilan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung karena pemeriksaan laik fungsi bangunan gedung ditentukan oleh kemampuan aparat birokrasi dan Tim Ahli bangunan gedung dalam menguasai materi daftar simak yang berisi ketentuan teknis keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan dan kemudahan bangunan gedung. Keselamatan bangunan gedung terkait dengan ketahanan konstruksi bangunan gedung, keselamatan dari bahaya kebakaran dan petir. Kesehatan bangunan gedung bahwa bahan bangunan gedung sudah memenuhi

standar kesehatan, mempunyai jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah dan air limbah. Kenyamanan terkait dengan sirkulasi udara, sinar dan meredam kebisingan, sedangkan kemudahan bahwa bangunan gedung sudah mempunyai aksesibilitas terhadap lansia dan anak-anak.

Berdasarkan pendapat landasan teori diatas dapat digambarkan kerangka pikir penelitian sesuai Gambar 2.11 sebagai berikut.



Gambar 2.11 Kerangka Pikir Penelitian

2.8.2 Hipotesis Penelitian

Kerangka pemikiran teori penelitian didasarkan telaah teoritis yang dilakukan dibagian awal, selanjutnya dibentuk sebuah model penelitian. Model penelitian ini, nantinya diharapkan akan dapat menjadi *guideline* bagi pemecahan

masalah diajukan pada tulisan ini (sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian awal). Model pada penelitian yang merupakan kerangka konsep penelitian teoritis ini menggambarkan pengaruh antara variabel-variabel independen yaitu : komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik sebagai variabel independen dan sumberdaya dan disposisi sebagai variabel intervening. Sedangkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang merupakan variabel dependen, maka istilah variabel independen dan dependen perlu diperjelas. Daclan Usman (2014: 35) mengatakan bahwa definisi variabel independen dan dependen harus direvisi dan dipertegas. Selain itu, keberadaan variabel intervening yang memediasi hubungan kausalitas antar variabel mengakibatkan munculnya terminologi jenis variabel yang lain, yaitu : variabel eksogenus dan variabel endogenus. Definisi dari keempat jenis variabel ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Definisi Jenis Variabel

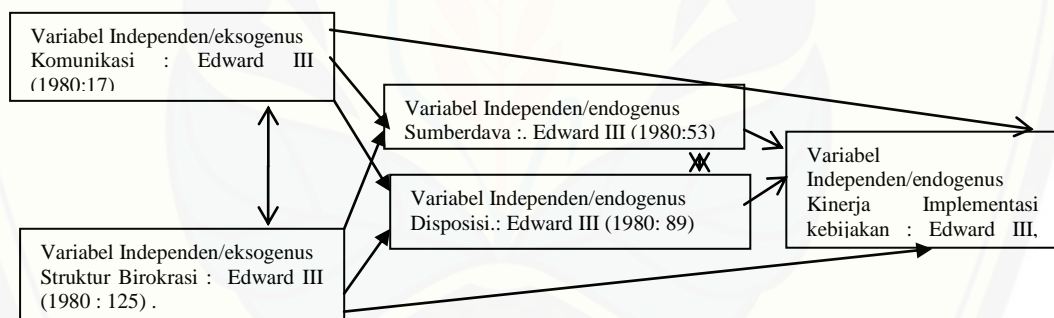
No	Jenis Variabel	Definisi
1	Independen	Variabel yang mempengaruhi (ada tanda panah yang keluar dari variabel ini)
2	Dependen	Variabel yang tidak mempengaruhi (tidak ada tanda panah yang keluar dari variabel ini)
3	Eksogenus	Variabel yang tidak dipengaruhi (tidak ada tanda panah yang menuju ke variabel ini)
4	Endogenus	Variabel yang dipengaruhi (ada tanda panah yang menuju ke variabel ini)

Sumber : Usman Dachlan (2014 : 34)

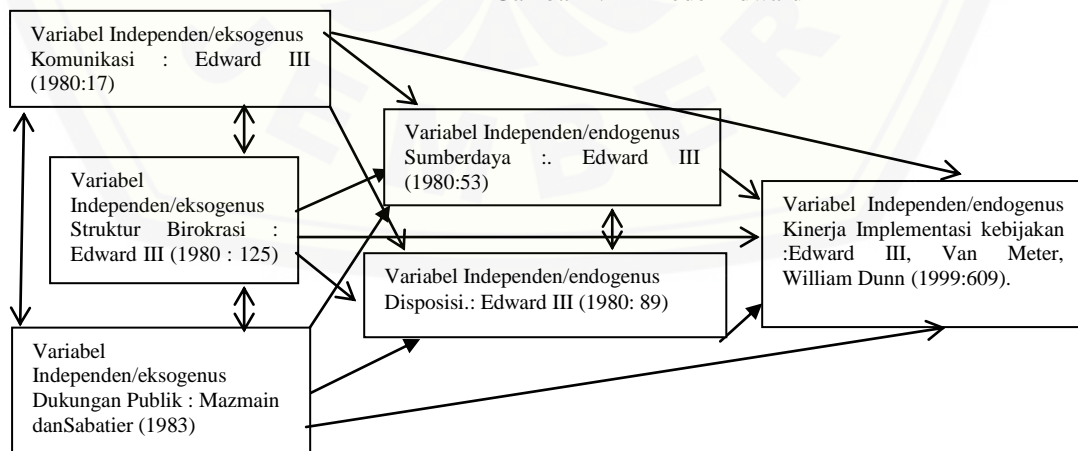
Dari definisi ini, variabel komunikasi, struktur birokrasi, dan dukungan publik disebut sebagai variabel independen dan eksogenus. Variabel sumberdaya dan disposisi sebagai variabel independen dan endogenus. Variabel kinerja implementasi kebijakan SLF bangunan gedung disebut sebagai variabel dependen dan endogenus. Dalam hubungan antar variabel yang diajukan ditampilkan pada gambar 2.12 dan hubungan antara variabel diterangkan yaitu: dalam hubungan antara variabel terdapat tiga variabel independen dan eksogenus, dua variabel intervening atau variabel endogenus dan satu variabel dependen atau endogenus. Variabel dependen/endogenus yaitu kinerja implementasi kebijakan SLF BG, tiga variabel independen/eksogenus yaitu komunikasi, struktur birokrasi, dukungan publik dan dua variabel intervening/endogenus yaitu sumberdaya dan disposisi.

Paradigma penelitian ini dinamakan paradigma jalur (Path analisis) , karena terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara yaitu variabel intervening. Dengan adanya variabel antara ini, akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran akhir harus melewati variabel antara itu atau bisa kesasaran akhir (Sugiono, 2007: 46). Analisis dilakukan dengan menggunakan korelasi dan regresi dengan SEM program AMOS 21 sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel dependent terakhir, harus lewat jalur langsung, atau intervening.

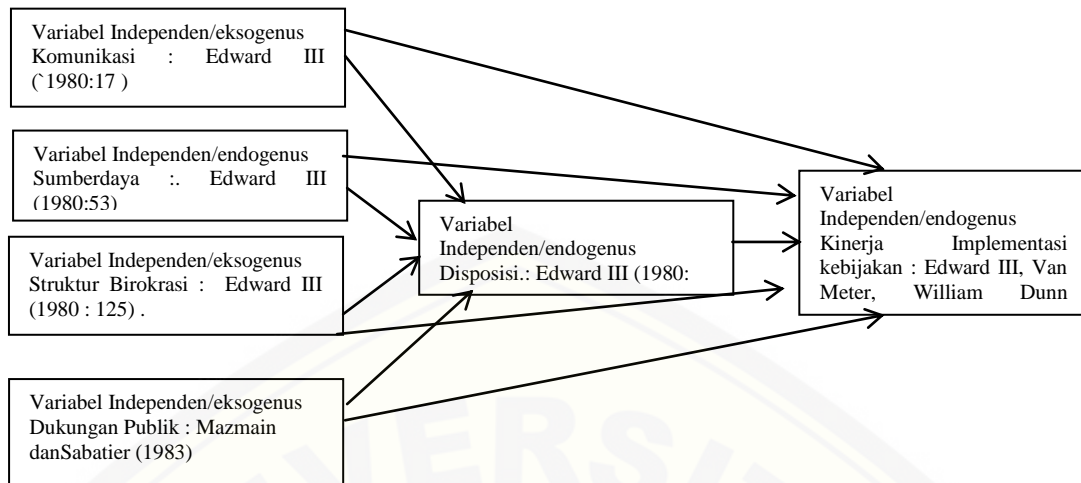
Hubungan variabel dapat dilihat pada model Edward III, konsep model 1 dengan variabel endogen intervening sumberdaya dan disposisi dan konsep model 2 dengan variabel endogen intervening disposisi. Konsep model 1 dan 2 untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel eksogenus dan endogen. Konsep model hubungan variabel dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.



Gambar 2.12 Model Edward III



Gambar 2.13 Konsep model 1 (Intervening Sumberdaya dan disposisi)



Gambar 2.14 Konsep model 2 (Intervening disposisi)

Secara rinci penjelasan hubungan variabel adalah sebagai berikut.

1. Pada model Edward III. Variabel bebas komunikasi dan struktur birokrasi dengan variabel intervening sumberdaya dan disposisi terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF BG. Hubungan variabel komunikasi/struktur birokrasi bisa langsung ke variabel kinerja implementasi kebijakan SLF-BG atau melalui variabel sumberdaya dan disposisi. Hubungan variabel Komunikasi/Struktur birokrasi ke sumberdaya/disposisi satu arah dan hubungan sumberdaya ke disposisi dua arah/resiprocal.
2. Pada Konsep model 1. Variabel bebas komunikasi, struktur birokrasi, dan dukungan publik terhadap variabel intervening sumberdaya, disposisi dan variabel tergantung kinerja Implementasi Kebijakan SLF-BG. Hubungan variabel komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik bisa langsung ke variabel kinerja implementasi kebijakan SLF-BG atau hubungan tidak langsung melalui variabel sumberdaya dan disposisi. Hubungan sumberdaya ke disposisi dua arah/resiprocal.
3. Pada Konsep model 2. Variabel bebas komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap variabel intervening disposisi dan variabel tergantung kinerja implementasi kebijakan SLF BG. Hubungan variabel komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik bisa langsung ke variabel kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung atau melalui variabel disposisi.

Dari penjelasan hubungan variabel berdasarkan teori dan referensi studi terdahulu dapat disusun hubungan variabel, dasar teori dan referensi studi terdahulu sesuai Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Hubungan variabel, dasar teori dan referensi temuan studi terdahulu.

No	Hubungan antar Variabel	Dasar Teori	Studi Terdahulu
Pengaruh Langsung			
1.	Komunikasi → kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980) dan Mazmain & Sabatier (1983)	Winda P (2012), Misroji (2014), Lasma Lusiana P (2012)
2	Sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980), dan Mazmain & Sabatier (1983)	Winda P (2012), Misroji (2014), M Winda P (2012), Misroji (2014) Jufri (2008), Lasma Lusiana P (2012), Yustiono E (2014)
3	Struktur birokrasi → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980), dan Mazmain & Sabatier (1983)	Winda P (2012), Misroji (2014), Yustiono E (2014)
4	Dukungan publik → Kinerja Implementasi SLF	Mazmain & Sabatier (1983) dan Van Meter & Van Horn (1975)	-
5	Komunikasi → disposisi	Edward III (1980), dan Mazmain & Sabatier (1983)	-
6	Sumberdaya → disposisi	Edward III (1980), Van Meter & Van Horn (1975)	-
7	Disposisi → sumberdaya	Edward III (1980).	-
8	Struktur birokrasi → disposisi	Edward III (1980), Van Meter & Van Horn (1975)	-
9	Dukungan publik → disposisi	Mazmain & Sabatier (1983) dan Van Meter & Van Horn (1975)	-
10	Disposisi → Kinerja Implementasi SLF BG	Edward III (1980), Van Meter & Van Horn (1975)	Winda P (2012), Misroji (2014)
11	Komunikasi → Sumberdaya	Edward III (1980).	-
12	Struktur birokrasi → Sumberdaya	Edward III (1980)	-
13	Dukungan publik → Sumberdaya	-	-
Pengaruh Tak Langsung			
14	Komunikasi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980)	-
15	Komunikasi → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980)	-
16	Sumberdaya → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980), Van Meter & Van Horn (1975)	-
17	disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980)	-
18	Struktur birokrasi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980).	-
19	Struktur birokrasi → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980), Van Meter & Van Horn (1975)	-
20	Dukungan publik → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	-	-
21	Dukungan publik → disposisi → Kinerja	Van Meter & Van Horn	-

No	Hubungan antar Variabel	Dasar Teori	Studi Terdahulu
	Implementasi SLF	(1975)	
22	Komunikasi → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980)	-
23	Komunikasi → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980)	-
24	Struktur Birokrasi → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980)	-
25	Struktur Birokrasi → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	Edward III (1980)	-
26	Dukungan publik → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	-	-
27	Dukungan publik → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	-	-

Sumber :diolah, tahun 2015.

Sehubungan dengan enam variabel pada konsep model, rumusan hipotesis nol sebagai hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang diuji, disimpulkan dalam bentuk H_0 dan hipotesis kerja dengan H_1 . Hipotesis kerja (H_1 ...27) dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pengaruh Langsung.

- H1: komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
- H2: sumberdaya berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
- H3 : struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- H4 : dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- H5 : komunikasi berpengaruh signifikan terhadap disposisi
- H6 : sumberdaya berpengaruh signifikan terhadap disposisi
- H7 : disposisi berpengaruh signifikan terhadap sumberdaya
- H8 : struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap disposisi
- H9 : dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap disposisi
- H10: disposisi berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- H11: komunikasi berpengaruh signifikan terhadap sumberdaya.
- H12: struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap sumberdaya.
- H13: dukungan publik signifikan berpengaruh terhadap sumberdaya

2. Pengaruh Tak Lansung

- H14: secara simulan ada berpengaruh signifikan komunikasi terhadap sumberdaya dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

- H15: secara simultan ada pengaruh signifikan komunikasi terhadap disposisi dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H16: secara simultan ada pengaruh signifikan sumberdaya terhadap disposisi dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H17: secara simultan ada berpengaruh signifikan disposisi terhadap sumberdaya dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H18: secara simultan ada berpengaruh signifikan struktur birokrasi terhadap sumberdaya dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H19: secara simultan ada berpengaruh signifikan struktur birokrasi terhadap disposisi dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H20: secara simultan ada berpengaruh signifikan dukungan publik terhadap sumberdaya dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H21: secara simultan ada berpengaruh signifikan dukungan publik terhadap disposisi dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H22: secara simultan ada berpengaruh signifikan komunikasi terhadap sumberdaya, disposisi dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H23: secara simultan ada berpengaruh signifikan komunikasi terhadap disposisi, sumberdaya dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H24: secara simultan ada berpengaruh signifikan struktur birokrasi terhadap sumberdaya, disposisi dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H25: secara simultan ada berpengaruh signifikan struktur birokrasi terhadap disposisi, sumberdaya dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H26: secara simultan ada berpengaruh signifikan dukungan publik terhadap sumberdaya, disposisi dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- H27: secara simultan ada berpengaruh signifikan dukungan publik terhadap disposisi, sumberdaya dan kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian.

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei yaitu dengan mengambil sampel dari suatu populasi. Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuesioner baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Secara philosophy positivistik penelitian ini bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realita. Ini berarti, apa yang disebut sebagai positif bertentangan dengan apa yang hanya ada di dalam angan-angan (impian), atau terdiri dari apa yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Dapat disimpulkan pengertian positivisme secara terminologis berarti merupakan suatu paham yang dalam "pencapaian kebenaran"-nya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu, sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Asas positivisme logis yang digunakan dalam penelitian ini adalah empirisme, positivisme, Logika, dan Kritik Ilmu. Positivisme pada hakikatnya juga adalah ajaran sosial, yang menganggap mungkin bahwa masyarakat yang lebih baik itu dapat dibentuk.

Penelitian ini menggunakan pola eksplanasi atau eksplanatory yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti dan hubungan serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Purwanto, E.A (2011:59) menerangkan bahwa penelitian survei sebenarnya digunakan sebagai suatu teknik untuk menggambarkan karakteristik atas dasar variabel-variabel tertentu dalam banyak kasus. Data yang diperoleh untuk menggambarkan karakter berbagai kasus berdasarkan berbagai variabel tersebut disajikan dalam suatu matriks data.

Karena tujuan survai adalah untuk menggambarkan karakteristik dari sejumlah besar populasi, maka sampel menjadi isu yang penting dari survai tersebut. Hal ini karena sampel harus dapat mewakili atau mencerminkan populasi.

Menurut pola atau sifatnya, penelitian ini cenderung merupakan penelitian kasus dan penelitian korelasi. Hal ini dapat dilihat dari tujuan penelitian yaitu menguji pengaruh atau korelasi antara variabel penelitian dalam kasus implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dalam peningkatan kinerja implementasi.

Jenis penelitian ini juga meneliti dari sudut pandang desain atau rancangan penelitian. Desain atau rancangan penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yaitu perencanaan terinci yang merupakan kerangka untuk mengkonseptualisasikan struktur relasi variabel-variabel suatu kajian penelitian yang digunakan sebagai pedoman studi penelitian yang mengarah pada tujuan dari penelitian tersebut (Suchman dalam Nazir, 2005 : 84, Kerlinger, 1993 : 532).

Menurut pendapat Uma Sekaran (1999:36), rancangan penelitian secara umum dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu penelitian eksploratif (*ekplorative research*), penelitian deskriptif (*descriptive research*), dan penelitian penjelasan (*explanatory research*). Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menguraikan sifat-sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu, sedangkan penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan-hubungan antara satu atau beberapa variabel mempengaruhi variabel lainnya. Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian penjelasan (*eksplanatory research*) yang bermaksud menjelaskan hubungan kausal antara variabel dalam pendekatan kuantitatif.

Pendapat Singarimbun (1989), bahwa penelitian eksplanatori (*Explanatory research*) adalah suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian penjelasan

dilakukan dengan survei, menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh responden.

Disamping pembuktian hipotesis dengan menggunakan analisis statistik untuk mencari pengaruh dan tidak pengaruh hubungan antara variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperluas, memperlemah dan menggugurkan data kuantitatif yang diperoleh pada tahap awal. (Sugiono, 2014: 420)

Berdasarkan pendapat Uma Sekaran, Singarimbun dan Sugiono tersebut, studi ini memberikan penjelasan pengaruh variabel komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap sumberdaya, disposisi dalam meningkatkan kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1 Fokus Penelitian

Strauss dan Corbin (1990) mengatakan bahwa fokus penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian dan menyeleksi jenis data yang diperlukan atau yang tidak diperlukan karena dianggap tidak relevan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini mengarah pada bagaimana peningkatan kinerja implementasi kebijakan SLF bangunan gedung.

Menurut Moleong (2007:94) ada dua maksud yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar atau informasi yang diperoleh dilapangan. Jadi dengan penetapan fokus penelitian yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang dikumpulkan, data yang diperlukan, dan data yang tidak diperlukan.

Fokus penelitian pada kajian ini pada faktor Internal Birokrasi yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya, disposisi; dan faktor Eksternal

Birokrasi adalah dukungan publik dengan fokus pada kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian menurut Yuswadi dalam Bungin (2005:120) merupakan tempat penelitian dan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan sertamenjawab pertanyaan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Seksi Penataan Ruang bersama Penataan Bangunan dan Lingkungan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Untuk penelitian dimasyarakat dilakukan pada pemilik bangunan gedung yangmemiliki IMB fungsi usaha, kontraktor pelaksana pembangunan gedung, konsultan pengkaji teknis bangunan gedung, dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Identifikasi Variabel

Variabel adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai atau memiliki bermacam-macam nilai (Kerlinger, 1986:49; Singarimbun dan Effendi (1995:42), atau sebagai segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian.Sesuai dengan kerangka konseptual,variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- 1) *Independent variable* untuk model Emprisis 2 adalah komunikasi (X1),sumberdaya (X2), struktur birokrasi (X3), dandukunganpublik (X4). Model Edward III dan Empiris 1adalahkomunikasi(X1), struktur birokrasi (X2),dan dukunganpublik (X3).
- 2) *Dependent variable* adalah kinerja Implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Y1/Y3).

- 3) *Intervening variable* adalah disposisi (Y2) untuk model 2 sedangkan Model Edward III dan model Empiris 1 adalah variable sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2).

3.3.2 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian

Definisi operasional ini, dibuat untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca, atau pengguna hasil penelitian” (Hadi, 1993:151). Menurut Widoyoko (2012), definisi operasional variabel adalah pernyataan yang sangat jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman penafsiran karena dapat diobservasi dan dibuktikan perilakunya Adapun definisi operasional dan indikator penelitian dari masing-masing variabel diilustrasikan pada Gambar 3.1 Model Variabel Penelitian dan diuraikan sebagai berikut.

a. Variabel Komunikasi (X1)

Definisi operasional indikator variabel komunikasi menurut Edwards III adalah sebagai berikut.

- 1) Transmisi (*transmission*) pesan ke personal yang tepat. Kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Kejelasan (*clarity*) pesan. Kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, dan substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Konsistensi (*consistency*) pesan. Kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Variabel Sumberdaya (X2 / Y1)

Definisi operasional indikator sumberdaya menurut Edwards III (1980: 54-78), adalah sebagai berikut.

- 1) Staf/personel. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- 2) Anggaran. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas dan juga akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
- 3) Informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan informasi kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasikan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut.
- 4) Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.
- 5) Fasilitas peralatan. Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

c. Variabel Struktur Birokrasi (X3/X2)

Definisi operasional indikator struktur birokrasi menurut Edward III (1980), adalah sebagai berikut.

- 1) *Fragmentasi/fragmentation*. Penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan pada beberapa unit organisasi. Fragmentasi terutama berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.
- 2) *koordinasi/coordination*. Suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mensinkronkan atau menyelaraskan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.
- 3) *Standard Operating Procedure (SOP)*. Respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

d. Variabel Dukungan Publik (X4/X3)

Definisi operasional indikator variabel dukungan publik menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) adalah sebagai berikut.

- 1) *Insentif Kebijakan*. Kebijakan yang memberikan *insentif* biasanya mudah mendapatkan dukungan publik seperti pengurusan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang tidak dikenakan biaya.
- 2) *Disinsentif Kebijakan*. Kebijakan yang bersifat *disinsentif* seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik. Persyaratan SLF bangunan umum untuk pemohon perlu adanya biaya yang dikeluarkan untuk konsultan pengawas bangunan dan penyiapan dokumen seperti *as built drawing* dan lain-lain.

e. Variabel Disposisi (Y1/Y2)

Definisi operasional indikator variabel disposisi menurut Edwards III (1980: 90-114) adalah sebagai berikut.

- 1) Kecendrungan/keinginan/komitmen. Kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan
- 2) Pengangkatan personel. Staf pelaksana yang seharusnya mengimplementasikan kebijakan ternyata tidak mau mengimplementasikan kebijakan sesuai perintah yang sebenarnya. Ditambah lagi, posisi staf tersebut ternyata tidak bisa / sulit digantikan.
- 3) Insentif personel. Pemberian insentif tambahan untuk memberikan motivasi bagi implementor dalam melaksanakan tugasnya.

f. Variabel Kinerja Implementasi Kebijakan SLF Bangunan Gedung (Y2/Y3)

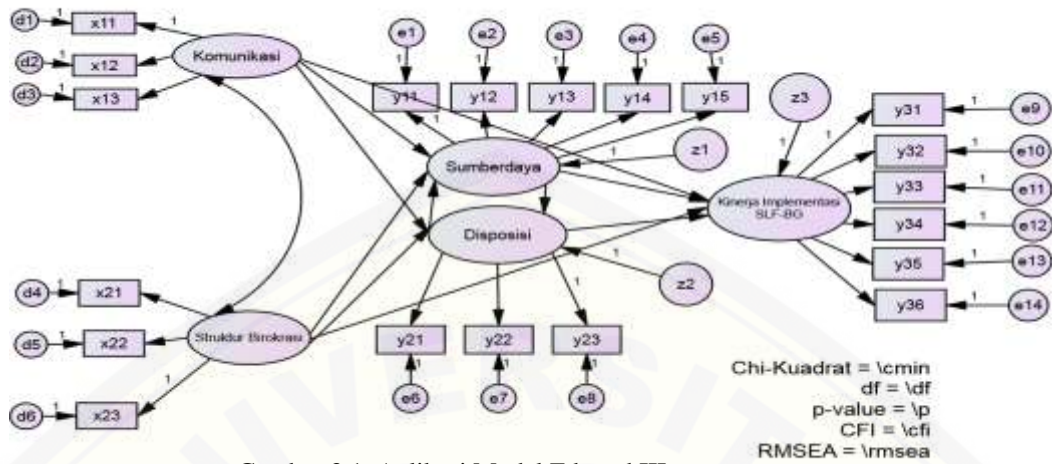
Definisi operasional indikator variabel dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan menurut William N. Dunn (1999 :609) dan Winarno (2002) sebagai berikut.

- 1) Efektivitas. Dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna dan selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai.
- 2) Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, yang merupakan hubungan efektivitas dan usaha yang terakhir diukur dari ongkos monitor. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.
- 3) Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dapat mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan

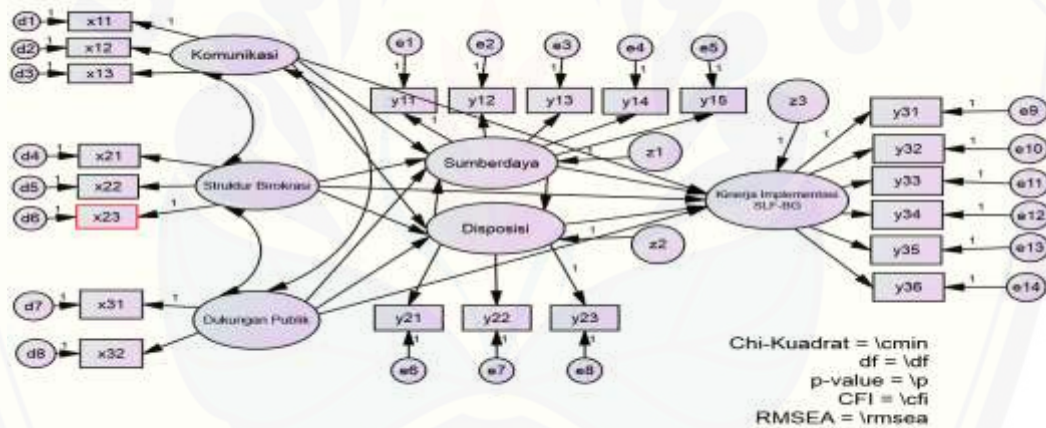
- (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- 4) Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equaty*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi, akibat, dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha yang secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.
 - 5) Responsivitas dalam kebijakan publik diartikan respon dari suatu aktivitas. Artinya, tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang terjadi bila kebijakan akan dilaksanakan. Selain itu juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan bisa dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.
 - 6) Ketepatan merujuk pada nilai atau tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk menjadikan rekomendasi apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansi, karena kriteria ini substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian

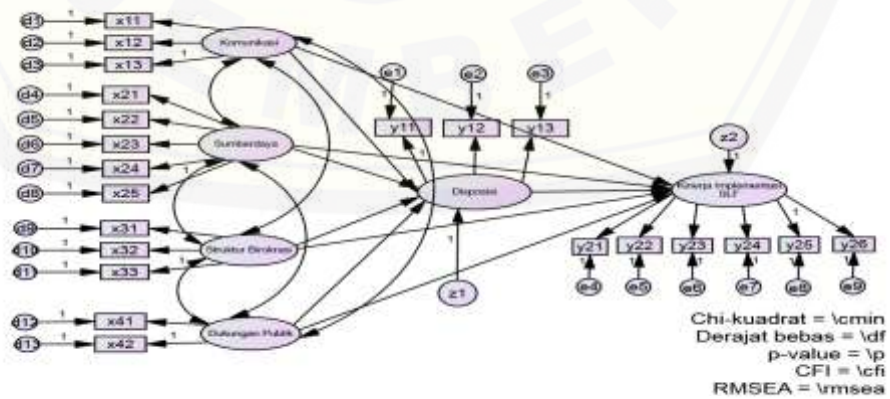
No	Variabel	Indikator	skala
I.	Independen 1. Komunikasi (X1)	1. Kebijakan SLF disampaikan kepada semua stakeholder. (<i>transmission</i>) 2. Kebijakan SLF dapat diterima dengan jelas (<i>Clarity</i>) kepada semua stakeholder 3. Kebijakan SLF konsistensi (<i>Consistency</i>) diterapkan untuk semua BG	Ordinal
	2. Struktur Birokrasi (X3/X2)	1. Lembaga Pelaksanaan SLF satu sesuai tugas dan fungsi. (<i>fragmentation</i>) 2. Pelaksanaan SLF terkoordinasi dalam mencapai tujuan 3. SOP yang jelas dalam Implementasi	Ordinal
	3. Dukungan Publik (X4/X3)	1. Pelaksanaan SLF tanpa biaya (Insentif) 2. Persyaratan pelaksanaan SLF yang menghambat. (Disinsentif)	Ordinal
II	Intervening : 1. Sumberdaya (X2/Y1)	1. Sumberdaya Manusia (SDM) yang profesional 2. Anggaran yang cukup 3. Peralatan yang memadai . 4. Informasi/data yang relevan 5. Kewenangan dalam mengambil keputusan sendiri	Ordinal
	2. Disposisi (Y1/Y2)	1. Komitmen melaksanakan tujuan kebijakan SLF 2. Mutasi personelse sesuai dengan kompetensi 3. Keberhasilan kebijakan SLF dengan Insentif personel	Ordinal
III	dependent : Kinerja Implementasi Kebijakan SLF BG (Y2/Y3)	1. Hasil Implementasi Kebijakan SLF tetapsasaran/ sesuai tujuan/ Efektifitas. 2. Usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Efisiensi) 3. Pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah (Kecukupan) 4. Pemerataan manfaat pada seluruh pemohon SLF BG 5. Hasil kebijakan implementasi SLF memuaskan pengguna bangunan gedung (Responsivitas/tanggap) 6. Hasil/tujuan yang diinginkan berguna atau bernilai. (Ketepatan)	Ordinal



Gambar 3.1 Aplikasi Model Edward III



Gambar 3.2 Model Empiris 1/Aplikasi Model Edward III (ntervening Sumberdaya dan Disposisi)



Gambar 3.3 Model Empiris 2/Aplikasi Model Van Meter

Keterangan Gambar : Indikator Variabel

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini berupa kuesioner. Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dapat diukur dan dapat dipercaya, instrumen penelitian perlu diuji terlebih dahulu. Untuk itu perlu dilakukan uji *validitas* dan *reliabilitas*. Jika *validitas* dan *reliabilitas* tidak diketahui, akibatnya akan tidak baik dalam memberikan kesimpulan ataupun alasan terhadap hubungan antar variabel. Uji tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Pengujian Validitas

Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa akurat suatu alat tes melakukan fungsi ukurannya. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang diteliti. Dengan menggunakan instrumen validitasnya, otomatis hasil penelitian menjadi valid.

Apabila validitas yang didapatkan semakin tinggi, tes tersebut akan semakin mengenai sasaran dan semakin menunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkan. Pengujian validitas ini dilakukan dengan internal validity, dan kriteria yang dipakai berasal dari dalam alat tes itu sendiri dan masing-masing item tiap variabel dikorelasi dengan nilai total yang diperoleh dari koefisien korelasi *product moment*. Apabila koefisien korelasi tidak signifikan, item yang bersangkutan gugur. Kriteria setiap item atau butir pertanyaan adalah jika nilai sig.(*probability correlation pearson*) di bawah nilai α berarti butir pertanyaan tersebut valid, dan jika nilai sig.(*probability correlation pearson*) di atas nilai α , berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid.

Cara pengujian validitas instrumen adalah menghitung korelasi antara masing-masing item pertanyaan dengan menggunakan rumus teknik korelasi *product moment*. (Rochaety, 2007: 49) berikut ini.

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan: $\sum X$: Skor item instrumen yang digunakan. $\sum Y$: Skor total instrumen.

$\sum xy$: Koefisien Korelasi Pearson antara item instrumen yang akandigunakan dengan variabel yang bersangkutan.
n : Jumlah reponden

Kriteria pengambilan keputusan untuk uji validitas adalah sebagai berikut.

- 1) Apabila nilai (koefisien korelasi) r hitung > r tabel, maka data tersebut dinyatakan valid.
- 2) Apabila nilai (koefisien korelasi) r hitung < r tabel, maka data tersebut dinyatakan tidak valid.
- 3) Apabila nilai sig (signifikansi korelasi) < 0,05 (taraf kesalahan 5 %), maka data tersebut dikatakan valid.
- 4) Apabila nilai sig (signifikansi korelasi) > 0,05 (taraf kesalahan 5%), maka data tersebut dikatakan tidak valid.

b. Pengujian Reliabilitas (Uji Keandalan)

Suatu alat pengukuran dikatakan reliabel apabila mendapatkan hasil yang tetap sama dari gejala pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan pada waktu yang berbeda. *Reliabilitas* adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun dan Efendi, 1989:140). Sementara itu, Sugiono (2000:97) berpendapat bahwa instrumen dikatakan reliabel apabila dipergunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas digunakan juga untuk menguji keajegan hasil pengukuran kuesioner yang erat hubungannya dengan masalah kepercayaan. Suatu taraf tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan bila tes tersebut memberikan hasil yang tepat (ajeg).

Pengujian reliabilitas kuesioner digunakan *Cronbach's Alpha* dengan rumus (Rochaety, 2007:56) berikut.

$$\alpha = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Keterangan:

α = reliabilitas instrumen. k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir σ_1^2 = varians total

$$\text{Atau : } \alpha = \frac{kr}{1 + (k-1)r}$$

Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data (Arikunto, 2006:178). Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,5 (Santoso, 2001:280).

3.5 Analisis Statistik

Untuk mempermudah perolehan data yang diinginkan, dapat dilakukan pengukuran dengan skala likert untuk memberikan nilai terhadap jawaban responden. Menurut Sugiyono, (2007:107) "Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial". Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden.

Pengukuran instrumen yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan pengisian kuesioner yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Masing-masing pertanyaan mempunyai skor atau nilai yang berbeda-beda, dan responden diminta mengisidafar pertanyaan tersebut dengan cara memberi tanda silang (X) pada lembar jawaban kuesioner.

Kriteria penilaian analisis kuantitatif adalah sebagai berikut.

1. Jika responden menjawab SJ (SangatJelas), SD (sangat didukung), SS (sangat sesuai) dan SP (sangat Puas) diberikan nilai 5
2. Jika responden menjawab J (Jelas), D (didukung), S (sesuai) dan P (Puas) diberikannilai 4
3. Jika responden menjawab N (Netral/ tidak tahu/tidak dapat menentukan pilihan) diberi nilai 3
4. Jika responden menjawab TJ (TidakJelas), TD (tidak didukung), TS (tidak sesuai) dan TS (tidak puas) diberi nilai 2
5. Jika responden menjawab STJ (SangatTidakJelas), STD (sangat tidak didukung), STS (sangat tidak sesuai) dan STP (Sangat tidak puas)diberi nilai 1

3.6 Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis akan digunakan beberapa perhitungan statistik antara lain sebagai berikut.

a. Perhitungan Koefisien Korelasi Ganda (R)

Menurut Priyatno (2009 : 78), koefisien ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

Koefisien korelasi dengan simbol “R”

$$R = \frac{\sqrt{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y}}{\sum y^2}$$

Sumber Hadi (2001 : 160).

Berikut adalah tabel koefisien korelasi untuk melihat seberapa kuat pengaruh antarvariabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R

No	Interval Koefisien	Tingkat hubungan
1	0,800-1,000	Sangat tinggi
2	0,600-0,799	Tinggi
3	0,400 – 0,599	Cukup tinggi
4	0,200 – 0,399	Rendah
5	0,000 – 0,199	Sangat rendah

Sumber : Arikunto (2002 : 77), Tahun 2015

b. Perhitungan Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Priyatno (2009:79), analisis determinasi ini digunakan untuk mengetahui besarnya variasi persentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai R², maka semakin besar pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan dinyatakan dengan rumus Supranto (2004 : 59) sebagai berikut.

$$R^2 = \frac{SSR}{TotalSS}$$

Keterangan :

SSR = Sum Of Squares Regression

Total SS = Total Sum of Squares

c. Uji F (uji Simultan / serentak)

Pengujian serentak adalah untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel tidak bebas. Adapun prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan hipotesis statistik yang digunakan :

$$H_0 : b_1 = 0 ; H_a : b_1 \neq 0$$

2. *Level of significance* (α) : 0,05 dengan $df = (n-k-1)$

3. Nilai statistik F hitung rumus Rangkuti (2007:165) sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{1 - R^2 / n - k - 1}$$

Keterangan :

R² = koefisien Kolerasi berganda ; k = Jumlah variabel independen ; n = Banyak sampel

4. Kriteria penolakan dan penerimaan H₀ dan H_a adalah :

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$: maka H₀ diterima dan H_a ditolak

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$: maka H₀ ditolak dan H_a diterima

d. Uji t (Uji Parsial / Individual)

Pengujian parsial untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel bebas masing-masing mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel tidak bebas. Adapun prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan hipotesis statistik yang digunakan :

$$H_0 : b_1 = 0$$

$$H_a : b_1 \neq 0$$

2. *Level of significance* (α) : 0,05 dengan $df = (n-k-1)$

3. Nilai statistik T hitung rumus Rangkuti (2007 : 165) sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{b}{Sb}$$

Keterangan :

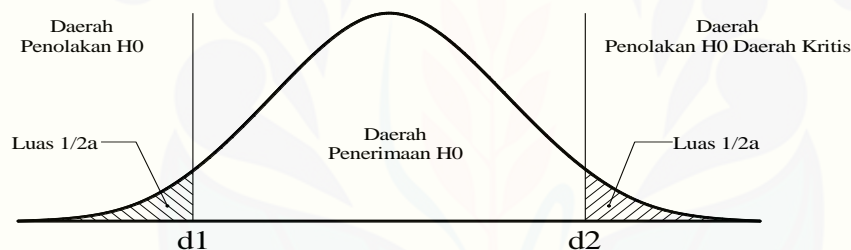
b : Parameter Estimasi ; Sb : *Standard Error*

4. Criteria penolakan dan penerimaan H_0 dan H_a adalah :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$: maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$: maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Dalam menentukan penerimaan dan penolakan hipotesis, maka hipotesis alternatif (H_a) diubah menjadi hipotesis nol (H_0). Untuk keperluan ini dicontohkan penerapannya pada sebuah populasi berdistribusi normal yang digambarkan dengan grafik sebagai berikut.



Hal tersebut dengan asumsi bahwa populasi tergambar dalam kurva normal, jika menentukan taraf kepercayaan 95% dengan pengetesan 2 ekor, maka akan terdapat dua daerah kritis, yaitu diekor kanan dan diekor kiri kurva. Daerah kritis merupakan daerah penolakan hipotesis (hipotesis nihil) dan disebut daerah signifikansi. Sebaliknya, daerah yang terletak diantara dua daerah kritis, yang tidak diarsir, dinamakan daerah penerimaan hipotesis atau daerah non-signifikansi. (Suharsimi Arikonto 2002 : 69-70).

3.7 Alat Analisis Data

Dalam proses pengolahan data penelitian, alat analisis yang digunakan mengacu pada definisi (Hair et al., 2010) dan (Solimun, 2002) terutama tentang Analisis *multivariate* dan *Structural Equation Modeling* (SEM). Hal ini karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur berbagai

hubungan pengaruh antara beberapa variabel dependen dan variabel independen. Untuk itu, analisis *multivariate* yang sesuai adalah multi hubungan pada beberapa variabel dependen dengan variabel independen, yaitu analisis Model Struktural, Analisis Path, dan *Struktural Equation Modeling*.

Menurut Bentler (1980) dan dalam Ghazali (2006), SEM telah menjadi suatu “keharusan” untuk penelitian non eksperimental yang metode untuk pengujian teori belum dikembangkan secara menyeluruh, sehingga tidak mengherankan jika terdapat banyak sekali *software* yang menawarkan SEM.

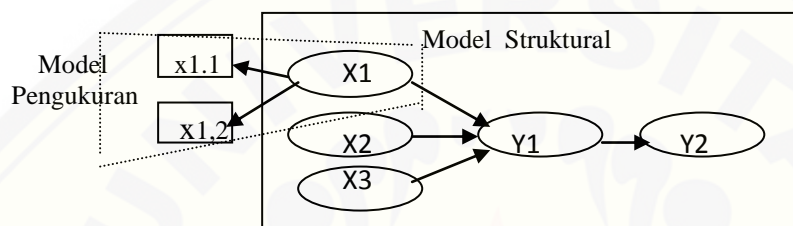
SEM dapat melakukan sejumlah teknik analisis faktor, analisis regresi, dan analisis jalur. Pemeriksaan validitas dan realibilitas instrumen sebagaimana *confirmatory factor analysis* atau CFA masing-masing variabel laten dalam model pengukuran diukur oleh sejumlah ukuran atau indikator. SEM dapat melakukan uji validitas dan realibilitas untuk semua ukuran/indikator terhadap masing-masing variabel latennya sebagaimana dilakukan oleh CFA. Item-item ukuran yang tidak valid ataupun tidak realibel akan disarankan oleh SEM untuk dikeluarkan dari analisis, atau SEM akan memberikan saran lainnya seperti merelasikan suatu indikator ke variabel laten lainnya.

SEM digunakan juga untuk menguji hubungan kausalitas (depensi secara statistik) antar variabel-variabel indepen terhadap variabel dependen. Berbeda dengan regresi, dalam SEM variabel-variabel yang terlibat dalam hubungan kausalitas bias merupakan variabel-variabel laten. Selain itu, SEM juga mengakomodasi keberadaan variabel intervening yang menjadikan sebuah variabel dependen menjadi variabel independen dalam relasi selanjutnya. Pengujian terhadap relasi kompleks ini dilakukan dalam sekali uji.

SEM mengakomodasi kemampuan analisis jalur dengan menampilkan kemampuan analisis jalur dan diagram jalur berupa skema statistik (*pictorial diagram*) untuk memudahkan analisis dengan tampilan visual. Diagram yang ditampilkan menggambarkan relasi masing-masing variabel laten terhadap masing-masing indikator pengukurnya dan sekaligus relasi antar variabel laten.

SEM menganalisis relasi variabel-variabel (indikator) terhadap variabel laten. Model relasi antara masing-masing indikator terhadap variabel laten

dikenal sebagai model pengukuran. SEM sekaligus menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel intervening dan variabel dependen yang dikenal sebagai model Struktural lihat pada gambar 3.4. Analisis terhadap relasi antar variabel laten (model struktural) yang pada umumnya yang merupakan hubungan kausalitas adalah analisis berdasarkan analisis jalur atau analisis regresi. Analisis terhadap relasi antara masing-masing variabel laten dengan masing-masing sejumlah indikatornya (model pengukuran) adalah didasarkan atas analisis faktor.



Gambar 3.4 Relasi Antar variabel Model Pengukuran dalam Model Struktural.

Analisis SEM fokus pada hubungan antar variabel laten atau analisis variabel laten (*Latent Variable Analysis*) basis analisisnya dan interpretasinya menggunakan pendekatan analisis regresi linier dan fokus pada hubungan strukturalnya. Analisis ini dinamakan analisis relasi struktural linier (*Linier Structural Relationship / LISREL*). Setiap variabel laten selalu diukur oleh indikator-indikator yang merupakan variabel observed, maka SEM memerlukan peran analisis faktor untuk analisis hubungan antara variabel laten dengan indikatornya.

3.7.1 Struktural Equation Model – AMOS

AMOS adalah kependekan dari *Analysis of moment Structure*. Paket aplikasi berplatform windows ini dikembangkan oleh James Arbuckle dari *departemen of psychology*, Temple University, Philadelphia. Amos versi 5 tahun 2003 (versi terakhir dari AMOS adalah versi 21 yang menambahkan fungsionalitas sederhana untuk mengestimasi parameter yang didefinisikan sendiri oleh pengguna/user-defined estimand) terdiri atas dua modul utama, yaitu

amos graphics dan *amos basics* (kini bernama program editor). *Amos graphics* menyediakan GUI yang memungkinkan pengguna untuk mengambarkan model pada layar yang tersedia. Semua aspek analisis juga dikendalikan melalui GUI ini. Sekumpulan tool tersedia untuk menggambar dan memodifikasi elemen grafik dari diagram skema/diagram jalur. *Amos graphics* juga dapat mencegah kesalahan dalam menentukan spesifikasi model.

Amos Basic bekerja dalam modul *batch*. Artinya, model dan data ditentukan dalam sintaks Amos berbasis teks sebelum seluruh statemen dieksekusi untuk menjalankan analisis. *Amos Basic* didukung oleh interpreter bahasa *Microsoft visual basic*, sehingga memungkinkan untuk menulis, mengkonfirmasi dan men-debug skrip *visual basic* untuk mengontrol atau memodifikasi fungsionalitas *Amos Graphics*.

Analisis SEM merupakan gabungan dari analisis regresi (analisis varians), analisis jalur dan analisis faktor. SEM dapat digunakan untuk memeriksa validitas dan reliabilitas instrumen sebagaimana analisis faktor konfirmatori (*confirmatory for analysis* atau CFA) untuk menguji hubungan dependensi atau kausalitas antar variabel sebagaimana analisis regresi dan analisis jalur. SEM juga menampilkan model yang dianalisis secara visual (diagram jalur), juga mengevaluasi model yang diajukan sekaligus memberikan saran-saran perbaikan model berdasarkan pertimbangan statistik.

SEM menggunakan matriks untuk mempresentasikan persamaan untuk model struktural (*structural equation*) dan persamaan untuk model pengukuran (*measurement equation*).

a. Persamaan struktural

Persamaan struktural dalam SEM secara umum adalah :

$$D = \gamma \xi + \beta \eta + \zeta$$

dengan keterangan: γ (gamma) = matrik relasi (loading) dari konstruk-eksogenus (ξ) menuju konstruk- endogenus (η). Elemen-elemen dari matrik γ adalah γ_{jk} ($j = 1, 2, \dots, m$; n adalah banyaknya konstruk endogenus, dan m adalah banyaknya konstruk eksogenus), β (beta) adalah matrik relasi loading dari konstruk- endogenus η ke

konstruk-konstruendogenus lainnya η . Elemen-elemen dari matrik β adalah β_{jj} ($j = 1, 2, \dots, n$ dimana n adalah banyak konstruendogenus)

Persamaan model struktural dalam penelitian ini adalah :

Konstru endogenus	konstruk eksogenus	kons endogenus	error
Y_1	$= \gamma_{11} X_1 + \gamma_{12} X_2$	$+ \gamma_{13} X_3$	$+ \zeta$
Y_2	$= \gamma_{21} X_1 + \gamma_{22} X_2$	$+ \gamma_{23} X_3 + \beta_{21} Y_1$	$+ \zeta$
Y_3	$=$	$+ \beta_{31} Y_1 + \beta_{32} Y_2$	$+ \zeta$

b. Persamaan Pengukuran

Persamaan model pengukuran terdapat 2 macam, yaitu indikator eksogenus (X) dan indikator endogenus (Y).

Persamaan pengukuran indikator eksogenus adalah :

$$X = \lambda \xi + \delta$$

Persamaan pengukuran indikator endogenus adalah :

$$\dot{Y} = \lambda \eta + \varepsilon$$

3.7.2 Model Rekursiv dan Nonrekursiv

Terdapat 2 jenis model dasar SEM (*path model*), yaitu model rekursiv (*recursive*) dan model nonrekursiv (*nonrecursive*). Model rekursiv mempunyai 2 ciri utama, yaitu:

- Tidak ada korelasi antar error
- Semua hubungan kausalitas bersifat satu arah atau *unidirectional* ($y_1 \rightarrow y_2$)

Sedangkan model nonrekursiv adalah model yang mempunyai *feedback loop* atau hubungan resipokal ($y_1 \leftrightarrow y_2$) atau terdapat korelasi antar error.

3.7.3 Analisis Kualitatif

Pada metode kualitatif sumber data yang dipilih untuk dilakukan wawancara mendalam (*indept interview*) dipilih secara purposive (siapa yang paling mengetahui tentang apa yang ditanyakan) atau dalam penelitian ini informan yang dipakai adalah implementor yang terlibat dalam pelaksanaan SLF mulai kepala

Dinas, kepala bidang, kepala seksi, staf dan publik mulai TABG, kontraktor, konsultan dan pemilik bangunan gedung ber-IMB.(Sugiono, 2014: 420)

Analisis data kualitatif dan pengujian kredibilitas data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Hasil analisis kualitatif diharapkan diperoleh data kualitatif yang kredibel untuk melengkapi dan memperkuat data kuantitatif.

3.8 Penyelesaian Struktural Equation Model dengan AMOS

3.8.1 Ukuran Sampel

Heir et al (2006) memberi petunjuk yang didasarkan atas kompleksitas model dan karakteristik model pengukuran sebagai berikut.

1. Jika model mengandung 5 buah konstruk atau kurang, yang masing masingkonstruk diukur dari 3 item indikator yang mempunyai komunalitas cukup besar (0,6 atau lebih), maka ukuran sampel yang diperlukan cukup antara 100 hingga 150.
2. Jika terdapat komunalitas yang sedang (0,45-0,55) atau model mengandung konstruk yang diukur oleh kurang dari 3 item indikator, maka ukuran sampel yang diperlukan lebih dari 200.
3. Jika komunalitas yang dihasilkan rendah,atau model mengandung banyak konstruks yang *underidentified*, maka ukuran sampel yang diperlukan sekurang-kurangnya 300.
4. Jika model mengandung lebih dari 6 konstruk yang diantaranya ada yang diukur menggunakan kurang dari 3 indikator, dan terdapat komuniliats yang rendah, maka ukuran sampel yang diperlukan lebih dari 500.

3.8.2 Tahapan Analisis SEM

Tahapan analisis SEM menurut Dachlan Usman (2014:203) secara lebih rinci dengan tahapan sebagai berikut.

a. Pengembangan dan Analisis Model pengukuran

1) Menetapkan model pengukuran awal:

- a) mengidentifikasi setiap konstruk laten yang akan dimasukkan kedalam model penelitian;

- b) membuat operasional konstruk;
- c) menentukan model pengukuran
- 2) Merancang studi empiris:
 - a) menetapkan tipe matrik sebagai input analisis;
 - b) menetapkan ukuran sampel;
 - c) menetapkan perlakuan terhadap data yang tidak lengkap (*missing data*);
 - d) menetapkan struktur model;
 - e) menetapkan teknik estimasi;
 - f) menetapkan program aplikasi komputer yang akan digunakan.
- 3) Memeriksa data
- 4) Mengevaluasi model
 - a) Uji validitas konstruk;
 - b) menilai fit model (*goodness of fit*)
- 5) Memperbaiki model pengukuran jika diperlukan
- b. Pengembangan dan Analisis Model Struktural
 - 1) Menetapkan model struktural
 - 2) Mengevaluasi model
 - 3) Memperbaiki model jika diperlukan
 - 4) Uji hipotesis relasi struktural
- c. Interpretasi hasil analisis

Interpretasi hasil analisis adalah menafsirkan hasil yang diperoleh dari analisis SEM terhadap realitas dan konsekuensinya bagi ilmu pengetahuan. Tahapan ini terdiri atas berikut ini.

- 1) Membaca angka-angka (statistik) yang diperoleh dari hasil analisis, dan menafsirkannya menggunakan kajian ilmu statistika.
- 2) Menafsirkan koefisien-koefisien beserta tafsiran statistiknya dikaitkan dengan model penelitian (relasi antar variable) yang diajukan.
- 3) Menafsirkan implikasi teoritis atas hasil yang diperoleh.
- 4) Menafsirkan implikasi praktis atas hasil yang diperoleh
- 5) Membuat rekomendasi teoritis dengan mendasarkan pada implikasi teoritis.
- 6) Membuat rekomendasi praktis dengan mendasarkan pada implikasi praktis.

3.9 Populasi dan Rancangan Teknik Pengambilan Sampel.

3.9.1 Populasi dan Sampel Data Kuantitatif

Populasi berdasarkan pendapat Sugiono (2007:80-82) adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakter tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sekaran (2003:121) populasi adalah mengacu keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Sementara itu, menurut Singarinbum dan Effendi (1986:108) bahwa populasi sebagai jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah internal birokrasi yaitu individu atau pegawai di SKPD Penyelenggara Bangunan Gedung dan eksternal birokrasi yaitu pemilik bangunan gedung ber-IMB serta pegawai perencana dan pelaksana bangunan gedung.

Berkaitan dengan populasi di atas, pengambilan sampel menggunakan metode *propability sampling*, dengan pertimbangan hal-hal berikut.

- a. Populasi terpisah dan mengelompok pada cluster masing-masing berdasarkan karakternya.
- b. Jumlah besaran unit cluster yang mewakili ditentukan kemudian, setelah diperoleh besaran sampel yang ada.
- c. Cluster memiliki karakter yang tidak bisa dikelompokkan dalam cluster yang besar, sehingga secara riil cluster memiliki sifat-sifat yang berbeda satu dengan lainnya.
- d. Peneliti memahami sifat dan karakter cluster sehingga memudahkan dalam menentukan pilihan terhadap responden yang memahami persoalan yang diteliti, yaitu responden yang terlibat dalam proses penyelenggaraan sertifikat laik fungsi bangunan gedung mulai dari birokrasi sampai dengan masyarakat yang mengurus perizinan bangunan gedung.
- e. Adanya kecendrungan sifat cluster yang tidak homogen. Oleh karena itu responden diambil secara *propotionate stratifield random sampling* dan berstrata secara proporsional dari cluster internal birokrasi SKPD penyelenggara bangunan gedung yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan

Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan, serta Cluster dukungan publik/eksternal birokrasi yaitu Pelaksana BG, Konsultan dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) serta pemilik BG yang ber-IMB fungsi usaha.

Pendapat Gay dan Diehl (1992), serta Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (1999) tentang pedoman penentuan jumlah sampel yang representatif dinyatakan bahwa : 1) ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian; 2) jika sampel dipecah ke dalam subsampel (misalnya pria/wanita, junior/senior dan sebagainya) ukuran sampel minimal 30 untuk tiap kategori adalah tepat; 3) dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi logistik), ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian; dan 4) untuk penelitian eksperimental sederhana dengan pengendalian eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses bisa dengan ukuran sampel antara 10 sampai dengan 20 anggota. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan metode probability sampling dan beberapa pendapat tentang pedoman penentuan jumlah minimal sampel representatif diatas, dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut.

Dari pengertian populasi diatas, populasi studi adalah jumlah pegawai pada birokrasi SKPD pelaksana BG (Dinas PU dan BPMPP) dan pengawas BG (Inspektorat), publik/masyarakat yaitu Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Perencana/Konsultan dan Pelaksana/Kontraktor BG dan Pemilik IMB BG fungsi usaha dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Populasi Studi Penelitian

No	Nama	Populasi	Jumlah
1	Birokrasi pelaksana dan pengawas bangunan gedung	PNS Bidang BM, Perkim, CK dan Pengairan Dinas PU Kota Probolinggo	33
		APIP Inspektorat Kota Probolinggo	20
		Bidang Pelayanan Perijinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	15
2	Dukungan Publik	IMB BG fungsi usaha Tahun 2014	84
		Tim Ahli Bangunan Gedung (Masyarakat Ahli), Pelaksana dan Perencana BG	30
		Jumlah	182

Sumber : Inspektorat, BPMPP dan PU, Tahun 2015

Populasi pada dukungan publik atau masyarakat pemilik bangunan ber-IMB dalam penelitian ini adalah jumlah permohonan IMB tahun 2014 di Kota Probolinggo dengan jumlah (N) = 450 sesuai hasil data sekunder dari Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan dengan rincian pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Data IMB Tahun 2014

No	Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah
1	Hunian	365
2	Umum (usaha)	84
	Jumlah	450

Sumber : BPMPP, 2015

Data populasi dari pemilik bangunan gedung IMB yang terdiri atas IMB bangunan gedung fungsi hunian dan bangunan gedung fungsi usaha. Karena fokus pelaksanaan implementasi SLF hanya pada gedung umum atau usaha, peneliti membatasi populasi pada bangunan gedung fungsi usaha sesuai pelaksanaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.

Data untuk sampel yang diambil dari populasi pelaksanaan implementasi kebijakan SLF di kota Probolinggo tersebut sebesar 10 % - 15 %. Hal ini sesuai pendapat Suharsimi Arikunto (2002 : 112), jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25 % atau lebih.

Menurut Rumus Slovin (Riduwan, 2010) untuk menentukan jumlah sampel dicari dengan Rumus :

$$n = \frac{N}{1 + N (E)^2} = \frac{182}{1 + 182 (5\%)^2} = 125,09 \text{ dibulatkan menjadi } 125$$

Keterangan :

n adalah jumlah sampel

N = jumlah populasi

E = *margin of error * desired* adalah persentase toleransi ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi sebesar 5 % ($d=0,05$).

Dalam penelitian ini, sampel diambil tahun 2014 dengan N rata-rata pemilik bangunan gedung ber-IMB usaha= 84, jumlah birokrasi 68 orang, jumlah Jasa Konstruksi dan TABG 30 orang, dan jumlah total 182 sedangkan tingkat kesalahan 5 %. Dari perhitungan rumus Slovin diatas didapat hasil 125,09 sampel (responden) yang dibulatkan menjadi minimal 125 orang.

Hair et al. (2006) dalam Panduan Lengkap SEM (Dachlan Usman 2014: 145) memberi petunjuk yang didasarkan kompleksitas model dan karakteristik model pengukuran, yaitu jika model mengandung 5 buah konstruk atau kurang, yang masing-masing konstruk diukur dengan lebih dari 3 item indikator yang mempunyai komunitas cukup besar (0,6 atau lebih), maka ukuran sampel yang diperlukan cukup antara 100 hingga 150.

Karakteristik data dalam model SEM-AMOS untuk ukuran sampel tidak ada masalah. Identifikasi atau model tetap dapat diestimasi dengan ukuran sampel kecil (100-200) dapat mencapai *statistical power* yang cukup tinggi dengan ukuran sampel kecil, ukuran sampel besar (>250) dapat meningkatkan ketepatan dan konsistensi hasil estimasi SEM-AMOS.

Dari ukuran sampel individu minimal 125 orang, agar sesuai dengan teori diatas dan pengukuran model dengan SEM Amos didapatkan model yang fit. Untuk sampel pegawai birokrasi SKPD berjumlah 50 orang, terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum 25 orang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 10 orang, dan auditor Inspektorat berjumlah 15 orang. Sampel dari pemilik IMB BG usaha 55 orang, Tim Ahli BG, Perencana BG, dan Pelaksana BG 20 orang. Jumlah sampel tersebut seperti pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Jumlah Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel
1	Birokrasi : Pelaksana &Pengawas BG	PNS Bidang BM, Perkim,CK dan Pengairan Dinas PU Kota Probolinggo	25
		APIP Inspektorat Kota Probolinggo	15
		Bidang Pelayanan Perijinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	10
2	Dukungan Publik	Pemilik IMB BG fungsi usaha Tahun 2014	55
		Tim Ahli Bangunan Gedung (Masyarakat Ahli), Pelaksana dan Perencana BG	20
		Jumlah	125

Sumber :data diolah, Tahun 2015

3.9.2 Sampel Data Kualitatif.

Data kualitatif yang digunakan dalam penentuan sampel informan untuk melakukan wawancara mendalam (indept interview) dan dilakukan Forum Group Diskusi (FGD). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka dari informan yang berpengalaman dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan SLF, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Data Informan dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Informan Penelitian

No	Jabatan Informan	Nama
1	Kepala Dinas/Eselon II-b	Nurkhamdani, ST, MT Ir. Imanto, MM
2	Sekretaris/Eselon III-a	Rasyid, S.Pd
3	Kasie/Eselon IV-a	Dini Santi, ST, M.Si Hari, ST
4	Kasie Turbinbaga Subdit PBL Direktorat CK Kemen.PUPR	Prastowo, ST, MT
5	Konsultan Ahli SLF Nasional	Dr. Ir. Jimmy S.Juwana.
6	Balai Tata Bangunan, Puslitbang Perkim Kemen. PUPR, Bandung	Pepen S, ST Ir. Wahyu, M.Sc.
7	Pemilik BG fungsi usaha	Lani Hartanta, SE, MM
8	Tim Ahli Bangunan Gedung	Ir. Wahyu Adi, ST
9	Konsultan Pengkaji Teknis	Ir. Hari Pujo, ST.

Sumber: Data diolah, tahun 2015

3.10 Metode Pengambilan Data dan Alat Pengambil Data.

Pengambilan data dan informasi dilakukan melalui pengambilan data sekunder IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo dan SLF BG di Dinas Pekerjaan Umum. Data yang dihimpun dari satuan kerja perangkat daerah terkait di Pemerintah Kota Probolinggo dalam bentuk statistik, peta, dan dokumen laporan ataupun hasil observasi lapangan yang pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya.. Dengan demikian, pengambilan data, informasi dan pemetaan serta kondisi pelaksanaan SLF bangunan gedung ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui observasi, kuesioner, dan wawancara.

1. Metode Observasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan program dilapangan. Metode ini menggunakan pendekatan pengamatan terhadap objek yang diamati.

BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Responden

Jumlah sampel responden yang mewakili dalam penelitian implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai dengan hasil perhitungan rumus Slovin pada Bab III sebesar 125 orang dari jumlah populasi sebesar 182 orang. Responden tersebut meliputi dari unsur birokrasi penyelenggara bangunan gedung dari pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan serta pengawas yaitu Inspektorat dan populasi pada dukungan publik atau masyarakat pemilik bangunan ber-IMB dalam penelitian ini adalah jumlah permohonan IMB fungsi usaha tahun 2014 di Kota Probolinggo.

Setelah dilakukan penelitian lapangan (*field research*), secara umum karakteristik responden dapat dikelompokkan sesuai dengan Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Karakteristik Demografi dan status Bangunan Gedung Responden

No	Karakteristik	Demografi & Status BG	Jumlah	Total
1.	Pekerjaan	a.PNS	63	125
		b.Swasta	56	
		c.Lain-lain	6	
2.	Jabatan	a.Staf	81	125
		b.Eselon	33	
		c.Direktur/Owner	3	
3.	Jenis Kelamin	a.Laki	100	125
		b.Perempuan	25	
4.	Pendidikan	a.SLTA/Sederajat	48	125
		b.D3	3	
		c.S1	56	
		d.S2	18	
5.	Status Kawin	a. Kawin	113	125
		b. Belum kawin	10	
		c. lain-lain (duda, mati cerai dll)	2	
6.	Pendapatan	a. 0 – Rp. 1.500.000,-	15	125
		b.Rp. 1.500.000 keatas	110	
7.	Status BG	a. Milik Sendiri	83	125

No	Karakteristik	Demografi & Status BG	Jumlah	Total
		b. Kontrak c. Ikut orang tua/dll	13 29	
8.	Fungsi BG	a. Hunian b. Usaha c. Sosial dan Budaya	70 55 -	125
9.	BG ber-IMB	a. Ya b. Tidak	65 60	125
10.	BG ber-SLF	a. Ya b. Tidak	30 95	125
11.	Bila tdk ada SLF lapor DPU	b. Ya b. Tidak	95 30	125

Sumber : data diolah, Tahun 2015

5.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Dalam uji validitas adalah menunjukkan ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (kuisioner) dalam melakukan fungsi ukurannya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi *Pearson Validity* dengan teknik product moment yaitu skor tiap item dikorelasikan dengan skor total. Uji validitas ini menggunakan paket program SPSS for windows versi 22 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 5.2 Hasil Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	Sig.	Keterangan
X1	x11	0.815	0.000	Valid
	x12	0.914	0.000	Valid
	x.13	0.831	0.000	Valid
X2	x.21	0.792	0.000	Valid
	x.22	0.763	0.000	Valid
	x.23	0.786	0.000	Valid
	x24	0.829	0.000	Valid
	x25	0.636	0.000	Valid
X3	X31	0.774	0.000	Valid
	X32	0.871	0.000	Valid
	X33	0.868	0.000	Valid
X4	x41	0.869	0.000	Valid
	x42	0.899	0.000	Valid
Y1	y11	0.837	0.000	Valid
	y12	0.883	0.000	Valid
	y13	0.910	0.000	Valid
Y2	y21	0.825	0.000	Valid
	y22	0.806	0.000	Valid
	y23	0.767	0.000	Valid
	y24	0.745	0.000	Valid

Variabel	Indikator	r hitung	Sig.	Keterangan
	y25	0.834	0.000	Valid
	y26	0.628	0.000	Valid

Sumber : Lampiran 1 hasil analisis SPSS versi 21, Tahun 2015

Berdasarkan data Tabel 5.1.2 diatas bahwa masing-masing variabel Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), struktur birokrasi (X3), Dukungan Publik (X4), Disposisi (Y1) dan Kinerja Implementasi SLF-BG (Y2) mempunyai nilai validitas signifikan lebih kecil 0.05. bahkan lebih kecil untuk 0.01 atau dibawah satu (1) persen, dan r hitung rata-rata X1,X2,X3,X4, Y1 dan Y2 = 0.8128 lebih besar (>) daripada r tabel df (N-2) = 123 untuk uji dua arah dan signifikansi 0,05 dengan r tabel = 0,1757, bahkan juga lebih besar (>) dari r tabel 0.01 dengan r tabel = 0.2296.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan konsistensi suatu hasil pengukuran. Suatu pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang jelas, mudah dipahami dan memiliki interpretasi yang sama meskipun disampaikan kepada responden yang berbeda dan pada waktu yang berlainan pula. Berikut ini adalah hasil pengujian reliabilitas menggunakan program SPSSv-21 berikut :

Tabel 5.3 Hasil Uji Reliabilitas :

No	Variabel	α	Keterangan
1.	Komunikasi (X1)	0.811	Reliable $\alpha >$ 0.5
2	Sumberdaya (X2)	0.821	
3	struktur birokrasi (X3)	0.779	
4	Dukungan Publik (X4)	0.718	
5	Disposisi (Y1)	0.848	
6	Kinerja Implementasi SLF-BG (Y2)	0.860	

Sumber : Lampiran 1 Hasil Analisis SPSS Versi 21, Tahun 2015

Suatu instrument dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,5 (Santoso, 2001:280) Dari tabel Reliability Statistic didapat bahwa reliabilitas Cronbach's alpha semua variabel memenuhi syarat diatas 0,5.

5.1.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel.

Analisa penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang tanggapan responden terhadap variabel penelitian sesuai dengan kondisi sebenarnya. Gambaran umum variabel ditunjukkan dengan angka minimum, angka maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi (penyimpangan), frekuensi, tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian.

Analisis statistik deskriptif ini dilakukan dengan memperhatikan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Fungsi analisis ini berguna dalam menjawab pertanyaan masalah yang mengarah kepada gambaran umum variabel komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dukungan public, disposisi dan kinerja implementasi kebijakan SLF. Dan pada intinya karakteristik data dan gambaran empiris variabel dapat dipahami.

Data variabel penelitian dideskripsikan dengan mengelaborasi setiap variabel. Untuk melihat gambaran yang lebih rinci pada masing masing variabel dan indikator berdasarkan perolehan skor.

Data berbentuk distribusi frekuensi mampu menampilkan deskripsi umum dengan cara menampilkan seluruh satuan yang ada. ciri khas tertentu dalam bentuk sebuah nilai bilangan yang merupakan ciri khas dan bilangan dapat diperoleh dengan menggunakan teknik kecendrungan memusat (tendensi sentral). Terdapat tiga ukuran tendensi sentral yang biasanya digunakan dalam penelitian social antara lain rata-rata hitung (mean), median, dan modus (Bungin, B, 2008 : 174)

a. Variabel Komunikasi.

Dalam penelitian ini variabel Komunikasi terdiri dari 3 indikator yaitu Kebijakan SLF disampaikan kepada semua stakeholder, Kebijakan SLF dapat diterima dengan jelas kepada semua stakeholder dan .Kebijakan SLF konsistensi diterapkan untuk semua bangunan gedung. Jumlah pertanyaan yang disebarkan kepada 125 responden sebanyak 3 variabel dan indikator untuk variabel komunikasi. Deskripsi data variabel komunikasi di Tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.4 Frekuensi Komunikasi

Indikator	Frekuensi/Persen (%)									
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
x1.1	-	-	1	8	29	23.2	82	65.4	13	10.4
x1.2	-	-	1	8	28	22.4	81	64.8	15	12
x1.3	-	-	1	8	37	29.6	72	57.6	15	12

Sumber : analisis SPSS 21, Tahun 2015

Tabel 5.4 menunjukkan variabel komunikasi (X1) dengan dimensi Transmisi/*transmission* (X1.1), Kejelasan/*Clarity* (X1.2) dan Konsistensi/*Consistency* (X1.3) dengan indikator X1.1 di atas menunjukkan kejelasan maksud dan tujuan kebijakan sertifikat laik fungsi bahwa responden menilai pada indikator X1.1 dengan jawaban jelas (jelas dan sangat jelas) sebanyak 95 orang dengan persentase 75,8 % dan tidak jelas (sangat tidak jelas dan tidak jelas/) sebanyak 1 orang dengan persentase 8 %. Indikator X1.2 di atas menunjukkan public sudah mengetahui secara jelas maksud dan tujuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. responden menilai dengan jawaban jelas (jelas dan sangat jelas) sebanyak 96 orang dengan persentase 76,8% dan jawaban tidak jelas (sangat tidak jelas dan tidak jelas) sebanyak 1 orang dengan persentase 8 %. Indikator X1.3 di atas menunjukkan kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilaksanakan secara konsisten pada semua bangunan gedung dan responden menilai dengan jawaban jelas (jelas dan sangat jelas) sebanyak 97 orang dengan persentase 69,6 % dan jawaban tidak jelas (sangat tidak jelas dan tidak jelas) sebanyak 1 orang dengan persentase 8 %.

b. Variabel Sumberdaya

Dalam penelitian ini variabel sumberdaya yang terdiri dari dimensi sumberdaya manusia, Sumberdaya Anggaran, sumberdaya peralatan (*Facility*), Sumberdaya Informasi/data, Sumberdaya kewenangan dengan indikator terdiri dari 5 indikator yaitu SDM yang profesional, Anggaran yang cukup, Peralatan yang memadai, Informasi/data yang relevan dan kewenangan dalam mengambil keputusan sendiri. jumlah pertanyaan yang disebarkan kepada 125 responden sebanyak 5 buah untuk variabel sumberdaya. Deskripsi data variabel komunikasi dapat dilihat dalam Tabel 5.5 sebagai berikut :

Tabel 5.5 Frekuensi Sumberdaya

Indikator	Frekuensi/Persen (%)									
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
X2.1	1	8	14	11.2	35	28	45	36	30	24
X2.2	2	1.6	16	12.8	44	35.2	47	37.6	16	12.8
X2.3	-	-	11	8.8	51	40.8	40	32	23	18.4
X2.4	-	-	9	7.2	33	26.4	53	42.4	30	24
X2.5	-	-	4	3.2	41	32.8	57	45.6	23	18.4

Sumber : analisis SPSS 21, Tahun 2015

Tabel 5.5 diatas menunjukkan Variabel Sumberdaya (X2) dengan dimensi Sumberdaya manusia, Sumberdaya Anggaran, Sumberdaya Peralatan/Facility, Sumberdaya Informasi/data, Sumberdaya Kewenangandengan indicator X2.1 Pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan jumlah staf menunjukkan responden menilai pada indikator X2.1 dengan jawaban didukung (diukung dan sangat didukung) sebanyak 95 orang dengan persentase 75,8 % dan tidak didukung (sangat tidak diukung dan tidak didukung) sebanyak 1 orang dengan persentase 8 %. Indikator 2.2 Pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan fasilitas peralatan yang memadai menunjukkan responden menilai pada indicator X2.2 dengan dengan jawaban didukung (diukung dan sangat didukung) sebanyak 63 orang dengan persentase 60,4 % dan tidak didukung (sangat tidak diukung dan tidak didukung) sebanyak 18 orang dengan persentase 14.4 %. Indikator X2.3 Pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan dana yang cukup supaya sesuai dengan tujuan, menunjukkan responden menilai pada indicator X2.3 dengan dengan jawaban didukung (diukung dan sangat didukung) sebanyak 63 orang dengan persentase 50,4 % dan tidak didukung (sangat tidak diukung dan tidak didukung) sebanyak 11 orang dengan persentase 8.8 %. Indikator X2.4 Pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan informasi/data yang akurat menunjukkan responden menilai pada indicator X2.4 dengan dengan jawaban didukung (diukung dan sangat didukung) sebanyak 83 orang dengan persentase 66,4 % dan tidak didukung (sangat tidak diukung dan tidak didukung) sebanyak 9 orang dengan persentase 7.2 %. Indikator X2.5 Pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai dengan tujuan maka diberi dengan kewenangan yang kuat menunjukkan responden menilai pada indicator X2.5

dengan dengan jawaban didukung (diukung dan sangat didukung) sebanyak 80 orang dengan persentase 64 % dan tidak didukung (sangat tidak diukung dan tidak didukung) sebanyak 4 orang dengan persentase 3.2 %.

c. Variabel Struktur Birokrasi

Dalam penelitian ini variabel struktur birokrasi yang terdiri dari dimensi Fragmentasi (*fragmentation*), koordinasi/*coordination* dan Standar operasionalprosedur (SOP) dengan indikator terdiri Lembaga Pelaksanaan SLF satu sesuai tugas dan fungsi, Pelaksanaan SLF terkoordinasi dalam mencapai tujuan dan SOP yang jelas dalam Implementasi dari 3 indikator yaitu.jumlah pertanyaan yang disebarakan kepada 125 responden sebanyak 3 buah untuk variabel struktur birokrasi. Deskripsi data variabel struktur birokrasi dapat dilihat dalam Tabel 5.6 sebagai berikut :

Tabel 5.6 Frekuensi struktur birokrasi

Indikator	Frekuensi/Persen (%)									
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
X3.1	-	-	4	3.2	40	32	60	48	21	16.8
X3.2	-	-	9	7.2	29	23.2	82	65.6	5	4.0
X3.3	-	-	6	4.8	36	28.8	77	61.6	6	4.8

Sumber : analisis SPSS 21, Tahun 2015

Tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa responden menilai dalam variabel X3 struktur birokrasi bahwaindikator X3.1 pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilaksanakan satu seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota menunjukkan responden menilai pada indikator X3.1 dengan jawaban sesuai (sesuai dan sangat sesuai) sebanyak 81 orang dengan persentase 64.8 % dan tidak sesuai (sangat tidak sesuai dan tidak sesuai) sebanyak 4 orang dengan persentase 3.2 %. Indikator X3.2 Dalam pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sudah terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya menunjukkan responden menilai pada indikator X3.2 dengan jawaban sesuai (sesuai dan sangat sesuai) sebanyak 87 orang dengan persentase 69.6 % dan tidak sesuai (sangat tidak sesuai dan tidak sesuai) sebanyak 9 orang dengan persentase 7.2 %. Indikator X3.3 tata cara pelaksanaan pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai dengan standar operasionalprosedur

(SOP) menunjukkan responden menilai pada indikator X3.3 dengan jawaban sesuai (sesuai dan sangat sesuai) sebanyak 83 orang dengan persentase 66.4 % dan tidak sesuai (sangat tidak sesuai dan tidak sesuai) sebanyak 6 orang dengan persentase 4.8 %.

d. Variabel Dukungan Publik

Dalam penelitian variabel dukungan publik dengan dimensi insentif kebijakan, disinsentif kebijakan dan terdiri dari 2 indikator yaitu pelaksanaan SLF tanpa biaya dan Persyaratan pelaksanaan SLF yang menghambat. Jumlah pertanyaan yang disebar kepada 125 responden sebanyak 2 buah untuk variabel dukungan publik. Deskripsi data variabel dukungan publik dapat dilihat dalam Tabel 5.7 sebagai berikut :

Tabel 5.7 Frekuensi Dukungan Publik

Indikator	Frekuensi/Persen (%)									
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
X4.1	1	0.8	5	4	41	32.8	65	52	13	10.4
X4.2	2	1.6	11	8.8	38	30.4	62	49.6	12	9.6

Sumber : analisis SPSS 21, Tahun 2015

Tabel 5.7 di atas bahwa responden menilai dalam variabel X4 Dukungan Publik bahwa indikator X4.1 Selama ini pemerintah kota dalam pelaksanaan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung tidak ada pungutan biaya menunjukkan responden menilai pada indikator X4.1 dengan jawaban sesuai (sesuai dan sangat sesuai) sebanyak 78 orang dengan persentase 62.4 % dan tidak sesuai (sangat tidak sesuai dan tidak sesuai) sebanyak 6 orang dengan persentase 4.8 %. Indikator X4.2 selama ini pemerintah kota dalam pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung masyarakat dibebani dengan persyaratan yang menghambat (as built drawing, Biaya Konsultan Pengawas/Pengkaji teknis dll) menunjukkan responden menilai pada indikator X4.2 dengan jawaban sesuai (sesuai dan sangat sesuai) sebanyak 74 orang dengan persentase 59.2 % dan tidak sesuai (sangat tidak sesuai dan tidak sesuai) sebanyak 13 orang dengan persentase 10.4 %.

e. Variabel Disposisi

Dalam penelitian ini variabel Disposisi yang terdiri dari 3 dimensi yaitu Kecendrungan/keinginan/ komitmen, Pengangkatan personel, Insentif personel dengan indikator yaitu jumlah Komitmen melaksanakan tujuan kebijakan SLF, Mutasi personel sesuai dengan kompetensi, Keberhasilan kebijakan SLF dengan Insentif personel. Pertanyaan yang disebarakan kepada 125 responden sebanyak 3 buah untuk variabel disposisi. Deskripsi data variabel disposisi dapat dilihat dalam Tabel 5.8 sebagai berikut :

Tabel 5.8 Frekuensi disposisi

Indikator	Frekuensi/Persen (%)									
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
Y1.1	1	0.8	9	8.8	24	30.4	71	49.6	20	9.6
Y1.2	5	4	9	7.2	28	22.4	58	46.4	25	20
Y1.3	3	2.4	7	5.6	34	27.2	51	40.8	30	24

Sumber : analisis SPSS 21, Tahun 2015

Tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa responden menilai dalam variabel Y1 Disposisi bahwa indikator Y1.1 Birokrasi mempunyai komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung menunjukkan responden menilai pada indikator Y1.1 dengan jawaban didukung (didukung dan sangat didukung) sebanyak 91 orang dengan persentase 59.2 % dan tidak didukung (sangat tidak didukung dan tidak didukung) sebanyak 10 orang dengan persentase 9.6 %. Indikator Y1.2 Birokrasi melakukan mutasi apabila pelaksanaan kebijakan sertifikasi laik fungsi tidak berjalan menunjukkan responden menilai pada indikator Y1.2 dengan jawaban didukung (didukung dan sangat didukung) sebanyak 83 orang dengan persentase 66.4 % dan tidak didukung (sangat tidak didukung dan tidak didukung) sebanyak 14 orang dengan persentase 11.2 %. Indikator Y1.3 Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung didukung dengan peningkatan insentif personel (honor, dll) menunjukkan responden menilai pada indikator Y1.2 dengan jawaban didukung (didukung dan sangat didukung) sebanyak 81 orang dengan persentase 64.8 % dan tidak didukung (sangat tidak didukung dan tidak didukung) sebanyak 10 orang dengan persentase 8 %.

f. Variabel Kinerja Implementasi Kebijakan SLF

Dalam penelitian ini variabel kinerja implementasi kebijakan SLF dengan dimensi yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas/tanggap dan Ketepatan. Indikator kinerja implementasi kebijakan SLF terdiri dari 6 indikator. Hasil Implementasi Kebijakan SLF tetap sasaran/sesuai tujuan, Usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah, Pemerataan manfaat pada seluruh pemohon SLF bangunan gedung, Hasil kebijakan implementasi SLF memuaskan pengguna bangunan gedung dan Hasil/tujuan yang diinginkan berguna atau bernilai. jumlah pertanyaan yang disebarakan kepada 125 responden sebanyak 6 buah untuk variabel kinerja implementasi kebijakan SLF. Deskripsi data variabel komunikasi dapat dilihat dalam Tabel 5.9 sebagai berikut :

Tabel 5.9 Frekuensi Kinerja Implementasi Kebijakan SLF

Indikator	Frekuensi/Persen (%)									
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
Y2.1	-	-	11	8.8	53	42.4	41	32.8	20	16
Y2.2	3	2.4	16	12.8	52	41.6	36	28.8	18	14.4
Y2.3	1	0.8	5	4	54	43.2	44	35.2	21	16.8
Y2.4	1	0.8	9	7.2	44	35.2	51	40.8	20	16
Y2.5	-	-	4	3.2	46	36.8	53	42.4	22	17.6
Y2.6	-	-	3	2.4	39	31.2	51	40.8	32	25.6

Sumber : analisis SPSS 21, Tahun 2015

Tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa Variabel Y2 Kinerja Implementasi Kebijakan SLF bahwa indikator Y2.1 hasil Kebijakan implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tepat sasaran/sesuai tujuan visi dan misi organisasi. Responden menilai pada indikator Y2.1 dengan jawaban puas (puas dan sangat puas) sebanyak 61 orang dengan persentase 48.8 % dan tidak puas (sangat tidak puas dan tidak puas) sebanyak 11 orang dengan persentase 8.8 %. Indikator Y2.2 usaha yang dilakukan birokrasi dalam mencapai tujuan kebijakan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung sudah tercapai menunjukkan responden menilai pada indikator Y2.2 dengan jawaban puas (puas dan sangat puas) sebanyak 54 orang dengan persentase 43.2 % dan tidak puas (sangat tidak puas dan tidak puas) sebanyak 9 orang dengan persentase 37.2 %. Indikator Y2.3 masalah implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sudah

diperbaiki menunjukkan responden menilai pada indikator Y2.3 dengan jawaban puas (puas dan sangat puas) sebanyak 65 orang dengan persentase 52 % dan tidak puas (sangat tidak puas dan tidak puas) sebanyak 6 orang dengan persentase 6.8 %. Indikator Y2.4 Pemerataan manfaat kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung pada seluruh pemohon/pengguna bangunan gedung menunjukkan responden menilai pada indikator Y2.4 dengan jawaban puas (puas dan sangat puas) sebanyak 71 orang dengan persentase 66.8 % dan tidak puas (sangat tidak puas dan tidak puas) sebanyak 10 orang dengan persentase 8 %. Indikator Y2.5 Hasil kebijakan implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung memuaskan pengguna Bangunan Gedung menunjukkan responden menilai pada indikator Y2.5 dengan jawaban puas (puas dan sangat puas) sebanyak 75 orang dengan persentase 60 % dan tidak puas (sangat tidak puas dan tidak puas) sebanyak 4 orang dengan persentase 3.2 %. Indikator Y2.6 Hasil/tujuan kebijakan implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung berguna/bernilai bagi pengguna bangunan gedung menunjukkan responden menilai pada indikator Y2.6 dengan jawaban puas (puas dan sangat puas) sebanyak 83 orang dengan persentase 66.4 % dan tidak puas (sangat tidak puas dan tidak puas) sebanyak 3 orang dengan persentase 2.4 %.

5.2. Analisis Model Implementasi Kebijakan Sertifikat Laik Fungsi

Dalam melakukan pengujian hipotesis mengenai relasi model struktural (relasi antar konstruk/indikator) dalam model struktural lengkap (full model). Evaluasi terhadap model struktural sesuai dengan gambar 5.1 pengukuran dilakukan menggunakan analisis faktor konfirmatori (CFA), sehingga model pengukuran disebut sebagai model konfirmatori. Setelah model pengukuran valid dan *established* melalui sejumlah tahapan, selanjutnya mengevaluasi relasi struktural antara konstruk yang satu dengan yang lain sesuai model teoritis. Relasi struktural mempresentasikan hipotesis penelitian yang akan diuji. Model struktural akan dianalisis relasi terdapat pada antar konstruk.

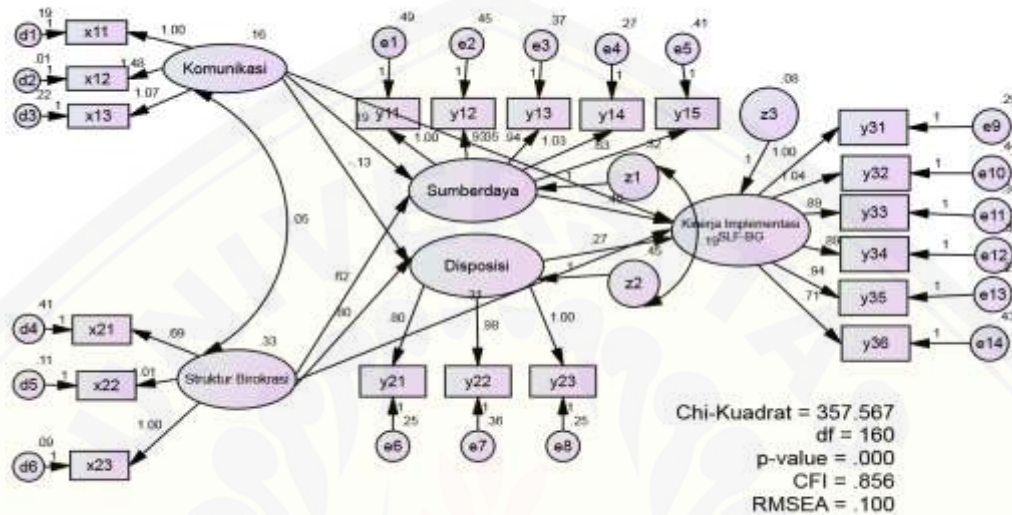
Pengembangan dan analisis model struktural dari penetapan model struktural dan evaluasi dan perbaikan model struktural. Analisa model dilakukan

terhadap beberapa model yang dikembangkan dengan mengacu dengan model teori Edward III dengan variabel bebas/independen komunikasi, struktur birokrasi, dan variabel intervening sumberdaya dan disposisi serta variabel tergantung/dependent kinerja implementasi Kebijakan SLF. Variabel bebas pada model ini direkonstruksi penulis dengan menambah variabel dukungan publik. Model dibagi menjadi 2 model empiris yaitu model empiris 1 dengan variabel intervening sumberdaya dan disposisi yang memediasihubungan antara variabel independen komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik dengan variabel dependent kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Model empiris 2 dengan variabel intervening disposisi yang memediasi antara variabel independen komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik dengan variabel dependent kinerja implementasi kebijakan SLF.

5.2.1 Aplikasi Model Edward III

Pada model Edward III ini variabel yang digunakan adalah 4 variabel independen Komunikasi, struktur birokrasi, variabel intervening sumberdaya dan disposisi, dan variabel dependen adalah kinerja implementasi. Model Edward III menggunakan data mentah yang sama dengan model empiris 1 dan 2 tanpa variabel dukungan publik. Model Edward III menggunakan perhitungan hubungan non rekursif pada variabel intervening sumberdaya dan disposisi yang mempunyai feedbackloop atau hubungan resiprokal ($Y1 \rightleftarrows Y2$) atau terdapat korelasi antar error. SEM-AMOS menghitung secara langsung pada variabel intervening secara timbal balik hubungan variabel sumberdaya dan disposisi terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya dan disposisi. Aplikasi Model Edward III tidak mempergunakan hubungan timbal balik variabel komunikasi dengan sumberdaya dan disposisi begitu juga hubungan timbal balik struktur birokrasi dengan sumberdaya dan disposisi sesuai gambar Model Edward III. Pada Aplikasi model Edward III hanya memakai hubungan searah variabel komunikasi dengan sumberdaya dan disposisi begitu juga variabel struktur birokrasi dengan sumberdaya dan disposisi.

- a. Aplikasi Model Edward III (Komunikasi dan struktur birokrasi
 →Sumberdaya→disposisi→Kinerja Implementasi SLF)



Gambar 5.1 Hasil Aplikasi Model Edward III-1

b. Uji Validitas Konstruk

Tabel 5.10 Regression Weights

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1 <--- X1	.190	.156	1.217	.224	par_1
Y1 <--- X2	.615	.134	4.591	***	par_6
Y2 <--- X2	.802	.143	5.619	***	par_7
Y2 <--- X1	-.133	.181	-.735	.462	par_24
Y3 <--- X1	.349	.105	3.307	***	par_2
Y3 <--- X2	.315	.098	3.209	.001	par_3
Y3 <--- Y1	.397	.100	3.976	***	par_4
Y3 <--- Y2	.270	.082	3.301	***	par_5

Sumber : hasil Analisis SEM-Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.10 terlihat bahwa 2 variabel komunikasi yang tidak berpengaruh terhadap variabel sumberdaya dan disposisi, dengan hasil p-value variabel Komunikasi (X1) terhadap Variabel sumberdaya (Y1) sebesar $0.224 > 0.05$ dan p-value Komunikasi (X1) terhadap Variabel disposisi (Y2) sebesar $0.464 > 0.05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak atau tidak ada pengaruhnya komunikasi

terhadap sumberdaya dan disposisi. Sedangkan faktor variabel komunikasi sebagai variabel mediasi berpengaruh terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan SLF, begitu juga dengan 6 (enam) variabel lainnya akan mempunyai nilai p-value sebesar *** yang berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan SLF dan nilainya tetap signifikan.

c. Menilai Fit Model

Tabel 5.11 Statistik Chi-kuadrat dan p-value untuk menilai fit model

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	50	357.567	160	.000	2.235
Saturated model	210	.000	0		
Independence model	20	1558.472	190	.000	8.202

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Statistik chi-kuadrat (X^2) yang dihasilkan sebesar 357.567 dengan p-value 0.000. karena p-value yang dihasilkan sangat kecil (lebih kecil dari $\alpha = 5\%$) maka model dikatakan tidak fit.

Tabel 5.12 CFI dan Indeks Incremental lainnya

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	.771	.728	.859	.829	.856
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Indeks fit CFI yang dihasilkan nilainya adalah 0.856. karena nilai CFI lebih kecil dari 0.90 yang semuanya bernilai dibawah atau hampir mendekati 0.90 maka model dikatakan fit.

Tabel 5.13 Indeks fit RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.100	.086	.114	.000
Independence model	.241	.230	.252	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Nilai RMSEA yang dihasilkan adalah 0.10 sama dengan dari 0.10 maka dapat dikatakan model fit.

d. Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dilakukan untuk menguji dua konstruk apakah memang berbeda dan masing-masing merupakan sebuah konstruk yang independen. Hal ini dilakukan dengan memberikan konstrain pada parameter korelasi antar kedua konstruk yang diestimasi sebesar 1. Validitas diskriminan dilakukan terpisah antar konstruk eksogen dengan konstruk eksogen dan antar konstruk endogen dengan konstruk endogen. Korelasi antara konstruk dapat dilihat pada Tabel 5.2.1.5 sebagai berikut :

Tabel 5.14 Correlations

Korelasi	Estimate	Interprestasi	Keterangan
X1 <--> X2	.207	Rendah	Signifikan
z2 <--> z1	.490	cukup	signifikan

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Hubungan kausalitas antar dua variabel terjadi bila kedua variabel tersebut mempunyai hubungan atau angka korelasi antar dua variabel tersebut signifikan atau nilainya besar. Antar variabel independen harus tidak mempunyai hubungan atau angka korelasi kedua variabel tersebut tidak signifikan atau nilainya harus kecil. Interpretasi mengenai besarnya angka korelasi sesuai dengan Suharsimi Arikunto (1995:70) pada Tabel 5.15 sebagai berikut :

Tabel 5.15 Interpretasi Nilai Korelasi

Nilai Korelasi (r)	Interpretasi
Antara 0.80 sampai dengan 1,00	Sangat tinggi
Antara 0.60 sampai dengan 0.80	Tinggi
Antara 0.40 sampai dengan 0.60	Cukup
Antara 0.20 sampai dengan 0,40	Rendah
Antara 0.00 sampai dengan 0.00	Sangat rendah (tidak berkorelasi)

Sumber : Suharsimi Arikunto (1995 : 70), Tahun 2015

e. Analisis Model Struktural : Uji Hipotesis Parameter Model

Kolom p pada Tabel 5.10 adalah p-value 2 ekor (two-tiled) untuk hasil estimasi koefisien jalur (regression weight). Jika menggunakan taraf signifikan $\alpha = 0.05$, maka nilai pada kolom p (Tabel 510) yang lebih kecil atau sama dengan

dari 0.05 menunjukkan bahwa koefisien jalur relasi dependensi yang bersangkutan signifikan (H_0 ditolak dan H_1 diterima).

Hasil pengujian Sembilan pasang hipotesis secara langsung adalah sesuai Tabel 5.16 sebagai berikut :

Tabel 5.16 Pengujian Hipotesis Variabel Langsung

No	Relasi antara Variabel Model Edward III	Hipotesis	p-value	Kesimpulan	
1	Komunikasi (X1) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	$H_{01} : \gamma_1 = 0$ $H_{11} : \gamma_1 \neq 0$	*** < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
2	Sumberdaya (Y1) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	$H_{02} : \gamma_2 = 0$ $H_{12} : \gamma_2 \neq 0$	*** < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
3	Struktur birokrasi (X2) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	$H_{03} : \gamma_3 = 0$ $H_{13} : \gamma_3 \neq 0$	0.001 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
4	Dukungan publik (X3) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	-	-	-	-
5	Komunikasi (X1) → disposisi (Y2)	$H_{05} : \gamma_5 = 0$ $H_{15} : \gamma_5 \neq 0$	0.462 > 0.05	Ho diterima H1 ditolak	TP
6	Sumberdaya (Y1) → disposisi (Y2)	$H_{06} : \gamma_6 = 0$ $H_{16} : \gamma_6 \neq 0$	*** < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
7	Struktur birokrasi (X2) → disposisi (Y3)	$H_{07} : \gamma_7 = 0$ $H_{17} : \gamma_7 \neq 0$	0.001 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
8	Dukungan public (X3) → disposisi (Y3)	-	-	-	-
9	Disposisi (Y2) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	$H_{09} : \gamma_9 = 0$ $H_{19} : \gamma_9 \neq 0$	*** < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
10	Komunikasi (X1) → Sumberdaya (Y1)	$H_{010} : \gamma_{10} = 0$ $H_{110} : \gamma_{10} \neq 0$	0.224 > 0.05	Ho diterima H1 ditolak	TP
11	Struktur Birokrasi (X2) → Sumberdaya (Y1)	$H_{011} : \gamma_{11} = 0$ $H_{111} : \gamma_{11} \neq 0$	*** < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Keterangan : P (berpengaruh); TP (tidak berpengaruh)

f. Estimasi Pengaruh Tak langsung

Dalam menganalisa variabel tak langsung ada dua macam yang dilakukan, yaitu :

1. Pengaruh tak langsung individual, yaitu pengaruh tak langsung dari sebuah variabel ke variabel lain setelah melewati satu atau beberapa variabel intervening dalam satu jalur yaitu dari variabel komunikasi (X1) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2)
2. Total pengaruh tak langsung, yaitu jumlahan dari seluruh pengaruh tak langsung individual yang mungkin dari variabel ke variabel lain. Dalam hal ini yaitu variabel komunikasi (X1) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2) + variabel Struktur birokrasi (X2) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2) + variabel dukungan publik (X3) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2)

Dalam menganalisa pengaruh tak langsung dapat dilihat pada Tabel 5.17 sebagai berikut :

Tabel 5.17 Indirect Effects

	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	.000	.000	.000	.000	.000
Y1	.000	.000	.000	.000	.000
Y3	.461	.039	.000	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.17 diatas dapat dilihat bahwa pengaruh tak langsung dari variabel sebagai berikut :

1. Komunikasi (X1) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2) adalah 0.39
2. Struktur birokrasi (X2) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2) adalah 0.461
3. Sumberdaya (Y1) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui disposisi (Y2) adalah 0.000

Dari Tabel 5.10 Regression Weights didapat hubungan tak langsung sebagai berikut :

- Komunikasi (X1) $\xrightarrow{0.190}$ Sumberdaya(Y1) $\xrightarrow{.490}$ disposisi(Y2) $\xrightarrow{0.270}$ kinerjaImplementasi SLF (Y3)
- Sumberdaya (Y1) $\xrightarrow{0.490}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.270}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y3)
- Struktur birokrasi (X2) $\xrightarrow{0.615}$ Sumberdaya(Y1) $\xrightarrow{0.490}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.270}$ kinerja Implementasi SLF (Y3)
- Estimasi pengaruh tak langsung individual dari komunikasi (X1) ke kinerja implementasi SLF BG (Y2) melalui sumberdaya dan disposisi adalah : $0.190 * 0.490 * 0.270 = 0.0251$. ini berarti tingkat komunikasi naik sebesar 0.0251 satuan setiap kenaikan komunikasi sebesar 1 satuan setelah melalui mediasi pada disposisi
- Estimasi pengaruh tak langsung individual dari sumberdaya (Y1) ke kinerja implementasi SLF BG (Y3) melalui disposisi adalah : $0.490 * 0.270 = 0.132$. ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.132 satuan setelah melalui mediasi pada disposisi.
- Estimasi pengaruh tak langsung individual dari struktur birokrasi (X2) ke kinerja implementasi SLF BG (Y3) melalui sumberdaya dan disposisi adalah : $0.615 * 0.490 * 0.270 = 0.081$ ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.081 satuan setelah melalui mediasi pada sumberdaya dan disposisi

Untuk estimasi total pengaruh tak langsung terstandarisasi dapat dilihat pada Tabel 5.18 sebagai berikut :

Tabel 5.18 Standardized Indirect Effects

	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	.000	.000	.000	.000	.000
Y1	.000	.000	.000	.000	.000
Y3	.394	.023	.000	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.10 estimasi koefisien jalur (regression) terstandarisasi diketahui bahwa :

Komunikasi (X1) $\xrightarrow{-0.133}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.315}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y3)
 Struktur birokrasi (X2) $\xrightarrow{0.802}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.270}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y3)

sumberdaya (Y1) $\xrightarrow{0.490}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.270}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y3)

Dari hasil tersebut diatas estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi adalah sebagai berikut :

- Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari komunikasi ke kekinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $-0.133 * 0.315 = -0.041$ ini berarti tingkat komunikasi akan turun sebesar 0.041 satuan setiap kenaikan komunikasi sebesar 1 satuan setelah melalui mediasi pada disposisi.
- Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari sumberdaya ke kinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $0.802 * 0.270 = 0.217$. ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.217 satuan setiap kenaikan sumberdaya sebesar 1 satuan setelah melalui mediasi pada disposisi.
- Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari struktur birokrasi ke kinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $0.490 * 0.270 = 0.1321$ ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.1321` satuan setiap kenaikan struktur birokrasi sebesar 1 satuan setelah melalui mediasi pada disposisi.

g. Estimasi Pengaruh Total.

Pengaruh total (*total effect*) dari suatu variabel ke variabel yang lain merupakan jumlah dari seluruh pengaruh langsung (*direct effect*) dan tak langsung (*indirect effect*) dari satu variabel ke variabel lain tersebut. Hal ini berlaku baik untuk pengaruh total yang tidak terstandarisir maupun yang terstandarisir.

Dalam menampilkan hasil estimasi pengaruh total dapat dilihat pada Tabel 5.19 estimate *total effect* sebagai berikut :

Tabel 5.19 Total Effects

	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	.802	-.133	.000	.000	.000
Y1	.615	.190	.000	.000	.000
Y3	.776	.388	.270	.397	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.19 dapat dimaknai sebagai berikut :

Hasil ini dapat ditafsirkan bahwa Kinerja Implementasi SLF BG (Y3) akan naik sebesar .388/.776/.397/.270 satuan untuk setiap kenaikan komunikasi/struktur birokrasi/public/sumberdaya/disposisi sebesar 1 satuan setelah melewati jalur disposisi diantara variabel tersebut.

h. Estimasi R Variabel Endogenus

Tabel 5.20 Squared Multiple Correlations:

	Estimate
Y2	.313
Y1	.305
Y3	.833

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, tahun 2015

Fokus pembicaraan dalam uji hipotesis relasi struktural adalah analisis terhadap estimasi korelasi berganda kuadrat atau SMC (squared multiple correlations) dari masing-masing variabel endogenus. SMC (untuk konstruk endogenus) merupakan analogi dari koefisien determinasi (R^2) dalam analisis regresi konvensional ini. Koefisien ini menjelaskan proporsi varians dan variabel endogenus yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya.

Dalam menampilkan SMC dari masing-masing variabel endogenus dari Tabel 5.20 diatas ditampilkan penjelasan sebagai berikut :

Dari data tersebut diatas dapat diartikan bahwa 31.3 % proporsi varian dari konstruk disposisi (Y2) yang dapat dijelaskan oleh konstruk komunikasi (X1) dan struktur birokrasi (X2). Sedangkan 83,3 % proporsi varians dari konstruk kinerja Implementasi SLF BG dapat dijelaskan oleh 3 konstruk Independen komunikasi (X1), struktur birokrasi (X2), dan konstruk Sumberdaya (Y1) serta disposisi (Y2) secara bersama-sama.

Jadi dapat dikatakan bahwa determinasi dari kedua relasi konstruk dependen dalam model penelitian ini, yaitu komunikasi (X1) dan struktur birokrasi (X2)

→ Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y1)) → Kinerja Implementasi Kebijakan SLF (Y3) cukup baik (diatas 50 %).

i. Uji Hipotesis Pengaruh Tak Langsung

Dalam penelitian ini hipotesis untuk pengaruh tak langsung adalah :

H_{110:γ10#} Terdapat total pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

H_{111:γ11} #Tidak Terdapat total pengaruh sumberdayaterhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.melalui disposisi.

H_{112:γ12#}Terdapat total pengaruh struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

H_{013:γ13#}Tidak terdapat total pengaruh dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

Tabel 5.21 Indirect Effects

	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y1	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	.000	.000	.000	.000	.000
Y3	.461	.039	.000	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Tabel 5.22 Indirect Effects - Standard Errors .

	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y1	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	.000	.000	.000	.000	.000
Y3	.141	.102	.000	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.21 dan Tabel 5.22 dapat dilihat bahwa untuk pengaruh tak langsung dari komunikasi (X1) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y3) :

Hasil Inderect effect = 0.039 Indirect effect – standar errors (SE) = .102

Dari kedua nilai ini diperoleh *critical ratio* (C.R) sebagai berikut :

$$C.R_{10} = \frac{\text{Estimate}}{S.E} = \frac{0,039}{0.102} = 0.382$$

Berdasarkan perhitungan seperti CR didapatkan CR11, CR12 dan CR13 seperti Tabel 5.23 berikut :

Tabel 5.23 Nilai Critical Ratio (CR)

SE / Estimate	(X2-Y3)= 0.461	(X1-Y3)=0.039	(Y1-Y3)=0.00
(X2-Y3) = 0.141	3.269		
(X1-Y3)=0.102		0.382	
(Y1-Y3)= 0.000			0.000

Sumber : hasil Perhitungan, Tahun 2015

Nilai C.R ini digunakan untuk menguji hipotesis ketujuhbelas, yaitu :

$H_{017}:\gamma_{17} =$ Tidak terdapat total pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi dan sumberdaya

$H_{117}:\gamma_{17} \neq$ Terdapat total pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi dan sumberdaya

Bila menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, *degree of freedom* $df = 194$ maka diperoleh statistic t tabel = 1,97 (perhitungan excel) H_0 ditolak jika $I C.R I > 1,97$. Jadi. Karena $C.R (=0.438) < 1,97$ maka H_0 diterima dan H_{010} tidak diterima dan H_{110} diterima. Begitu juga dengan perhitungan H_{017} , H_{018} dan H_{014} .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat total pengaruh tak langsung signifikan sumberdayaterhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.
2. Terdapat total pengaruh tak langsung signifikan sumberdayaterhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.
3. Tidak terdapat total pengaruh tak langsung signifikan komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.melalui sumberdaya dan disposisi
4. Terdapat total pengaruh tak langsung signifikan struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.melalui sumberdaya dan disposisi.

g. Uji Hipotesis Pengaruh Simultan/Total

Tabel 5.24 Total Effects-Estimate (Group number 2 - Default model)

	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y1	.615	-.133	.000	.000	.000
Y2	.802	.190	.000	.000	.000
Y3	.776	.388	.553	.270	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Tabel 5.25 Total Effects - Standard Errors (Group number 2 - Default model)

	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y1	.174	.169	.000	.000	.000
Y2	.201	.186	.000	.000	.000
Y3	.131	.125	.125	.110	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari perhitungan hasil kedua tabel diatas didapat : $IC.R I_{13} = \frac{Estimate}{S.E} = \frac{0,190}{1.124} = 0.169$

Tabel 5.26 Nilai Critical Ratio (CR)

SE \ Estimate	(X1>Y1>Y2>Y3)=0.133	(X1>Y2>Y1>Y3)=0.190	(X2>Y1>Y2>Y3)=0.615	(X2>Y2>Y1>Y3)=0.802	(X1>Y1>Y3)=0.90	(Y1>Y2>Y3)=-0.553	(X1>Y2>Y3)=-0.190	(X2>Y1>Y3)=0.615	(X2>Y2>Y3)=0.802	(Y2>Y1>Y3)=0.270
(X1>Y1>Y2>Y3)=0.169	.786									
(X1>Y2>Y1>Y3)=0.186		1.021								
(X2>Y1>Y2>Y3)=0.174			3.534							
(X2>Y2>Y1>Y3)=0.201				3.990						
(X1>Y1>Y3)=0.169					1.124					
(Y1-Y3)=0.125						4.24				
(X1>Y2>Y3)=0.190							1.000			
(X2>Y1>Y3)=0.615								1.000		
(X2>Y2>Y3)=0.201									3.990	
(Y2>Y1>Y3)=0.110										2.455

Sumber : hasil Perhitungan, Tahun 2015

Bila menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, degree of freedom (df) = 194, maka diperoleh statistic t tabel = 1,97 (perhitungan excel) H_0 ditolak jika $IC.R I > 1,97$. Jadi. Karena $IC.R I = 1.124 < 1,97$ maka H_{013} diterima dan H_{113} ditolak. Sedangkan H_{14} dengan $IC.R I = 4.24 > 1.97$ maka H_{014} ditolak H_{114} diterima dan H_{17} $IC.R I = 1.000 < 1.97$.begitu juga dengan Dengan H_{13}, H_{14}, H_{17} dan H_{18} dengandemikian dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat pengaruh total signifikan komunikasi (X1) terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Y3) melalui sumber daya (Y1). / H_{13}
2. Terdapat pengaruh total signifikan komunikasi (X1) terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Y3) melalui disposisi (Y2). / H_{14}

3. Tidak Terdapat pengaruh total signifikan struktur birokrasi (X2) terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Y3) melalui sumberdaya (Y1)./H17
4. Terdapat pengaruh total signifikan struktur birokrasi (X2) terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Y3) melalui disposisi (Y2)./H18
5. Terdapat pengaruh total signifikan sumberdaya(Y1) terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Y3) melalui disposisi (Y2).(H17)
6. Terdapat pengaruh total signifikan struktur birokrasi (X2) terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Y3) melalui sumber daya (Y1) dan disposisi (Y2) .(H18).

Dari hubungan variabel tak langsung pada variabel komunikasi/struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya dan disposisi maupun dibalik melalui disposisi dan sumberdaya dapat direkapitulasi dapat dilihat Tabel 5.27 berikut :

Tabel 5.27 Tabel Hubungan Variabel Tidak Langsung Model Edward III

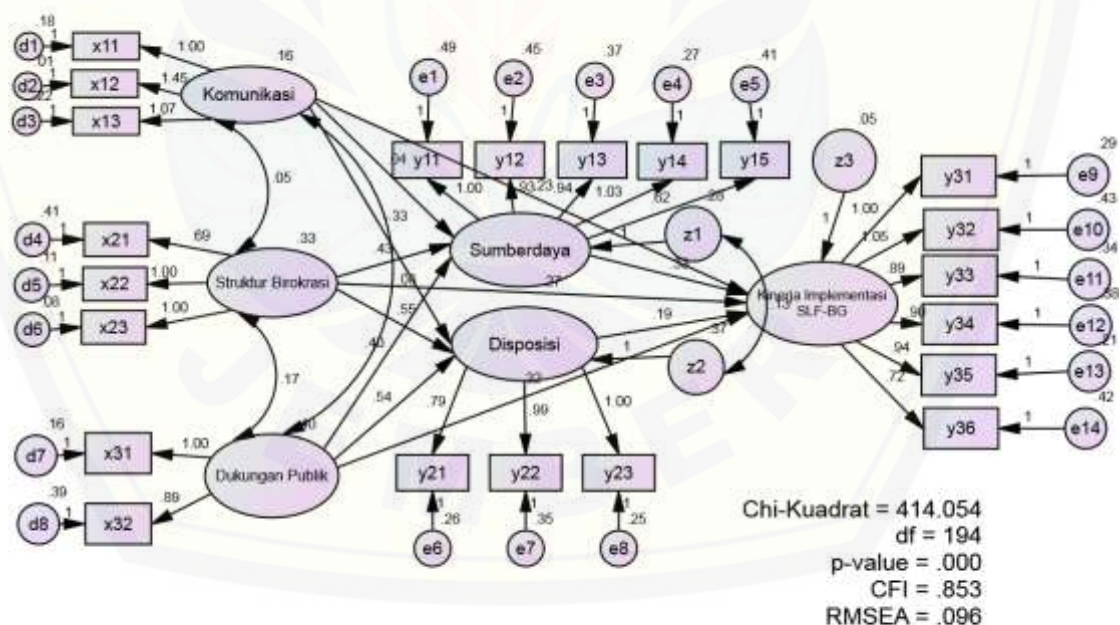
No. H..	Hubungan Variabel	Kesimpulan		
		Edward III		
13	Komunikasi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.1249 < 1.97	Ho diterima H1 ditolak	TP
14.	Komunikasi → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.00 < 1.97	Ho diterima H1 ditolak	TP
15	Sumberdaya → disposisi Kinerja Implementasi SLF	ICRI=4.24 > 1.97	Ho ditolak H1 diterima	P
16	disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.445 > 1.97	Ho ditolak H1 diterima	P
17	Struktur birokrasi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.000 > 1.97	Ho diterima H1 ditolak	P
18	Struktur birokrasi → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=3.990 > 1.97	Ho ditolak H1 diterima	P
21	Komunikasi → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=.786 < 1.97	Ho diterima H1 ditolak	TP
22	Komunikasi → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.021 < 1.97	Ho diterima H1 ditolak	TP
23	Struktur Birokrasi → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=3.534 > 1.97	Ho ditolak H1 diterima	P
24	Struktur Birokrasi → disposisi → sumberdaya → kinerja Implementasi SLF	ICRI=3.990 > 1.97	Ho ditolak H1 diterima	P

Sumber : hasil Perhitungan, Tahun 2015; Keterangan : P (berpengaruh); TP (tidak berpengaruh)

Pada hubungan nomor 21 dan 22 variabel Komunikasi terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya dan disposisi mempunyai nilai yang sama bila dibalik melalui disposisi dan sumberdaya dengan nilai $I\ CR\ I=3.104 > 1,97$. Juga hubungan nomor 23 dan 24 variabel struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya dan disposisi mempunyai nilai yang sama bila dibalik melalui disposisi dan sumberdaya dengan nilai $I\ CR\ I=5.923 > 1,97$.

5.2.2 Model Empiris 1 (Variabel Intervening : Sumberdaya dan Disposisi)

Model Empiris 1 menggunakan data mentah yang sama dengan model Edward III dan dibagi menjadi model Empiris. Model Empiris perhitungannon rekusif untuk hubungan variabel intervening sumberdaya dan disposisi dengan SEM-AMOS dihitung secara timbal balik pada variabel intervening secara timbal balik/resiprokal atau terdapat korelasi antara error.



Gambar 5.2 Model Empiris 1/Hasil Aplikasi Model Edward III

a. Identifikasi Model

Pada windows Amos Output ditampilkan hasil sebagai berikut :

Number of distinct sample moments: 253

Number of distinct parameters to be estimated: 59

Degrees of freedom (253 - 59): 194

Dengan 22 buah variabel *observed* (indicator), diperoleh banyaknya *distinct sample moments* (nilai unik) = $\frac{1}{2} * 22 * (22+1) = 253$.

Banyaknya parameter yang akan diestimasi adalah $k = 59$ terdiri dari 22 buah *loading factor* (λ), 9 buah *varians error* (ξ) dari *indicator endogenous*, 13 buah *varians errors* (δ) dari *indicator eksogenous* dan 2 buah *varians error* (ζ) *structural* pada konstruk endogenous. Dengan demikian derajat bebas (*df*) model tersebut $253 - 59 = 194$. dengan *df* yang positif, maka syarat perlu sebagai model yang *identified* telah terpenuhi.

b. Uji Normalitas dan Outlier

Pada hasil windows Amos Output folder *asssestmen of normality* ditampilkan pada lampiran 2 terlihat bahwa nilai *critical ratio* (c.r) untuk *skewness* dan c.r untuk *kurtosis*. Tidak ada ICRI (harga-harga absolut CR yang nilainya lebih besar 2,58 (digunakan $\alpha = 1\%$) dengan demikian seluruh indikator tersebut memenuhi asumsi normalitas *univariat*. Demikian juga bila menggunakan *rule of thomb* dari Curran et. Al (1997), dapat dikatakan semua variabel memenuhi asumsi *normalitas univariat*, karena tidak ada koefisien *skewness* yang harga absolutnya lebih besar dari 3 dan juga tidak ada koefisien *kurtosis* yang harga absolutnya lebih besar dari 8.

Nilai CR yang dihasilkan untuk koefisien *kurtosis multivariate* sebesar 14.583. nilai ini lebih besar dari 2,58 ((digunakan $\alpha = 1\%$). Sehingga normalitas *multivariate* tidak terpenuhi. Namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa semua indikator memenuhi asumsi normalitas *univariat*, dan juga nilai CR untuk *kurtosis multivariate* yang dihasilkan tidak jauh lebih besar dibandingkan 2.58, maka masih dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dapat terpenuhi. Dengan demikian metode estimasi *Maximum Likelihood* (ML) dapat digunakan.

Untuk menampilkan statistic D^2 dilihat pada *folder Observations farthest the centroid (Mahalanobis distance)* sebagaimana pada Tabel 5.28 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.28 Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance)

No	Observation Number	Mahalanobis d-squared	P1	P2
1	32	56.700	.000	.008
2	46	50.319	.001	.002
3	27	47.228	.001	.001
4	54	45.911	.002	.000
5	9	45.292	.002	.000

Sumber : Hasil Analisa SEM Amos, Tahun 2015

Pada kolom p1 dan p2 (baris pertama) karena tidak ada nilai yang lebih kecil dari 0.001 (menggunakan $\alpha = 0,1\%$). Dan juga statistic D^2 yang dihasilkan nilai tidak jauh beda dibandingkan nilai-nilai D^2 untuk observasi lainnya, maka dapat dikatakan bahwa data terbebas dari *outlier*.

c. Uji Validitas Konstruk

1) Signifikansi parameter, *loading factor* (λ) dan *loading structural* (γ)

Hasil Amos output diperoleh sesuai Tabel 5.29 berikut :

Tabel 5.29 Regression Weights

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1 <--- X1	.042	.158	.267	.790	par_1
Y2 <--- X3	.538	.177	3.044	.002	par_6
Y1 <--- X3	.400	.152	2.626	.009	par_27
Y1 <--- X2	.431	.135	3.205	.001	par_28
Y2 <--- X2	.553	.153	3.608	***	par_29
Y2 <--- X1	-.332	.186	-1.789	.074	par_30
Y3 <--- X1	.227	.104	2.182	.029	par_2
Y3 <--- X2	.274	.091	3.014	.003	par_3
Y3 <--- Y1	.328	.094	3.470	***	par_4
Y3 <--- Y2	.188	.080	2.332	.020	par_5
Y3 <--- X3	.317	.106	2.980	.003	par_7

Sumber : Hasil Analisa SEM Amos, Tahun 2015

Pada baris 1 sampai dengan 9 , yaitu p-valui 2 ekor (two tailed) menunjukkan bahwa nilainya dibawah 0,05. ini berarti bawa dinyatakan signifikan. ini berarti bahwa relasinya dinyatakan sangat signifikan.jadi pada baris ini semua indikator dinyatakan signifikan sebagai pengukur masing-masing factor variabel latennya,

dan faktor variabel laten (Komunikasi (X1), struktur birokrasi (X2), Dukungan Publik (X3), Sumberdaya (Y1), Disposisi (Y2) dan Kinerja implementasi SLF-BG (Y3)) signifikan.

Hasil estimasi terstandarisasi regression weight pada lampiran 2 berupa loading structural (γ) dan loading factor (λ), (λ) loading structural u1 dan untuk relasi dari faktor komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Struktur Birokrasi (X3) dan Dukungan Publik (X4) ke faktor Disposisi (Y1) dan Kinerja Implementasi SLF-BG (Y2) nilainya lebih kecil dari 0,7. Oleh karenanya faktor tersebut tidak memenuhi validitas konvergen sebagai pengukur dimensi X1, X2, X3 dan X4 serta Y2.

Sementara itu indikator pada Y2, X2, X3 dan X4 mempunyai nilai loadingnya lebih besar dari 0,7 sehingga memenuhi validitas konvergen sebagai pengukur masing-masing konstruk latennya. sedangkan X1, X2 (x21, x22) dan Y1 (y12) tidak memenuhi validitas konvergen karena nilai loadingnya lebih kecil 0,7.

2) Reliabilitas indikator

Hasil Amos Estimate dari Squared multiple Correlations pada Model Emperis 2 Lampiran 2. SMC (Squared Multiple Correlations) merupakan kuadrat dari nilai estimate terstandarisasi. SMC masing-masing variabel indikator dapat ditafsirkan sebagai reliabilitas indikator. Indikator yang reliable mempunyai nilai SMC lebih besar dari 0.5. dari tabel lampiran 2 dapat dikatakan dari 22 indikator ada indikator dinyatakan reliable dan 12 tidak reliable yaitu indikator x42, x31, x21, x22, x25, x11, x13, y26, dan y24.

d. Menilai Fit Model

Tabel 5.30 Statistik Chi-kuadrat dan p-value untuk menilai fit model

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	59	414.054	194	.000	2.134
Saturated model	253	.000	0		
Independence model	22	1726.385	231	.000	7.474

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Statistik chi-kuadrat (X^2) yang dihasilkan sebesar 414.054 dengan p-value 0.000. karena p-value yang dihasilkan sangat kecil (lebih kecil dari $\alpha = 5\%$) maka model dikatakan tidak fit.

Tabel 5.31 CFI dan Indeks incremental lainnya

Model	NFI	RFI	IFI	TLI	CFI
	Delta1	rho1	Delta2	rho2	
Default model	.760	.714	.856	.825	.853
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Indeks fit CFI yang dihasilkan nilainya adalah 0.853. karena nilai CFI lebih kecil dari 0.90 yang semuanya bernilai dibawah atau hampir mendekati 0.90 maka model dikatakan fit.

Tabel 5.32 Indeks fit RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.096	.083	.108	.000
Independence model	.228	.218	.239	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Nilai RMSEA yang dihasilkan adalah 0.096 lebih kecil dari 0.10 maka dapat dikatakan model fit.

e. Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dilakukan untuk menguji dua konstruk apakah memang berbeda dan masing-masing merupakan sebuah konstruk yang independen. Hal ini dilakukan dengan memberikan konstrain pada parameter korelasi antar kedua konstruk yang diestimasi sebesar 1. Validitas diskriminan dilakukan terpisah antar konstruk eksogen dengan konstruk eksogen dan antar konstruk endogen dengan konstruk endogen. Korelasi antara konstruk dapat dilihat pada Tabel 5.33 sebagai berikut :

Tabel 5.33 Correlations

	Estimate	Interprestasi	Keterangan
X1 <--> X2	.213	Rendah	Signifikan
X2 <--> X3	.469	Cukup	Signifikan
X1 <--> X3	.331	rendah	Signifikan
z2 <--> z1	.393	rendah	Signifikan

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Hubungan kausalitas antar dua variabel terjadi bila kedua variabel tersebut mempunyai hubungan atau angka korelasi antar dua variabel tersebut signifikan atau nilainya besar. Antar variabel independen harus tidak mempunyai hubungan atau angka korelasi kedua variabel tersebut tidak signifikan atau nilainya harus kecil. Interpretasi mengenai besarnya angka korelasi sesuai dengan Suharsimi Arikunto (1995:70) pada Tabel 5.15 Interpretasi Nilai Korelasi.

f. Analisis Model Struktural : Uji Hipotesis Parameter Model

Kolom p pada Tabel 5.2.2 adalah p-value 2 ekor (two-tailed) untuk hasil estimasi koefisien jalur (regression weight). Jika menggunakan taraf signifikan $\alpha = 0.05$, maka nilai pada kolom p (Tabel 5.32) yang lebih kecil atau sama dengan dari 0.05 menunjukkan bahwa koefisien jalur relasi dependensi yang bersangkutan signifikan (H_0 ditolak dan H_1 diterima).

Hasil pengujian Sembilan pasang hipotesis secara langsung adalah sesuai Tabel 5.34 sebagai berikut :

Tabel 5.34 Pengujian Hipotesis Variabel Langsung

No	Relasi	Hipotesis	p-value	Kesimpulan	
1	Komunikasi (X1) → kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	Ho1 : $\gamma_1 = 0$ H11 : $\gamma_1 \neq 0$	0.029 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
2	Sumberdaya (Y1) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	Ho2 : $\gamma_2 = 0$ H12 : $\gamma_2 \neq 0$	*** < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
3	Struktur birokrasi (X2) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	Ho3 : $\gamma_3 = 0$ H13 : $\gamma_3 \neq 0$	0.003 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
4	Dukungan publik (X3) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	Ho4 : $\gamma_4 = 0$ Ho4 : $\gamma_4 = 0$	0.003 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
5	Komunikasi (X1) → disposisi (Y2)	Ho5 : $\gamma_5 = 0$ H15 : $\gamma_5 \neq 0$	0.074 > 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
6	Sumberdaya (Y1) → disposisi (Y2)	Ho6 : $\gamma_6 = 0$ H16 : $\gamma_6 \neq 0$	0.006 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
7	disposisi (Y2) → Sumberdaya (Y1)	Ho7 : $\gamma_7 = 0$ H17 : $\gamma_7 \neq 0$	0.006 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
8	Struktur birokrasi (X2) → disposisi (Y3)	Ho8 : $\gamma_8 = 0$ H18 : $\gamma_8 \neq 0$	0.003 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
9	Dukungan publik (X3) → disposisi (Y3)	Ho9 : $\gamma_9 = 0$ H19 : $\gamma_9 \neq 0$	0.003 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
10	Disposisi (Y2) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	Ho10 : $\gamma_{10} = 0$ H110 : $\gamma_{10} \neq 0$	0.003 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
11	Komunikasi (X1) → Sumberdaya (Y1)	Ho11 : $\gamma_{11} = 0$ H111 : $\gamma_{11} \neq 0$	0.79 > 0.05	Ho diterima H1 ditolak	<i>TP</i>
12	Struktur Birokrasi (X2) → Sumberdaya (Y1)	Ho12 : $\gamma_{12} = 0$ H112 : $\gamma_{12} \neq 0$	0.001 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P

13	Dukungan Publik (X3) → Sumberdaya (Y1)	Ho13: $\gamma_{13} = 0$ H1 13: $\gamma_{13} \neq 0$	0.009 < 0.05	Ho ditolak H1 diterima	P
----	---	--	--------------	---------------------------	---

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Keterangan : P (berpengaruh); TP (tidak berpengaruh)

g. Estimasi Pengaruh Tak langsung

Dalam menganalisa variabel tak langsung ada dua macam yang dilakukan, yaitu :

1. Pengaruh tak langsung individual, yaitu pengaruh tak langsung dari sebuah variabel ke variabel lain setelah melewati satu atau beberapa variabel intervening dalam satu jalur yaitu dari variabel komunikasi (X1) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2)
2. Total pengaruh tak langsung, yaitu jumlahan dari seluruh pengaruh tak langsung individual yang mungkin dari variabel ke variabel lain. Dalam hal ini yaitu variabel komunikasi (X1) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2) + variabel Struktur birokrasi (X2) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2) + variabel dukungan publik (X3) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2)

Dalam menganalisa pengaruh tak langsung dapat dilihat pada Tabel 5.38 sebagai berikut :

Tabel 5.35 Indirect Effects

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y3	.232	.245	-.049	.000	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.35 diatas dapat dilihat bahwa pengaruh tak langsung sebagai berikut :

1. Komunikasi (X1) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2) adalah -0.049
2. Struktur birokrasi (X2) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2) adalah 0.245

3. Dukungan publik (X3) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui Sumberdaya (Y1) dan disposisi (Y2) adalah 0.232
4. Sumberdaya (Y1) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y3) melalui disposisi (Y2) adalah 0.000

Dari Tabel 5.29 Regression Weights didapat hubungan tak langsung sebagai berikut :

Tabel 5.36 Regression Weights

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1 <--- X1	.042	.158	.267	.790	par_1
Y2 <--- X3	.538	.177	3.044	.002	par_6
Y1 <--- X3	.400	.152	2.626	.009	par_27
Y1 <--- X2	.431	.135	3.205	.001	par_28
Y2 <--- X2	.553	.153	3.608	***	par_29
Y2 <--- X1	-.332	.186	-1.789	.074	par_30
Y3 <--- X1	.227	.104	2.182	.029	par_2
Y3 <--- X2	.274	.091	3.014	.003	par_3
Y3 <--- Y1	.328	.094	3.470	***	par_4
Y3 <--- Y2	.188	.080	2.332	.020	par_5
Y3 <--- X3	.317	.106	2.980	.003	par_7

Komunikasi (X1) $\xrightarrow{0.790}$ Sumberdaya (Y1) $\xrightarrow{0.006}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.020}$ kinerja Implementasi SLF (Y3)

Sumberdaya (Y1) $\xrightarrow{0.006}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.020}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y3)

Struktur birokrasi (X2) $\xrightarrow{0.001}$ Sumberdaya (Y1) $\xrightarrow{0.006}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.020}$ kinerja Implementasi SLF (Y3)

Dukungan publik (X3) $\xrightarrow{0.009}$ Sumberdaya (Y1) $\xrightarrow{0.006}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.020}$ kinerja Implementasi SLF (Y3)

1. Estimasi pengaruh tak langsung individual dari komunikasi (X1) ke kinerja implementasi SLF BG (Y2) melalui sumberdaya dan disposisi adalah : $0.790 * 0.006 * 0.02 = 0.0000316$. ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.0000948 satuan setiap kenaikan komunikasi setelah melalui mediasi pada disposisi
2. Estimasi pengaruh tak langsung individual dari sumberdaya (Y2) ke kinerja implementasi SLF BG (Y3) melalui disposisi adalah : $0.006 * 0.02 =$

0.00012. ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.1 satuan setiap kenaikan sumberdaya setelah melalui mediasi pada disposisi.

3. Estimasi pengaruh tak langsung individual dari struktur birokrasi (X2) ke kinerja implementasi SLF BG (Y3) melalui disposisi adalah : $0.001 * 0.006 * 0.02 = 0.00000012$ ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.00000012 satuan setiap kenaikan struktur birokrasi setelah melalui mediasi pada disposisi
4. Estimasi pengaruh tak langsung individual dari dukungan publik(X3) ke kinerja implementasi SLF BG (Y3) melalui disposisi adalah : $0.009 * 0.006 * 0.02 = 0.00000108$ ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.00000108 satuan setiap kenaikan dukungan public setelah melalui mediasi pada disposisi.

Untuk estimasi total pengaruh tak langsung terstandarisasi dapat dilihat pada Tabel 5.37 sebagai berikut :

Tabel 5.37 Standardized Indirect Effects

	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	.141	.138	.010	.000	.000	.000
Y3	.219	.211	-.029	.087	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.39 estimasi koefisien jalur (regression) terstandarisasi diketahui bahwa :

Komunikasi (X1) $\xrightarrow{0.01}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{-0.029}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y3)

Struktur birokrasi (X2) $\xrightarrow{0.138}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.211}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y3)

Dukungan publik (X3) $\xrightarrow{0.141}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.219}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y3)

sumberdaya (Y1) $\xrightarrow{0.000}$ disposisi (Y2) $\xrightarrow{0.87}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y2)

Dari hasil tersebut diatas estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi adalah sebagai berikut :

1. Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari komunikasi ke kekinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $0.01 * -0.029 = -0.00029$ ini berarti tingkat komunikasi akan turun sebesar 0.00029 satuan setiap kenaikan komunikasi setelah melalui mediasi pada disposisi.
2. Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari sumberdaya ke kinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $0.000 * 0.87 = 0.000$. ini berarti tingkat komunikasi akan tetap sebesar 0.000 satuan setiap kenaikan sumberdaya konstan setelah melalui mediasi pada disposisi.
3. Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari struktur birokrasi ke kekinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $0.138 * 0.211 = 0.0291$ ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.0291 satuan setiap kenaikan struktur birokrasi setelah melalui mediasi pada disposisi
4. Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari dukungan publik ke kinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $0.141 * 0.87 = 0.1227$. ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.1227 satuan setiap kenaikan dukungan publik setelah melalui mediasi pada disposisi.

h. Estimasi Pengaruh Total.

Pengaruh total (*total effect*) dari suatu variabel ke variabel yang lain merupakan jumlah dari seluruh pengaruh langsung (*direct effect*) dan tak langsung (*indirect effect*) dari satu variabel ke variabel lain tersebut. Hal ini berlaku baik untuk pengaruh total yang tidak terstandarisasi maupun yang terstandarisasi.

Dalam menampilkan hasil estimasi pengaruh total dapat dilihat pada Tabel 5.38 estimate total effect sebagai berikut :

Tabel 5.38 Total Effects

	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y1	.400	.431	.042	.000	.000	.000
Y2	.538	.553	-.332	.000	.000	.000
Y3	.549	.519	.179	.328	.188	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.40 dapat diperoleh dimaknai sebagai berikut :

Hasil ini dapat ditafsirkan bahwa Kinerja Implementasi SLF BG (Y3) akan naik sebesar .179/.519/.549/.328/.188 satuan untuk setiap kenaikan komunikasi/struktur birokrasi/dukungan publik/sumberdaya/disposisi sebesar 1 satuan setelah melewati jalur disposisi diantara variabel tersebut.

i. Estimasi R Variabel Endogenus

Tabel 5.39 Squared Multiple Correlations:

	Estimate
Y1	.404
Y2	.439
Y3	.885

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, tahun 2015

Fokus pembicaraan dalam uji hipotesis relasi struktural adalah analisis terhadap estimasi korelasi berganda kuadrat atau SMC (*squared multiple correlations*) dari masing-masing variabel endogenus. SMC (untuk *konstruk endogenus*) merupakan analogi dari koefisien determinasi (R^2) dalam analisis regresi konvensional ini. Koefisien ini menjelaskan proporsi varians dan variabel endogenus yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya.

Dalam menampilkan SMC dari masing-masing variabel endogenus dari Tabel 5.35 diatas ditampilkan penjelasan sebagai berikut :

Dari data tersebut diatas dapat diartikan bahwa 52,6 % proporsi varian dari konstruk disposisi (Y2) yang dapat dijelaskan oleh konstruk komunikasi (X1), struktur birokrasi (X2) dan Dukungan Publik (X3). Sedangkan 88,5 % proporsi varians dari konstruk kinerja Implementasi SLF BG dapat dijelaskan oleh 4 konstruk Independen komunikasi (X1), struktur birokrasi (X2), Dukungan Publik (X3) dan konstruk Sumberdaya (Y1) serta disposisi (Y2) secara bersama-sama.

Jadi dapat dikatakan bahwa determinasi dari kedua relasi konstruk dependen dalam model penelitian ini, yaitu komunikasi (X1), struktur birokrasi (X2) dan Dukungan Publik (X3)) \rightarrow Sumberdaya (Y1 dan disposisi (Y1)) \rightarrow Kinerja Implementasi Kebijakan SLF (Y3) cukup baik (diatas 50 %)

j. Uji Hipotesis Pengaruh Tak Langsung

Dalam penelitian ini hipotesis untuk pengaruh tak langsung adalah :

H₁₁₀: γ_{10} # Terdapat total pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

H₁₁₁: γ_{11} # Terdapat total pengaruh sumberdayaterhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.melalui disposisi.

H₁₁₂: γ_{12} #Terdapat total pengaruh struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

H₀₁₃: γ_{13} # terdapat total pengaruh dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

Tabel 5.40 Indirect Effects

	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y3	.232	.245	-.049	.000	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Tabel 5.41 Indirect Effects - Standard Errors .

	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y3	.221	.126	.112	.000	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.40 dan Tabel 5.41 dapat dilihat bahwa untuk pengaruh tak langsung dari komunikasi (X1) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y3) :

Hasil Inderect effect = -0.049 Indirct effect – standar errors (SE) = .112

Dari kedua nilai ini diperoleh *critical ratio* (C.R) sebagai berikut :

$$C.R_{10} = \frac{\text{Estimate}}{S.E} = \frac{-0,049}{0.122} = -0.438$$

Berdasarkan perhitungan seperti CR didapatkan CR11, CR12 dan CR13 seperti

Tabel 5.42 berikut :

Tabel 5.42 Nilai Critical Ratio (CR)

SE \ Estimate	(X3>Y1>Y2>Y3)= 0.232	(X2>Y1>Y2>Y3)= 0.245	(X1>Y1>Y2>Y3)=- 0.049	(Y1>Y2>Y3)=0.00
(X3>Y1>Y2>Y3= 0.221	1.04			
(X2>Y1>Y2>Y3)= 0.126		1.94		

SE \ Estimate	(X3>Y1>Y2>Y3)= 0.232	(X2>Y1>Y2>Y3)= 0.245	(X1>Y1>Y2>Y3)=- 0.049	(Y1>Y2>Y3)=0.00
(X1>Y1>Y2>Y3)=0.112			0.438	
(Y1>Y2>Y3)= 0.000				0.000

Sumber : hasil Perhitungan, Tahun 2015

Nilai C.R ini digunakan untuk menguji hipotesis ke limabelas, yaitu :

$H_{015}:\gamma_{15}$ = Tidak terdapat total pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi dan sumberdaya

$H_{115}:\gamma_{15}$ # Terdapat total pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi dan sumberdaya

Bila menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, degree of freedom $df = 194$ maka diperoleh statistic t tabel = 1,97 (perhitungan excel) H_0 ditolak jika $I C.R I > 1,97$. Jadi. Karena C.R (=0.438) $< 1,97$ maka H_0 diterima dan H_{010} tidak diterima dan H_{110} diterima. Begitu juga dengan perhitungan H_{011} , H_{012} dan H_{013} . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat total pengaruh tak langsung signifikan komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF Bangunan Gedung.melalui sumberdaya dan disposisi
2. Tidak terdapat total pengaruh tak langsung signifikan struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.melalui sumberdaya dan disposisi
3. Tidak terdapat total pengaruh tak langsung signifikan dukungan publik birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya dan disposisi.
4. Tidak terdapat total pengaruh tak langsung signifikan sumberdaya terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

k. Uji Hipotesis Pengaruh Simultan (Total)

Tabel 5.43 Total Effects-Estimate (Group number 2 - Default model)

	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y1	.400	.431	.042	.000	.000	.000
Y2	.538	.553	-.332	.000	.000	.000

	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y3	.549	.519	.179	.328	.188	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Tabel 5.44 Total Effects - Standard Errors (Group number 2 - Default model)

	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
Y1	.242	.194	.182	.000	.000	.000
Y2	.258	.232	.204	.000	.000	.000
Y3	.214	.143	.138	.155	.132	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari perhitungan hasil kedua tabel diatas didapat : $CR_{10} = \frac{Estimate}{S.E} = \frac{0,549}{0,214} = 2,565$

Tabel 5.45 Nilai Critical Ratio (CR)

Estimate SE	(X3>Y1>Y2>Y3))=0.549 49	(X2>Y1>Y2>Y3))=0.519 9	X2>Y1 >Y3))=0.519 9	(X1>Y1>Y2>Y3))=0.179 29	(X1>Y1>Y2>Y3))=0.179 29	(Y1>Y2>Y3))=0.328 328	(X3>Y1>Y2>Y3))=0.400 400	X3>Y2>Y3))=0.538 538	(X2>Y1>Y2>Y3))=0.431 431	(X2>Y1>Y2>Y3))=0.553 553	(X1>Y1>Y2>Y3))=0.042 42	(X1>Y1>Y2>Y3))=0.332 332
(X3>Y1>Y2>Y3)=0.249	2.20											
(X2>Y1>Y2>Y3)=0.143		3.62										
X2>Y2>Y1>Y3)=0.143			3.62									
(X1>Y1>Y2>Y3)=.138				1.29								
(X1>Y2>Y1>Y3)=.386					1.29							
(Y1>Y2>Y3)=.155						2.12						
(X3>Y1>Y3)=.242							1,65					
X3>Y2>Y3)=0.258								2,09				
(X2>Y1>Y3)=.194									2,22			
(X2>Y2>Y3)=.232										2,38		
(X1>Y1>Y2)=.182											0,23	
(X1>Y2>Y3)=-.204												1,63

Sumber : hasil Perhitungan, Tahun 2015

Bila menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, degree of freedom (df) = 194, maka diperoleh statistic t tabel = 1,97 (perhitungan excel) Ho ditolak jika I C.R I > 1,97. Jadi. Karena C.R (=2.565) > 1,97 maka Ho10 diterima dan H110 ditolak. Sedangkan H11 dengan IC.RI = 2.433 > 1.97 maka Ho11 ditolak H111 diterima dan dan C.R = 3.1 > 1.97 .begitu juga dengan Dengan H12 dan H13 demikian dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat pengaruh total signifikan komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya
2. Tidak terdapat pengaruh total signifikan komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya dan disposisi

3. Terdapat pengaruh total signifikan struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya.
4. Terdapat pengaruh total signifikan struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya dan disposisi
5. Tidak terdapat pengaruh total signifikan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya.
6. Terdapat pengaruh total signifikan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya dan disposisi.
7. Tidak terdapat pengaruh total signifikan sumberdaya terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi

Tabel 5.46 Pengaruh Tak Langsung Model Empiris 1

No	Hubungan Variabel	Empiris 1	Kesimpulan	
14	Komunikasi → Sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 0.231 < 1,97	Ho diterima H1 ditolak	TP
15	Komunikasi → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 1.627 < 1,97	Ho diterima H1 ditolak	TP
16	sumberdaya → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 2.116 > 1,97	Ho ditolak H1 diterima	P
17	disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 2.116 > 1,97	Ho ditolak H1 diterima	P
18	Struktur birokrasi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 2.221 > 1,97	Ho ditolak H1 diterima	P
19	Struktur birokrasi → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 2.383 > 1,97	Ho ditolak H1 diterima	P
20	Dukungan publik → Sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 1.653 < 1,97	Ho diterima H1 ditolak	TP
21	Dukungan publik → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 2.085 > 1,97	Ho ditolak H1 diterima	P
22	Komunikasi → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 1.297 < 1,97	Ho diterima H1 ditolak	TP
23	Komunikasi → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 1.297 < 1,97	Ho diterima H1 ditolak	TP
24	Struktur Birokrasi → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 2.310 > 1,97	Ho ditolak H1 diterima	P
25	Struktur Birokrasi → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 2.310 > 1,97	Ho ditolak H1 diterima	P
26	Dukungan publik → sumberdaya → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = 2.204 > 1,97	Ho ditolak H1 diterima	P
27	Dukungan	ICRI = 2.204 > 1,97	Ho ditolak	P

No	Hubungan Variabel	Empiris 1	Kesimpulan
	publik → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF		H1 diterima

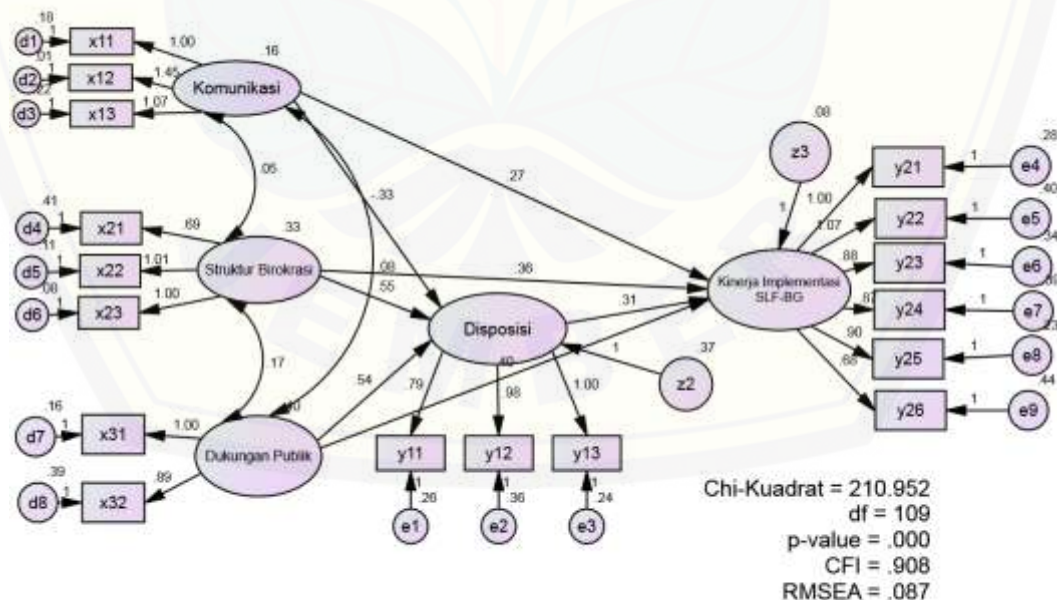
Sumber : hasil Perhitungan, Tahun 2015

Keterangan : P (berpengaruh); TP (tidak berpengaruh)

5.2.3 Model Empiris 1 Tanpa Intervening.

a. Tanpa Variabel Intervening Sumberdaya

Pada model Empiris 2 tanpa variabel sumberdaya ini variabel yang digunakan adalah 4 variabel yaitu variabel independen Komunikasi dan struktur birokrasi, variabel intervening disposisi, dan variabel dependen adalah kinerja implementasi. Model Edward III menggunakan data sama tanpa variabel sumberdaya pada penelitian ini. Penggunaan model ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen melalui variabel intervening. Model Empiris 1 tanpa intervening sumberdaya dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut:



Gambar 5.3 Model Empiris 1/Aplikasi Model Edward III (Intervening: Disposisi)

1) Uji Validitas Konstruk

Tabel 5.47 Regression Weights

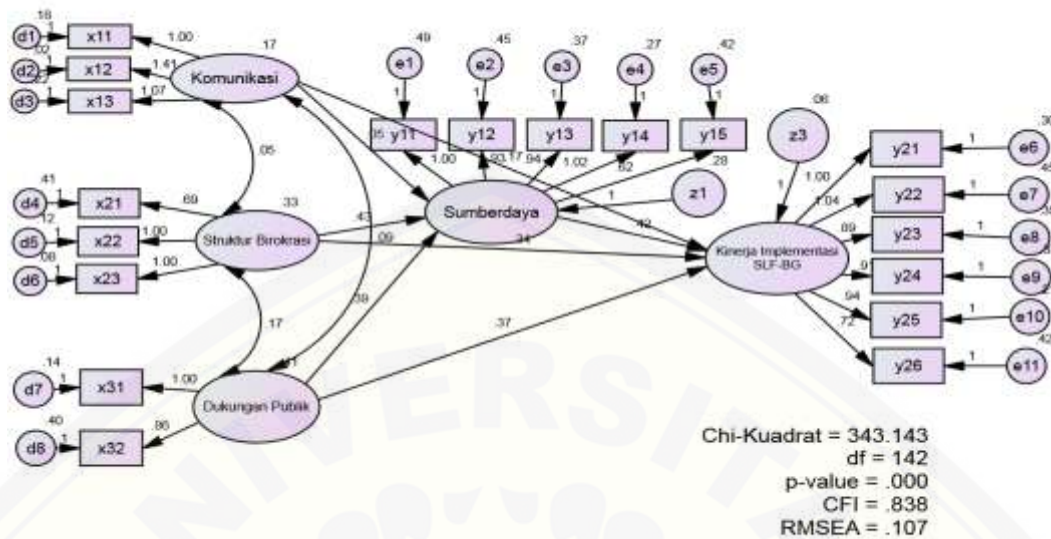
	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1 <--- X3	.540	.178	3.041	.002	par_4
Y1 <--- X1	-.334	.187	-1.787	.074	par_5
Y1 <--- X2	.554	.154	3.599	***	par_6
Y2 <--- X1	.268	.116	2.305	.021	par_1
Y2 <--- X2	.359	.101	3.564	***	par_2
Y2 <--- Y1	.305	.085	3.600	***	par_3
Y2 <--- X3	.397	.118	3.362	***	par_7

Sumber : hasil Analisis SEM-Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.53 terlihat bahwa 1 variabel komunikasi yang tidak berpengaruh terhadap variabel disposisi, dengan hasil p-value variabel Komunikasi (X1) terhadap Variabel disposisi (Y2) sebesar $0.074 > 0.05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak atau tidak ada pengaruhnya komunikasi terhadap disposisi. Sedangkan factor variabel komunikasi sebagai variabel mediasi berpengaruh terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan SLF, begitu juga dengan 6 (enam) variabel lainnya akan mempunyai nilai p-value sebesar *** yang berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan SLF dan nilainya tetap signifikan. Untuk nilai CFI adalah Fit dengan nilai $0.908 > 0.900$ dan nilai RMSEA mendekati Fit yaitu $0.087 < 0.09$.

b. Tanpa Variabel Intervening Disposisi

Pada model Empiris 2 tanpa variabel disposisi ini variabel yang digunakan adalah 4 variabel yaitu variabel independen Komunikasi dan struktur birokrasi, variabel intervening sumberdaya, dan variabel dependen adalah kinerja implementasi kebijakan SLF. model Empiris 2 dengan variabel intervening sumberdaya menggunakan data sama tanpa variabel disposisi pada penelitian ini. Penggunaan model ini untuk mengetahui pengaruh variabel independ terhadap dependen melalui variabel intervening. Model Empiris 1 tanpa Intervening disposisi dapat dilihat pada Gambar 5.4 berikut :



Gambar 5.4 Model Empiris 1/Aplikasi Model Edward III (Intervening: Sumberdaya)

Tabel 5.48 Regression Weights

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1 <--- X1	.047	.159	.295	.768	par_1
Y1 <--- X2	.433	.134	3.223	.001	par_5
Y1 <--- X3	.390	.150	2.597	.009	par_6
Y2 <--- X1	.168	.104	1.611	.107	par_2
Y2 <--- X2	.340	.094	3.616	***	par_3
Y2 <--- Y1	.418	.097	4.322	***	par_4
Y2 <--- X3	.366	.110	3.325	***	par_7

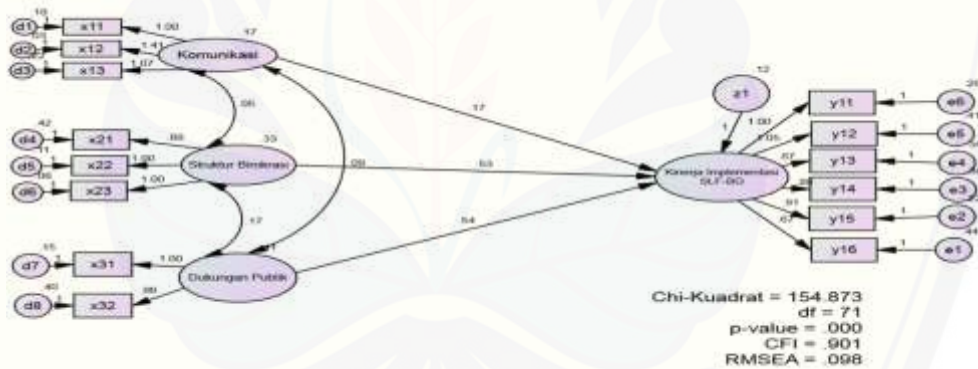
Sumber : hasil Analisis SEM-Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.48 terlihat bahwa 2 variabel komunikasi yang tidak berpengaruh terhadap variabel sumberdaya dan Implementasi Kinerja SLF, dengan hasil p-value variabel Komunikasi (X1) terhadap Variabel sumberdaya (Y1) sebesar $0.768 > 0.05$ dan p-value Komunikasi (X1) terhadap Variabel kinerja implementasi SLF (Y2) sebesar $0.107 > 0.05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak atau tidak ada pengaruhnya komunikasi terhadap sumberdaya dan kinerja implementasi SLF. Sedangkan factor variabel struktur birokrasi dan dukungan publik sebagai variabel mediasi berpengaruh terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan SLF, begitu juga dengan 3 variabel lainnya akan mempunyai nilai p-value sebesar *** yang berpengaruh terhadap variabel

implementasi kebijakan SLF dan nilainya tetap signifikan. Untuk nilai CFI adalah tidak Fit dengan nilai $0.838 < 0.900$ dan nilai RMSEA Fit yaitu $0.107 > 0.09$.

c. Tanpa Intervening Sumberdaya dan Disposisi

Pada model Empiris 2 tanpa variabel intervening sumberdaya dan disposisi ini variabel yang digunakan adalah 4 variabel yaitu variabel independen Komunikasi dan struktur birokrasi dan dukungan publik, variabel dependen adalah kinerja implementasi kebijakan SLF. model Empiris 2 tanpa variabel intervening sumberdaya dan disposisi menggunakan data sama tanpa variabel sumberdaya dan disposisi pada penelitian ini. Penggunaan model ini untuk mengetahui pengaruh variabel independ terhadap dependen . Model Empiris 1 tanpa intervening sumberdaya dan disposisi dapat dilihat pada Gambar 5.5 berikut :



Gambar 5.5 Model Empiris 1/Aplikasi Model Edward III (Tanpa Intervening: Sumberdaya Disposisi)

Tabel 5.49 Regression Weights

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1 <---	X1	.174	.125	1.390	.164	par_1
Y1 <---	X2	.533	.109	4.893	***	par_2
Y1 <---	X3	.545	.128	4.261	***	par_3

Sumber : hasil Analisis SEM-Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.49 terlihat bahwa variabel komunikasi yang tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja implementasi Kinerja SLF, dengan hasil p-value variabel Komunikasi (X1) terhadap Variabel kinerja implementasi SLF (Y2) sebesar $0.164 > 0.05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak atau tidak ada

pengaruhnya komunikasi terhadap kinerja implementasi SLF. Sedangkan factor variabel struktur birokrasi dan dukungan publik. Untuk nilai CFI adalah Fit dengan nilai $0.901 > 0.900$ dan nilai RMSEA Fit yaitu $0.098 > 0.09$.

5.2.4 Perbandingan Antara Model Empiris 1 (Intervening : Disposisi dan Sumberdaya, dengan intervening disposisi, dengan intervening sumberdaya dan tanpa intervening)

Tabel 5.50 Perbandingan Variabel Langsung dan tidak langsung Model Empiris 1

no	Relasi antara Variabel	Model Empiris 1				Hasil
		sumberdaya & disposisi	tanpa sumberdaya	tanpa disposisi	tanpa sumberdaya & disposisi	
		p-value/ICR/	p-value	p-value	p-value	
	Variabel Langsung					
1	Komunikasi (X1) → kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	0.029 < 0.05	0.021 < 0.05	0.107 > 0.05	0.164 > 0.05	<i>Tidak ekuivalen</i> berpengaruh dan <i>tidak berpengaruh</i>
2	Sumberdaya (Y1) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	*** < 0.05	-	*** < 0.05	-	Ekuivalen berpengaruh
3	Struktur birokrasi (X2) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	0.003 < 0.05	*** < 0.05	*** < 0.05	*** < 0.05	Ekuivalen berpengaruh
4	Dukungan publik (X3) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	0.003 < 0.05	*** < 0.05	*** < 0.05	*** < 0.05	Ekuivalen berpengaruh
5	Komunikasi (X1) → disposisi (Y2)	0.074 > 0.05	0.074 > 0.05	-	-	<i>Tidak ekuivalen</i> berpengaruh dan <i>tidak berpengaruh</i>
6	Sumberdaya (Y1) → disposisi (Y2)	0.006 < 0.05	-	-	-	Ekuivalen berpengaruh
7	Disposisi (Y2) → Sumberdaya (Y1)	0.003 < 0.05	-	-	-	Ekuivalen berpengaruh
8	Struktur birokrasi (X2) → disposisi (Y3)	0.003 < 0.05	*** < 0.05	-	-	Ekuivalen berpengaruh
9	Dukungan public (X3) → disposisi (Y3)	0.003 < 0.05	*** < 0.05	-	-	Ekuivalen berpengaruh
10	Disposisi (Y2) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	0.001 < 0.05	*** < 0.05	-	-	Ekuivalen berpengaruh
11	Komunikasi (X1) → Sumberdaya (Y1)	0.79 > 0.05	-	0.768 > 0.05	-	<i>Ekuivalen tidak berpengaruh</i>
12	Struktur Birokrasi (X2) → Sumberdaya (Y1)	0.009 < 0.05	-	0.001 < 0.05	-	Ekuivalen berpengaruh
13	Dukungan Publik (X3)		-	0.009 < 0.05	-	Ekuivalen

no	Relasi antara Variabel	Model Empiris 1				Hasil
		sumberdaya & disposisi	tanpa sumberdaya	tanpa disposisi	tanpa sumberdaya & disposisi	
	→Sumberdaya(Y1)	0.009 < 0.05				berpengaruh
	Variabel tidak langsung					
14	Komunikasi→Sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=.231 < 1,97	-	-	-	Tidak Berpengaruh
15	Komunikasi→disposisi→Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.627 < 1,97	-	-	-	Tidak Berpengaruh
16	Sumberdaya→disposisi Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.116 < 1,97	-	-	-	Berpengaruh
17	Disposisi→sumberdaya→Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.116 < 1,97	-	-	-	Berpengaruh
18	Struktur birokrasi→sumberdaya→Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.221 > 1,97	-	-	-	Berpengaruh
19	Struktur birokrasi→disposisi→Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.383 > 1,97	-	-	-	Berpengaruh
20	Dukungan publik→sumberdaya→Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.653 > 1,97	-	-	-	Tidak Berpengaruh
21	Dukungan publik→disposisi→Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.310 > 1,97	-	-	-	Berpengaruh
22	Komunikasi→Sumberdaya → Disposisi →Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.297 < 1,97	-	-	-	Tidak Berpengaruh
23	Komunikasi→ Disposisi→sumberdaya→Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.2975 < 1,97	-	-	-	Tidak Berpengaruh
24	Struktur Birokrasi→ Sumberdaya→ Disposisi→ Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.204 > 1,97	-	-	-	Berpengaruh
25	Struktur Birokrasi→disposisi→sumberdaya→ Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.204 > 1,97	-	-	-	Berpengaruh
26	Dukungan publik→ Sumberdaya→ Disposisi→ Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.116 > 1,97	-	-	-	Berpengaruh
27	Dukungan publik→disposisi→sumberdaya→ Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.116 > 1,97	-	-	-	Berpengaruh

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2015

Pada Tabel 5.50 ada 13 hubungan variabel langsung dan 14 hubungan variabel tidak langsung antara variabel yang sebagian besar saling mempengaruhi salah satu sama lain. Variabel Komunikasi yang mempengaruhi variabel kinerja implementasi Kebijakan SLF pada 5 (lima) model dengan hasil yang berbeda dan tidak equevalen. Ada 3 (tiga) model variabel komunikasi yang mempengaruhi

kinerja implementasi Kebijakan SLF, yaitu 2 (dua) variabel dengan variabel intervening sumberdaya dan disposisi dan 1 tanpa sumberdaya. Ada 2 (dua) model variabel komunikasi yang tidak mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan SLF yaitu model tanpa variabel disposisi dan model tanpa variabel intervening sumberdaya dan disposisi.

Hubungan variabel komunikasi ke variabel disposisi dengan 3 (tiga) model yaitu model emperis satu dengan variabel intervening sumberdaya dan disposisi berpengaruh dengan $p\text{-value } 0.043 < 0.05$. sedangkan model Edward III dengan variabel intervening sumberdaya dan disposisi dengan $p\text{-value } 0.148 > 0.05$ dan model emperis 2 tanpa variabel intervening sumberdaya dengan $p\text{-value } = 0.074 > 0.05$ tidak berpengaruh terhadap variabel disposisi.

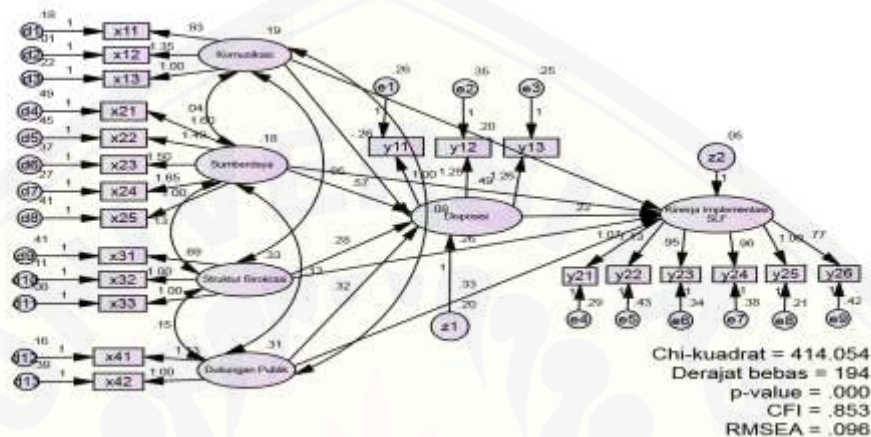
Pada hubungan variabel komunikasi ke variabel sumberdaya dengan 3 (tiga) model tidak berpengaruh yaitu model emperis satu dengan variabel intervening sumberdaya dan disposisi berpengaruh dengan $p\text{-value } 0.079 > 0.05$, model Edward III dengan variabel intervening sumberdaya dan disposisi dengan $p\text{-value } 0.224 > 0.05$ dan model emperis 2 tanpa variabel intervening disposisi dengan $p\text{-value } = 0.768 > 0.05$.

Dari perbandingan 5 (lima) model diatas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel komunikasi pada model emperis 2 yaitu variabel intervening sumberdaya dan disposisi sangat berpengaruh terhadap hubungan variabel komunikasi terhadap variabel disposisi dan kinerja implementasi kebijakan SLF dengan hasil $p\text{-value}$ lebih kecil dari 0.05 kecuali komunikasi terhadap sumberdaya yang tidak berpengaruh dengan $p\text{-value } 0.79 > 0.05$. hal ini menunjukkan bahwa komunikasi sudah jelas disampaikan kepada stakeholder yaitu petugas pelaksana dan masyarakat pemilik bangunan ber-IMB karena tanpa sosialisasi SLF kemasyarakat pemerintah kota sudah menindaklanjuti bangunan yang baru ber-IMB dengan SLF.

Dari 14 hubungan variabel tidak langsung terdapat 5 hubungan variabel tidak langsung yang tidak saling mempengaruhi yaitu 4 hubungan variabel komunikasi terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya dan disposisi

dan 1 hubungan tidak langsung dukungan publik terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya.

5.2.5 Model Empiris 2 (Variabel Intervening : Disposisi)



Gambar 5.2.2.6 Model Empiris 2 (Intervening : Disposisi)

Identifikasi Model

Pada windows Amos Output ditampilkan hasil sebagai berikut :

Number of distinct sample moments: 253

Number of distinct parameters to be estimated: 59

Degrees of freedom (253 - 59): 194

Dengan 22 buah variabel *observed* (indicator), diperoleh banyaknya *distinct sample moments* (nilai unik) = $\frac{1}{2} * 22 * (22+1) = 253$.

Banyaknya parameter yang akan diestimasi adalah $k = 59$ terdiri dari 22 buah parameter jalur, 13 buah parameter kovarians error (δ) dari indikator eksogenus dan 2 buah varians error (ζ) structural pada konstruk endogenus. Dengan demikian derajat bebas (df) model tersebut $253 - 59 = 194$. Dengan df yang positif, maka syarat perlu sebagai model yang *identified* telah terpenuhi.

a. Uji Normalitas dan Outlier

Pada hasil windows Amos Output Lampiran 2 *Assessment of normality* (Group number 2) diatas terlihat bahwa nilai *critical ratio* (c.r) untuk *skewness* dan c.r untuk *kurtosis*. Tidak ada I c.r I (harga-harga absolut c.r. yang nilainya lebih besar 2,58 (digunakan $\alpha = 1\%$) dengan demikian seluruh indikator tersebut memenuhi asumsi normalitas univariat. Demikian juga bila menggunakan *rule of thomb* dari *Curran et. Al* (1997), dapat dikatakan semua variabel memenuhi asumsi normalitas univariat, karena tidak ada koefisien *skewness* yang harga absolutnya lebih besar dari 3 dan juga tidak ada koefisien *kurtosis* yang harga absolutnya lebih besar dari 8.

Nilai $Ic.r.I$ yang dihasilkan untuk koefisien kurtosis multivariate sebesar 15.193. nilai ini lebih besar dari 2,58 ((digunakan $\alpha = 1\%$). Sehingga normalitas multivariate tidak terpenuhi. Namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa semua indikator memenuhi asumsi normalitas univariat, dan juga nilai $Ic.r.I$ untuk kurtosis multivariate yang dihasilkan tidak jauh lebih besar dibandingkan 2.58, maka masih dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dapat terpenuhi. Dengan demikian metode estimasi *Maximum Likelihood* (ML) dapat digunakan.

Untuk menampilkan statistic D^2 dilihat pada folder Observations farthest the centroid (Mahalanobis distance) sebagaimana pada Tabel 5.51 dapat dijelaskan berikut :

Tabel 5.51 Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance)

No	Observation Number	Mahalanobis d-squared	P1	P2
1	32	56.700	.000	.008
2	46	50.319	.001	.002
3	27	47.228	.001	.001
4	54	45.911	.002	.000
5	9	45.292	.002	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos.Tahun 2015

Pada kolom p1 dan p2 (baris pertama) karena tidak ada nilai yang lebih kecil dari 0.001 (menggunakan $\alpha = 0,1\%$). Dan juga statistic D^2 yang dihasilkan nilai tidak jauh beda dibandingkan nilai-nilai D^2 untuk observasi lainnya, maka dapat dikatakan bahwa data terbebas dari *outlier*.

b. Uji Validitas Konstruk

1) Signifikansi parameter, *loading factor* (λ) dan *loading structural* (γ) Hasil

Amos Output diperoleh sesuai Tabel 5.52 sebagai berikut :

Tabel 5.52 Regression Weights: (Group number 2 - Default model)

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1	<---	X2	.573	.200	2.862	.004	par_1
Y1	<---	X3	.284	.123	2.302	.021	par_2
Y1	<---	X4	.320	.145	2.200	.028	par_3
Y1	<---	X1	-.259	.127	-2.038	.042	par_25
Y2	<---	X3	.256	.084	3.068	.002	par_4
Y2	<---	X1	.198	.092	2.141	.032	par_5
Y2	<---	X2	.491	.156	3.140	.002	par_6
Y2	<---	X4	.334	.108	3.105	.002	par_7
Y2	<---	Y1	.221	.093	2.388	.017	par_11

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos.Tahun 2015

Pada baris 1 sampai dengan 9, yaitu p-value 2 ekor (two tailed) menunjukkan bahwa nilainya dibawah 0,05. ini berarti bahwa dinyatakan signifikan. ini berarti bahwa relasinya dinyatakan sangat signifikan, jadi pada baris ini semua indikator dinyatakan signifikan sebagai pengukur masing-masing faktor variabel latennya, dan faktor variabel laten (Komunikasi (X1), sumberdaya (X2), struktur birokrasi (X3), Dukungan Publik (X4), Disposisi (Y1) dan Kinerja implementasi SLF-BG (Y2)) signifikan.

Hasil estimasi terstandarisasi pada Tabel 5.52 berupa *loading structural* (γ) dan *loading factor* (λ) (λ) loading structural u1 dan untuk relasi dari faktor komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Struktur Birokrasi (X3) dan Dukungan Publik (X4) ke faktor Disposisi (Y1) dan Kinerja Implementasi SLF-BG (Y2) nilainya lebih kecil dari 0,7. Oleh karenanya faktor tersebut tidak memenuhi *validitas konvergen* sebagai pengukur dimensi X1, X2, X3 dan X4 serta Y2.

Sementara itu indikator pada Y2, X2, X3 dan X4 mempunyai nilai loadingnya lebih besar dari 0,7 sehingga memenuhi *validitas konvergen* sebagai pengukur masing-masing konstruk latennya.

Tabel 5.53 Standardized Regression Weights

	Estimate
Y1 <--- X2	.381
Y1 <--- X3	.254
Y1 <--- X4	.280
Y1 <--- X1	-.176
Y2 <--- X3	.235
Y2 <--- X1	.138
Y2 <--- X2	.335
Y2 <--- X4	.299
Y2 <--- Y1	.227

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

2) Reliabilitas Indikator

Hasil Amos Estimate dari Squared multiple Correlations diperoleh sesuai dengan Tabel 5.54 sebagai berikut:

Tabel 5.54 Squared Multiple Correlations:

	Estimate	
Y1	.526	x23 .525
Y2	.885	x24 .648
y12	.647	x25 .306
x41	.718	x11 .474
x42	.443	x12 .959
y13	.723	x13 .461
y11	.613	y26 .356
x31	.276	y21 .603
x32	.746	y22 .535
x33	.796	y23 .509
x21	.489	y24 .485
x22	.472	y25 .646

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos. Tahun 2015

SMC (*Squared Multiple Correlations*) merupakan kuadrat dari nilai estimate terstandarisasi. SMC masing-masing variabel indikator dapat ditafsirkan sebagai reliabilitas indikator. Indikator yang reliable mempunyai nilai SMC lebih besar dari 0.5. dari tabel diatas dapat dikatakan dari 22 indikator ada indikator

dinyatakan reliable dan 12 tidak reliable yaitu indikator x42, x31, x21,x22,x25, x11, x13, y 26, dan y24.

c. Menilai Fit Model

Tabel 5.55 Statistik Chi-kuadrat dan p-value untuk menilai fit model

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	59	414.054	194	.000	2.134
Saturated model	253	.000	0		
Independence model	22	1726.385	231	.000	7.474

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Statistik chi-kuadrat (X^2) yang dihasilkan sebesar 414.054 dengan p-value 0.000. karena p-value yang dihasilkan sangat kecil (lebih kecil dari $\alpha = 5\%$) maka model dikatakan tidak fit.

Tabel 5.56 CFI dan Indeks incremental lainnya

Model	NFI	RFI	IFI	TLI	CFI
	Delta1	rho1	Delta2	rho2	
Default model	.760	.714	.856	.825	.853
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Indeks fit CFI yang dihasilkan nilainya adalah 0.853. karena nilai CFI lebih kecil dari 0.90 yang semuanya bernilai dibawah atau hampir mendekati 0.90 maka model dikatakan fit.

Tabel 5.57 Indeks fit RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.096	.083	.108	.000
Independence model	.228	.218	.239	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015.

Nilai RMSEA yang dihasilkan adalah 0.096 lebih kecil dari 0.10 maka dapat dikatakan model fit.

d. Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dilakukan untuk menguji dua konstruk apakah memang berbeda dan masing-masing merupakan sebuah konstruk yang independen. Hal ini dilakukan dengan memberikan konstrain pada parameter

korelasi antar kedua konstruk yang diestimasi sebesar 1. Validitas diskriminan dilakukan terpisah antar konstruk eksogen dengan konstruk eksogen dan natar konstruk endogen dengan konstruk endogen. Korelasi antara konstruk dapat diliha padat Tabel 5.58 sebagai berikut :

Tabel 5.58 Correlations

Korelasi	Estimate	Interprestasi	Keterangan
X2 <--> X3	.541	cukup	Signifikan
X3 <--> X4	.469	Cukup	Signifikan
X3 <--> X1	.213	Rendah	Signifikan
X4 <--> X1	.331	Rendah	Signifikan
X2 <--> X4	.548	Cukup	Signifikan
X2 <--> X1	.224	Rendah	Signifikan

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Hubungan kausalitas antar dua variabel terjadi bila kedua variabel tersebut mempunyai hubungan atau angka korelasi antar dua variabel tersebut signifikan atau nilainya besar. Antar variabel independen harus tidak mempunyai hubungan atau angka korelasi kedua variabel tersebut tidak signifikan atau nilainya harus kecil.

e. Analisis Model Struktural : Uji Hipotesis Parameter Model

Pernyataan Hipotesis dalam penelitian yang disampaikan pada bab II ada Sembilan belas hipotesis. Pada model emperis 1 (equivalen dengan model Van Meter : intervening disposisi) ada 13 hipotesis. Sedangkan pada model emperis 2 (equivalen dengan model Edward III : intervening sumberdaya dan disposisi) ada 6 tambahan hipotesis jadi keseluruhan berjumlah 19 hipotesis.

Kolom p pada Tabel 5.59 adalah p-value 2 ekor (two-tiled) untuk hasil estimasi koefisien jalur (regression weight). Jika menggunakan taraf signifikan $\alpha = 0.05$, maka nilai pada kolom p (Tabel 5.2.3.2) yang lebih kecil atau sama dengan dari 0.05 menunjukkan bahwa koefisien jalur (relasi dependensi yang bersangkutan signifikan (Ho ditolak dan H1 diterima).

Hasil pengujian Sembilan pasang hipotesis secara langsung adalah sesuai Tabel 5.59 sebagai berikut :

Tabel 5.59 Pengujian Hipotesis Variabel Langsung

No	Relasi	Hipotesis	p-value	Kesimpulan	
1	Komunikasi (X1) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y2)	Ho1 : $\gamma_1 = 0$ H11 : $\gamma_1 \neq 0$	0.032 (<0.05)	Ho ditolak H1 diterima	P
2	Sumberdaya (X2) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y2)	Ho2 : $\gamma_2 = 0$ H12 : $\gamma_1 \neq 0$	0.002 (<0.05)	Ho ditolak H1 diterima	P
3	Struktur birokrasi (X3) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y2)	Ho3 : $\gamma_3 = 0$ H13 : $\gamma_1 \neq 0$	0.002 (<0.05)	Ho ditolak H1 diterima	P
4	Dukungan publik (X4) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y2)	Ho4 : $\gamma_4 = 0$ Ho4 : $\gamma_4 = 0$	0.002 (<0.05)	Ho ditolak H1 diterima	P
5	Komunikasi (X1) → disposisi (Y1)	Ho5 : $\gamma_5 = 0$ H15 : $\gamma_5 \neq 0$	0.042 (<0.05)	Ho ditolak H1 diterima	P
6	Sumberdaya (X2) → disposisi (Y1)	Ho6 : $\gamma_6 = 0$ H16 : $\gamma_6 \neq 0$	0.004 (<0.05)	Ho ditolak H1 diterima	P
7	Struktur birokrasi (X3) → disposisi (Y1) Dukungan public (X4) → disposisi (Y1)	Ho7 : $\gamma_7 = 0$ H17 : $\gamma_7 \neq 0$	0.021 (<0.05)	Ho ditolak H1 diterima	P
8	Disposisi (Y1) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y2)	Ho8 : $\gamma_8 = 0$ H18 : $\gamma_8 \neq 0$	0.028 (<0.05)	Ho ditolak H1 diterima	P
9		Ho9 : $\gamma_9 = 0$ H19 : $\gamma_9 \neq 0$	0.017 (<0.05)	Ho ditolak H1 diterima	P

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015;

Keterangan : P (berpengaruh); TP (tidak berpengaruh)

f. Estimasi Pengaruh Tak langsung

Dalam menganalisa variabel tak langsung ada dua macam yang dilakukan, yaitu :

1. Pengaruh tak langsung individual, yaitu pengaruh tak langsung dari sebuah variabel ke variabel lain setelah melewati satu atau beberapa variabel intervening dalam satu jalur yaitu dari variabel komunikasi (X1) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi (Y1)
2. Total pengaruh tak langsung, yaitu jumlahan dari seluruh pengaruh tak langsung individual yang mungkin dari variabel ke variabel lain. Dalam hal ini yaitu variabel komunikasi (X1) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi (Y1) + variabel sumberdaya (X2) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi (Y1) + variabel struktur birokrasi (X3) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi (Y1) + variabel dukungan publik (X4) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi (Y1)

Dalam menganalisa pengaruh tak langsung dapat dilihat pada Tabel 5.60 sebagai berikut :

Tabel 5.60 Indirect Effects

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	-.057	.071	.063	.127	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.60 di atas dapat dilihat bahwa pengaruh tak langsung dari variabel sebagai berikut :

- 1) Komunikasi (X1) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi (Y1) adalah -0.057
- 2) Sumberdaya (X2) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi (Y1) adalah 0.071
- 3) Struktur birokrasi (X3) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi (Y1) adalah 0.063
- 4) Dukungan public (X4) ke kinerja Implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi (Y1) adalah 0.127

Dari Tabel 5.52 Regression Weights didapat hubungan tak langsung sebagai berikut :

Komunikasi (X1) $0.042 \rightarrow$ disposisi (Y1) $0.017 \rightarrow$ kinerja Implementasi SLF BG (Y2)

Sumberdaya (X2) $0.004 \rightarrow$ disposisi (Y1) $0.017 \rightarrow$ kinerja Implementasi SLF BG (Y2)

Struktur birokrasi (X3) $0.021 \rightarrow$ disposisi (Y1) $0.017 \rightarrow$ kinerja Implementasi SLF BG (Y2)

Dukungan public (X4) $0.028 \rightarrow$ disposisi (Y1) $0.017 \rightarrow$ kinerja Implementasi SLF BG (Y2)

1. Estimasi pengaruh tak langsung individual dari komunikasi (X1) ke kinerja implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi adalah : $0.042 * 0.017 = 0.0007$. ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.0007 satuan setiap kenaikan komunikasi setelah melalui mediasi pada disposisi
2. Estimasi pengaruh tak langsung individual dari sumberdaya (X2) ke kinerja implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi adalah : $0.004 * 0.017 = 0.00007$. ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.00007 satuan setiap kenaikan sumberdaya setelah melalui mediasi pada disposisi.

3. Estimasi pengaruh tak langsung individual dari struktur birokrasi (X3) ke kinerja implementasi SLF BG (Y2) melalui disposisi adalah : $0.021 * 0.017 = 0.0004$ ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.004 satuan setiap kenaikan struktur birokrasi setelah melalui mediasi pada disposisi
4. Estimasi pengaruh tak langsung individual dari dukungan publik(X4) ke kinerja implementasi SLF BG (Y1) melalui disposisi adalah : $0.028 * 0.017 = 0.0005$ ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.0005 satuan setiap kenaikan dukungan public setelah melalui mediasi pada disposisi.

Untuk estimasi total pengaruh tak langsung terstandarisasi dapat dilihat pada Tabel 5.61 sebagai berikut :

5.61 Standardized Indirect Effects

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	-.040	.063	.058	.087	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.67 estimasi koefisien jalur (regression) terstandarisasi diketahui bahwa :

Komunikasi (X1) $\xrightarrow{-0.176}$ disposisi (Y1) $\xrightarrow{-0.227}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y2)

Sumberdaya (X2) $\xrightarrow{0.381}$ disposisi (Y1) $\xrightarrow{0.227}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y2)

Struktur birokrasi (X3) $\xrightarrow{0.254}$ disposisi (Y1) $\xrightarrow{0.227}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y2)

Dukungan public (X4) $\xrightarrow{0.280}$ disposisi (Y1) $\xrightarrow{0.227}$ kinerja Implementasi SLF BG (Y2)

Dari hasil tersebut diatas estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi adalah sebagai berikut :

1. Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari komunikasi ke kekinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $-0.176 * 0.227 = -0.0399$ ini berarti tingkat komunikasi akan turun sebesar 0.0399 satuan setiap kenaikan komunikasi setelah melalui mediasi pada disposisi.

2. Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari sumberdaya ke kinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $0.381 * 0.227 = 0.0865$. ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.0865 satuan setiap kenaikan sumberdaya setelah melalui mediasi pada disposisi.
3. Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari struktur birokrasi ke kinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $0.254 * 0.227 = 0.0576$ ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.0576 satuan setiap kenaikan struktur birokrasi setelah melalui mediasi pada disposisi
4. Estimasi pengaruh tak langsung terstandarisasi dari dukungan public ke kinerja implementasi SLF BG melalui disposisi adalah : $0.280 * 0.227 = 0.064$. ini berarti tingkat komunikasi akan naik sebesar 0.064 satuan setiap kenaikan dukungan publik setelah melalui mediasi pada disposisi.

g. Estimasi Pengaruh Total.

Pengaruh total (*total effect*) dari suatu variabel ke variabel yang lain merupakan jumlah dari seluruh pengaruh langsung (*direct effect*) dan tak langsung (*indirect effect*) dari satu variabel ke variabel lain tersebut. Hal ini berlaku baik untuk pengaruh total yang tidak terstandarisasi maupun yang terstandarisasi.

Dalam menampilkan hasil estimasi pengaruh total dapat dilihat pada Tabel 5.62 *estimate total effect* sebagai berikut :

Tabel 5.62 Total Effects

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	-.259	.320	.284	.573	.000	.000
Y2	.140	.405	.319	.618	.221	.000

Sumber : Hasil Analisa SEM Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.62 dapat diperoleh dimaknai sebagai berikut :

Hasil ini dapat ditafsirkan bahwa Kinerja Implementasi SLF BG (Y2) akan naik sebesar .140/.405/.319/.618 satuan untuk setiap kenaikan komunikasi/sumberdaya/struktur birokrasi/dukungan publik sebesar 1 satuan setelah melewati jalur disposisi diantara variabel tersebut.

h. Estimasi R Variabel Endogenus

Tabel 5.63 Squared Multiple Correlations:

	Estimate
Y1	.526
Y2	.885

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015.

Fokus pembicaraan dalam uji hipotesis *relasi structural* adalah analisis terhadap analisis terhadap estimasi korelasi berganda kuadrat atau SMC (squared multiple correlations) dari masing-masing variabel endogenus. SMC (untuk konstruk endogenus) merupakan analogi dari koefisien determinasi (R^2) dalam analisis regresi konvensional ini. Koefisien ini menjelaskan proporsi varians dan variabel endogenus yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya.

Dalam menampilkan SMC dari masing-masing variabel endogenus dari Tabel 5.63 diatas ditampilkan penjelasan sebagai berikut :

Dari data tersebut diatas dapatdiartikan bahwa 52,6 % proporsi varian dari konstruk disposisi (Y1) yang dapat dijelaskan oleh konstruk komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), struktur birokrasi (X3) dan Dukungan Publik (X4). Sedangkan 88,5 % proporsi varians dari konstruk kinerja Implementasi SLF BG dapat dijelaskan oleh 4 konstruk Independen (komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), struktur birokrasi (X3) dan Dukungan Publik (X4)) dan konstruk dependen secara bersama-sama.

Jadi dapat dikatakan bahwa determinasi dari kedua relasi konstruk dependen dalam model penelitian ini, yaitu (komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), struktur birokrasi (X3) dan Dukungan Publik (X4)) → disposisi dan (komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), struktur birokrasi (X3), dukungan Publik (X4) dan disposisi (Y1) → cukup baik (didas 50 %).

i. Uji Hipotesis Pengaruh Tak Langsung

Dalam penelitian ini hipotesis untuk pengaruh tak langsung adalah :

H_{110:γ10#} Terdapat total pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi BG melalui disposisi.

H₁₁₁: γ_{11} # Terdapat total pengaruh sumberdayaterhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi BG.melalui disposisi.

H₁₁₂: γ_{12} #Terdapat total pengaruh struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi BG melalui disposisi.

H₀₁₃: γ_{13} #Terdapat total pengaruh dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi BGMelalui disposisi.

Tabel 5.64 Indirect Effects

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	-.057	.071	.063	.127	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos

Tabel 5.65 Indirect Effects - Standard Errors .

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	.067	.145	.063	.123	.000	.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015.

Dari Tabel 5.70 dan Tabel 5.71 dapat dilihat bahwa untuk pengaruh tak langsung dari komunikasi (X1) ke Kinerja Implementasi SLF BG (Y2):

Hasil Inderect effect = -0.092Indirect effect – standar errors (SE) = .155

Dari kedua nilai ini diperoleh *critical ratio* (C.R) sebagai berikut:

$$C.R_{10} = \frac{\text{Estimate}}{S.E} = \frac{-0,92}{0.155} = -0.59$$

Berdasarkan perhitungan seperti CR didapatkan CR10, CR11, CR12 dan CR 13 seperti Tabel 5.66 berikut :

Tabel 5.66 Nilai Critical Ratio (CR)

SE \ Estimate	(X1-Y2)= -0,057	(X4-Y2)= 0.071	(X3-Y2)=.063	(X2-Y2)=0.127
(X1-Y2)= 0.067	-0.851			
(X4-Y2) = 0.145		0.489		
(X3-Y2)=0.063			1	
(X2-Y2)= 0.123				1.03

Sumber : hasil Perhitungan, Tahun 2015.

Nilai C.R ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama, yaitu :

H₀₁₀: γ_{10} = Tidak terdapat total pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi

$H_{10}:\gamma_{10}$ Terdapat total pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi Bila menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, degree of freedom $df = 194$ maka diperoleh statistic t tabel = 1,97 (perhitungan excel) H_0 ditolak jika $I.C.R.I > 1,97$. Jadi. Karena $C.R = 10.851 < 1,97$ maka H_0 diterima dan H_{010} tidak diterima dan H_{110} diterima. Begitu juga dengan perhitungan H_{12} , H_{13} dan H_{14} . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat total pengaruh tak langsung signifikan komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.melalui disposisi.
2. Tidak terdapat total pengaruh tak langsung signifikan sumberdaya terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.melalui disposisi
3. Tidak terdapat total pengaruh tak langsung signifikan struktur birokrasiterhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi
4. Tidak terdapat total pengaruh tak langsung signifikan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

j. Uji Hipotesis Pengaruh Simultan (Total)

Tabel 5.67 Total Effects-Estimate (Group number 2 - Default model)

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	-0.259	0.320	0.284	0.573	0.000	0.000
Y2	0.140	0.405	0.319	0.618	0.221	0.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015

Tabel 5.68 Total Effects - Standard Errors (Group number 2 - Default model)

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	0.153	0.243	0.178	0.312	0.000	0.000
Y2	0.121	0.178	0.103	0.253	0.143	0.000

Sumber : Hasil Analisis SEM Amos, Tahun 2015.

Dari perhitungan hasil kedua tabel diatas didapat :

$$C.R_{10} = \frac{\text{Estimate}}{S.E} = \frac{0,140}{0.121} = 1.157$$

Tabel 5.69 Nilai Critical Ratio (CR)

	(X1-Y2)=-0.140	(X4-Y2)=0.405	(X3-Y2)=.319	(X2-Y2)=0.618
(X1-Y2)=0.121	1.157			
(X4-Y2)=0.178		2.275		
(X3-Y2)=0.103			3.097	
(X2-Y2)=0.253				2.443

Sumber : hasil Perhitungan, Tahun 2015

Bila menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, degree of freedom (df) = 194, maka diperoleh statistic t tabel = 1,97 (perhitungan excel) H_0 ditolak jika $I.C.R.I > 1,97$. Jadi. Karena $C.R (=1.157) < 1,97$ maka H_{010} diterima dan H_{110} ditolak. Sedangkan H_{11} dengan $I.C.R.I = 2.433 > 1.97$ maka H_{011} ditolak H_{111} diterima dan $C.R = 3.1 > 1.97$. begitu juga dengan H_{12} dan H_{13} demikian dapat disimpulkan bahwa :

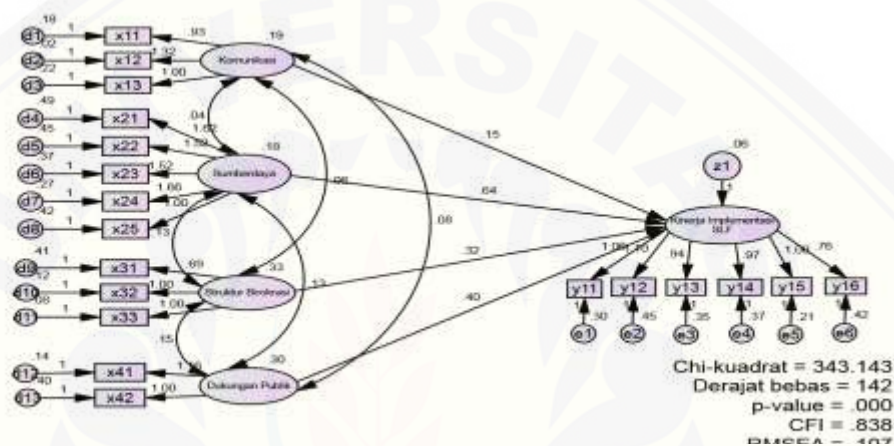
1. Tidak terdapat pengaruh total signifikan komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.
2. Terdapat pengaruh total signifikan sumberdaya terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi
3. Terdapat pengaruh total signifikan struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi
4. Terdapat pengaruh total signifikan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

k. Pengaruh Faktor Intervening

Disposisi merupakan variabel intervening, yaitu variabel yang menengahi atau memediasi (mediating variable) hubungan dependensi antar 2 (dua) variabel. Dalam hal ini Tuckman (1988) menyatakan “ *An intervening variable is that factor that theoretically affect the observed phenomenon but cannot be seen, measure, or manipulate*”. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel indenpenden dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur (Sugiono, 2007:41). Variabel antara ini mempengaruhi/memediasi hubungan

antara variabel independen/eksogenus yaitu komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik dengan variabel dependen/endogenus yaitu kinerja implementasi kebijakan SLF.

Apabila variabel disposisi tidak ada antara variabel independen dan variabel dependen, maka dapat dilihat hubungan antara variabel tersebut bagaimana pengaruhnya terhadap hasil korelasi sesuai pada Gambar 5.7 berikut:



Gambar 5.7 Model Empiris 2/Aplikasi Model Van Meter (Tanpa Intervening: Disposisi)

1) Uji Validitas Konstruk

Tabel 5.70 Regresion Weight

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1 <--- X3	.321	.086	3.721	***	par_1
Y1 <--- X1	.148	.093	1.584	.113	par_2
Y1 <--- X2	.641	.169	3.792	***	par_3
Y1 <--- X4	.401	.112	3.583	***	par_4

Sumber : hasil Analisis SEM-Amos, Tahun 2015

Dari Tabel 5.76 terlihat bahwa tanpa variabel intervening disposisi, variabel komunikasi tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan SLF (Y1), dengan hasil p-value variabel Komunikasi (X1) terhadap Variabel Kinerja (Y1) sebesar $0.113 > 0.05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak atau tidak ada pengaruhnya komunikasi terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan SLF. Sedangkan apabila ada faktor variabel disposisi sebagai variabel mediasi maka variabel komunikasi berpengaruh terhadap variabel kinerja implementasi

kebijakan SLF, begitu juga dengan 3 (tiga) variabel lainnya akan mengalami kenaikan nilai p-value sebesar 0.002 yang berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan SLF dan nilainya tetap signifikan. Perbandingan ini dapat dilihat pada Tabel 5.71 berikut:

Tabel 5.71 Perbandingan p-value dengan dan tanpa Variabel Disposisi

No	Relasi	Hipotesis	p-value dgn disposisi	Kesimpulan dgn disposisi	p-value tanpa disposisi	Kesimpulan dgn disposisi
1	Komunikasi (X1) → kinerja Implementasi SLF (Y2)	Ho1 : $\gamma_1 = 0$ H11 : $\gamma_1 \neq 0$	0.032 (< 0.05)	Ho ditolak H1 diterima	0.113 (> 0.05)	Ho diterima H1 ditolak
2	Sumberdaya (X2) → Kinerja Implementasi SLF (Y2)	Ho2 : $\gamma_2 = 0$ H12 : $\gamma_1 \neq 0$	0.002 (< 0.05)	Ho ditolak H1 diterima	*** (< 0.05)	Ho ditolak H1 diterima
3	Struktur birokrasi (X3) → Kinerja Implementasi SLF (Y2)	Ho3 : $\gamma_3 = 0$ H13 : $\gamma_1 \neq 0$	0.002 (< 0.05)	Ho ditolak H1 diterima	*** (< 0.05)	Ho ditolak H1 diterima
4	Dukungan publik (X4) → Kinerja Implementasi SLF (Y2)	Ho4 : $\gamma_4 = 0$ Ho4 : $\gamma_4 = 0$	0.002 (< 0.05)	Ho ditolak H1 diterima	*** (< 0.05)	Ho ditolak H1 diterima

Sumber : hasil analisis, Tahun 2015

5.2.6 Perbandingan Antara Model Edward III, Model Empiris 1 (Variabel Intervening Sumberdaya dan disposisi) dan Model Empiris 2 (Variabel Intervening Disposisi).

Tabel 5.72 Perbandingan Model Edward III, Model Empiris 1 (Intervening: Disposisi) dan Empiris 2 (Intervening : Disposisi)

	Pengaruh antar Va	Model Edward III		Model Emperis 1		Model Emperis 2	
		p-value / C.R	Hipotesis	p-value / C.R	Hipotesis	p-value / C.R	Hipotesis
1	Komunikasi → kinerja Implementasi SLF	*** < 0.05	P	0.029 < 0.05	P	0.032 (< 0.05)	P
2	Sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	*** < 0.05	P	*** < 0.05	P	0.002 (< 0.05)	P
3	Struktur birokrasi → Kinerja Implementasi SLF	0.001 < 0.05	P	0.003 < 0.05	P	0.002 (< 0.05)	P
4	Dukungan publik → Kinerja Implementasi SL	-	-	0.003 < 0.05	P	0.002 (< 0.05)	P
5	Komunikasi → disposisi	0.462 > 0.05	TP	0.074 > 0.05	TP	0.042 (< 0.05)	P
6	Sumberdaya → disposisi	*** < 0.05	P	0.006 < 0.05	P	0.004 (< 0.05)	P
7	Disposisi → sumberdaya	-	-	0.003 < 0.05	-	-	-
8	Struktur birokrasi → disposisi	0.001 < 0.05	P	0.003 < 0.05	P	0.021 (< 0.05)	P
9	Dukungan publik →	-	-	0.003 < 0.05	P	0.028	P

	Pengaruh antar Va	Model Edward III		Model Emperis 1		Model Emperis 2	
	disposisi					(<0.05)	
10	Disposisi → Kinerja Implementasi SLF BG	*** < 0.05	P	0.001 < 0.005	P	0.017 (<0.05)	P
11	Komunikasi → Sumberdaya	0.224 > 0.05	TP	0.79 > 0.05	TP	-	-
12	Struktur birokrasi → Sumberdaya	*** < 0.05	P	0.009 < 0.05	P	-	-
13	Dukungan publik → Sumberdaya	-	-	0.009 < 0.05	P	-	-
Pengaruh Tak Langsung							
14	Komunikasi → Sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.124 < 1.97	TP	ICRI=.231 < 1,97	TP	-	-
15	Komunikasi → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.00 < 1.97	TP	ICRI=1.627 < 1,97	TP	ICRI=1.157 < 1.97	TP
16	Sumberdaya → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=4.224 > 1.97	P	ICRI=2.116 > 1.97	P	ICRI=2.443 > 1,97	P
17	Disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.00 < 1.97	TP	ICRI=2.116 > 1.97	P	-	-
18	Struktur birokrasi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=5,923 > 1.97	P	ICRI=2.221 > 1,97	P	-	-
19	Struktur birokrasi → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=3.99 > 1,97	P	ICRI=2.383 > 1,97	P	ICRI=3.097 > 1,97	P
20	Dukungan publik → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	-	-	ICRI=1.653 < 1,97	TP	-	-
21	Dukungan publik → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	-	-	ICRI=2.310 > 1,97	P	ICRI=2.275 > 1,97	P
22	Komunikasi → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	CR=0.786 > 1.97	TP	ICRI=1.297 < 1,97	TP	-	-
23	Komunikasi → Disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	CR=1.021 < 1.97	TP	ICRI=1.297 > 1,97	TP	-	-
24	Struktur Birokrasi → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	CR=3.593 > 1.97	P	ICRI=2.204 > 1,97	P	-	-
25	Struktur Birokrasi → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	CR=3.990 > 1.97	P	ICRI=2.204 > 1,97	P	-	-
26	Dukungan publik → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	-	-	ICRI=2.116 > 1,97	P	-	-
27	Dukungan publik → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	-	-	ICRI=2.116 > 1,97	P	-	-

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2015; Keterangan : P (Berpengaruh); TP (Tidak berpengaruh)

Dari Hasil Perbandingan Tabel 5.72 diatas dapat dijelaskan berikut :

- a. Pada Model Edward III terdapat 6 variabel dengan 14 hubungan antara variabel dengan rincian 9 hubungan antara variabel secara langsung dan 5 hubungan secara tidak langsung. Rekonstruksi model Edward III yaitu model empiris 1 menambah variabel independen/eksogenus dukungan publik dengan variabel intervening/endogenus sumberdaya dan disposisi tetap dengan 27 hubungan antara variabel yang terdiri 13 hubungan antara variabel langsung dan 14 hubungan antara variabel tidak langsung. Sedangkan rekonstruksi model Edward III kedua yaitu model Empiris 2 yang mempunyai 13 hubungan antara variabel dengan rincian 9 hubungan antara variabel secara langsung dan 4 hubungan antara variabel secara tidak langsung. Pada model empiris 2 ada 4 variabel independen/endogenus yaitu komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dukungan publik dengan variabel intervening/endogenus disposisi dan variabel dependen/endogenus kinerja implementasi kebijakan SLF.
- b. Kajian pada model Edward III terdapat 9 variabel hubungan pengaruh langsung dengan 2 variabel yang tidak berpengaruh yaitu variabel komunikasi tidak berpengaruh terhadap variabel disposisi dan sumberdaya. Pada 10 variabel hubungan pengaruh tidak langsung terdapat 5 variabel yang tidak berpengaruh yaitu variabel komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF melalui disposisi dan sumberdaya. Disposisi terhadap kinerja melalui sumberdaya, komunikasi terhadap kinerja melalui sumberdaya dan disposisi atau disposisi dan sumberdaya.
- c. Pada model empiris 1 (intervening sumberdaya dan disposisi) terdapat 13 variabel hubungan langsung dengan 1 variabel yang tidak berpengaruh yaitu variabel komunikasi tidak berpengaruh terhadap sumberdaya. Pada 14 variabel tidak langsung terdapat 5 variabel yang tidak berpengaruh yaitu variabel komunikasi terhadap kinerja implementasi SLF melalui disposisi atau disposisi dan komunikasi terhadap kinerja implementasi SLF melalui

sumberdaya dan disposisi dan dukungan publik terhadap kinerja SLF melalui sumberdaya.

- d. Pada model empiris 2 (intervening disposisi) terdapat 9 variabel langsung yang berpengaruh langsung terhadap kinerja implementasi SLF. Pada 4 variabel tidak langsung terdapat 1 variabel yang tidak berpengaruh yaitu variabel komunikasi terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya.
- e. Dari perbandingan 3 model empiris hubungan variabel langsung terdapat perbedaan hubungan variabel yang tidak berpengaruh hanya pada model Edward III yaitu komunikasi tidak berpengaruh terhadap disposisi, sedangkan 2 model lainnya berpengaruh. Persamaannya yaitu variabel komunikasi tidak berpengaruh terhadap sumberdaya atau disposisi pada model Edward III dan empiris 1. Pada hubungan variabel tidak langsung 3 model terdapat persamaannya yaitu variabel komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya atau disposisi. Perbedaannya pada 2 model hubungan variabel komunikasi terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya dan disposisi tidak berpengaruh pada model empiris 1.
- f. Kesimpulan pada perbandingan model Edward III, model Empiris 1 dan 2 yaitu :
 - 1) Pada hubungan variabel tidak langsung model Edward III variabel komunikasi tidak berpengaruh terhadap disposisi dan apabila ditambah variabel independen/eksogenus dukungan publik pada model empiris 1 dan 2 hubungan antara variabel berpengaruh. Pada model Edward III Hubungan antara variabel komunikasi terhadap sumberdaya tidak berpengaruh begitu juga dengan penambahan variabel dukungan publik/eksogenus model empiris 1 hubungan antara variabel tidak berpengaruh.
 - 2) Hubungan variabel tidak langsung model Edward III variabel independen/eksogenus komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF melalui disposisi begitu juga dengan menambah variabel independen/eksogenus dukungan publik pada model empiris 1 dan 2 hubungan antara variabel tidak berpengaruh. Pada model model

Edward III hubungan variabel komunikasi terhadap kinerja implementasi melalui sumberdaya dan disposisi berpengaruh sedangkan apabila ditambah variabel independen/eksogenus dukungan pada model empiris 1 justru tidak berpengaruh.

- 3) Dari kedua alternatif model diatas penulis mengambil model 1 (intervening sumberdaya dan disposisi) atau model Edward III ditambah variabel independen/eksogenus dukungan publik sebagai model yang dapat diterapkan di kota Probolinggo maupun di daerah lainnya di Indonesia dengan pertimbangan berdasarkan analisis data kuantitatif kedua model pada tabel 5.2.4.1 diatas bahwa model empiris 1 mempunyai kelebihan 13 hubungan langsung dibandingkan model Edward III dan model empiris 2 yang hanya mempunyai 9 hubungan tidak langsung. Hubungan tidak langsung model empiris 1 yang mempunyai 15 hubungan dibandingkan model Edward III yang hanya mempunyai 5 hubungan variabel tidak langsung dan model 2 yang hanya mempunyai 4 hubungan tidak langsung. Pada Model empiris 1 ini ada 12 hubungan langsung yang berpengaruh terhadap variabel lainnya. Pada hubungan tidak langsung ada 13 hubungan antara variabel dengan 5 hubungan variabel yang tidak berpengaruh

Dari hasil perbandingan model empiris diatas, hasil Model Empiris 1 yang dapat dilihat pada Tabel 5.73 Pengaruh langsung dan Tabel 5.74 untuk Pengaruh tidak langsung yang merupakan model temuan penelitian berikut:

Tabel 5.73 Hasil Model Empiris Pengaruh Langsung Temuan Penelitian.

Hipotesis	Pengaruh Variabel	Estimasi	Effects		Total	p-value / C.R	Hasil Hipotesis
			Direct	Indirect			
	Pengaruh Langsung	Koef					
H1	Komunikasi (X1) → kinerja Implementasi SLF (Y3)	0.227	.138	-.029	.108	0.029 < 0.05	P
H2	Sumberdaya (Y1) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	0.328	.335	.087	.422	*** < 0.05	P
H3	Struktur birokrasi (X2) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	0.188	.235	.211	.446	0.003 < 0.05	P
H4	Dukungan public (X3) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	0.317	.299	.219	.518	0.003 < 0.05	P
H5	Komunikasi ((X1) → disposisi (Y2)	-0.351	-.176	.010	-	0.074 >	P

					.166	0.05	
H6	Sumberdaya (Y1) → disposisi (Y2)	0.451	.381	.000	.381	0.002 < 0.05	P
H7	Disposisi(Y2)→sumberdaya (Y1)	0.34	.406	.000	.406	-	-
H8	Strukturbirokrasi (X2)→ disposisi (Y2)	0.358	.254	.138	.393	0.018 < 0.05	P
H9	Dukunganpublik (X3)→ disposisi(Y2)	0.358	.280	.141	.420	0.039 < 0.05	P
H10	Disposisi (Y2) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	0.188	.227	.000	.227	0.02 < 0.05	P
H11	Komunikasi (X1)→ Sumberdaya (Y1)	0.042	.025	.000	.025	0.79 > 0.05	TP
H12	Strukturbirokrasi (Y2) → Sumberdaya (Y1)	0.45	.363	.000	.363	0.001 < 0.05	P
H13	Dukunganpublik (X3)→Sumberdaya (Y1)	0.400	.369	.000	.369	0.009 < 0.05	P

Sumber : Hasil Analisis,tahun 2015

Keterangan : P (Berpengaruh); TP (Tidak berpengaruh)

Tabel 5.74 Hasil Model Empiris Pengaruh Tidak Langsung Temuan Penelitian.

Hasil Hipotesis	Pengaruh Tak Langsung	TE-Estimate	TE-Standar Error	Critical ratio=Estimat/SE	Hasil Hipotesis
H14	Komunikasi (X1)→Sumberdaya (Y1) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	.182	-.042	ICRI=0.231 < 1,97	TP
H15	Komunikasi (X1) →disposisi (Y2)→Kinerja Implementasi SLF (Y3)	-.332	.204	ICRI=1.627 < 1,97	TP
H16	Sumberdaya (Y1)→disposisi (Y2)→Kinerja Implementasi SLF (Y3)	0.413	0.134	ICRI=3.082 > 1,97	P
H17	Disposisi (Y2)→sumberdaya (Y1) →Kinerja Implementasi SLF (Y3)	.343	.139	ICRI=2.47 > 1,97	P
H18	Struktur birokrasi (X2) →sumberdaya (Y1)→Kinerja Implementasi SLF (Y3)	.431	.194	ICRI=2.221 > 1,97	P
H19	Strukturbirokrasi (X2)→disposisi (Y2)→Kinerja Implementasi SLF (Y3)	.519	.143	ICRI=3.629 > 1,97	P
H20	Dukunganpublik (X3)→sumberdaya (Y1)→ Kinerja Implementasi SLF (Y3)	.400	.242	ICRI=1.653 < 1,97	TP
H21	Dukunganpublik (X3)→disposisi (Y2)→ Kinerja Implementasi SLF (Y3)	.538	.258	ICRI=2.085 > 1,97	P
H22	Komunikasi (X1)→Sumberdaya (Y1)→ Disposisi (Y2)→Kinerja Implementasi SLF (Y3)	.179	.138	ICRI=1.297 < 1,97	TP
H23	Komunikasi (X1)→ Disposisi (Y2)→sumberdaya(Y1)→Kinerja Implementasi SLF (Y3)	.179	.138	ICRI=1.297 < 1,97	TP
H24	Struktur Birokrasi (X2)→ Sumberdaya (Y1)→ Disposisi (Y2)→ Kinerja Implementasi SLF (Y3)	.519	.143	ICRI=3.629 > 1,97	P
H25	Struktur Birokrasi (X2)→disposisi (Y2)→sumberdaya (Y1)→ Kinerja Implementasi SLF (Y3)	.519	.143	ICRI=3.629 > 1,97	P
H26	Dukungan publik (X3)→ Sumberdaya (Y1)→ Disposisi (Y2)→ Kinerja Implementasi SLF (Y3)	-.549	.214	ICRI=2.565 > 1,97	P
H27	Dukungan publik (X3)→disposisi (Y2)→sumberdaya (Y1)→ Kinerja Implementasi SLF (Y3)	-.549	.214	ICRI=2.565 > 1,97	P

Sumber : Hasil Analisis,tahun 2015 .

Keterangan : P (Berpengaruh); TP (Tidak berpengaruh).

Pada model empiris 1 Squared Multiple Correlation (SMC) merupakan kuadrat dari nilai estimasi terstandarisasi masing-masing variabel indikator dapat ditafsirkan sebagai reliabilitas indikator. Indikator yang reliabel mempunyai nilai SMC lebih besar dari 0,5. SMC model empiris 1 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.75 Squared Multiple Correlation (SMC) Model Empiris 1

No.	Variabel	Indikator	Estimate	Keterangan	
1	Kinerja Implementasi <i>SLF</i> (Y3)	<i>Ketepatan</i>	y36	,356	Tidak Reliabel
		Responsivitas	y35	,646	Reliabel
		<i>Pemerataan</i>	y34	,485	Tidak Reliabel
		kecukupan	y33	,509	Reliabel
		Effisien	y32	,535	Reliabel
		Effektif	y31	,603	Reliabel
2	Disposisi (Y2)	Komitmen	y21	,613	Reliabel
		Penempatan Staf	y22	,647	Reliabel
		Insentif staf	y23	,723	Reliabel
3	Sumberdaya (Y1)	<i>Kewenangan</i>	y15	,306	Tidak Reliabel
		Informasi data	y14	,648	Reliabel
		Anggaran	y13	,525	Reliabel
		<i>peralatan</i>	y12	,472	Tidak Reliabel
		<i>SDM</i>	y11	,489	Tidak Reliabel
4	Dukungan Publik (X3)	<i>persyaratan menghambat (disinsentif)</i>	x32	,443	Tidak Reliabel
		Tanpa biaya (insentif)	x31	,718	Reliabel
5	Struktur Birokrasi (X2)	<i>Fragmentasi</i>	x21	,276	Tidak Reliabel
		koordinasi	x22	,746	Reliabel
		SOP	x23	,796	Reliabel
6	Komunikasi (X1)	<i>Konsisten</i>	x13	,461	Tidak Reliabel
		Jelas	x12	,959	Reliabel
		<i>Transmisi</i>	x11	,474	Tidak Reliabel

Sumber: Hasil Analisis, tahun 2015

Pada Tabel 5.75 Squared Multiple Correlation (SMC) Model Empiris 1 adalah mengenai validitas konstruk, yaitu tingkatan yang memastikan bahwa item-item pengukuran (indikator) secara aktual merepresentasikan konstruk

hipotesis (variabel laten) yang dirancang untuk diukur oleh item-item. Grace (2006) validitas konstruk menjadi 2 kelompok, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal menunjukkan derajat relasi item-item ukuran dengan kriteria eksternal, yaitu validitas kriterion. Validitas internal dilakukan secara internal antar ukuran yang satu terhadap yang lain, bukan terhadap kriterion eksternal. Validitas internal adalah validitas konvergen dan validitas diskriminan.

Validitas konvergen terpenuhi jika terdapat interkoneksi yang cukup antar variabel-variabel (indikator) yang digunakan untuk mengukur konstruk yang sama. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi validitas konvergen yaitu menggunakan reliabilitas instrumen pengukuran yang dapat ditunjukkan dengan reliabilitas item atau R^2 Indikator/ Squared Multiple Correlation (SMC).

Reliabilitas adalah derajat keandalan (konsistensi) instrumen pengukuran. Pada pengukuran variabel laten atau konstruk, reliabilitas adalah konsistensi internal indikator-indikator suatu konstruk dalam melakukan pengukuran (Hair et al. 2006). Dalam terminologi formal, reliabilitas adalah derajat yang menyatakan bahwa dua atau lebih indikator berbagi (share) dalam mengukur sebuah konstruk. Indikator-indikator konstruk yang mempunyai reliabilitas tinggi (diatas 0,5), maka akan mempunyai interkoneksi (korelasi antar indikator) yang tinggi pula, ini menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut bersama-sama mengukur konstruk yang sama.

Variabel laten/konstruk komunikasi mempunyai indikator transmisi (x1.1), jelas (x1.2) dan konsistensi (x1.3) dari 3 indikator ada 2 indikator yang tidak reliabel yaitu indikator transmisi dan konsisten. Artinya komunikasi kurang disampaikan kepada stakeholder internal dan eksternal dan kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF-BG) tidak konsisten diterapkan pada semua bangunan gedung.

Variabel unobserved/laten/konstruk/konsep struktur birokrasi mempunyai indikator fragmentasi (x2.1), koordinasi (x2.2) dan SOP (x2.3). dari ketiga Indikator terdapat satu indikator yang tidak reliabel yaitu fragmentasi

(x2.1)/lembaga terpecah-pecah atau tidak menjadi satu akan menyebabkan fragmentasi yaitu pelaksanaan sertifikat laik fungsi dilaksanakan satu seksi sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan Walikota.

Variabel unobserved/laten/konstruk/konsep dukungan publik mempunyai indikator tanpa biaya/insenti (x3.1) dan persyaratan menghambat/disinsentif (x3.2). Dari kedua indikator bahwa indikator persyaratan menghambat/disinsentif tidak reliabel yaitu dalam pelaksanaan SLF-BG masyarakat dibebani dengan persyaratan menghambat (as built drawing, biaya sendiri untuk konsultan pengawas/MK/pengkaji teknis).

Variabel unobserved/laten/konstruk/konsep sumberdaya mempunyai indikator sumberdaya manusia (y1.1), anggaran (y1.2), peralatan (y1.3), informasi data (y1.4) dan kewenangan (y1.5). dari kelima indikator ada tiga indikator yang tidak reliabel yaitu SDM, peralatan dan kewenangan. Pelaksanaan sertifikat laik fungsi fungsi bangunan tidak didukung dengan jumlah SDM, tidak mempunyai peralatan dan tidak memiliki kewenangan yang kuat.

Variabel unobserved/laten/konstruk/konsep disposisi mempunyai indikator komitmen (y2.1), mutasi staf (y2.2) dan insentif (y2.3). ketiga indikator semua reliabel dengan komitmen yang kuat dalam melaksanakan SLF, melakukan mutasi staf sesuai kompetesin dan memberikan insentif kepada staf dalam pelaksanaan SLF-BG.

Variabel unobserved/laten/konstruk/konsep kinerja implementasi kebijakan SLF-BG mempunyai indikator efektif (y3.1), efisien (y3.2), kecukupan (y3.3), pemerataan (y3.4), responsivitas (y3.5) dan ketepatan (y3.6). Dari keenam indikator ada dua indikator yang tidak reliabel yaitu pemerataan dan ketepatan. Kinerja implementasi kebijakan SLF-BG belum merata pada seluruh pemohon/pengguna bangunan gedung dan ketepatan kebijakan SLF-BG belum berguna/benilai bagi pemilik bangunan gedung sesuai dengan tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yaitu bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

5.3 Hasil Penelitian Data Kualitatif Melalui Indept Interiew

5.3.1 Komunikasi

Keputusan dan perintah Kebijakan SLF harus diterapkan kepada orang yang tepat dan di komunikasikan kepada orang yang jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana dilapangan, salah satu adalah peran sekretaris dalam menerjemahkan kebijakan SLF, salah satu penghambat adalah pergantian sekretaris di Dinas PU yang bukan berlatar belakang teknis yang belum mengetahui SLF. Rasyid Sekretaris Dinas PU mengatakan bahwa :

“dia mewakili rapat tetapi belum mengetahui apa itu SLF ? fungsi sekretaris adalah terkait dengan program-program umum di dinas PU sedangkan yang bersifat teknis diserahkan bidang untuk melaksanakan termasuk SLF yang bersifat teknis.” (wawancara, 23/7/2015).

Fungsi sekretaris adalah sebagai koordinasi antara bidang dan unit pelayanan teknis. Sekretaris baru membutuhkan pengetahuan tentang ke-pu-an agar dapat lebih intensip melakukan tugas penunjang administrasi bagi bidang dan UPT serta wakil kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan dalam menjalankan tugas. Pekerjaan ini membutuhkan peran sekretaris agar cepat beradaptasi dan belajar tentang tugas dan fungsinya.

Dini Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas PU mengatakan :

“Selama ini dalam kebijakan SLF belum dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat pemilik bangunan gedung ber-IMB dan kebijakan SLF bangunan gedung belum dilaksanakan secara konsisten, hanya bangunan gedung umum yang sudah di beri SLF. Sedangkan bangunan gedung hunian belum diberikan SLF.” (wawancara, 8/9/2015).

Senada dengan Dini, Kasi Penataan Ruang Dinas PU Hari juga mengatakan :

“ Dalam implementasi kebijakan SLF bangunan gedung kurang disosialisasikan kepada pemilik bangunan gedung ber-IMB, juga pimpinan kurang mengkomunikasikan pada staf pelaksana lapangan.”(wawancara, 10/9/2015).

Bangunan gedung yang mempunyai SLF tidak sesuai dengan jumlah bangunan gedung yang mempunyai IMB. Hal ini salah satu sebabnya adalah

kurang komunikasi yang dilakukan aparat Dinas PU dalam mengkomunikasikan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung khususnya SLF secara rutin ke masyarakat. Implementasi SLF selama ini yang berjalan komunikasi kepada masyarakat hanya dilakukan sekedarnya tanpa mempunyai program dan dilakukan sekali setahun.

Nurkhamdani, ST Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo mengatakan:

“ untuk komunikasi di Dinas Pekerjaan Umum antara Kepala Dinas dengan kbid, kasi dan staf adalah komunikasi dilakukan setiap minggu 2 kali diinternal PU. apabila ada laporan dari staf, kasi dan kbid yang perlu ditindaklanjuti dengan dicari bagaimana solusinya? “ (wawancara, 6/8/2015).

Disamping komunikasi yang dilakukan ke masyarakat, faktor yang penting adalah memberikan pengetahuan dan wawasan kebijakan SLF kepada staf pelaksana lapangan sebelum terjun ke masyarakat. Ini dilakukan agar birokrasi yang mempunyai kesamaan pandangan SLF dalam mengkomunikasi SLF sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.

Dari pendapat dan paparan penyelenggara bangunan gedung diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung tidak mengalami peningkatan dikarenakan kurangnya komunikasi kepada masyarakat dan pelaksana lapangan, juga kurang konsistennya penyelenggara bangunan gedung menjalankan peraturan perda dan perwali SLF. Dalam penerapan implementasi kebijakan SLF bagi bangunan gedung umum dan hunian, hanya bangunan gedung umum saja yang diberikan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

5.3.2 Sumberdaya

Salah satu variabel yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan adalah sumberdaya (SDM, dana, peralatan, kewenangan dan informasi). Sumberdaya yang penting adalah sumberdaya manusia. Kuantitas maupun kualitas menentukan arah kebijakan yang akan menjadi tujuan

organisasi. Peraturan tentang aparatur yang lengkap tidak akan berpengaruh bila SDM yang ada tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam bidangnya maka tujuan implementasi kebijakan tidak berjalan efektif dan efisien

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan SLF, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan SLF, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumberdaya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak efektif.

Hari Kasi Penataan Ruang Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum mengatakan:

“ SLF tidak jalan (lambat) karena kita kekurangan Sumberdaya Manusia yang mempunyai sertifikasi pengkaji teknis Bangunan Gedung contohnya kita tidak bisa memeriksa bangunan gedung sederhana karena kekurangan SDM dan juga sumberdaya anggaran dan peralatan yang memadai”. (wawancara :23/7/2015).

Dini Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum mengatakan:

“ implementasi kebijakan SLF tidak didukung dengan jumlah staf, dana yang digunakan hanya untuk operasional Tim Ahli Bangunan gedung (TABG), informasi/data yang tidak terintegrasi dengan Badan Pelayanan Perijinan, kewenangan yang kurang dari tim TABG hanya memberikan rekomendasi kepada Dinas” (wawancara,8/9/2015).

Jumlah SDM yang menangani SLF dan berlatar belakang teknik hanya 1 orang dengan status kepegawaian PNS, kualifikasi pendidikan D3, satu orang pendidikan D3, status pegawai tidak tetap (PTT) dan 2 orang tenaga SMK teknik dengan status PTT. Pekerjaan yang utama dan rutin adalah mengerjakan proyek-proyek pembangunan gedung pemerintah daerah. Sedangkan pengurusan SLF tidak merupakan pekerjaan utama karena tidak ada anggaran yang memadai atau insentif/honor bagi mereka.

Nurkhamdani, ST Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo mengatakan:

“selama ini dalam implementasi SLF bangunan gedung di bidang Cipta Karya, SDM yang menangani SLF kurang, sosialisasinya sudah dilakukan bahwa pentingnya SLF tapi itu akan menjadi permasalahan dikemudian hari. Pada tahun 2016 sosialisasi kepada yang berkepentingan seperti dinas terkait dan masyarakat perlu. SLF harus dioptimalkan pelaksanaannya. Dana kecil, anggaran kecil. Anggaran 2016 akan ditingkatkan, personel ditambah kedepannya. Perda akan berjalan maksimal tahun 2016 ditingkatkan sosialisasi di radio suara kota, koran dan langsung sosialisasi ke masyarakat. Agar Masyarakat tahu SLF.” (wawancara, 6/8/2015).

Mencermati pernyataan kepala Dinas PU diatas bahwa SDM kurang akan ditambah. Melihat kebijakan Menpan yang masih melakukan moratorium terhadap PNS akan sulit bagi pemda menambah PNS, salah satu cara adalah dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat atau swasta melalui pemberdayaan jasa konstruksi dibidang pengkaji teknis bangunan gedung dan melibatkan TABG dalam melakukan pemeriksaan teknis dan administrasi kelengkapan aspek keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan bangunan gedung. Peningkatan anggaran pada pos peningkatan SDM aparatur dan pemberdayaan jasa konstruksi. Dengan anggaran yang cukup dapat dibeli peralatan yang dibutuhkan untuk memeriksa laik fungsi bangunan gedung seperti peralatan profometer untuk mengecek tulangan didalam beton dan inframerah untuk peralatan listrik, juga peralatan server bagi sistem informasi bangunan gedung sebagai data terintegrasi dipusat data Dinas PU dari Dinas Perijinan dan Kecamatan.

Ir. Wahyu W, Msc mengatakan:

” Dari sisi pemda tidak ada alasan tidak ada SDM karena ada pengkaji teknis. Memanfaatkan potensi dimasyarakat sebagai manajemen konstruksi (MK) dipihak owner bisa memeriksa hasil MK tidak harus dobel. Penyedia jasa lain memeriksa. Masalahnya bagaimana membuat sistem SLF supaya jalan dari aturan PP pemda hanya sebagai pembina. Kita harus membuat masyarakat mandiri. Bila dikerjakan sendiri beban Pemda menjadi berat. Dari perwali No. 35 SLF tahun 2013 TABG memeriksa dokumen rencana teknis, dihalaman berikut bab 5 pasal 10 TABG memeriksa kelaikan ini tidak sama dengan awal. Ditambah beban lagi TABG. Pengalaman 43 SLF BG adakah yang tidak laik apakah semua lolos. Setelah cek lapangan,

lalu rapat pleno apakah sesuai atau tidak.” Ujar bu Wahyu. (FGD, 17/9/2015).

Dari pendapat diatas bahwa tidak harus menambah SDM/personel tapi dapat dilakukan dengan memanfaatkan masyarakat dengan pemberdayaan jasa konstruksi sebagai penanggung jawab konstruksi bangunan gedung apabila terjadi kegagalan konstruksi. Tugas TABG dari unsur masyarakat adalah memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pertimbangan pada dokumen teknis SLF.

Pepen, ST mengatakan:

“ Ditahun 2011 daftar simak kita banyak istilah yang belum dimengerti, tugas kita adalah memeriksa bangunan gedung apakah sudah dilakukan pemeriksaan sesuai daftar simak. Instruksi kerja daftar simak dibagi sesuai kompleksitas bangunan gedung sesuai keandalan. Yaitu Keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Keselamatan ada keamanan, pemadam kebakaran dan petir. Balitbang perumahan dan permukiman dari tahun 2013 sudah ada KAN sebagai lembaga inspeksi sesuai ISO 1720, lingkupnya memeriksa kelaikan bangunan gedung. Sedangkan yang mengeluarkan sertifikat SLF adalah pemda. Ada puluhan BG, pemda sebagai pembina bangunan gedung. Bukan sebagai pemain merangkap wasit. Ijin pelaksana pemeriksa juga yang laik sebagai apa. Apakah swasta sebagai pemeriksa kita diakui sebagai inspeksi. Yang penting keselamatan teknis mereka meminta karena dipaksa oleh pasar secara teknis punya aturan standar kita bisa gampang memutuskan. Didaerah yang diakui pemeriksian pemadam kebakaran hasil kita bisa dipantau oleh pemilik BG. Kita sudah bagi secara jelas keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Kita lakukan jajak pendapat melalui HP dari situ keselamatan nomor satu ketika struktur bangunan gedung, bagaimana secara visual dokumen yang penting bagi memeriksa BG. Keputusan dari pemeriksaan dengan pengukuran lain apabila diskor. Keselamatan tidak ada skor, inspektur oke jadi keputusan laik atau tidak? Faktor keselamatan nomor satu. disini akan ada rekomendasi teknis, lampiran ini. menilai laik fungsi bagaimana ? tidak ada bobot hanya dari visual.”

Dari pendapat diatas bahwa istilah yang perlu dimengerti oleh personel pemda dalam mengisi daftar simak sebagai kelengkapan SLF dan juga bagi pengkaji teknis bangunan gedung sebagai unsur penanggung jawab atau wakil

pemilik bangunan gedung. Hal perlu dilakukan peningkatan SDM baik bagi personel pemda dan pengkaji teknis melalui pelatihan/workshop SLF tentang pedoman sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Wahyu ST mengatakan:

“ Pada waktu rapat akan memeriksa bangunan gedung dilakukan sendiri untuk memilih bangunan yang bertingkat berapa ? diatur sendiri, rekomendasi dari dinas PU apabila bangunan gedung yang kompleks. Di Jakarta level bangunan sederhana cukup kecamatan. Untuk bangunan gedung tingkat 8 keatas dinas PU. Contohnya Bangunan tertinggi di Indonesia, IMB diperiksa TABG membutuhkan waktu yang lama” Wahyu ST mengatakan “di Jakarta dipandu mulai IMB, sedangkan di Probolinggo TABG yang memeriksa termasuk SLF. Di Jakarta tidak semua bangunan diperiksa TABG. Di peraturan pemerintah bangunan gedung pemeriksaan dilakukan oleh pengkaji teknis. Di Bandung konsultan perencanaan nurut. Pemda yang membuat sistem menghadapi perencana yang bisa dihandalkan. Untuk memeriksa bangunan pada waktu proses IMB dicegat dulu. Jadi kita menilai laik fungsi atau tidak. Instrument apa ? ini berfungsi apa, kapasitas termasuk control dari konsultan. Apabila yang dicontoh tingkat tinggi. Sesuai dengan SDM yang ada. Di Probolinggo tidak sebanyak DKI. Nanti berat kedepan bila semua ditangani TABG.”

Kapasitas SDM pemda dan pengkaji teknis sebagai unsur utama dalam memeriksa laik fungsi atau tidak bangunan untuk mendapat SLF. Untuk pengkaji dan perencana perlu diseleksi melalui Sertifikat keahlian (SKA) dan SKT perorangan. Sertifikat Badan Usaha (SBU) diperlukan sekali untuk menyeleksi badan usaha jasa konstruksi dalam melakukan pemeriksaan SLF. Sementara ini aturan kementerian PU sudah ada tentang sertifikat badan usaha pemeliharaan dan pemeriksaan bangunan gedung, tetapi karena pasar belum banyak melakukan konsultan belum merespon dan tidak ada yang mengurus SBU.

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor sumberdaya mulai sumberdaya anggaran, peralatan, informasi, kewenangan dan yang memegang peranan penting adalah sumberdaya manusia yang memainkan peran yang vital atau berpengaruh dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

5.3.3 Struktur Birokrasi

Sumberdaya untuk mengimplementasikan kebijakan memadai dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Namun implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi.

Hari Kasi Penataan Ruang Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum mengatakan:

“ di seksi penataan ruang ada beban yang mempengaruhi kinerja dalam pengawasan bangunan gedung karena juga menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) ada dua beban dalam meningkatkan kinerja termasuk membantu seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam menerbitkan SLF.” (wawancara : 23/7/2015).

Beban yang ada diseksi Penataan Ruang adalah menyusun perencanaan penataan ruang yaitu Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan pengendalian ruang yaitu pengawasan bangunan, menerbitkan SKRK dan rekomendasi IMB. Sedangkan penerbitan SLF merupakan dukungan terhadap penyediaan data IMB. Pengawasan bangunan dilakukan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki IMB dan pelaksanaan awal pembangunan gedung yang sudah ber-IMB.

Dini Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum mengatakan:

“ada dua beban yang dilaksanakan diseksi ini yaitu pelaksanaan proyek proyek pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedungpemerintah dan menerbitkan SLF BG tetapi hal ini menjadi saling melengkapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah daerah dengan ditindaklanjuti SLF BG”.(wawancara : 23/7/2015).

Beban berat diseksi penataan bangunan dan lingkungan adalah perencanaan bangunan gedungdan pembangunan gedung pemerintah yang mempunyai volume pekerjaan yang besar, dengan beban ini pekerjaan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung banyak tidak tertangani.

Salah satu yang juga menjadi kajian struktur birokrasi adalah koordinasi penyelenggara bangunan gedung. Koordinasi terkait perubahan perda retribusi

IMB. Didalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Salah satu Pasal (Pasal 142 ayat (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Nurkhamdani, ST Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo mengatakan:

“Bila ada perubahan perda retribusi IMB ada surat walikota untuk melakukan koordinasi yang membutuhkan waktu dengan Bagian Hukum. Harus dilakukan validasi dan dipertanggungjawaban dalam merapatkan barisan dan berupaya sehingga tujuan dimaksud bisa tercapai. Dirubah dengan perda/perwali membutuhkan waktu, aparatur apabila tidak ada aturan tidak bisa berkerja. Merubah perda retribusi, kita akan berupaya seperti itu. Khususnya bagian hukum dan dinas terkait.”(wawancara, 6/8/2015).

Koordinasi yang terjadi pada birokrasi adalah kegiatan yang membutuhkan waktu apalagi pembahasan peraturan perlu kecermatan dalam pembahasan terkait aturan maupun pelaksanaan.

Pepen, ST mengatakan tentang koordinasi antara SKPD adalah:

“Dalam pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Batam melibatkan Disnaker, di Kota Probolinggo melibatkan juga disnaker ? Tim terdiri dari beberapa keahlian, maksud saya dalam Berita Acara untuk menerbitkan SLF ada Berita acara bersama apakah juga tim melakukan croscek. Dari Disnaker lulus tapi isinya abal-abal. bagaimanapun tim yang bertanggung jawab. Secara visual memenuhi syarat karena bangunan baru. Laik operasi dilampirkan untuk SLF. Laik operasi lima tahun sekali harus direvisi. mereka sudah melakukan peremajaan ngurus SLO diundang lagi ke PU. Ada tim dari konsultan ada pemeriksaan listrik. lampiran gambar. Rekomendasi keluar dikerjakan sesuai hasil rekomendasi konsultan pengkaji teknis.”(FGD, 17/9/2015).

Dari pendapat ini bahwa koordinasi yang dilakukan terkait pelaksanaan SLF juga memerlukan tim terpadu dalam menghasilkan rekomendasi agar berita acara yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Ir. Wahyu W, Msc berbagai cerita tentang pemeriksaan kebakaran di Batam.

“ Dinas PU Kota Batam gandeng Dinas Kebakaran dan kelistrikan yang diperiksa melalui proses yang sangat panjang. Apakah kita percaya rekomendasi dari mereka, dinas teknis terkait juga terlibat?. Dari sini merekomendasikan bangunan gedung laik fungsi. dalam menerbitkan SLF ada BA apakah setiap orang menanda tangani seperti Disnaker sebagai dinas tidak merekomendasikan, tetapi personel yang bertanggung jawab. Apakah tim juga melakukan croscek, rekomendasi lulus laik fungsi tetapi isinya abal-abal, padahal yang mempertanggung jawabkan adalah tim ini. Bu dini tentang ini mengatakan “ panel listrik sudah terpasang ada rekomendasi dari disnaker sudah memenuhi syarat dari bangunan baru. Peraturan umum konstruksi bangunan karena baru dilampirkan SLF, setiap tahun peraturan harus revisi. Pak Adi dari AKLI Probolinggo mengatakan “Harus ada peremajaan ngurus SLO baru. Selain dari kita ada tim konsultan kalau listrik tidak ada rekomendasi tidak bisa keluar”.

Koordinasi antara tim terdiri dari dinas teknis yang melakukan pemeriksaan fungsi bangunan gedung hunian pada periode 2008-2009, instansi kebakaran yaitu UPT kebakaran, Disnaker dan BLH terkait listrik diajak untuk mengecek bangunan dengan mengisi daftar simak. Dinas PU memberikan surat keterangan laik fungsi dengan melibatkan disnaker, sebelum melihat lapangan mereka menguji bahan-bahan tahan api dari disnaker”

Pepen ST, mengatakan dalam kesempatan ini

Punya SOP lain. Misal gini disini detail pintu rusak dikatakan apa ? rekemondasi perlu diperbaiki. Struktur ada retak perlu diperbaiki. Karena struktur siapa yang kerja sempurna. Mungkin di Jakarta karena owner menuntut baik. Pemda yang menyelenggarakan SLF, pemda bisa membuat pedoman ketika instrument meniru pusat jadi keberatan karena kondisi berbeda. Daerah membuat panduan yang tidak menyulitkan disini. Di kota Probolinggo bangunan gedung bertingkat tidak banyak; di Jakarta bangunan gedung bertingkat banyak. Instrumen dibuat pemda seisinya tetapi pembuatan sesuai kapasitasnya Cuma didalam undang-undang keselamatan tidak bisa ditawarkan lagi yang bisa pondasi susah tertuang kurang sedikit keselamatan wajib

bisa bagaimana pelaksanaannya. Sekarang kolom sudah tertutup banyak lembaran kosong bagaimana pertanggung jawab ke publik. Bagaimana bila ada gempa atau angin bangunan gedung ambruk masyarakat percaya Dinas PU. kejadian kebakaran kita terlanjur mengeluarkan SLF jadi boomerang bikin sendiri, keselamatan masyarakat tidak boleh ditawar tinggal memeriksakan dan siapa yang memeriksa balik ketiga berat tanggung jawab. Kita lebih baik pakai alat. Di Jepang dengan kuisisioner jadi kesimpulan bagi kita ngomong kurang atau ukur apa ditulis direkomendasi. Lebih lanjut Pepen, ST mengatakan : “ Perlindungan kepublik tanggung jawab pemeriksa terkait nyawa orang bila struktur bangunan tidak sesuai. Pengkaji teknis bertanggung secara profesional. secara visual ada pedoman bagaimana harus di selesaikan secara struktur. penghawaan terkait ventilasi secara teknis 10 % dari luas ruangan, ada saat pada udara segar pengaturan ruang terkait oksigen.” (FGD, 17/9/2015)

Disamping koordinasi yang diperlukan dalam kerjasama tim, sebagai pendukung koordinasi adalah standar operasional prosedur, dimana pada SOP ini pelaksanaan koordinasi sudah baku dengan peran masing-masing anggota tim sudah jelas dan waktu pelaksanaan sudah jelas.

“ Perijinan IMB di Jakarta melalui Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (BPSP), SLF yang mengeluarkan BPSP, dulu Dinas Pengawasan Bangunan, yang mengurus SLF dulu di Dinas Pengawasan Bangunan adalah bagian, sekarang jadi seksi di Dinas Tata Kota, jumlah SDM sedikit tidak berpengaruh dengan 7 orang bisa mengatur ratusan bangunan. Dari perijinan pengurusan SLF disebar ke dinas teknis yang memeriksa administrasi adalah BPSP. Sedangkan dinas teknis yang merokemendasi secara teknis. Mengacu dari dinas teknis. Semua permohonan dari dinas perijinan. Minta copy semua dari perijinan satu pintu. Bila Di Batam masih Dinas Tata Kotasemua melalui dinas teknis. Permohonan SLF melalui dinas PU. Sesuai undang-undang pemerintah memberi kewajiban SLF. Peraturan Bangunan adalah pembinaan. Intinya masyarakat di DKI diberi pembelajaran tentang bangunan yang disegel sebagai sanksiyaitu sokterapi kepada masyarakat yang tidak memiliki SLF, contohnya beberapa waktu lalu adalah bangunan milik kontrad (BG Green Mal Tebet)”.

Struktur Birokrasi perijinan bangunan gedung dimasing-masing kota bermacam-macam. Dengan adanya pedoman dari Kemendagri tentang Pelayanan terpadu satu pintu daerah, diharapkan pemerinta daerah mengikuti ketentuan ini yang nantinya investasi dan pemohon tidak mengurus perijinan bangunan di dinas

teknis, cukup melalui Dinas Perijinan. Fungsi Pelayanan terpadu satu adalah sebagai pemerosesan administrasi perijinan bangunan gedung dan koordinasi sedangkan rekomendasi teknis tetap melalui Dinas Teknis.

Pepen S, ST juga menyampaikan:

. Struktur birokrasi berubah ketika sistem belum berjalan. Orang teknis gampang bekerja. Didalam UU ada P4K. pemeriksaan kelapangan. di Probolinggo menggunakan daftar simak merujuk bidang kepakaran. Di Bandung Rusun yang minta karena ada ketentuan UU Rusun. Pemda meminta rekomendasi dari pengkaji teknis mana rekomendasinya SLF-BG. bila gedung baru ada MK ditanda-tangani diatas materi, aman sekali sudah ada tameng dari pengkaji teknis. Gratis. Bangunan gedung ditesting tidak sama antara gambar IMB dengan hasil dicek kenyataan dilapangan ada perubahan”, (FGD, 17/9/2015).

Pendapat ini menguatkan bahwa struktur birokrasi berubah ketika sistem belum berjalan, diperlukan penguatan koordinasi internal antara SKPD dan koordinasi eksternal dengan konsultan pengkaji teknis agar pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa struktur birokrasi meningkatkan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi, juga berpengaruh dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

5.3.4 Dukungan Publik

Dukungan publik terhadap suatu kebijakan sangat penting. Pada setiap peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, perda dan peraturan pelaksanaan seperti peraturan kepala daerah pada bab terakhir ada peran masyarakat, tanpa peran masyarakat pelaksanaan undang-undang tidak akan jalan dan efektif. Pada teori yang dipakai pada penelitian ini (Mazmanian dan Sabatier, 1983) bahwa kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat *dis-insentif* seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

Menurut Dini Susanti, ST Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo bahwa:

“dukungan publik sangat kurang dalam menindaklanjuti IMB menjadi SLF hal ini dilakukan dengan memberikan surat panggilan beberapa kali kepada Pemilik bangunan gedung. Contohnya kita memberikan surat panggilan kepada Bank Panin Kota Probolinggo di Jl. Panglima Sudirman sampai panggilan ketiga tetapi tidak direspon oleh pelaksana bangunan tetapi pemilik bangunan di Jakarta akhirnya bisa memaklumi bahwa segera diurus SLF, mungkin karena ini sudah ditetapkan perusahaan bahwa SLF sangat perlu sebagai sertifikat kelaikan bangunan gedung seperti di Jakarta yang sudah diberlakukan SLF pada setiap bangunan”.(wawancara, 15/5/2015).

Sedangkan bangunan gedung fungsi usaha yang sangat antusias adalah Kantor BCA di jalan Suroyo mereka tanpa diminta mengurus SLF ke Dinas PU. Menurut Ir. Imanto MM Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum sekarang menjabat Kepala Bappeda:

”dukungan publik yang baik adalah pada bangunan gedung Pabrik Eratex di Jl. Sukarno Hatta. Walaupun tidak diminta mereka sangat membutuhkan SLF dan mengajukan SLF . mungkin persyaratan Keselamatan gedung adalah standar ILO. mereka sangat membutuhkan untuk mengurusnya.” (wawancara, 10/5/2015).

Menurut Hari Kasi Penataan Ruang Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo:

“dukungan publik sangat kurang dalam mengurus SLF yaitu pada pelaksanaan Pembangunan gedung Show room dan bengkel Toyota Auto 2000 di jalan Panglima Sudirman. Sudah dipanggil sampai tiga kali tidak ada respon sama sekali, anggapan mereka mungkin tidak membutuhkan SLF. Sampai sekarang Bangunan gedung Auto 2000 Toyota belum ada SLF nya.”(Wawancara, 12/5/2015).

Dari pendapat diatas bahwa dukungan publik sangat kurang terhadap pelaksanaan SLF. Hal ini karena kurang sosialisasi dari Birokrasi dan juga sistem peraturan perundang-undangan belum membutuhkan SLF sebagai jaminan asuransi atau prasyarat bagi perijinan lainnya.

Dukungan Publik Terhadap Implementasi SLF ini bila intensip dilakukan birokrasi hasilnya akan baik. Hasil wawancara dengan ibu Lani Hartanta, SE,

MM pemilik Pink House (homestay) di Jalan Mawar Permai No. 26 dengan luas lantai bangunan Lt. I 379,71 m² dan Lt. II 292,23 M² mengatakan bahwa:

“ dia meminta kepada dinas PU agar mempercepat SLF karena akan digunakan sebagai ijin pemanfaatan bangunan (contoh sudah ada Plat SLF di Guest House Diponegoro 5) “ juga bersamaan diberita mas media televisive tentang penyegelan Mall Green Tebet oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur karena tidak mempunyai SLF.(wawancara, 23/7/2015).

Dari pendapat masyarakat ini memberikan gambaran bila bangunan gedung lainnya sudah ada SLF maka bangunan gedung lainnya mengikuti dan juga ada contoh kota lainnya yang sudah menerapkan penertiban SLF.

Menurut Hari Pujo, ST Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang juga praktisi Konsultan mengatakan bahwa:

“ dukungan publik sangat kurang dalam implementasi Kebijakan karena kurangnya sosialisasi dalam Kebijakan SLF dan warga tidak tahu apa itu SLF. Pada waktu warga mengurus SLF akan dicek bahwa semua ketentuan teknis IMB sesuai dengan pelaksanaannya.” (wawancara, 8/8/2015).

Pendapat ini juga memberikan gambaran bahwa birokrasi kurang mengadakan sosialisasi SLF, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi bahwa setelah masyarakat mempunyai IMB ditindaklanjuti dengan SLF.

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor dukungan publik berpengaruh dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

5.3.5 Disposisi

Disposisi adalah kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Apabila implementasi kebijakan SLF ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan SLF. Pelaksana juga harus melakukan kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh pelaksana kebijakan

adalah kejujuran, komitmen, demokratis, kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh. Disposisi yang bermotivasi tinggi mempunyai keberhasilan implementasi kebijakan.

Disposisi dalam implementasi kebijakan SLF sangat rendah. Hal dapat dilihat dari kinerja yang dihasilkan mulai tahun 2008 sampai dengan 2014 hanya 44 SLF yang dihasilkan dan belum ada peraturan walikota tentang pelaksanaan perda bangunan gedung. Baru tahun 2013 keluar peraturan walikota tentang SLF dan SOP penerbitan SLF.

Faktor disposisi atau sikap pimpinan dalam implementasi kebijakan SLF masih kurang, mulai dari penegakan peraturan terkait sanksi administrasi. Hal ini ditegaskan oleh Nurkhamdani, ST Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo mengatakan:

“ bagi bangunan gedung yang belum mempunyai SLF untuk bangunan yang akan dimanfaatkan seperti Toyota auto 2000 akan diundang, dari bangunan gedung swasta masih bandel akan disosialisasikan pentingnya SLF. seperti implementasi bangunan gedung, kegiatan apa akan diprogram tahun 2016 ? mereka akan dipanggil. semua kegiatan itu dikoordinasikan dengan Bagian Hukum dan Walikota. Sehingga penting bagi bangunan untuk keselamatan penghuninya. Nanti akan dikoordinasikan. Intinya semua yang narik retribusi akan dikoordinasikan. Retribusi diserahkan ke PU. kita akan koordinasi dengan tim kalau Dinas PU aja, ini kurang etis dan dirapatkan langkah-langkah seperti saya punya program tahun 2016 berjalan dengan baik. Intinya semua yang menarik diperijinkan bagaimana tim. Berkoordinasi sesuai tim yang terbaik seperti apa. Kurang etis bila Dinas PU aja. Kedepan langkah sebaik apa. Tahun 2016 bagaimana baiknya”.(wawancara, 6/8/2015).

Komitmen pimpinan sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja implementasi SLF mulai dari koordinasi, meningkatkan sosialisasi dan rencana kepala bidang dan kepala seksi agar implementasi berjalan sesuai tujuan dan target organisasi.

Pepen S, ST juga menyampaikan:

“Sanksi di UU BG sudah ada, juga sanksi diperda ada, implementasi BG tinggal komitmen dari pimpinan. Di DKI berani bertindak. DKI sudah ada perwali semua tahapan penyelenggara BG dikontrol. BG ber-SLF semua harus diacu. Sesuai perda tahun 2010 ketika tidak ada

respon, pemilik BG diperingati dengan surat peringatan 1, 2 sampai surat peringatan ke 3 disegel. 3 (tiga) bulan supaya SLF selesai, soft terapi juga pemda DKI yang menangani implementasi SLF. SDM ada 8 orang yang menangani SLF, jumlah bangunan gedung yang mengajukan SLF ada 800 BG. Kasus di DKI ini belum ada di undang-undang dan peraturan pemerintah. ketika ingin membuat panduan supaya bisa menjalankan SLF”.

Komitmen pimpinan dalam implementasi SLF perlu dilakukan terutama apabila bangunan gedung tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila masyarakat tidak mentaati peraturan, maka perlu diterapkan penertiban dan sanksi tegas dari pimpinan terhadap bangunan gedung yang melanggar.

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa disposisi berpengaruh dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

5.3.6 Kinerja Implementasi Kebijakan SLF

Dalam mencapai tujuan organisasi, maka ditetapkan target-target atau sasaran tertentu. Realisasi pencapaian target ini disebut dengan hasil kerja /prestasi kerja/kinerja atau performance. Kinerja institusi (organisasi) bertalian denganseberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatanpokok sehingga mencapai misi atau visi institusi.Di samping hal ini, dikenal pula kinerja kebijakan/program, yaitu sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalamkebijakan atau program telah dilaksanakan oleh suatu institusi(organisasi) sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan atauprogram tersebut.

Kinerja Implementasi SLF terkait dengan program penilaian kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum setiap tahun dimana pembinaan bangunan gedung masuk kategori penilaian yaitu implementasi SLF. Setiap tahun pemerintah daerah diharapkan memberikan contoh 5 bangunan gedung hunian, 5 bangunan gedung umum dan 5 bangunan pemerintah. dari kegiatan ini personel PU

mengambil kebijakan melengkapi SLF dimulai dari tahun 2011-2014. Dari penilaian PKPD-PU ini Pemkot Probolinggo masuk peringkat 2 tahun 2011 dengan hadiah mobil dump truck, peringkat 1 tahun 2012 dengan hadiah bulldozer, peringkat 1 tahun 2013 dengan hadiah mobil penyedot lumpur drainase dan peringkat 2 tahun 2014 dengan hadiah bego.

Dini Kasi Penataan Bangunan dan lingkungan Cipta Karya Dinas PU mengatakan:

“ Implementasikan kebijakan SLF salah satunya adalah untuk melengkapi dan mengikuti kriteria lomba PKPD-PU agar dapat peringkat. Dan juga sesuai dengan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen PBL CK Kementerian PU bahwa sebenarnya pemerintah daerah fokus menyelesaikan SLF sesuai IMB yang dikeluarkan setiap tahun misalnya Pemkot atau Dinas Perijinan mengeluarkan IMB tahun 2014 sebanyak 450 IMB itulah yang dikeluarkan SLF-nya”. (wawancara,8/9/2015).

Dari pendapat ini bahwa pelaksanaan PKPD-PU menjadi pemicu Dinas PU untuk mengimplementasi kebijakan SLF walaupun tidak menghasilkan kinerja optimal tetapi hal ini menghasilkan SLF meskipun minimal.

Wawancara hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 dengan Dr. Jimmy S. Juwana Ahli SLF-BG di Acara KLB dan Ultah 63 PII di Hotel Shangrila Jakarta.

“Jadi menjawab kepekaan Pemda tentang SLF terkait satu kesatuan proses permohonan IMB melihat sasaran karena Pemda melihat sebagai target retribusi, kualitas bangunan tidak memadai bagi SLF, bila IMB tidak baik bisa dibayangkan pada hasil SLF, yang memeriksa SLF orang lain, supaya turun pengkaji teknis betul tidak paham SLF, pengkaji teknis bayarannya mahal. dengan pedoman bagi pemda yang akan tahu persis tentang SLF. Apa saja yang diperiksa, mengugat permen PU No. 16, rumit formulirnya tidak semua tahu”

“ Dalam SLF bagi Pemda beban baru, karena tidak ada uangnya, pekerjaan berat tidak ada uangnya. Komitmen pemda luntur, selama dasarwarsa UU BG 10 tahun, usulan revisi UU BG dibalik, SLF dikenakan retribusi dan IMB tidak dibebani retribusi. Ada 2 hal terkait hal ini yaitu : pemda menerima pemasukan tetap karena SLF secara berkala tiap lima tahun diperiksa. Bila bangunan gedung punya SLF pasti ada IMB nya, tetapi sekarang punya IMB belum tentu punya SLF.. perusahaan Samsung reinvestasi handphone di Bekasi dan Tangerang Selatan, ada beberapa bangunan gedung ditunda peresmiannya karena tidak ada SLF, ini dipaksa Pemda, investasi tenaga asing, tidak menutup asumsi kalau tidak ada SLF, pemda harus

mengasumsi tentunya asuransi bangunan gedung harus ada perda, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), komitmen pemda, contoh di Surabaya mana ada pemda yang menerapkan SLF, saya bilang Pemkot Probolinggo SLF sudah jalan, saya baru dari kota Probolinggo, hal ini karena ketidaktahuan, mereka enggan memulai, SLF beban baru intinya karena tidak ada biaya, beban berat dan urusannya banyak.tidak ada uangnya.” Ujar Dr. Jimmy (wawancara, 23/5/2015)

Didalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Salah satu Pasal (Pasal 142 ayat (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.) menurut Dr. Jimmy:

“Retribusi IMB mencakup bukan prasarana gedung, pasal retribusi IMB bukan prasarana gedung, formulir IMB tapi proses implementasi dan pengawasan, tetapi proses implementasinya dan pemanfaatannya (SLF), bagaimama daerah memformulasikan harga satuan retribusi juga dibagi habis IMB tapi pengawasan dan pemanfaatannya.ada peluang, Harga satuan ditambahkan (catatan bukan IMB tapi ada alokasi untuk pengawasan dan pemanfaatannya), tapi tidak pada undang-undang BG dan jasa konstruksi. Ada pelayanan Pemda terkait retribusi IMB untuk pengawasan dan pemanfaatannya. Tidak ada uang tidak jalan. Ada peluang dari retribusi IMB untuk pemanfaatan dan pengawasan.dikaitkan dengan asuransi selesai.”(wawancara, 23/5/2015)

Ada salah satu keputusan ILO tentang **Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)** dan lingkungan kerja terkait buruh atau karyawan yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga

pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Istilah K3 atau Keselamatan dan kesehatan kerja saat ini sudah sangat nyaring terdengar apalagi dikalangan para pekerja suatu industri ataupun pabrik, dengan adanya slogan “**zero accident**” maka istilah K3 semakin akrab dengan telinga masyarakat. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari definisi K3 menurut International Labour Organisation (ILO) : “ Suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan diantara pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi; dan diringkaskan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada jabatannya.

Gedung tidak ada SLF perwakilan asing tidak menjamin keselamatan gedung tersebut. Orang tersebut akan pindah kenegara lain (Vietnam, Taiwan dll), isu ini akan kita hembuskan, pada awal tahun 2016 MEA pasar tunggal Asean, kesepakatan menakutkan Negara-negara Asean. Faktor bangunan hanya IMB, BG tidak ada asuransi, aset ada pada BG yang ber SLF. bangunan tidak diasuransikan tidak bisa dijamin. Menurut Dr. Jimmy memberikan contoh yaitu:

“Kabupaten Bekasi, di Jababeka, perusahaan Samsung handpone investasi baru, Bangunan Gedung tidak ada SLF, bisa membayar ratusan juta pengkaji teknis untuk SLF (Dr. Jimmy melakukan pengkajian bangunan gedung untuk SLF di plasa Indonesia, Rutan Cipinang (SLF juga), makin banyak yang kita racuni semakin bagus, makin banyak BG untuk ber SLF.”

Menurut Dr. Jimmy:

“ UU No. 28 tahun 2002 sudah 10 tahun lebih boleh direvisi, sudah beberapa kali diusulkan direvisi, dibalik/dirubah IMB bebas retribusi, SLF dikenakan retribusi, Pemda akan dapat retribusi tiap hari, BG tidak boleh dioperasikan bila tidak ada SLF. contohnya plasa/Mall sebagai BG usaha, membahayakan keselamatan pengunjung dan pengguna bangunan, alasannya jelas yang dikerjakan, harus ada prioritas bangunan umum dulu, untuk hunian cukup, ada rencana. 32 kab/kota yang dipilih untuk pendampingan IMB, SLF & TABG,

model raperwali kota/kab dibikin. Bila saya keliling di 110 kab/kota saya tidak pulang-pulang. 32 kab/kota sebagai TOT yang dipilih propinsi untuk TABG, SLF dan pendataan BG. Kab/kota yang terpilih tersebut mengajari kab/kota sekitar, kecuali pasien khusus kab/dulu, program ini harus selesai 2019, mungkin dari 32 yang terpilih, 17 kab/kota mengajari pendataan kab/kota sekitar. TABG belum terbentuk sebagai cikal bakal sebagai pengkaji teknis sebelum pengkaji teknis terbentuk, TABG sebagai pioner. Sebagai embrio pengkaji teknis. Model rapelwali sedang dibikin. Bibit unggul kab/kota yang dipilih. Nanti mereka kab/kota terpilih yang mengajari kab/kota sekitarnya. Pendanaan dari kab/kota.” (wawancara, 23/5/2015)

Berdasarkan hasil komunikasi dengan bapak Prastowo, ST, MT Kasi Turbinbaga bahwa penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten/Kota di Indonesia khususnya Sertifikat Laik Fungsi Di Indonesia masih sedikit atau 6 %. Dalam kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung untuk percepatan implementasi SLF di Pemkab/Kota adalah 30 % implementasi SLF dan 50 % bangunan gedung ber IMB. Sekarang sedang launching peraturan menteri tentang bangunan gedung hijau. (komunikasi dengan SMS, 6 mei 2015).

Dalam Acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-14 agustus 2014 acara Konsolidasi Awal di Pusat dalam rangka percepatan implementasi Perda BG tahun anggaran 2015 ini, akan dilaksanakan mendetailkan proses dan strategi melaksanakan percepatan perda BG yaitu Program Percepatan Implementasi Perda BG di Daerah, Kelembagaan dalam Implementasi Perda BG di Daerah dan implementasi IMB, SLF, TABG dan pendataan BG.

Ir Wahyu W. MSc menyampaikan dalam FGD bahwa:

“Strategi SLF yang ada di Probolinggo dan beberapa daerah menarik benang merah gambaran umum dan pedoman generik dan menarik pemda lain agar berjalan sejalan dengan kemementerian PUPERA terkait perdanya. Dan strategi apa yang dilakukan supaya SLF berjalan. Ada aturan yang tidak powernya atau bisa diaplikasi. Kami melihat dari dulu bisa jalan apa pemicunya setelah belum optimal apa ada kendala internal dan external. Kebanyakan Kab/kota perdanya belum dan tim belum ada. Dibeberapa daerah. Pemda memanfaatkan TABG. Dari orbolan dan survei bisa dari pemilik owner. dari struktur organisasi dan statistik penerbitan perijinan bagaimana proses penerbitan, siapa menerbitkan apakah dan sumberdaya. Founder siapa pemilik SLF sehingga bisa memicu. Founder dapat fee”.

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor Kinerja Implementasi Kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung berpengaruh dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

5.3.7 Rangkuman Hasil Data Kualitatif

Dari hasil pandangan penyelenggara SLF diatas dan untuk memperkuat, memperdalam dan memperluas hasil data kuantitatif hubungan (korelasi) variabel langsung maupun variabel tidak langsung analisa SEM Amos, maka disusun perbandingan dengan hasil wawancara dan *indept interview*.

Dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan tokoh-tokoh kunci pelaksana SLF di Kota Probolinggo dan *Forum Group Discussion* di kota Probolinggo dapat disusun Rangkuman seperti Tabel 5.76 Sebagai berikut :

Tabel 5.76 Rangkuman Hasil *Indepth Interview* dan *Forum Goup Discussion*.

No	Nama Informan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Ir. Nurkhamdani, MT Kadin PU Kota Probolinggo	<ul style="list-style-type: none"> • SDM kurang. Dana kurang dan sosialisasi kurang • Koordinasi perubahan perda dan perwali • Pemilik BG usaha tdk ada SLF akan dipanggil dan koordinasi dgn SKPD lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi yang dilakukan minimal. • Sumberdaya belum optimal • Struktur Birokrasi perlu revisi kelembagaan • Disposisi perlu penguatan pada komitmen dan insentif staf.
2.	Rasyid, Sekretaris PU	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris tidak berlatang teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya perlu peningkatan kompetensi SDM.
3.	Dini Santi, ST, Kasi PBL Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> • SLF belum dikomunikasi dan sosialisasi • Dana, staf, data tdk terintegrasi SKPD lain dan kewenangan Tim kurang • Ada 2 beban diseksi • Pemilik Bangunan tdk ada respon. • SLF untuk ikut PKPD-PU 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi yang dilakukan minimal. • Sumberdaya yang dimiliki minimal. • Struktur Birokrasi perlu dilakukan revisi kelembagaan. • Dukungan Publik dilakukan sosialisasi insentif • Kinerja Implementasi

No	Nama Informan	Hasil Wawancara	Keterangan
			perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi.
4.	Hari,ST Kasi Tata Ruang Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi SLF belum dan pimpinan kurang komunikasi. • SDM kurang utk periksa BG • Ada 2 beban diseksi . • Pemilik BG tdk ada respon 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi yang dilakukan minimal • Sumberdaya ditingkatkan SDM melalui pelatihan teknis SLF • Struktur Birokrasi perlu dilakukan revisi kelembagaan. • Dukungan Publik dilakukan sosialisasi dengan insentif
5	Hari Pujo, ST. TABG dan Konsultan BG.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang sosialisasi kepada pemilik BG dan warga 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi yang dilakukan minimal
6	Dr. Jimmy S. Juwana. Ahli SLF BG	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Pemda dalam SLF • SLF beban baru tdk ada retribusi • Dibalik SLF ada retribusi setiap 5 tahun dan IMB tidak. • Biaya SLF dimasukan di retribusi IMB. • TOT pemeriksa BG • BG usaha tdk ada SLF tdk boleh dioperasionalkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disposisi perlu penguatan pada komitmen pelaksanaan SLF dan konsistensi. • Sumberdaya ditingkatkan SDM melalui pelatihan teknis SLF • Komunikasi yang dilakukan minimal
7	Prastowo, ST, MT. Kasi Tubinbaga PBL Ditjen Cipta Karya KemenPUPR	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya 6 % Kota/Kab yang ber SLF • Tahun 2019 di kab/kota 30 % BG sdh SLF dan BG 50% sdh IMB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disposisi SLF. perlu penguatan pada komitmen pimpinan pada pelaksanaan SLF dan konsistensi.
8	Ir. Wahyu, MSc. Puslibang Perkim PU Bandung.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SLF tdk optimal krn faktor Internal dan Eksternal. • Strategi apa dilakukan dalam Implementasi • Tdk ada alasan krn SDM sdh ada Pengkaji teknis, perlu pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Disposisi perlu penguatan pada komitmen pelaksanaan SLF dan konsistensi. • Sumberdaya perlu peningkatan SDM dalam pemberdayaan jasa konstruksi.
9	Pepen S, ST. Puslibang Perkim PU Bandung.	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi ada diperda dan tinggal komitmen pimpinan seperti DKI • SDM DKI hanya 8 org menangani SLF 800. • SLF diserahkan swasta sbg pengkaji teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disposisi perlu peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan SLF. • Dukungan publik memberikan fasilitas pemberdayaan swasta

No	Nama Informan	Hasil Wawancara	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemda sebagai Pembina BG. Bukan pemain merangkap wasit. • Pemilik BG merawat dan memelihara BG secara berkala Pemda memverifikasi. • BG ber SLF punya gengsi dan prestise. • DiSingapura, Slandia baru Pemda punya power mengendalikan pengkaji teknis swasta. 	<p>dalam pelaksanaan SLF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur birokrasi ditingkatkan pada koordinasi internal dan eksternal. SOP di direvisi sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan BG.
10	Adi, ST Akli Probolinggo	<ul style="list-style-type: none"> • Listrik harus sesuai rekomendasi laik fungsi operasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya peralatan perlu pengadaan dan SDM perlu ditingkatkan.

Sumber : Data diolah, tahun 2015

5.4 Analisis terhadap Implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi

5.4.1 Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Bangunan Gedung

Dari implementasi Perda nomor 4 tahun 2008 tentang bangunan gedung ada pasal yang belum diimplementasikan oleh birokrasi Dinas Pekerjaan Umum. Temuan pasal yang belum diimplementasi ini dapat dirangkum dalam Tabel 5.77 sebagai berikut :

Tabel 5.77 Implementasi Perda yang belum ditindaklanjuti

No	Pasal	Temuan	Faktor Pengaruh
1.	Pasal 10 ayat 6 “orang pribadi atau badan sebelum memanfaatkan/menggunakan bangunan diwilayah daerah atau sebelum dihuni maka bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi bangunan gedung.”	Dari tahun 2008 – 2014 hanya 44 BG ber SLF dari 55.343 BG . Berarti tidak ada komitmen dari Dinas PU melaksanakan ketentuan perda.	Komunikasi, Disposisi dan dukungan publik
2	Pasal 52 ayat 1 untuk bangunan gedungbaru, pengajuan permohonan SLF dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IMB	<ul style="list-style-type: none"> • Sejak tahun 2008 permohonan SKRK (surat keterangan Rencana Kota, IMB dan SLF menjadi Satu di Badan Pelayanan perijinan tetapi pada tahun 2012 SKRK dikembalikan pada Dinas PU dan 	Sumberdaya(SDM), komunikasi dan disposisi (komitmen)

No	Pasal	Temuan	Faktor Pengaruh
		<p>permohonannya hanya IMB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 perwali No. 35 tahun 2013 ada permohonan penerbitan SLF dan lampirannya. Ini bertentangan dengan perda pasal 52 ayat 1. untuk bangunan baru permohonan IMB dan SLF bersamaan kecuali perpanjangan SLF. 	
3	Pasal 52 ayat 6 “ SLF berlaku 20 tahun untuk BG rumah tinggal tunggal dan deret serta berlaku 5 tahun untuk BG fungsi hunian bangunan tidak sederhana dan fungsi usaha, keagamaan, sosial budaya, khusus dan prasana bangunan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2008 dan tahun 2009 sudah terbit SLF untuk 6 BG fungsi hunian, tetapi setelah itu tidak ada lagi penerbitan SLF, hanya penerbitan SLF untuk fungsi usaha. • Perwali No. 35 tahun 2013 pasal 11 ayat (1) ada tim teknis yang berwenang melakukan pemeriksaan SLF bangunan gedung sederhana. Ayat (2) keanggotaan tim teknis ditetapkan oleh kepala dinas (hanya lingkup Dinas) apabila melibatkan SKPD lain sebaiknya oleh walikota. Padahal anggota tim teknis terdiri dari lintas SKPD yaitu : PU, BPMPP (IMB) , BLH (listrik), Dinkes (Sanitasi) dan Disnaker (petir dan PMK). 	Sumberdaya, Komunikasi dan disposisi
4	Pasal 52 ayat 7 “ apabila habis masa belakunya SLF, pemilik dan atau penggunaan bangunan wajib mengajukan permohonan perpanjangan SLF paling lambat 60 hari kalender sebelum masa berlakunya SLF	Pada tahun 2008 telah terbit 5 SLF BG usaha dan berakhir tahun ke 5 (2013).	Sumberdaya, Disposisi dan dukungan publik
5	Pasal 53 ayat 1 “ pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan pemerintah daerah pada saat perpanjangan SLF /atau adanya laporan masyarakat;	Perpanjangan SLF tidak dilakukan terhadap 5 BG usaha berarti tidak ada pengawasan BG	Komunikasi, sumberdaya dan Disposisi
6	Pasal 67 “ dengan berlakunya perda ini, maka setiap bangunan gedung yang didirikan sebelum dikeluarkan	5 tahun sejak berlakunya perda yaitu sejak maret 2008 hingga tahun 2013	Komunikasi, Sumber daya, Struktur birokrasi, Dukungan

No	Pasal	Temuan	Faktor Pengaruh
	perda ini dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun wajib memiliki SLF”.	hanyasebagian dari implementasi perda BG sesuai pasal 67 ini.hanya 43 SLF yang dihasilkan dari 55.343 BG.	publik dan disposisi

Sumber : hasil analisa, Tahun 2015

Disamping implementasi kebijakan SLF diPerda Bangunan gedung belum dilaksanakan juga belum konsistensinya peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang SLF dengan Perda No 4 tahun 2008 dan PP 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung.Hal ini memberikan ketidakjelasan penyelenggara bangunan gedung dalam mengimplemesiakan kebijakan SLF. Temuan Ketidaksesuaian dapat dilihat dalam Tabel 5.78 sebagai berikut :

Tabel 5.78 Ketidaksesuaian Perwali SLF dan Perda Bangunan Gedung

No	Perwali 35 tahun 2013	Peraturan Atas (Perda, PP &UU)	Implementasi
1.	Bab V Pasal pasal 10 ayat 1 “ Tim Ahli Bangunan Gedung berwenang melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang kompleks, memiliki fungsi khusus dan bangunan umum	Perda pasal 46 ayat 4 “ Tim TABG memberikan pertimbangan teknis dibidang bangunan gedung sama dengan PP pasal 66 ayat 4 dan pasal 67 ayat 2 penjelasan “ penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis keandalan bangunan gedung dilakukan minimal terhadap dokumen pengembangan rencana bangunan gedung” dan Tugas TABG sesuai PP pasal 15 ayat 4 “ untuk proses perizinan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus mendapat pertimbangan dari TABG dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.	Sesuai perda tapi tidak sesuai PP.
2	Lampiran Perwali Permohonan SLF tersendiri.	Perda Pasal 52 ayat 1 “ untuk bangunan baru, pengajuan SLF dilakukan bersamaan permohonan IMB	Pengajuan tersendiri sesuai Perwali. Hal ini membuat pemohon IMB tidak tahu bahwa sebelum dimanfaatkan diwajibkan memiliki SLF.

No	Perwali 35 tahun 2013	Peraturan Atas (Perda, PP &UU)	Implementasi
3.	Pasal 5 “lingkup pemeriksaan SLF BG terdiri dari Keselamatan (beban muatan, kebakaran, petir dan listrik) dan persyaratan kesehatan”.	PP 36 tahun 2005 pasal 70 Pengawasan konstruksi ayat 4 “ Pemeriksaan SLF meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan terhadap IMB yang diberikan “.	Tidak sesuai PP, kurang aspek kenyamanan dan kemudahan.
4	Pasal 6 ayat (1) “ penggolongan bangunan gedung untuk pemberian SLF terdiri a. BG pada umumnya (hunian) . b. bangunan gedung tertentu (BG kepentingan umum dan fungsi khusus)	Sesuai perda pasal 52 ayat (6) “ SLF diberikan selama 20 tahun untuk fungsi hunian dan 5 tahun bangunan umum.”dan sesuai PP pasal 71 ayat (3).	Tidak konsisten memberikan SLF hanya untuk BG umum. Sedangkan untuk fungsi hunian tidak diberikan.

Sumber : hasil analisa, tahun 2015.

Hasil evaluasi kinerja terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam hal Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara pelayanan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung. Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015. Evaluasi ini dimaksudkan penyelenggara pelayanan publik sampai saat ini belum maksimal.

Dalam rangka memaksimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, diperlukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik. Hal ini sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengamatkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Maksud dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yaitu sebagai acuan bagi Pembina/penanggung jawab penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki, dan meyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan tujuan dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, yaitu :

- a. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik.
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil evaluasi.

- c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik menggunakan indikator dan subindikator serta bukti dapat dilihat pada Tabel 5.79 berikut :

Tabel 5.79 Evaluasi Indikator Kualitas Pelayanan Publik SLF

No	Indikator	Sub-Indikator	Bukti	Keterangan
1	Standar Pelayanan	a. Standar pelayanan sudah ditetapkan.	-Dasar hukum - SOP bagi pelaksana	- Perda 4 tahun 2008 ttg bangunan gedung, Perwali 35 tahun 2013 ttg SLF - SOP tentang SLF tahun 2014. - Standar pelayanan Kadis PU 600/425.1001/2013 di Dinas PU
		b. Pelaksanaan standar pelayanan	Sudah dipublikasikan, dipampang dan diwebsite	Sudah dipublikasikan melalui leaflet, profil PU dan website pu
		c. Kesenambungan	- Penurunan keluhan - Perbaikan proses	- Secara tertulis tidak ada keluhan - Belum ada perbaikan pertahun.
2	Maklumat Pelayanan	a. Adanya pernyataan maklumat	- Kebijakan Standar Pelayanan pimpinan penyelenggara - Bukti publikasi (banner, website)	- Standar pelayanan Kadis PU 600/425.1001/2013 di Dinas PU - Belum ada banner, website sudah ada.
		b. Aplikasi pelaksanaan maklumat	- Sesuai janji/hak - Tingkat keluhan pengaduan	- Pelaksanaan sesuai janji - Tidak ada keluhan pengaduan
3	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pelaksanaan survei (pernah dilaksanakan atau tidak. (secara tahunan atau periodek)	- Surat tugas, SK - Laporan hasil survey	- Sudah ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pekerjaan Umum tetapi SLF belum masuk hanya IMB.
4	Pengelolaan Pengaduan	a. Keberadaan petugas pengelolaan pengaduan	Surat petugasan	- Pengaduan ada di sub bagian penyusunan program dan pengaduan didistribusi kemasing-masing bidang sesuai permasalahan.
		b. Mekanisme	- Juklak/ Juknis	- Sesuai SOP surat

No	Indikator	Sub-Indikator	Bukti	Keterangan
		pengelolaan pengaduan	- SOP	masuk. Belum ada SOP mekanisme pengelolaan pengaduan
		c. Penyelesaian aktualisasi informasi pelayanan publik	Pembaruan (up dating data dan informasi) penanganan pengaduan	Belum ada pembaruan karena tidak ada pengaduan.
5	Sistem Informasi Pelayanan Publik	a. Keberadaan sistem dan mekanisme SIPP	- Kebijakan pimpinan penyelenggara - Publikasi SIPP	- Kebijakan penyelenggara di alokasikan di Website - Di Website PU
		b. Akurasi dan aktualisasi informasi pelayanan publik	Pembaruan (updating data dan informasi)	Diupdate secara berkala tapi belum optimal

Sumber : Hasil analisa, tahun 2015

Dari Tabel 5.79 diatas indikator yang belum dilaksanakan : 1) standar pelayanan pada kesinambungan perbaikan proses belum ada perbaikan pertahun; 2) maklumat pelayanan dengan bukti banner belum terpasang; 3) hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) bahwa SLF belum tersurvey; 4) pengelolaan pengaduan pada mekanisme pengaduan belum ada dan belum ada pembaruan karena tidak ada pengaduan;5) dan belum ada pembaruan karena tidak ada pengaduan. Sedangkan untuk sistem informasi pelayanan publik sudah dilaksanakan di website pu.probolinggokota.go.id tapi belum optimal

5.5 Analisis terhadap Variabel Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sertifikat Laik Fungsi

5.5.1 Analisis Pengaruh Variabel Komunikasi

Agar implementasi bisa berjalan efektif, pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka laksanakan. Perintah untuk implementasi kebijakan harus disebarkan pada personel yang tepat, dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten. Bila pengambil kebijakan melihat implementasi secara khusus tidak jelas, mereka boleh salah mengerti dengan pada siapa mereka diarahkan.

Persyaratan pertama untuk efektivitas implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan tersebut harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus diberikan kepada personil yang sesuai sebelum hal tersebut dilakukan. Secara alami, komunikasi yang akurat diperlukan dan dapat diterima dengan akurat pula oleh pelaksana. Banyak rintangan yang terjadi dalam pola pengiriman komunikasi implementasi dan rintangan ini dapat menghalangi implementasi kebijakan. Apabila kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, perintah implementasi tidak hanya diterima, tetapi juga harus jelas. Karena apabila perintahnya tidak jelas, maka akan membingungkan pelaksana untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kebingungan ini akan berakibat pada perbedaan implementasi kebijakan yang dilakukan dan keinginan dari atasannya. Aspek lain dari komunikasi melalui perintah implementasi adalah konsistensi. Keputusan yang bertolak belakang akan membingungkan dan membuat frustrasi para staf administrasi serta memaksa kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

Faktor Komunikasi ini sangat penting dalam menyampaikan pesan kebijakan kepada stakeholder internal birokrasi dan eksternal birokrasi. Keputusan kebijakan dan perintahnya harus diterapkan kepada orang yang tepat dan dikomunikasi kepada orang yang jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana yaitu pengawas lapangan salah satunya adalah peran sekretaris dalam menerjemahkan kebijakan SLF, salah satu penghambat adalah pergantian sekretaris di Dinas PU yang bukan berlatar teknis yang belum mengetahui SLF.

Persyaratan utama bagi implementasi kebijakan yang efektif menurut Edward III (1984) adalah bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan kebijakan harus disalurkan (*transmission*) kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus akurat diterima dengan jelas (*clarity*), juga perintah kebijakan harus konsisten (*consistency*).

Dalam aspek *transmission* (penyampaian), pesan kebijakan disampaikan kepada dua pihak. Pihak pertama adalah aparat pelaksana kebijakan; dan pihak kedua

adalah masyarakat yang akan dikenai kebijakan. Dalam pengujian hipotesis bahwa faktor komunikasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF dan berpengaruh terhadap disposisi/ kecenderungan sikap. Tetapi dalam pelaksanaan implementasi SLF kinerja yang dihasilkan sangat sedikit atau hanya 44 SLF selama kurun waktu tahun 2008 – 2014, juga penyampaian pesan atau sosialisasi SLF kepada masyarakat secara langsung melalui dialog tatap muka/disiminasi hanya dilakukan pada tahun 2008 tapi dilakukan jumlah peserta terbatas dan tidak berkesinambungan, setelah itu tidak pernah dilakukan secara langsung hanya sosialisasi dilakukan melalui leaflet melalui acara MPS2 setiap 4 kali pertahun dan sosialisasi melalui radio suara kota pada tahun 2012 bersamaan dengan kedatangan dengan Tim Balitbang Perumahan dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum tentang sosialisasi ketentuan teknis sertifikat Laik Fungsi.

Dalam aspek kejelasan (*clarity*), tidak jelasnya pesan disampaikan bukan hanya mengakibatkan tidak tercapainya perubahan yang diinginkan. Bisa juga mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki.

Misalnya masyarakat yang kebingungan dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Selama ini masyarakat hanya tahu IMB belum tahu tentang SLF dalam izin pemanfaatan bangunan gedung. ketidaktepatan (*Lack of clarity*) informasi kebijakan oleh beberapa faktor antara lain : kompleksitas pembuatan kebijakan publik (*complexity of policymaking*), penolakan masyarakat (*public opposition*), (*competing goals and the needs for consensus*) tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan (*competing goals and the needs for consensus*), sifat kebaruan program kebijakan (*unfamiliarity of news programs*), kebijakan yang tidak akuntabel (*avoiding accountability*). Dan lain sebagainya.

Informasi yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan sangat bermanfaat bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi kerja. informasi kebijakan SLF harus jelas dan dapat meningkatkan implikasi kinerja implementasi kebijakan SLF.

Penyampaian pesan oleh seseorang dalam istilah komunikasi disebut komunikator, sedangkan yang menerima pesan disebut komunikan. Apabila antara komunikator dan komunikan tidak terdapat kesamaan makna dikarenakan

salah satunya tidak mengerti apa maksud isi pesan yang disampaikan, maka keadaan ini dinyatakan suasana komunikasi yang belum efektif.

Apabila implementasi kebijakan berjalan berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan kebijakan harus konsisten dan jelas. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SLF tidak konsistennya antara perwali SLF dengan Perda Bangunan gedung mengenai SLF yaitu tidak semua bangunan gedung yang dikenakan SLF hanya bangunan gedung umum saja. Sedangkan bangunan gedung hunian tidak dikenakan SLF.

Implementasi Kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dapat berjalan dengan efektif, bila proses komunikasi yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara bangunan gedung dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan kepala Dinas PU. Komunikasi dalam kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui transformasi atau penyampaian informasi kepada seluruh aparatur dan masyarakat, melalui kejelasan informasi dan adanya konsistensi penyampaian informasi. Proses komunikasi yang baik akan mendorong aparatur penyelenggara bangunan gedung untuk dapat lebih meningkatkan pelaksanaan kebijakan sertifikat laik fungsi dengan baik.

Sesuai dengan hasil penyebaran kuisioner bahwa faktor komunikasi dengan indikator X1.1 kejelasan maksud dan tujuan kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung bahwa responden menilai dengan jawaban jelas (jelas dan sangat jelas) sebanyak 95 orang dengan persentase 75,8 %. Indikator X1.2 Publik sudah mengetahui secara jelas maksud dan tujuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Responden menilai jawaban jelas (jelas dan sangat jelas) sebanyak 96 orang dengan persentase 76,8 %. Indikator X1.3 kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilaksanakan secara konsisten pada semua bangunan gedung. Responden menilai jawaban jelas (jelas dan sangat jelas) sebanyak 97 orang dengan persentase 69,9 %.

a. Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan SLF

Berdasarkan hasil penelitian Model Empiris 1 didapat hasil bahwa p value = $0.029 < 0,05$ dan model empiris 2 p value = $0.032 < 0,05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi.

Hal ini menguatkan bahwa faktor komunikasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan sesuai dengan hasil penelitian Winda Paramita (2012) dan Misroji (2014).

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa faktor komunikasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF dengan meningkatkan komunikasi melalui sosialisasi kepada stakeholder dan menerapkan konsistensi SLF pada fungsi bangunan gedung hunian dan umum sesuai peraturan perda bangunan gedung.

b. Pengaruh Komunikasi terhadap Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian model empiris 1 didapat hasil bahwa p value = $0.043 < 0,05$ dan model Empiris p value = $0.042 < 0,05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa faktor komunikasi meningkatkan disposisi melalui komitmen, mutasi dan intensif aparatur.

c. Pengaruh Total Komunikasi terhadap pada Kinerja Implementasi Kebijakan SLF melalui disposisi.

Dari pengujian hipotesis analisa statistik perbandingan antara Estimate dan standar erros model Empiris 1 hubungan komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui disposisi atau sumberdaya bahwa Critical

Ratio atau $ICRI = 1.627 < 1,97$ atau $ICRI = 0,230 < 1,97$ dan model Empiris 2 didapat $ICRI = 1.157 < 1.97$ maka Hipotesis nol diterima dan Hipotesis alternatif ditolak. jadi tidak terdapat pengaruh total signifikan komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa faktor komunikasi meningkatkan disposisi melalui komitmen, mutasi dan intensif aparatur dan hasilnya meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

d. Pengaruh Komunikasi terhadap Sumberdaya

Berdasarkan hasil penelitian model Emperis 1 $p \text{ value} = 0.79 > 0.05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap sumberdaya. Sedangkan model empiris 2 tidak ada jalur antara komunikasi terhadap sumberdaya.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan Forum group diskusi (FGD) dengan pengaruh komunikasi kedepan peningkatan sumberdaya SDM, peralatan, dana, informasi/data dan kewenangan.

e. Pengaruh Total Komunikasi terhadap Sumberdaya dan Disposisi serta Dampaknya pada Kinerja Implementasi Kebijakan SLF

Berdasarkan hasil analisa terhadap model Emperis 1 melalui pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui sumberdaya dan disposisi atau disposisi dan sumberdaya didapat $ICRI = 1.297 < 1.97$ tidak ada pengaruh total Komunikasi terhadap sumberdaya dan disposisi serta dampaknya pada kinerja implementasi kebijakan SLF.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisis terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan Forum group diskusi (FGD) dengan pengaruh komunikasi kedepan diharapkan peningkatan kinerja

implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui penambahan sumberdaya SDM, peralatan, dana, informasi/data dan kewenangan.

5.5.2 Analisis Pengaruh Sumberdaya

Tanpa adanya sumberdaya, personal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan akan bekerja tidak efektif, meskipun perintah telah diberikan secara jelas dan konsisten, serta disebarkan secara tepat. Sumberdaya yang penting antara lain staf yang cukup jumlah dan kemampuannya, informasi yang sesuai mengenai bagaimana perintah dilaksanakan, kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan seperti yang diharapkan, dan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan seperti gedung, peralatan, lahan dan persediaan.

Sumberdaya (*resources*) meliputi *staff*, *information*, *authority* dan *facilities*. *Kempat* hal tersebut memiliki posisi sangat penting dalam implementaasi kebijakan, tanpa sumberdaya (*resources*) pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan tidak akan berhasil dalam proses implementasi. Tanpa sumberdaya yang tersedia implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sesuai dengan rencana yang diagendakan.

Salah satu variabel yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan adalah sumberdaya manusia. Kuantitas maupun kualitas menentukan arah kebijakan yang akan menjadi tujuan organisasi. Peraturan tentang aparatur yang lengkap tidak akan berpengaruh bila SDM yang ada tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam bidangnya maka tujuan implementasi kebijakan tidak berjalan efektif. Sumberdaya tidak hanya mementingkan kuantitas tetapi juga keahlian (*skills*) dan menyarankan dalam analisa sumberdaya (*resource*) dalam implementasi kebijakan publik, yaitu menganalisa ukuran (*size*) dan keahlian (*skills*).

Jumlah SDM yang menangani SLF hanya sedikit sekali dan berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF. Juga keahlian (*skills*) yang hanya

mempunyai tenaga D3 sipil sedangkan tenaga S1 sipil sudah dimutasi ke kelurahan dan hasil implementasi kebijakan SLF kurang maksimal. Ini juga berpengaruh terhadap koordinasi dengan instansi dan pemohon SLF.

Pengaruh SDM terhadap kinerja SLF yaitu sedikit sekali SLF yang dihasilkan pertahun hanya rata-rata 6 SLF dari tahun 2008 – 2014 hanya 44 SLF yang dihasilkan. Padahal setiap tahun Perijinan mengeluarkan 400 IMB. Kepala Dinas PU Kota Probolinggo Nurkhamdani, ST, MT, kepala bidang Cipta Karya, dan Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan mengatakan bahwa Sumberdaya SDM yang kurang tidak menjadi hambatan Dinas PU dalam meningkatkan kinerja implementasi SLF melalui peningkatan sosialisasi SLF. Tahun 2016 sosialisasi SLF bersama SKPD terkait yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dioptimalkan. Anggaran SLF kecil pada tahun 2016 akan ditingkatkan dan personel ditambah dengan melakukan pemberdayaan jasa konstruksi dan meningkatkan peran TABG. Sosialisai Perda Bangunan gedung akan dimaksimalkan pada tahun 2016 dengan Talk show SLF di suara kota, pengumuman di masmedia dan sosialisasi tatap muka/diseminasi ke masyarakat.

Sumberdaya informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan SLF. Informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Ini berkaitan dengan pelaksana agar tidak melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dan melaksanakan kebijakan SLF. Informasi ini penting untuk diketahui pelaksana dalam melaksanakan dan mematuhi apa yang terjadi dalam tugas dan fungsinya. Informasi juga terkait dengan data yang sesuai dengan SLF agar cepat dan terintegrasi dengan data IMB perlu diimplementasikan SIMbg versi 4 yang sudah disosialisasikan oleh Direktorat Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan Ditjen Cipta Karya dalam pendataan bangunan gedung.

Kewenangan adalah sumberdaya yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan dalam menyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, ini menjadi penting apabila dihadapkan dengan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dalam suatu keputusan, misalnya apabila pelaksana

mengambil keputusan SLF apabila bangunan gedung yang diperiksa tidak memenuhi syarat keandalan bangunan yang terdiri dari keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan. Masalah yang dipentingkan adalah mendahulukan faktor keselamatan yang dari struktur bangunan dan pemadam kebakaran gedung.

Sesuai dengan hasil penyebaran kuisioner bahwa faktor sumberdaya dengan indikator indikator pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan jumlah staf menunjukkan responden menilai pada indikator X2.1 dengan jawaban didukung (didukung dan sangat didukung) sebanyak 95 orang dengan persentase 75,8 %. Indikator 2.2 Pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan fasilitas peralatan yang memadai menunjukkan responden menilai pada indikator X2.2 dengan dengan jawaban didukung (diukung dan sangat didukung) sebanyak 63 orang dengan persentase 60,4. Indikator X2.3 Pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan dana yang cukup supaya sesuai dengan tujuan, menunjukkan responden menilai pada indikator X2.3 dengan dengan jawaban didukung (diukung dan sangat didukung) sebanyak 63 orang dengan persentase 50,4 %. Indikator X2.4 Pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan informasi/data yang akurat menunjukkan responden menilai pada indikator X2.4 dengan dengan jawaban didukung (diukung dan sangat didukung) sebanyak 83 orang dengan persentase 66,4. Indikator X2.5 Pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai dengan tujuan maka diberi dengan kewenangan yang kuat menunjukkan responden menilai pada indikator X2.5 dengan dengan jawaban didukung (diukung dan sangat didukung) sebanyak 80 orang dengan persentase 64.

a. Pengaruh Sumberdaya terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan SLF.

Berdasarkan hasil penelitian model emperis 1 didapat hasil bahwa p value = $*** < 0,05$ dan model emperis 2p value = $0.002 < 0,05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa sumberdaya berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi. Hal ini menguatkan bahwa faktor sumberdaya berpengaruh terhadap

kinerja implementasi kebijakan sesuai dengan hasil penelitian Winda Paramita (2012) dan Misroji (2014) dan penelitian Soedarmayanti (2001:7).

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) dengan pengaruh sumberdaya SDM, dana, peralatan, informasi/data dan kewenangan terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung

b. Pengaruh Sumberdaya terhadap Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian model empiris 1 didapat hasil bahwa $p \text{ value} = 0.002 < 0,05$ model Empiris 2 $p \text{ value} = 0.004 < 0,05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa sumberdaya berpengaruh terhadap disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) dengan pengaruh sumberdaya SDM, dana, peralatan, informasi/data dan kewenangan terhadap disposisi dalam meningkatkan komitmen pimpinan.

c. Pengaruh Total sumberdaya terhadap Disposisi dan dampaknya pada Kinerja Implementasi Kebijakan SLF

Dari pengujian hipotesis analisa statistik perbandingan antara Estimate dan standar error pada model empiris 1 bahwa Critical Ratio (CR) adalah $I \text{ CR} = 3.082 < 1,97$ dan model Empiris 1 bahwa Critical Ratio (CR) adalah $I \text{ CR} = 3.082 < 1,97$ maka Hipotesis nol diterima dan Hipotesa alternatif ditolak. jadi tidak terdapat pengaruh total signifikan komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) dengan pengaruh sumberdaya SDM, dana, peralatan, informasi/data dan

kewenangan meningkatkan kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui disposisi dalam meningkatkan komitmen pimpinan.

5.2.3 Analisis Struktur Birokrasi

Faktor terpenting yang dibahas dalam membicarakan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan publik adalah *Standart Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi (*fragmentation*).

Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Salah satu aspek yang membuat kerja lancar dan baku adalah pembagian kewenangan masing-masing bidang dan seksi dalam pelaksanaan SLF. Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai manajer madya memberikan perintah kepada seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam pelaksanaan SLF. Sedangkan dalam penerbitan SLF sudah ada standar operasional prosedur (SOP) dalam proses pelaksanaan SLF. SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan mengerakkan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan /menghasilkan SLF. SOP merupakan tata cara yang dilakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Dalam SOP SLF sudah ada, dengan waktu penerbitan SLF selama 3 hari. Ada 11 kegiatan mulai dari pengajuan berkas oleh pemohon sampai dengan pemohon menerima berkas SLF. Yang membutuhkan waktu satu hari masing-masing adalah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung kepentingan umum dan berfungsi khusus (struktur, bangunan, listrik, pencegahan kebakaran dll) dan memberikan persetujuan bersama atas daftar simak, surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Untuk bagan SOP SLF dapat dilihat di Lampiran 4.

Dalam struktur organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan peraturan perundang tentang pemerintah daerah sebagaimana Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pada lampiran yang mengatur tentang pembagian urusan. Urusan sertifikat laik fungsi bangunan gedung masuk

urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar yaitu pekerjaan umum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Sedangkan kelembagaan sebagai aturan main (*rule of game*) dan bagaimana aturan main dijalankan. Bogasan (2000) mengemukakan beberapa ciri umum kelembagaan, antara lain adanya sebuah struktur yang didasarkan pada interaksi di antara para aktor, adanya pemahaman bersama tentang nilai-nilai dan adanya tekanan untuk berperilaku sesuai dengan yang telah disepakati dan ditetapkan. Setiap lembaga mempunyai tujuan, pembagian kerja, struktur dan koordinasi. Sehingga apabila salah satu struktur yang dibutuhkan pada lembaga tersebut tidak terbentuk, dengan sendirinya fungsi organisasi tidak dapat berjalan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Struktur organisasi yang menangani Sertifikat laik fungsi bangunan gedung adalah Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagai pelaksana SLF dan dibantu Seksi Penataan Ruang sebagai seksi yang menangani rekomendasi IMB. Untuk rekomendasi IMB diseksi penataan ruang kurang sesuai karena seksi ini menangani teknis perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan kompetensi sarjana planologi. Untuk rekomendasi IMB sudah masuk ke perencanaan teknis bangunan gedung yang bertanggung jawab adalah kompetensi sarjana sipil/arsitektur. Sesuai dengan kajian terhadap beban kerja pada seksi bangunan gedung dan lingkungan bahwa seksi ini mempunyai beban kerja yang berat terkait pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah. Dengan beban ini penanganan SLF kurang optimal. Untuk itu agar kedepan lebih optimal perlu penanganan SLF dan rekomendasi masuk seksi sendiri.

Dalam fragmentasi bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan SLF tidak mengalami fragmentasi. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terjadi pemecahan koordinasi pelaksanaan kebijakan. Karena pelaksanaan implementasi kebijakan tetap di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

Keberhasilan suatu koordinasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama terdapatnya perbedaan atau persamaan kepentingan, dan kedua, adanya

keterlibatan dua atau lebih struktur pemerintahan dengan tingkat otoritas yang berbeda (Lele, 2001).

Salah satu yang menghambat terkait koordinasi dalam penanganan SLF adalah data IMB yang ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, karena pelayanan masih bersifat manual dan masih belum online maka penanganan SLF masih belum optimal. Program SIMBGversi2 yang sudah diberi pelatihan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU tahun 2012 tidak digunakan karena kurang dana untuk server sebagai input data IMB dan SLF di Kecamatan, BPMPP dan DPU sebagai koordinasi pendataan bangunan gedung.

Sesuai dengan hasil penyebaran kuisisioner bahwa faktor struktur birokrasi bahwa Indikator X3.1 Pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilaksanakan satu seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota menunjukan responden menilai pada indikator X3.1 dengan jawaban sesuai (sesuai dan sangat sesuai) sebanyak 81 orang dengan persentase 64.8 %. Indikator X3.2 Dalam pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sudah terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya menunjukan responden menilai pada indikator X3.2 dengan jawaban sesuai (sesuai dan sangat sesuai) sebanyak 87 orang dengan persentase 69.6 %. Indikator X3.3 Tata cara pelaksanaan pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai dengan Standar operating Prosedur (SOP) menunjukan responden menilai pada indikator X3.3 dengan jawaban sesuai (sesuai dan sangat sesuai) sebanyak 83 orang dengan persentase 66.4 %.

a. Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan SLF

Berdasarkan hasil penelitian model Emperis 1 didapat hasil bahwa $p \text{ value} = 0.003 < 0,05$ dan model Emperis 2 didapat hasil bahwa $p \text{ value} = 0.002 < 0,05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa struktur birokrasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa pengaruh struktur birokrasi dengan pelaksanaan SLF ditangani satu seksi, terkoordinasi sesuai tupoksi dan proses SLF sesuai dengan SOP dalam meningkatkan kinerja Implementasi Kebijakan SLF.

Hal ini menguatkan bahwa faktor struktur birokrasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan sesuai dengan hasil penelitian Winda Paramita (2012) dan Misroji (2014).

b. Analisis Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian model emperis 1 didapat hasil bahwa p value = $0.018 < 0,05$ model Emperis 2 didapat hasil bahwa p value = $0.021 < 0,05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa struktur birokrasi berpengaruh terhadap disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa pengaruh struktur birokrasi dengan pelaksanaan SLF ditangani satu seksi, terkoordinasi sesuai tupoksi dan proses SLF sesuai dengan SOP dalam meningkatkan disposisi dengan penguatan komitmen pimpinan.

c. Analisis Pengaruh Total Struktur Birokrasi terhadap Disposisi dan dampaknya pada Kinerja Implementasi Kebijakan SLF

Dari pengujian hipotesis analisa statistik perbandingan antara Estimate dan standar erros pada model emperis 2 bahwa Critical Ratio (CR) adalah $I CR I = 3.097 > 1,97$ dan model Emperis 1 bahwa Critical Ratio (CR) adalah $I CR I = 2.383 > 1,97$ maka Hipotesis nol ditolak dan Hipotesis alternatif diterima. Jadi terdapat pengaruh total signifikan struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa pengaruh struktur birokrasi dengan pelaksanaan SLF ditangani satu seksi, terkoordinasi sesuai tupoksi dan proses SLF sesuai dengan SOP meningkatkan kinerja sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui disposisi dengan penguatan komitmen pimpinan.

d. Analisis Pengaruh struktur birokrasi terhadap sumberdaya

Berdasarkan hasil penelitian model Empiris 1 didapat hasil bahwa $p \text{ value} = 0.001 < 0,05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa struktur birokrasi berpengaruh terhadap disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa pengaruh struktur birokrasi dengan pelaksanaan SLF ditangani satu seksi, terkoordinasi sesuai tupoksi dan proses SLF sesuai dengan SOP dalam peningkatan sumberdaya SDM, dana, peralatan, informasi/data dan kewenangan.

e. Pengaruh total struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya dan disposisi.

Dari pengujian hipotesis analisa statitik perbandingan antara Estimate dan standar erros model Empiris 1 bahwa Critical Ratio (CR) adalah $|CR| = 2.565 > 1,97$ maka Hipotesis nol ditolak dan Hipotesis alternatif diterima. Jadi terdapat pengaruh total signifikan struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya dan disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa pengaruh struktur birokrasi dengan pelaksanaan SLF ditangani satu seksi, terkoordinasi sesuai tupoksi dan proses SLF sesuai dengan SOP dalam

peningkatan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui sumberdaya SDM, dana, peralatan, informasi/data dan kewenangan dan disposisi komitmen pimpinan.

5.2.4 Analisis Dukungan Publik.

Dukungan Publik terhadap implementasi SLF ini bila intensip dilakukan birokrasi hasilnya akan baik. Hasil wawancara dengan ibu Lani hartanta, SE, MM pemilik Pink House (homestay) di Jalan Mawar Permai No. 26 dengan luas lantai Lt. I 379,71 m² dan Lt. II 292,23 M² bahwa “ dia meminta kepada dinas PU agar mempercepat SLF karena akan digunakan sebagai ijin pemanfaatan bangunan (contoh sudah ada Plat SLF di Homestay Diponegoro) “ juga bersamaan diberita mas media televise tentang penyegelan Mall Green Tebet oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur karena tidak mempunyai SLF.

Menurut Hari Pujo, ST Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang juga praktisi Konsultan mengatakan dukungan publik sangat kurang dalam implementasi Kebijakan karena kurangnya Sosialisasi dalam Kebijakan SLF dan warga tidak tahu apa itu SLF. Pada waktu warga mengurus SLF akan dicek bahwa semua ketentuan teknis IMB sesuai dengan pelaksanaannya.”

Menurut pendapat Mazmanian dan Sabatier variabel dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang *memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik*. Sebaliknya, kebijakan yang *bersifat dis-insentif* seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

Sesuai dengan hasil penyebaran kuisioner bahwa faktor dukungan publik bahwa variabel X4 Dukungan Publik bahwaindikator X4.1 Selama ini pemerintah kota dalam pelaksanaan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung tidak ada pungutan biaya menunjukan responden menilai pada indicator X4.1 dengan jawaban sesuai (sesuai dan sangat sesuai) sebanyak 78 orang dengan persentase 62.4 %. Indikator X4.2 Selama ini pemerintah kota dalam pelaksanaan Sertifikat Laik fungsi bangunan gedung masyarakat dibebani

dengan persyaratan yang menghambat (as built drawing, Biaya Konsultan Pengawas/Pengkaji teknis dll) menunjukkan responden menilai pada indikator X4.2 dengan jawaban sesuai (sesuai dan sangat sesuai) sebanyak 74 orang dengan persentase 59.2 %.

a. Pengaruh Dukungan Publik terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan SLF

Berdasarkan hasil penelitian untuk model empiris 2 hasilnya bahwa p value = $0.002 < 0,05$ dan model Empiris 1 dengan p value = $0.009 < 0,05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan publik berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi. Didukung dengan data kualitatif bahwa pemilik bangunan gedung ber-IMB mendukung bangunan gedung sebelum dimanfaatkan harus mempunyai SLF.

b. Pengaruh Dukungan Publik terhadap Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian model empiris 2 didapat hasil bahwa p value = $0.028 < 0,05$ dan model Empiris 1 didapat hasil bahwa p value = $0.039 < 0,05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan publik berpengaruh terhadap disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa pengaruh dukungan publik dalam meningkatkan disposisi komitmen pimpinan.

c. Pengaruh Total Dukungan Publik terhadap Disposisi dan dampaknya Kinerja Implementasi Kebijakan SLF

Dari pengujian hipotesis analisa statistik perbandingan antara Estimate dan standar erros model empiris2 bahwa Critical Ratio (CR) adalah $|CR| = 2.275 > 1,97$ dan model Empiris 1 bahwa Critical Ratio (CR) adalah $|CR| =$

2.085 > 1,97 maka Hipotesis nol ditolak dan Hipotesis alternatif diterima. Jadi terdapat pengaruh total signifikan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisa terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa pengaruh dukungan publik meningkatkan kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui disposisi komitmen pimpinan.

d. Pengaruh total dukungan publik terhadap sumberdaya

Berdasarkan hasil penelitian model Empiris 1 didapat hasil bahwa p value = $0.009 < 0,05$ dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan publik berpengaruh terhadap sumberdaya berpengaruh.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisis terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa pengaruh dukungan publik dalam meningkatkan sumberdaya SDM, dana, peralatan, informasi/data dan kewenangan.

e. Pengaruh total dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya.

Dari pengujian hipotesis analisa statistik perbandingan antara Estimate dan standar erros model Empiris 1 bahwa Critical Ratio (CR) adalah $|CR| = 1.683 < 1,97$ maka Hipotesis nol diterima dan Hipotesis alternatif ditolak. Jadi tidak terdapat pengaruh total signifikan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya dan disposisi. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan publik melihat sumberdaya birokrasi yang menangani insentif (tidak biaya retribusi SLF) dan disinsentif (hambatan pelaksanaan SLF) belum mendukung atau masih diragukan oleh publik dalam peningkatan kinerja implementasi Kebijakan SLF.

f. Pengaruh total dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya dan disposisi.

Dari pengujian hipotesis analisa statistik perbandingan antara Estimate dan standar error model Empiris 1 bahwa Critical Ratio (CR) adalah $|CR| = 2.565 > 1,97$ maka Hipotesis nol ditolak dan Hipotesis alternatif diterima. Jadi terdapat pengaruh total signifikan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui sumberdaya dan disposisi.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisis terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan Forum group diskusi (FGD) bahwa pengaruh dukungan publik meningkatkan kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui disposisi komitmen pimpinan dan peningkatan sumberdaya SDM, dana, peralatan, informasi/data dan kewenangan.

5.2.5 Analisa Pengaruh Faktor Disposisi

Pelaksana kebijakan memiliki nilai-nilai aturan yang bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan kebijakan atau penilaian terhadap kebijakan yang ada. Jika perbedaan nilai antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan cukup besar dan cenderung berlawanan arah, maka pelaksanaan kebijakan akan berada pada tahap yang sulit dan akan menjadi menghambat pelaksanaan kebijakan.

Apabila pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif. Para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak pula hanya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebijaksanaan.

Dalam pengisian dan pengangkatan jabatan aparatur yang terkait kinerja implementasi kebijakan penyelenggara bangunan gedung tidak berdasarkan pengetahuan apa yang harus dikerjakan dan tidak punya kemampuan dalam

melaksanakan kebijakan dan juga pejabat tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa pengangkatan aparatur sipil negara harus berdasarkan kemampuan kompetensi teknis, manajerial dan kemampuan sosial budaya. Bila ditingkal level staf maka kemampuan teknis harus menjadi dasar dalam menangani bidang penyelenggaraan bangunan gedung. Begitu juga dilevel pimpinan eselon II maka kemampuan kompetensi teknis, manajerial dan sosial budaya adalah persyaratan wajib yang harus dipunyai pejabat yang bersangkutan untuk dilakukan asesment/penilaian kemampuan pejabat dalam menduduki eselon II.

Agar aparatur sipil negara mempunyai komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan bangunan gedung perlu diberikan insentif agar kinerja implementasi kebijakan SLF bangunan gedung dapat ditingkatkan.

Sesuai dengan hasil penyebaran kuisioner bahwa responden menilai dalam variabel Y1 Disposisi bahwa.Indikator Y1.1 Birokrasi mempunyai komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung menunjukkan responden menilai pada indikator Y1.1 dengan jawaban didukung (didukung dan sangat didukung) sebanyak 91 orang dengan persentase 59.2 %. Indikator Y1.2 Birokrasi melakukan mutasi apabila pelaksanaan kebijakan sertifikasi laik fungsi tidak berjalan menunjukkan responden menilai pada indikator Y1.2 dengan jawaban didukung (didukung dan sangat didukung) sebanyak 83 orang dengan persentase 66.4 %. Indikator Y1.3 Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung didukung dengan peningkatan insentif personel (honor, dll) menunjukkan responden menilai pada indikator Y1.2 dengan jawaban didukung (didukung dan sangat didukung) sebanyak 81 orang dengan persentase 64.8 %.

a. Pengaruh Disposisi terhadap Kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Berdasarkan hasil penelitian model empiris2 didapat hasil bahwa p value = 0.017 < 0,05 dan model Emperis 1 didapat hasil bahwa p value = 0.02 < 0,05

dengan hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa disposisi berpengaruh terhadap Kinerja implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Data kuantitatif ini dikuatkan dengan hasil analisis terhadap data kualitatif melalui wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan forum group diskusi (FGD) bahwa pengaruh disposisi dengan komitmen pimpinan yang kuat dapat meningkatkan kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

5.5.6 Perbandingan Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Hubungan Antara Variabel

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif melalui uji statistik dan didukung dengan analisis kualitatif melalui *Indept Interview* dan FGD diatas, maka disusun perbandingan hubungan variabel komunikasi, struktur birokrasi dukungan publik terhadap sumberdaya, dukungan publik dan kinerja implementasi kebijakan SLF baik melalui hubungan secara langsung maupun tidak langsung.. Perbandingan analisis dapat dilihat pada Tabel 5.80 sebagai berikut.

Tabel 5.80 Perbandingan analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Hubungan Variabel.

No	Hubungan antar Variabel	Data Kuantitatif (korelasi)	Data Kualitatif (hubungan)	Kesimpulan
Pengaruh Langsung				
1.	Komunikasi → kinerja Implementasi SLF	0.029 < 0.05	Komunikasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF tetapi komunikasi yang dilakukan minimal terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
2	Sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	*** < 0.05	Sumberdaya berpengaruh terhadap Kinerja Implementasi SLF perlu peningkatan sumberdaya. Terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat, data kuantitatif
3	Struktur birokrasi → Kinerja Implementasi SLF	0.003 < 0.05	Struktur birokrasi berpengaruh terhadap	Memperkuat, data kuantitatif

No	Hubungan antar Variabel	Data Kuantitatif (korelasi)	Data Kualitatif (hubungan)	Kesimpulan
			Kinerja Implementasi SLF perlu peningkatn struktur birokrasi. Terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	
4	Dukungan publik → Kinerja Implementasi SL	0.003 < 0.05	Dukungan publik berpengaruh terhadap Kinerja Implementasi SLF perlu dilakukan sosialisasi secara insentif. Terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
5	Komunikasi disposisi →	0.074 > 0.05	Komunikasi tidak berpengaruh terhadap disposisi karena pelaksanaan komunikasi minimal tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Tidak Memperkuat data kuantitatif
6	Sumberdaya disposisi →	0.006 < 0.05	Sumberdaya berpengaruh terhadap disposisi perlu peningkatan sumberdaya terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
7	Disposisi → sumberdaya	0.003 < 0.05	Disposisi berpengaruh terhadap sumberdaya perlu penguatan disposisi. Terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
8	Struktur birokrasi → disposisi	0.003 < 0.05	Struktur birokrasi berpengaruh terhadap disposisi perlu peningkatan struktur birokrasi. Terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
9	Dukungan publik → disposisi	0.003 < 0.05	Dukunganpublic berpengaruh terhadap disposisiterdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
10	Disposisi → Kinerja	0.001 < 0.05	Disposisi berpengaruh	Memperkuat

No	Hubungan antar Variabel	Data Kuantitatif (korelasi)	Data Kualitatif (hubungan)	Kesimpulan
	Implementasi SLF BG		terhadap Kinerja Implementasi SLF BG terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	data kuantitatif
11	Komunikasi Sumberdaya →	$0.79 > 0.05$	Komunikasi tidak berpengaruh terhadap Sumberdaya karena komunikasi yang dilakukan minimal. Tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi (tidak reciprocal/interaktif)	Tidak Memperkuat data kuantitatif
12	Struktur birokrasi Sumberdaya →	$0.009 < 0.05$	Struktur birokrasi berpengaruh terhadap Sumberdaya perlu peningkatan struktur birokrasi. terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
13	Dukungan publik Sumberdaya →	$0.009 < 0.05$	Dukungan publik berpengaruh terhadap Sumberdaya terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
Pengaruh Tak Langsung				
14	Komunikasi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	I CR $I = 0.231 < 1.97$	Komunikasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja melalui sumberdaya. Tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi (tidak reciprocal/interaktif)	Tidak Memperkuat data kuantitatif
15	Komunikasi → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	I CR $I = 1.627 > 1.97$	Komunikasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja melalui disposisi. Tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi (tidak reciprocal/interaktif)	Tidak Memperkuat data kuantitatif
16	Sumberdaya → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI = $2.116 > 1.97$	Sumberdaya berpengaruh terhadap Kinerja Implementasi SLF melalui disposisi terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
17	disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	I CR $I = 2.116 > 1.97$	Sumberdaya berpengaruh terhadap Kinerja Implementasi SLF	Memperkuat data kuantitatif

No	Hubungan antar Variabel	Data Kuantitatif (korelasi)	Data Kualitatif (hubungan)	Kesimpulan
			melalui disposisi terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	
18	Struktur birokrasi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.221 > 1,97	Struktur birokrasi berpengaruh terhadap Kinerja Implementasi SLF melalui disposisi, terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
19	Struktur birokrasi disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.383 > 1,97	Struktur birokrasi berpengaruh terhadap Kinerja Implementasi SLF melalui disposisi, terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
20	Dukungan publik → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.310 < 1,97	Dukungan publik tidak berpengaruh terhadap Kinerja Implementasi SLF melalui disposisi tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	<i>Tidak Memperkuat data kuantitatif.</i>
21	Dukungan publik → disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.310 > 1,97	Dukungan publik berpengaruh terhadap Kinerja Implementasi SLF melalui disposisi terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
22	Komunikasi → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.653 < 1.97	Komunikasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF melalui Sumberdaya dan Disposisi tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	<i>Tidak saling Memperkuat data kuantitatif</i>
23	Komunikasi → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=1.653 < 1.97	Komunikasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF melalui Sumberdaya dan Disposisi tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	<i>Tidak saling Memperkuat data kuantitatif</i>

No	Hubungan antar Variabel	Data Kuantitatif (korelasi)	Data Kualitatif (hubungan)	Kesimpulan
24	Struktur Birokrasi → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=3.629> 1,97	Struktur Birokrasi Kinerja Implementasi SLF melalui Sumberdaya dan Disposisi terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
25	Struktur Birokrasi → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=3.629> 1,97	Struktur Birokrasi Kinerja Implementasi SLF melalui Sumberdaya dan Disposisi terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
26	Dukungan publik → Sumberdaya → Disposisi → Kinerja Implementasi SLF	ICRI=2.565> 1,97	Dukungan publik berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF melalui Sumberdaya dan Disposisi terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif
27	Dukungan publik → disposisi → sumberdaya → Kinerja Implementasi SLF	I CR I=2.565> 1,97	Dukungan publik berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF melalui Sumberdaya dan Disposisi terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal/interaktif)	Memperkuat data kuantitatif

Sumber : Hasil Analisa, tahun 2015.

5.6 Temuan Hasil Penelitian Kinerja Implementasi SLF-BG

5.6.1 Temuan Model Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan di sub bab sebelumnya, maka dapat disusun perbandingan antara Model Edward III dan Model Empiris sebagai temuan penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.81 dan 5.82 sebagai berikut:

Tabel 5.81 Perbandingan Model Edward III dan Model Empiris Pengaruh langsung

Hipotesis	Pengaruh Variabel Pengaruh Langsung	Model Edward III	Model Empiris	
			p-value / C.R	Hasil Hipotesis
H1	Komunikasi (X1) → kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	0.029 < 0.05	P
H2	Sumberdaya (Y1) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	*** < 0.05	P
H3	Struktur birokrasi (X2) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	0.003 < 0.05	P
H5	Komunikasi ((X1)* → disposisi (Y2) *	Berpengaruh	0.074 > 0.05	TP
H6	Sumberdaya (Y1) → disposisi (Y2)	Berpengaruh	0.006 < 0.05	P
H7	Disposisi (Y2) → sumberdaya (Y1)	Berpengaruh	0.003 < 0.05	P
H8	Struktur birokrasi (X2)* → disposisi (Y2)*	Berpengaruh	0.003 < 0.05	P
H10	Disposisi (Y2) → Kinerja Implementasi SLF BG (Y3)	Berpengaruh	0.003 < 0.05	P
H11	Komunikasi (X1)* → Sumberdaya (Y1)*	Berpengaruh	0.79 > 0.05	TP
H12	Struktur birokrasi (Y2)* → Sumberdaya (Y1)*	Berpengaruh	0.001 < 0.05	P
Hubungan Variabel Tambahan				
H4	Dukungan publik (X3) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	-	0.003 < 0.05	P
H9	Dukungan publik (X3) → disposisi (Y2)	-	0.009 < 0.05	P
H13	Dukungan publik (X3) → Sumberdaya (Y1)	-	0.009 < 0.05	P

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2015

Keterangan : * → * Pada model Empiris hubungan kausalitas satu arah. Pada model Edward III hubungan dua arah/resiprokal.

Tabel 5.82 Perbandingan Model Edward III dan Model Empiris Pengaruh Tidak Langsung

Hipotesis	Pengaruh Variabel Pengaruh Tak Langsung	Model Edward III	Model Empiris	
			ICritical Ratio I=Estimat/SE < 1.97	Hasil Hipotesis
H14	Komunikasi (X1)* → Sumberdaya (Y1)* → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	0.231 < 1,97	TP
H15	Komunikasi (X1)* → disposisi (Y2)* → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	1.627 < 1,97	TP
H16	Sumberdaya (Y1) → disposisi (Y2) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	2.166 > 1,97	p
H17	Disposisi (Y2) → sumberdaya (Y1) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	2.116 > 1,97	p
H18	Struktur birokrasi (X2)* → sumberdaya (Y1)* → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	2.221 > 1,97	p
H19	Struktur birokrasi (X2)* → disposisi (Y2)* → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	3.383 > 1,97	p
H22	Komunikasi (X1) → Sumberdaya (Y1) → Disposisi (Y2) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	1.297 < 1.97	TP
H23	Komunikasi (X1) → Disposisi (Y2) → sumberdaya (Y1) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	1.297 < 1.97	TP
H24	Struktur Birokrasi (X2) → Sumberdaya (Y1) → Disposisi (Y2) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	2.310 > 1,97	P

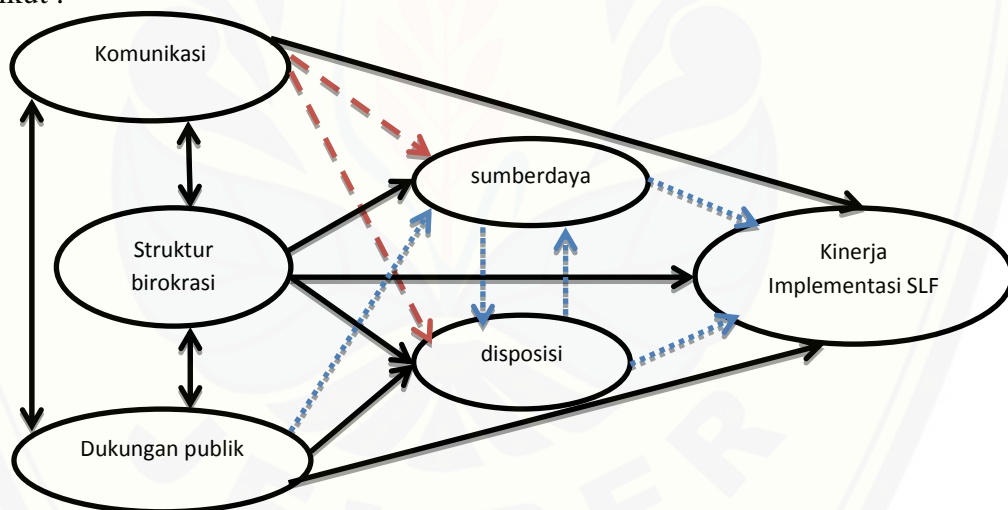
H25	Struktur Birokrasi (X2) → disposisi (Y2) → sumberdaya (Y1) → Implementasi SLF (Y3)	Berpengaruh	2.310 > 1,97	P
Hubungan Variabel Tambahan				
H20	Dukungan publik (X3) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	-	1.653 < 1,97	TP
H21	Dukungan publik (X3) → disposisi (Y2) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	-	2.085 > 1,97	P
H26	Dukungan publik (X3) → Sumberdaya (Y1) → Disposisi (Y2) → Kinerja Implementasi SLF (Y3)	-	2.204 > 1,97	P
H27	Dukungan publik (X3) → disposisi (Y2) → sumberdaya (Y1) → Implementasi SLF (Y3)	-	2.204 > 1,97	P

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2015

Keterangan : P (berpengaruh); TP (tidak Berpengaruh)

* → * Pada model Empiris hubungan kausalitas satu arah. Pada model Edward III hubungan dua arah/resiprokal

Dari Tabel 5.80 dan 5.81 dapat digambarkan dan direkomendasikan model implementasi kebijakan yang dapat diterapkan di Kota Probolinggo. Rekomendasi implementasi kebijakan SLF-BG dapat dilihat di Gambar 5.8 berikut :



Gambar 5.8 Temuan Model Implementasi SLF-BG

Keterangan Panah : —→ Pengaruh langsung; - - - → Tidak berpengaruh langsung; ... → / - - - → / - - - → tidak berpengaruh tidak langsung.

Variabel yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan SLF-BG di Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja Implementasi Kebijakan SLF-BG. Komunikasi tidak dapat mempengaruhi kinerja

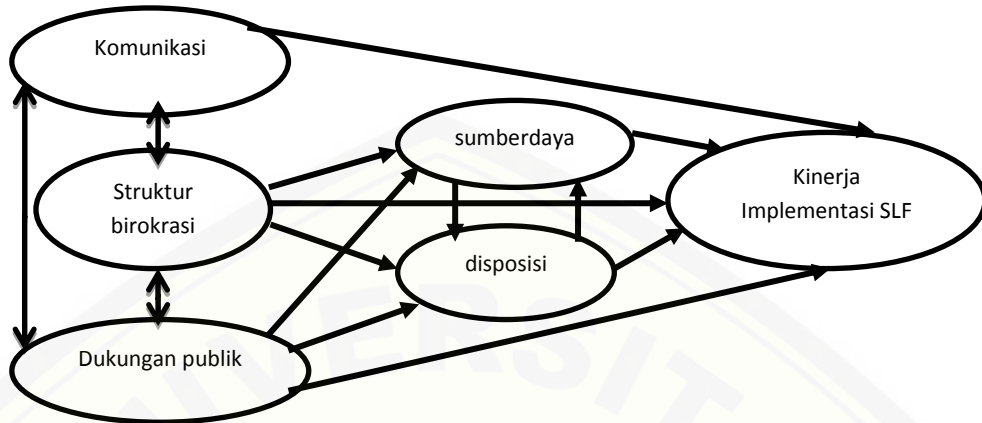
implementasi kebijakan SLF-BG melalui disposisi dan sumberdaya atau melalui sumberdaya dan disposisi secara simultan. Komunikasi tidak dapat mempengaruhi disposisi dan sumberdaya secara langsung.

2. Struktur birokrasi dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja Implementasi Kebijakan SLF-BG, disposisi secara langsung. Struktur birokrasi dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja Implementasi Kebijakan SLF-BG melalui disposisi dan sumberdaya atau sebaliknya melalui sumberdaya dan disposisi secara simultan.
3. Dukungan publik dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja Implementasi Kebijakan SLF-BG, disposisi secara langsung dan sumberdaya secara langsung. Dukungan publik dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja Implementasi Kebijakan SLF-BG melalui disposisi dan sumberdaya secara simultan dan dukungan publik tidak dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan SLF-BG melalui sumberdaya secara simultan.
4. Sumberdaya dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja Implementasi Kebijakan SLF-BG secara langsung atau melalui disposisi secara tidak langsung.
5. Disposisi dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja Implementasi Kebijakan SLF-BG secara langsung atau melalui sumberdaya secara tidak langsung.
6. Komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik saling mempengaruhi dan mendukung secara reciprocal/interaktif dan mempengaruhi/mendukung peningkatan kinerja implementasi kebijakan SLF-BG melalui sumberdaya dan disposisi.
7. Indikator variabel komunikasi mempunyai indikator transmisi, jelas dan konsistensi ada 2 indikator yang tidak reliabel yaitu indikator transmisi dan konsisten. Artinya komunikasi kurang disampaikan kepada stakeholder internal dan eksternal dan kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF-BG) tidak konsisten diterapkan pada semua bangunan gedung; variabel struktur birokrasi yaitu fragmentasi /lembaga terpecah-pecah atau tidak

menjadi satu akan menyebabkan fragmentasi yaitu pelaksanaan sertifikat laik fungsi dilaksanakan satu seksi sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan Walikota; indikator pada variabel dukungan publik yaitu indikator persyaratan menghambat/disinsentif tidak reliabel yaitu dalam pelaksanaan SLF-BG masyarakat dibebani dengan persyaratan menghambat (as built drawing, biaya sendiri untuk konsultan pengawas/MK/pengkaji teknis); indikator pada variabel sumberdaya ada tiga indikator yang tidak reliabel yaitu SDM, peralatan dan kewenangan. Pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan tidak didukung dengan jumlah SDM, tidak mempunyai peralatan dan tidak memiliki kewenangan yang kuat; Indikator pada variabel disposisi mempunyai tiga indikator semua reliabel dengan komitmen yang kuat dalam melaksanakan SLF, melakukan mutasi staf sesuai kompetesin dan memberikan insentif kepada staf dalam pelaksanaan SLF-BG; Indikator variabel kinerja implementasi kebijakan SLF-BG mempunyai enam indikator ada dua indikator yang tidak reliabel yaitu pemerataan dan ketepatan. Kinerja implementasi kebijakan SLF-BG belum merata pada seluruh pemohon/pengguna bangunan gedung dan ketepatan kebijakan SLF-BG belum berguna/benilai bagi pemilik bangunan gedung sesuai dengan tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yaitu bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

5.6.2 Rekomendasi Model Implementasi Kebijakan SLF

Dari hasil temuan model penelitian di atas dapat direkomendasikan model implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung dengan menghilangkan dua pengaruh variabel langsung dan tujuh variabel tidak langsung. Rekomendasi model dapat dilihat pada Gambar 5.9 berikut.



Gambar 5.9 Rekomendasi Model Implementasi Kebijakan SLF-BG

Dari Gambar 5.9 rekomendasi model implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung berdasarkan pengaruh komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung adalah Pengaruh langsung komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Pengaruh langsung sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap disposisi dan pengaruh langsung disposisi, komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap sumberdaya.

Pengaruh tidak langsung sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi melalui disposisi.

Pengaruh tidak langsung disposisi dan struktur birokrasi terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi melalui sumberdaya.

Pengaruh tidak langsung struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi melalui sumberdaya dan disposisi.

Pengaruh tidak langsung struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi melalui disposisi dan sumberdaya.

Dalam mengakomodasi temuan penelitian dukungan publik yang dapat digunakan pada rekomendasi model implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi

bangunan gedung. Dukungan publik pada implementasi kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung yaitu keterlibatan publik dalam hal ini Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) pada masukan pemeriksaan administrasi dan teknis bangunan gedung sebelum SLF diterbitkan dengan SKPD Pelaksana bangunan gedung. Proses pelayanan yang menjadi tanggung jawab SKPD harus mengikuti prinsip *pelayanan prima* yang berarti proses penerbitan SLF bangunan gedung dilaksanakan dengan waktu yang singkat sesuai dengan kompleksitas teknis bangunan gedung dan *tanpa dipungut biaya* yang berarti SLF bangunan gedung sebagai keterangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan bangunan gedung telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam IMB untuk dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, sehingga tidak dikenakan biaya lagi.

5.6.3 Proposisi Penelitian

Hubungan/*relationship* antara variabel adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat (kausalitas) dan hubungan sebab-akibat yang berlaku umum adalah proposisi. Dalam wujudnya proposisi berupa ungkapan/kalimat yang terdiri dari dua variabel atau lebih, yang merupakan bagian dari teori atau ilmu. Hubungan antara variabel bersifat tegas, baik bersifat normatif yaitu hubungan-hubungan itu harus merupakan pernyataan yang layak maupun tidak normatif (nomologis) (Soetrisno dan Rita, 2007:144)

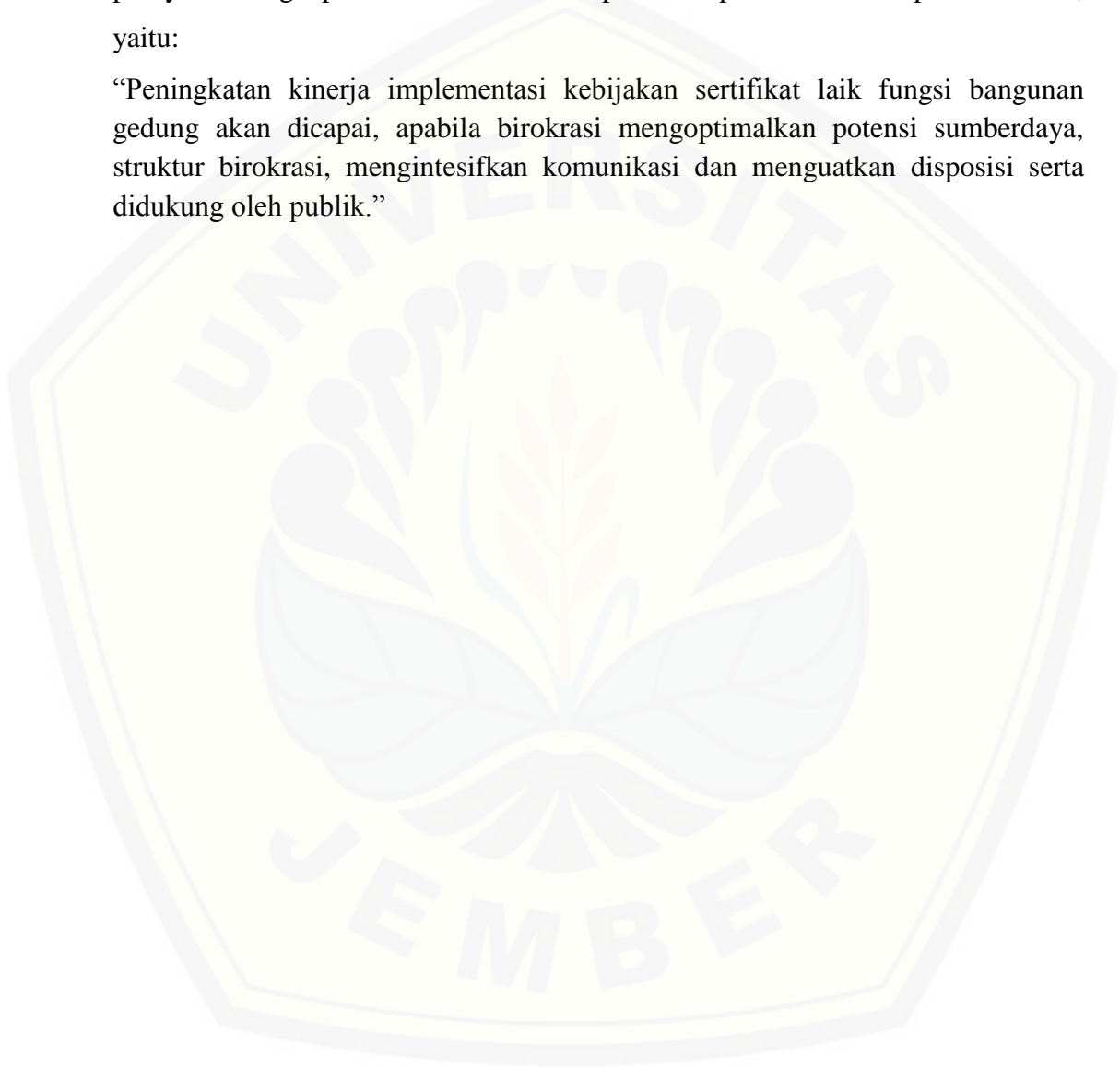
Determinant/faktor/variabel bebas (*Independent variables*)/Eksogenus dalam studi ini yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan publik. Sedangkan *result* atau disebut juga variabel terikat (*dependen variables*)/endogenus yaitu kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang belum optimal dalam pelaksanaannya perlu dilakukan upaya meningkatkan kinerja dengan mempertimbangkan potensi internal yaitu komunikasi, sumberdaya (SDM, dana, peralatan, informasi dan kewenangan), meningkatkan disposisi melalui komitmen pimpinan SKPD, struktur birokrasi dan faktor

eksternal birokrasi yaitu dukungan publik dalam mewujudkan kinerja peningkatan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Dari pembahasan dan analisis hubungan variabel pada sub bab sebelumnya, maka dapat disusun proposisi mayor penelitian sebagai pernyataan/ungkapan kalimat dan merupakan implikasi teoritik penelitian ini, yaitu:

“Peningkatan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung akan dicapai, apabila birokrasi mengoptimalkan potensi sumberdaya, struktur birokrasi, mengintensifkan komunikasi dan menguatkan disposisi serta didukung oleh publik.”



BAB 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan penelitian pengaruh komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap sumberdaya dan disposisi dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi yang telah dilaksanakan di kota Probolinggo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik berpengaruh signifikan langsung terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Artinya semakin intensip komunikasi dilakukan dan upaya meningkatkan optimalisasi struktur birokrasi serta memaksimalkan dukungan publik akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan laik fungsi bangunan gedung. Komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik berpengaruh terhadap disposisi. Artinya semakin intensip komunikasi dilakukan dan berupaya meningkatkan sumberdaya, mengoptimalkan struktur birokrasi serta dukungan publik akan meningkatkan disposisi.

Pada struktur birokrasi, dukungan publik berpengaruh signifikan langsung terhadap sumberdaya. Artinya optimalisasi struktur birokrasi dan dukungan publik akan meningkatkan sumberdaya. Pada sisi lain komunikasi tidak berpengaruh signifikan langsung terhadap disposisi dan sumberdaya. Artinya komunikasi yang tidak konsisten dilakukan dan komunikasi yang tidak ditransmisikan kepada semua stakeholder tidak mampu meningkatkan peran disposisi dan sumberdaya. Meningkatkan peran sumberdaya dalam meningkatkan kompetensi SDM, jumlah peralatan dan kewenangan yang kuat. Pada variabel disposisi mengoptimalkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan SLF, melakukan mutasi staf sesuai kompetensi dan

memberikan insentif kepada staf dalam pelaksanaan SLF-BG. Meningkatkan Kinerja implementasi kebijakan SLF-BG belum merata pada seluruh pemohon/pengguna bangunan gedung dan ketepatan kebijakan SLF-BG belum berguna/benilai bagi pemilik bangunan gedung sesuai dengan tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yaitu bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

2. Sumberdaya berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui disposisi. Artinya meningkatkan sumberdaya akan meningkatkan kinerja implementasi Sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang dimediasi oleh disposisi. Disposisi berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui sumberdaya. Artinya optimalisasi disposisi akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dimediasi oleh sumberdaya. Struktur birokrasi berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya atau disposisi. Artinya optimalisasi struktur birokrasi akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang dimediasi oleh sumberdaya atau disposisi.

Dukungan publik tidak berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui sumberdaya. Artinya kurangnya dukungan publik tidak akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang tidak dimediasi oleh sumberdaya.

Dukungan publik berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui disposisi. Artinya meningkatnya dukungan publik akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang dimediasi oleh disposisi.

Struktur birokrasi berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya dan disposisi. Artinya optimalisasi struktur birokrasi akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang dimediasi oleh sumberdaya dan disposisi. Struktur birokrasi berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap

kinerja implementasi SLF melalui disposisi dan sumberdaya. Artinya optimalisasi struktur birokrasi akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang dimediasi oleh disposisi dan sumberdaya.

Dukungan publik berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan SLF melalui sumberdaya dan disposisi. Artinya meningkatnya dukungan publik akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang dimediasi oleh sumberdaya dan disposisi. Dukungan publik berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan SLF melalui disposisi dan sumberdaya. Artinya meningkatnya dukungan publik akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang dimediasi oleh disposisi dan sumberdaya. Komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui sumberdaya atau disposisi. Artinya komunikasi yang kurang intensip dilakukan tidak meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan tidak dimediasi oleh sumberdaya atau disposisi. Komunikasi tidak berpengaruh signifikan tidak langsung terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui disposisi dan sumberdaya. Artinya komunikasi yang kurang intensip dilakukan tidak meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan tidak dimediasi disposisi dan sumberdaya.

3. Rekomendasi model implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung berdasarkan pengaruh komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung adalah Pengaruh langsung komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Pengaruh langsung sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap disposisi dan pengaruh langsung disposisi, komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap sumberdaya. Pengaruh tidak langsung sumberdaya, struktur

birokrasi dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi melalui disposisi. Pengaruh tidak langsung disposisi dan struktur birokrasi melalui sumberdaya. Pengaruh tidak langsung struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi melalui sumberdaya dan disposisi. Pengaruh tidak langsung struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi melalui disposisi dan sumberdaya.

6.2. Kontribusi Penelitian

Setiap penelitian di harapkan akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, implikasi teoritis maupun implikasi kebijakan yang bersifat praktis. Adapun kontribusi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.2.1 Implikasi Teoritik

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa pengaruh faktor komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap sumberdaya dan disposisi dalam kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di kota Probolinggo masih belum dilaksanakan secara optimal dan sistematis. Faktor sumberdaya, struktur birokrasi, disposisi dengan dukungan publik perlu dilakukan peningkatan kinerja secara optimal.

Dari hasil penelitian dan uraian pembahasan, maka implikasi teoritis yang dapat diusulkan dan merupakan kebaruan studi kasus penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Peningkatan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung akan dicapai, apabila birokrasi mengoptimalkan potensi sumberdaya, struktur birokrasi, mengintegrasikan komunikasi dan menguatkan disposisi serta didukung oleh publik.”

Implikasi teoritis dari penelitian ini sebagai kritikan, sekaligus melengkapi teori sebagai berikut:

- a. model teori implementasi kebijakan Edward III dengan variabel independen komunikasi, struktur birokrasi dan variabel intervening sumberdaya dan disposisi serta dukungan publik sebagai variabel independen tambahan. Bahwa pada prinsipnya variabel kinerja implementasi SLF belum tentu bisa diimplementasikan pada semua tempat, situasi dan kondisi, karena sangat dipengaruhi oleh dukungan publik, sehingga suatu paradigma belum tentu bisa diterapkan ditempat lain. Hal ini karena faktor dukungan publik dengan indikator insentif kebijakan penerbitan SLF dan indikator pelaksanaan SLF tanpa biaya, indikator disinsentif kebijakan SLF dan indikator persyaratan SLF yang menghambat mempengaruhi publik dalam mengurus sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- b. Teori Van Meter dan Van Horn dengan model struktural hubungan/relasi variabel bebas/eksogenus dengan variabel independen/endogenous searah/*unidirectional* kecuali relasi variabel endogenous pertama komunikasi antar organisasi dalam aktivitas komunikasi dengan variabel karakteristik dari agen pelaksana bersifat dua arah/*feedback loop* atau hubungan resiprokal. Pada variabel endogenous politik, sosial dan ekonomi yang bersifat umum perlu didetailkan dengan bersifat variabel khusus yaitu variabel dukungan publik (masyarakat dan swasta) sebagai bagian *good governance*.
- c. Teori Model Mazmanian dan Sabatier dengan model struktural yaitu tiga variabel bebas/independent. dan variabel dependen tahapan dalam proses implementasi. Pada variabel diluar kebijakan/*nonstatutory variable*, unsur pertama yaitu *socio economic conditions and technology* memiliki kesamaan dengan variabel Van Meter dan Van Horn yaitu keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan utamanya adalah Mazmanian dan Sabatier menyebutkan kata 'teknologi' sebagai satu kesatuan dengan sosioekonomi. Mazmanian dan Sabatier juga memperhatikan politik. Pada unsur kedua yaitu *public support* maupun unsur keempat yaitu *support from sovereigns* memperlihatkan bahwa dukungan publik (*bottom*) maupun dukungan dari penguasa (*top*) ikut menentukan implementasi. Tanpa dukungan dari kedua pihak (*top* dan *bottom*) maka implementasi akan menghadapi kendala. Dukungan dari atas maupun

bawah ini melibatkan proses politik. Publik yang memiliki kepentingan lebih cenderung akan mendukung suatu kebijakan yang mengutamakan kepentingan mereka. Demikian juga penguasa juga akan cenderung mendukung kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Model Mazmanian dan Sabatier memperhitungkan peran serta publik dalam implementasi kebijakan. Dari model ini bahwa dukungan publik wajib dilaksanakan pada implementasi kebijakan sesuai hasil penelitian ini.

6.2.2 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi kebijakan dalam implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Implikasi kebijakan tersebut adalah:

a. Pemerintah Daerah.

- 1) Kebijakan substansi yang khas dibanding kebijakan substansi lainnya yaitu kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung pada implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung dengan pendekatan pada:
a. Pengaturan perundangan-undangan keselamatan bangunan gedung.
b. Pemberdayaan swasta dan masyarakat jasa konstruksi bangunan gedung.
c. Pembangunan bangunan gedung.
d. Pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
e. Perlindungan keselamatan masyarakat terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.
- 2) Optimalisasi kinerja penyelenggara bangunan gedung dalam implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung dengan meningkatkan kinerja internal birokrasi dengan meningkatkan komunikasi, menambah sumberdaya (SDM, anggaran dan peralatan), meningkatkan struktur birokrasi dan meningkatkan disposisi.
- 3) Meningkatkan optimalisasi kinerja penyelenggara bangunan gedung dalam meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengawasan dan pembinaan terhadap jasa konstruksi dengan memfasilitasi keberadaan konsultan

penilai/pengkaji teknis bangunan gedung dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian (SKA) personil dalam pemeriksaan bangunan gedung sesuai Sertifikat Badan Usaha/SBU (AR103) Jasa penilaian perawatan dan kelayakan Bangunan gedung.

- 4) Beragamnya implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di beberapa kota di Indonesia perlu dilakukan standarisasi instansi penyelenggara, pelaksana pengkaji teknis dan metode pelaksanaannya.

b. Swasta/Jasa Konstruksi dan Masyarakat

- 1) Perlu meningkatkan kompetensi jasa konstruksi dalam sertifikasi laik fungsi bangunan gedung dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian (SKA) personil dalam pemeriksaan bangunan gedung sesuai Sertifikat Badan Usaha/SBU (AR103) Jasa penilaian perawatan dan kelayakan Bangunan gedung.
- 2) Masyarakat perlu menuntut hak bangunan gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan dengan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- 3) Sertifikat Laik fungsi bangunan gedung memberikan jaminan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan kepada penghuni /pengguna bangunan gedung dalam pemanfaatan bangunan gedung dan bangunan gedung kepentingan umum dapat menjadi jaminan pertanggung jawaban terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.

c. Peneliti

Sebagian studi ini memperkuat teori yang telah ada maupun temuan studi sebelumnya. Namun, terdapat temuan yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, penelitian akan lebih menarik jika dilakukan studi penelitian lanjutan/berikutnya untuk menjawab temuan-temuan yang tidak signifikan berkaitan dengan kinerja implementasi sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

6.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara akademis maupun empiris sebagai berikut:

1. Sebelum implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi dilaksanakan maka SKPD penyelenggara bangunan gedung perlu mempersiapkan sumberdaya (SDM, dana, peralatan, sistem informasi dan kewenangan) secara bertahap agar penerbitan SLF terlaksana.
2. Dalam meningkatkan sumberdaya anggaran dengan menambah dana operasional SLF, perlu dilakukan revisi terhadap perda perijinan tertentu retribusi IMB berdasarkan pasal 142 undang-undang 28 tahun 2002 tentang retribusi dan pajak daerah agar koefisien pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut dimasukkan dalam perhitungan retribusi IMB.
3. Meningkatkan sumberdaya informasi dengan mengintegrasikan data bangunan gedung dengan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) dan online yaitu integrasi data IMB di kecamatan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dengan pusat data server di Dinas Pekerjaan Umum.
4. Menambah dan meningkatkan kompetensi sumberdaya SDM pelaksana bangunan gedung dalam sertifikasi pemeriksaan administrasi dan teknis SLF-BG dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung untuk semua fungsi bangunan gedung (fungsi hunian, keagamaan, usaha dan sosial budaya).
5. Meningkatkan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilakukan secara terus menerus agar SOP Sertifikat laik fungsi bangunan gedung berjalan sesuai dengan kondisi yang ada.
6. Pelaksanaan IMB dan SLF dilakukan satu paket, mulai dari formulir permohonan (pasal 52 perda nomor 4 tahun 2008) sampai pembangunan bangunan gedung selesai atau sebelum dimanfaatkan. Penyelenggara

bangunan gedung memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung apabila laik fungsi diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

7. Meningkatkan komunikasi kepada semua stakeholder bangunan gedung dengan melakukan sosialisasi secara langsung melalui tatap muka/desiminasi dan tidak langsung melalui brosur, leaflet dan baliho tentang sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

6.4 Keterbatasan Studi.

Studi ini memiliki keterbatasan, populasi Kota/Kab studi Implementasi SLF ini hanya pada pada Dinas PU Kota Probolinggo karena pada waktu itu Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur yang sudah melaksanakan implementasi SLF baru Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Hal ini berimplikasi pada temuan studi yang hanya berlaku terbatas di satu Pemerintah Daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan penguatan data kualitatif. Sampel sumber data secara *purposiven* (siapa yang paling mengetahui tentang apa yang ditanyakan) melalui indept intevieiw dan forum group diskusi terbatas pada implementor pelaksana SLF dan pemilik bangunan gedung ber-IMB fungsi usaha. Penelitian akan menarik bila dilakukan penelitian kombinasi (*mixed method*) dan dapat dipertanggungjawakan secara ilmiah.

Sampel Studi individu pada suatu organisasi SKPD yang melaksanakan SLF yaitu pada Dinas PU, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP), Pengawas Perijinan yaitu Inspektorat dan Dukungan Publik pada Pemilik BG ber IMB, Perencana/Konsultan dan Pelaksana/Kontraktor BG.

Variabel yang digunakan pada Internal Birokrasi (komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan disposisi dan kinerja implementasi) dan eksternal birokrasi yaitu dukungan publik. Akan lebih menarik bila variabel eksternal birokrasi ditambah kondisi ekonomi, sosial dan politik (teori Van Meter dan Van Horn).

Model studi disusun berdasarkan analisis dengan memilih model studi terdahulu yang masih menunjukkan kekurangan. Model studi ini baru, namun variabel yang ada (dukungan publik/*public support*) yang jelas diambil dari model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang mempunyai model berbeda dengan model Edward III.

Model Studi yang digunakan pada penelitian ini untuk hubungan antar variabel independen/eksogenus dengan variabel dependen/endogenus/intervening dan dependen/endogenus adalah hubungan kausalitas satu arah. Pada Model Edward III hubungan antar variabel independen/eksogenus komunikasi dan struktur birokrasi dengan variabel dependen/endogenus/intervening sumberdaya dan disposisi adalah hubungan dua arah/resiprokal . Oleh sebab itu, akan lebih menarik jika dilakukan studi lanjutan untuk menjawab hubungan antar variabel independen/eksogenus dengan variabel dependen/endogenus/intervening dan dependen/endogenus adalah hubungan dua arah/resiprokal.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adam Ibrahim Andrawijaya.1986. *Perilaku Organisasi*.Penerbit Sinar Baru, Bandung
- Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Armstrong, Michael.1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia, A Handbook Of Human Resource Management*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Anonim. 2009. *Pencapaian Sebuah Perubahan: Evaluasi 4 TahunPelaksanaan RPJMN 2004-2009*, hal. 584, Jakarta: Kemeng PPN/Bappenas, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Darjosanjoto, Endang T.S. 2006. *Penelitian Arsitektur di Bidang Perumahan dan Permukiman*. Cetakan pertama, Penerbit ITS press, Surabaya
- Dahlan Usman, 2014. *Panduan Lengkap Structural Equation Modeling Tingkat Dasar Metodologi, Konsepsi dan Aplikasi (dengan AMOS)*, Lentera Ilmu, Semarang.
- Dharma, Surya. 2013. *Manajemen Knerja, Falsafah Teori dan Penerapanya*.Cetakan VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DeLeon, P. and deLeoin, L. (2002). *What Ever Happened to Policy Implementation ? An Alternative Approach, Journal of Public Administration Research and Theory*, V.12 (4),pp 467-492.
- Denhardt, Janer V, and Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service : Serving Not Steering*. Armonk, N.Y : M.E. Sharpe.
- Dunn, William N. 2004, (1981). *Public Policy Analysis : An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Edisibahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta :Gajahmada University Press.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*, New Jersey : Prentice Hall.

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Police*. Washington, D.C :Congressional Quarterly Press.
- Gallion B Arthur, Eisner Simon. 1994, *Pengantar Perancangan Kota, Desain dan Perancangan Kota*, Penerbit Airlangga, Jakarta
- Hadi, S. 1995. *Statistik*, Jilid I. Penerbit Andy Offset, Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy Irfan M. 1988. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, FIA Unibraw Malang, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Kamisa. 1996. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Kartika, Surabaya.
- KartiniKartono.1983. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Keith Davis. 1972. *Human Relations At Work*, Mc.Graw Hill Book Co, Inc, Kogakusha Co Ltd, Tokyo.
- Keban Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.
- Kuncoro Mudrajat. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Penerbit Airlangga, Jakarta.
- Kusumanegara Solahudi. 2010. *Model dan Aktor dalam proses Kebijakan Publik*. Penerbit Gaya Media, cetakan pertama, Yogyakarta.
- Keith Davis. 1972. *Human Relations At Work*, Mc.Graw Hill Book Co, Inc, Kogakusha Co Ltd, Tokyo.
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Police*, New York :Herper Collins.
- Makmur. 2009. *Patologi serta Terapinya dalam Im Administrasi dan Organisasi*. Bandung: Penerbit Refika Aditama
- Malthis, R.L dan Jackson.2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mintzberg, Henry. 1979. *The Structure of Organizations*, Prentice-Hall, New York

- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nasir Moh. 1999. *Metodologi Penelitian*, Cetakan keempat, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nurmandi Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*, Penerbit Lingkaran Bangsa, Yogyakarta
- Nugroho Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*, cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nugroho Riant. 2008. *Public Police*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, cetakan ke limabelas, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, cetakan keenam, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sangarimbun, Masri, dkk. 1989. *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta Yogyakarta.
- Santoso Singgih. 2015. *Amos 22 untuk Struktural Equation Modelling Konsep dasar dan Aplikasi*, penerbit PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta.
- Suryabrata Sumadi. 2000. *Metodologi Penelitian*, Cetakan 12, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Simamora, Henry. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT. Refika Aditam, Bandung.
- Supranto, J. 1997. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*, Edisi Pertama, Rineka Cipta, Jakarta .
- Solihin Mahfud dan Ratmono Dwi. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0*, Andi offset, Yogyakarta
- Subarsono A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Pruit, Dean. 1986. *Teori Konflik Sosial*, McGraw-Hill, Inc, New York
- Purwanto Erwan A dan S.D. Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.
- Pramusinto A dan Purwanto ErwanA. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*, cetakan pertama, Penerbit Gaya Media, Jian UGM dan MAP-UGM, Yogyakarta.
- Parasuraman, A. Zeithalm, V dan Berry L. 1985. *A Conceptual Model of Service Quality and its Implication for Future Research*. Journal of Marketing, Vol 49,41-50
- Priyatno, Duwi. 2009. *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*, Cetakan Pertama, Korelasi dan Regres, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gava Media.
- Poernomo Djoko. 2015. *Usaha Mikro Batik Madura*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Griya Pandiva
- Tjiptono, F. 2002. *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rangkuti Freddy. 2004. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, cetakan keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Riduwan. 2010. *Dasar-dasar Statistika*. Universitas Negeri Malang, penerbit Alfabeta, Bandung
- Ripley, Randall. B . (1985). *Policy Analysis in Political Science*. Chicago : Nelson-Hall.
- Robbins, Stephen. P. dan Mary Coulter. 2005. *Manajemen*. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Setyoadi. 2010. *Membangun Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Penataan Kawasan Kumuh di Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi*, Prosiding Seminar “Inovasi Dalam Riset Dan Praktek Perencanaan Menuju Penataan Ruang Kota Masa Depan ITS.
- Yuswadi Hary. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Humaniora: Suatu Pendekatan kuantitatif dan Kualitatif*. FISIP UNEJ, Jember.

- Van Meter, D.S, & Van Horn, C. E. 1975. “ *The Policy implementation process: A. Conceptual Framework*”. *Adminsitration and Society*, 6 (4),pp: 445-488.
- Waluyo Minto. 2011. *Panduan dan Aplikasi Struktural Equation Modeling (Untuk Aplikasi Model Dalam Penelitian Teknik Industri, Psikologi, Sosial dan Manajemen)*,PT. Indeks, Jakarta
- Widodo Joko. 2011. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Cetakan keenam Bayu Media Publising, Malang
- Winarno Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Cetakan Kedua,PT Buku Seru, Jakarta
- Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., and Gremler, D.D. 2010. *Services Marketing Strategy, in Wiley International Encyclopedia of Marketing: Marketing Strategy*, Robert A. Peterson and Roger A. Kerin, eds. Chichester, UK: John Wiley & Sons

Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2014.*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2011.*Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2011.*Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun*.
- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2002.*Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*.
- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2005.*Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*.
- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2007.*Peraturan Menteri Perumahan Pekerjaan Nomor : 17/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2008. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2008. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah*

Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.*

Bagian Hukum Sekretariat Kota Probolinggo. 2010. *Peraturan Daerah Kota Probolinggo, Nomor 2 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo tahun 2009-2028*

Bagian Hukum Sekretariat Kota Probolinggo. ,2008. *Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung.*

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. 2007. *Peraturan Daerah Kota Probolinggo, Nomor 4 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum.*

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. 2013. *Peraturan Daerah Kota Probolinggo, Nomor 3 Tahun 2013, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.*

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. 2013. *Peraturan Walikota Probolinggo, Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung.*

Jurnal/artikel

Bambang Budijono. 2004. *Pengaruh Pengawasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik*

Febriani Dewi, Darusman D, Nurrochmat D.R, Wijayanto N. 2012. *Strategi Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.*

Chris Ansell, Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Chris Ansell, Alison Gash, University of California, Berkeley, Advance acces publication.

Daud M. Liando. 2011. *The Influence Of Population Administrative Policy Implementation On The Quality Of Id Card Service*, Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.

- Defrima Yenti. 2012. *Pengaruh motivasi, komitmen Organisasi dan partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap kinerja Organisasi (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang . Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang, Email: ridef29@yahoo.co.id.
- Effendi Darmawan, Soemitro R.A.A, Artama W.I.P, 2011. *Perumusan Strategi Optimalisasi Fungsi Pasar Baru Muara Labuh Berdasarkan Analisis Keunggulan Bersaing*. Program Magister Teknik Bidang Keahlian Manajemen Aset FTSP-ITS.
- Endah Harisun. 2013. yang dibimbing oleh Prof. Ir. B. F. Sompie, MS dan IR. J.P. Rantung, MSi, MM. *Kajian Sistem Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara*.
- Hendrawati Reny. 2010, *Analisis Dampak Implementasi Kebijakan dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi (studi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi)*.
- Hikmawati. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.
- Idayanti Nursyamsi. 2012. "Pengaruh Kepemimpinan, Pemberdayaan, dan Stres Kerja Terhadap Komitmen Organisasional serta dampaknya terhadap Kinerja Dosen".
- Iswahyudi Fajar. 2012. *Effektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul)*, Jurnal Borneo Administrator Volume 8 No. 3.
- Kusnandar Ishak. 2005. disertasi: "Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan."
- Masana Sembiring. 2013. *Pengaruh budaya organisasi dan implementasi kebijakan Publik Kinerja organisasi pelaksana Keteriban, kebersihan dan Keindahan di Kota Bandung*. Masana Sembiring, Dosen Senior IPDN Jatinangor, Sumedang, Hp.08122422740.
- Masrukhindan Waridin. *Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai*. EKOBIS, Vol 7. No 2, 2004, hlm. 197-209.

- Mitchel N. Herian , Joseph A. Hamm , Alan J. Tomkins , Lisa M. Pytlik Zillig. 2012. *Partisipasi Publik, Keadilan Prosedural, dan Evaluasi Pemerintahan Daerah: Memodernisasi Peran ketidakpastian* University of Nebraska Kebijakan Publik Pusat.on Januari 16.
- Semmy Herman Tetelepta. 2005. Dengan judul: "*Pengaruh Kinerja Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik*."
- Sopannah,Isa Wahyudi, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi masyarakat dan Tranparansi Kebijakan Publik Terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*.Sopannah, Universitas Widya Gama Malang, Isa Wahyudi, Malang Corruption Watch (MCW).
- Silvia Yulita Ratih. 2013.*Evaluasi Kesiapan Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Pusat Perbelanjaan di Solo*,Silvia Yulita Ratih dalam jurnal FTSP UNS VOL 14 NO 1 TAHUN 2013.
- Jufri Muhamad. 2010. *Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan dan Kualitas Sumber daya Aparatur Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Daerah Di Kota Bekasi.(Studi Perda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bekasi)*
- Tomi Setiawanand Egnas Sukma F,*Public Private Partnership as a Public Service Dilemma,Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, UniversitasPadjajaran, West Java, Indonesia, tomi.setiawan@unpad.ac.id*
- Rhys Andrews, George A. Boyne. 2007. *Sentralisasi,Strategi Organisasi, dan Kinerja Pelayanan publik*. University of Cardiff; Hukum Jennifer, University of Glamorgan;Richard M. Walker, University of Hong Kong dan Cardiff University, on december 18,2007.
- Yustono Eris, Pengaruh Kapasitas Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi di STIA LAN Bandung, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung, Volume XII, Nomor 3 Tahun 2015.
- Zulkarnaini, *Pengaruh Komitmen organisasi dan Pengendalian Intern terhadap slack anggaran*.Survey Pada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya, Dosen pada Jurusan Tata Niaga, Politeknik Negeri Lhokseumawe

LAMPIRAN A.DATA VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Correlations

		x11	x12	x13	X1
x11	Pearson Correlation	1	.674**	.435**	.815**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	125	125	125	125
x12	Pearson Correlation	.674**	1	.666**	.914**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125
x13	Pearson Correlation	.435**	.666**	1	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	125	125	125	125
X1	Pearson Correlation	.815**	.914**	.831**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	125	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	125	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	3

Correlations

	x21	x22	x23	x24	x25	X2
Pearson Correlation	1	.654**	.467**	.458**	.376**	.792**
x21 Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
N	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.654**	1	.504**	.503**	.182*	.763**
x22 Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.042	.000
N	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.467**	.504**	1	.647**	.381**	.786**
x23 Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
N	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.458**	.503**	.647**	1	.588**	.829**
x24 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
N	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.376**	.182*	.381**	.588**	1	.636**
x25 Sig. (2-tailed)	.000	.042	.000	.000		.000
N	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.792**	.763**	.786**	.829**	.636**	1
X2 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	125	125	125	125	125	125

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	125	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	125	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	5

Correlations

		x31	x32	x33	X3
x31	Pearson Correlation	1	.443**	.443**	.774**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	125	125	125	125
x32	Pearson Correlation	.443**	1	.778**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125
x33	Pearson Correlation	.443**	.778**	1	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	125	125	125	125
X3	Pearson Correlation	.774**	.871**	.868**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	125	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	125	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.779	3

Correlations

		x41	x42	X4
x41	Pearson Correlation	1	.564**	.869**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	125	125	125
x42	Pearson Correlation	.564**	1	.899**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	125	125	125
X4	Pearson Correlation	.869**	.899**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	125	125	125

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	125	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	125	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.718	2

Correlations

		y11	y12	y13	Y1
y11	Pearson Correlation	1	.577**	.673**	.837**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	125	125	125	125
y12	Pearson Correlation	.577**	1	.712**	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125
y13	Pearson Correlation	.673**	.712**	1	.910**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	125	125	125	125
Y1	Pearson Correlation	.837**	.883**	.910**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	125	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	125	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.848	3

Correlations

	y21	y22	y23	y24	y25	y26	Y2
Pearson Correlation	1	.723**	.531**	.498**	.619**	.405**	.825**
y21 Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	125	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.723**	1	.551**	.472**	.510**	.393**	.806**
y22 Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
N	125	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.531**	.551**	1	.572**	.569**	.311**	.767**
y23 Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
N	125	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.498**	.472**	.572**	1	.626**	.268**	.745**
y24 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.003	.000
N	125	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.619**	.510**	.569**	.626**	1	.568**	.834**
y25 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
N	125	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.405**	.393**	.311**	.268**	.568**	1	.628**
y26 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	.000		.000
N	125	125	125	125	125	125	125
Pearson Correlation	.825**	.806**	.767**	.745**	.834**	.628**	1
Y2 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	125	125	125	125	125	125	125

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	125	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	125	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.860	6

LAMPIRAN B. OUTPUT SEM AMOS

1. Model Emperis 2 (Variabel Intervening : Disposisi)

Assessment of normality (Group number2)

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
y12	1.000	5.000	-.815	-3.720	.469	1.070
x41	1.000	5.000	-.427	-1.949	.607	1.386
x42	1.000	5.000	-.576	-2.628	.339	.774
y13	1.000	5.000	-.617	-2.815	.218	.497
y11	1.000	5.000	-.749	-3.420	.673	1.537
x31	2.000	5.000	-.067	-.308	-.491	-1.120
x32	2.000	5.000	-.935	-4.266	.666	1.521
x33	2.000	5.000	-.627	-2.861	.394	.898
x21	1.000	5.000	-.322	-1.468	-.675	-1.540
x22	1.000	5.000	-.220	-1.006	-.356	-.812
x23	2.000	5.000	.111	.505	-.812	-1.854
x24	2.000	5.000	-.315	-1.438	-.627	-1.430
x25	2.000	5.000	-.040	-.185	-.608	-1.388
x11	2.000	5.000	-.191	-.870	.300	.684
x12	2.000	5.000	-.166	-.758	.237	.540
x13	2.000	5.000	.015	.067	-.310	-.708
y26	2.000	5.000	-.082	-.372	-.910	-2.077
y21	2.000	5.000	.152	.693	-.708	-1.616
y22	1.000	5.000	-.064	-.294	-.353	-.805
y23	1.000	5.000	.032	.148	-.256	-.584
y24	1.000	5.000	-.212	-.967	-.237	-.541
y25	2.000	5.000	.073	.334	-.693	-1.581
Multivariate					84.775	14.583

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 2)

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
32	56.700	.000	.008
46	50.319	.001	.002
27	47.228	.001	.001
54	45.911	.002	.000
9	45.292	.002	.000
39	44.876	.003	.000
50	43.400	.004	.000
48	42.484	.005	.000
59	42.217	.006	.000
55	41.253	.008	.000
38	39.038	.014	.000
53	37.785	.019	.000
10	37.573	.020	.000
18	36.532	.027	.000
60	35.747	.032	.000
66	35.619	.033	.000
30	35.591	.034	.000
85	34.817	.040	.000

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
95	34.053	.049	.000
80	33.656	.053	.000
24	32.446	.070	.000
79	32.372	.071	.000
64	32.317	.072	.000
29	32.203	.074	.000
82	30.775	.101	.001
100	29.976	.119	.003
98	29.810	.123	.002
88	29.568	.129	.002
81	27.364	.198	.196
109	27.145	.206	.200
121	26.334	.238	.427
44	26.079	.248	.455
76	25.995	.252	.411
92	25.755	.262	.437
47	25.744	.263	.364
67	25.689	.265	.313
103	25.525	.273	.309
77	25.453	.276	.270
34	25.446	.276	.212
40	25.391	.279	.176
93	25.191	.288	.186
26	25.042	.295	.182
11	24.909	.301	.173
3	24.605	.316	.222
101	24.571	.318	.180
99	24.558	.319	.139
108	24.431	.325	.132
57	24.377	.328	.108
52	24.213	.336	.111
78	24.138	.340	.094
58	24.068	.344	.079
73	23.240	.388	.292
112	23.106	.396	.289
4	22.980	.403	.282
21	22.636	.423	.379
33	22.288	.443	.488
115	21.990	.461	.575
35	21.743	.475	.634
106	21.387	.497	.741
45	21.360	.499	.693
107	21.329	.500	.644
84	21.020	.520	.731
111	21.003	.521	.677
123	20.852	.530	.688

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
113	20.781	.534	.660
65	20.631	.544	.671
118	20.529	.550	.658
110	20.262	.567	.727
7	19.884	.590	.832
86	19.758	.598	.832
19	19.446	.618	.891
72	19.297	.627	.897
94	19.116	.638	.911
83	18.496	.676	.981
89	18.474	.678	.973
23	17.899	.712	.995
114	17.633	.727	.998
122	17.525	.734	.997
120	17.497	.735	.996
49	17.457	.738	.994
119	17.226	.751	.996
104	16.841	.772	.999
69	16.792	.775	.998
68	16.364	.797	1.000
87	16.323	.800	.999
105	15.940	.819	1.000
6	15.823	.825	1.000
5	15.708	.830	1.000
56	15.364	.846	1.000
90	15.216	.853	1.000
91	15.168	.855	1.000
51	14.695	.875	1.000
62	14.497	.883	1.000
28	14.432	.885	1.000
14	14.262	.892	1.000
71	14.064	.899	1.000
116	13.717	.911	1.000
63	13.704	.912	1.000
25	13.652	.913	1.000
97	13.566	.916	1.000

Regression Weights: (Group number 2 - Default model)

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1	<--- X2	.573	.200	2.862	.004	par_1
Y1	<--- X3	.284	.123	2.302	.021	par_2
Y1	<--- X4	.320	.145	2.200	.028	par_3
Y1	<--- X1	-.259	.127	-2.038	.042	par_25
Y2	<--- X3	.256	.084	3.068	.002	par_4
Y2	<--- X1	.198	.092	2.141	.032	par_5
Y2	<--- X2	.491	.156	3.140	.002	par_6
Y2	<--- X4	.334	.108	3.105	.002	par_7
Y2	<--- Y1	.221	.093	2.388	.017	par_11

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
y25	<---	Y2	1.000				
y23	<---	Y2	.951	.111	8.543	***	par_8
y22	<---	Y2	1.125	.131	8.603	***	par_9
y24	<---	Y2	.959	.114	8.381	***	par_10
y26	<---	Y2	.771	.111	6.925	***	par_12
y21	<---	Y2	1.069	.113	9.441	***	par_13
x13	<---	X1	1.000				
x12	<---	X1	1.353	.174	7.774	***	par_14
x11	<---	X1	.932	.129	7.200	***	par_15
x25	<---	X2	1.000				
x24	<---	X2	1.647	.265	6.218	***	par_16
x23	<---	X2	1.502	.267	5.632	***	par_17
x22	<---	X2	1.490	.291	5.119	***	par_18
x21	<---	X2	1.601	.305	5.251	***	par_19
x33	<---	X3	1.000				
x32	<---	X3	1.004	.090	11.134	***	par_20
x31	<---	X3	.689	.116	5.918	***	par_21
y11	<---	Y1	1.000				
x42	<---	X4	1.000				
x41	<---	X4	1.127	.183	6.147	***	par_22
y13	<---	Y1	1.261	.133	9.464	***	par_29
y12	<---	Y1	1.247	.143	8.699	***	par_30

Standardized Regression Weights: (Group number 2 - Default model)

			Estimate
Y1	<---	X2	.381
Y1	<---	X3	.254
Y1	<---	X4	.280
Y1	<---	X1	-.176
Y2	<---	X3	.235
Y2	<---	X1	.138
Y2	<---	X2	.335
Y2	<---	X4	.299
Y2	<---	Y1	.227
y25	<---	Y2	.804
y23	<---	Y2	.713
y22	<---	Y2	.731
y24	<---	Y2	.696
y26	<---	Y2	.597
y21	<---	Y2	.777
x13	<---	X1	.679
x12	<---	X1	.979
x11	<---	X1	.688
x25	<---	X2	.553
x24	<---	X2	.805
x23	<---	X2	.725
x22	<---	X2	.687
x21	<---	X2	.699

	Estimate
x33 <--- X3	.892
x32 <--- X3	.864
x31 <--- X3	.525
y11 <--- Y1	.783
x42 <--- X4	.666
x41 <--- X4	.847
y13 <--- Y1	.850
y12 <--- Y1	.804

Covariances: (Group number 2 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X2 <--> X3	.133	.035	3.807	***	par_23
X3 <--> X4	.151	.042	3.644	***	par_24
X3 <--> X1	.053	.027	1.974	.048	par_26
X4 <--> X1	.081	.032	2.530	.011	par_27
X2 <--> X4	.131	.038	3.421	***	par_28
X2 <--> X1	.042	.022	1.937	.053	par_31

Correlations: (Group number 2 - Default model)

	Estimate
X2 <--> X3	.541
X3 <--> X4	.469
X3 <--> X1	.213
X4 <--> X1	.331
X2 <--> X4	.548
X2 <--> X1	.224

Variances: (Group number 2 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X2	.182	.060	3.066	.002	par_32
X3	.331	.056	5.927	***	par_33
X4	.314	.085	3.681	***	par_34
X1	.189	.047	4.072	***	par_35
z1	.195	.046	4.216	***	par_36
z2	.045	.018	2.497	.013	par_37
e8	.215	.033	6.447	***	par_38
e7	.382	.053	7.184	***	par_39
e6	.342	.048	7.136	***	par_40
e5	.432	.063	6.876	***	par_41
e4	.295	.045	6.615	***	par_42
e9	.421	.057	7.432	***	par_43
d3	.222	.032	6.929	***	par_44
d2	.015	.031	.481	.631	par_45
d1	.183	.028	6.604	***	par_46
d8	.414	.058	7.175	***	par_47
d7	.269	.054	4.979	***	par_48
d6	.372	.058	6.369	***	par_49

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
d5	.452	.071	6.406	***	par_50
d4	.489	.080	6.143	***	par_51
d11	.085	.024	3.568	***	par_52
d10	.114	.026	4.437	***	par_53
d9	.412	.055	7.456	***	par_54
e3	.251	.053	4.753	***	par_55
d13	.395	.065	6.086	***	par_56
d12	.157	.056	2.808	.005	par_57
e1	.260	.045	5.847	***	par_58
e2	.349	.062	5.624	***	par_59

Squared Multiple Correlations: (Group number 2 - Default model)

	Estimate
Y1	.526
Y2	.885
y12	.647
x41	.718
x42	.443
y13	.723
y11	.613
x31	.276
x32	.746
x33	.796
x21	.489
x22	.472
x23	.525
x24	.648
x25	.306
x11	.474
x12	.959
x13	.461
y26	.356
y21	.603
y22	.535
y23	.509
y24	.485
y25	.646

Total Effects (Group number 2 - Default model)

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	-.259	.320	.284	.573	.000	.000
Y2	.140	.405	.319	.618	.221	.000
y12	-.324	.399	.354	.714	1.247	.000
x41	.000	1.127	.000	.000	.000	.000
x42	.000	1.000	.000	.000	.000	.000
y13	-.327	.403	.358	.722	1.261	.000
y11	-.259	.320	.284	.573	1.000	.000
x31	.000	.000	.689	.000	.000	.000

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
x32	.000	.000	1.004	.000	.000	.000
x33	.000	.000	1.000	.000	.000	.000
x21	.000	.000	.000	1.601	.000	.000
x22	.000	.000	.000	1.490	.000	.000
x23	.000	.000	.000	1.502	.000	.000
x24	.000	.000	.000	1.647	.000	.000
x25	.000	.000	.000	1.000	.000	.000
x11	.932	.000	.000	.000	.000	.000
x12	1.353	.000	.000	.000	.000	.000
x13	1.000	.000	.000	.000	.000	.000
y26	.108	.312	.246	.476	.171	.771
y21	.150	.433	.341	.661	.237	1.069
y22	.158	.456	.359	.696	.249	1.125
y23	.134	.385	.304	.588	.211	.951
y24	.135	.388	.306	.592	.212	.959
y25	.140	.405	.319	.618	.221	1.000

Total Effects - Standard Errors (Group number 2 - Default model)

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	.153	.243	.178	.312	.000	.000
Y2	.121	.178	.103	.253	.143	.000
y12	.190	.295	.199	.371	.234	.000
x41	.000	.276	.000	.000	.000	.000
x42	.000	.000	.000	.000	.000	.000
y13	.187	.281	.214	.370	.172	.000
y11	.153	.243	.178	.312	.000	.000
x31	.000	.000	.167	.000	.000	.000
x32	.000	.000	.115	.000	.000	.000
x33	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x21	.000	.000	.000	.475	.000	.000
x22	.000	.000	.000	.460	.000	.000
x23	.000	.000	.000	.326	.000	.000
x24	.000	.000	.000	.270	.000	.000
x25	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x11	.134	.000	.000	.000	.000	.000
x12	.274	.000	.000	.000	.000	.000
x13	.000	.000	.000	.000	.000	.000
y26	.094	.152	.082	.194	.114	.125
y21	.127	.196	.112	.269	.156	.110
y22	.134	.198	.125	.289	.164	.150
y23	.116	.167	.107	.257	.137	.114
y24	.115	.174	.096	.244	.135	.099
y25	.121	.178	.103	.253	.143	.000

Direct Effects - Standard Errors (Group number 2 - Default model)

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	.153	.243	.178	.312	.000	.000
Y2	.136	.267	.100	.263	.143	.000

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
y12	.000	.000	.000	.000	.234	.000
x41	.000	.276	.000	.000	.000	.000
x42	.000	.000	.000	.000	.000	.000
y13	.000	.000	.000	.000	.172	.000
y11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x31	.000	.000	.167	.000	.000	.000
x32	.000	.000	.115	.000	.000	.000
x33	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x21	.000	.000	.000	.475	.000	.000
x22	.000	.000	.000	.460	.000	.000
x23	.000	.000	.000	.326	.000	.000
x24	.000	.000	.000	.270	.000	.000
x25	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x11	.134	.000	.000	.000	.000	.000
x12	.274	.000	.000	.000	.000	.000
x13	.000	.000	.000	.000	.000	.000
y26	.000	.000	.000	.000	.000	.125
y21	.000	.000	.000	.000	.000	.110
y22	.000	.000	.000	.000	.000	.150
y23	.000	.000	.000	.000	.000	.114
y24	.000	.000	.000	.000	.000	.099
y25	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Standardized Direct Effects - Standard Errors (Group number 2 - Default model)

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	.101	.191	.135	.159	.000	.000
Y2	.088	.198	.094	.137	.152	.000
y12	.000	.000	.000	.000	.088	.000
x41	.000	.099	.000	.000	.000	.000
x42	.000	.078	.000	.000	.000	.000
y13	.000	.000	.000	.000	.044	.000
y11	.000	.000	.000	.000	.071	.000
x31	.000	.000	.099	.000	.000	.000
x32	.000	.000	.048	.000	.000	.000
x33	.000	.000	.041	.000	.000	.000
x21	.000	.000	.000	.083	.000	.000
x22	.000	.000	.000	.087	.000	.000
x23	.000	.000	.000	.063	.000	.000
x24	.000	.000	.000	.064	.000	.000
x25	.000	.000	.000	.089	.000	.000
x11	.088	.000	.000	.000	.000	.000
x12	.072	.000	.000	.000	.000	.000
x13	.077	.000	.000	.000	.000	.000
y26	.000	.000	.000	.000	.000	.079
y21	.000	.000	.000	.000	.000	.052
y22	.000	.000	.000	.000	.000	.055
y23	.000	.000	.000	.000	.000	.045
y24	.000	.000	.000	.000	.000	.052

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
y25	.000	.000	.000	.000	.000	.042

Indirect Effects (Group number 2 - Default model)

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	-.057	.071	.063	.127	.000	.000
y12	-.324	.399	.354	.714	.000	.000
x41	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x42	.000	.000	.000	.000	.000	.000
y13	-.327	.403	.358	.722	.000	.000
y11	-.259	.320	.284	.573	.000	.000
x31	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x32	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x33	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x21	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x22	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x23	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x24	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x25	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x12	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x13	.000	.000	.000	.000	.000	.000
y26	.108	.312	.246	.476	.171	.000
y21	.150	.433	.341	.661	.237	.000
y22	.158	.456	.359	.696	.249	.000
y23	.134	.385	.304	.588	.211	.000
y24	.135	.388	.306	.592	.212	.000
y25	.140	.405	.319	.618	.221	.000

Indirect Effects - Standard Errors (Group number 2 - Default model)

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
Y1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y2	.067	.145	.063	.123	.000	.000
y12	.190	.295	.199	.371	.000	.000
x41	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x42	.000	.000	.000	.000	.000	.000
y13	.187	.281	.214	.370	.000	.000
y11	.153	.243	.178	.312	.000	.000
x31	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x32	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x33	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x21	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x22	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x23	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x24	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x25	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x12	.000	.000	.000	.000	.000	.000

	X1	X4	X3	X2	Y1	Y2
x22	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x23	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x24	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x25	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x12	.000	.000	.000	.000	.000	.000
x13	.000	.000	.000	.000	.000	.000
y26	.048	.092	.055	.077	.093	.000
y21	.061	.108	.072	.092	.120	.000
y22	.057	.102	.069	.086	.113	.000
y23	.057	.098	.066	.084	.109	.000
y24	.056	.101	.063	.081	.106	.000
y25	.064	.109	.073	.096	.121	.000

Covariances: (Group number 2 - Default model)

		M.I.	Par Change
d13 <-->	e2	5.848	.099
d9 <-->	X2	5.736	.055
d4 <-->	X4	10.272	.116
d4 <-->	d12	7.098	.097
d4 <-->	d10	12.437	.097
d4 <-->	d11	5.272	-.059
d5 <-->	e3	5.270	-.089
d5 <-->	d4	17.475	.199
d6 <-->	X3	5.612	-.074
d7 <-->	d10	4.766	-.048
d7 <-->	d11	7.428	.056
d7 <-->	d4	10.983	-.130
d7 <-->	d6	4.399	.072
d8 <-->	d5	15.840	-.169
d8 <-->	d7	14.232	.132
d1 <-->	d8	4.433	.055
d2 <-->	d12	4.428	-.037
d2 <-->	e3	4.483	-.042
d2 <-->	d4	5.541	-.057
d2 <-->	d7	4.746	.042
e9 <-->	z2	7.457	-.056
e9 <-->	d9	10.013	.124
e9 <-->	d5	7.413	-.116
e9 <-->	d8	15.900	.157
e4 <-->	X1	4.079	-.044
e4 <-->	d13	5.561	-.083
e4 <-->	d9	5.501	-.080
e4 <-->	d3	6.909	-.065
e5 <-->	X4	4.496	.071
e5 <-->	e3	8.312	.108
e5 <-->	d7	6.287	-.092
e5 <-->	e4	19.839	.158

		M.I.	Par Change	
e6	<-->	d5	6.444	.100
e6	<-->	d8	5.426	-.085
e6	<-->	e9	5.848	-.088
e7	<-->	e3	4.836	-.077
e7	<-->	d5	7.523	.113
e7	<-->	d8	7.356	-.104
e7	<-->	e9	9.167	-.116
e8	<-->	X1	4.552	.040
e8	<-->	e2	4.235	-.062
e8	<-->	d9	11.441	.100
e8	<-->	d10	4.106	-.037
e8	<-->	d4	5.177	-.076
e8	<-->	e9	5.110	.067
e8	<-->	e5	5.775	-.074

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	59	414.054	194	.000	2.134
Saturated model	253	.000	0		
Independence model	22	1726.385	231	.000	7.474

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	.050	.763	.691	.585
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	.257	.244	.172	.223

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	.760	.714	.856	.825	.853
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	.840	.638	.716
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	1.000	.000	.000

NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	220.054	165.312	282.547
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	1495.385	1367.028	1631.183

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	3.339	1.775	1.333	2.279

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Saturated model	.000	.000	.000	.000
Independence model	13.922	12.060	11.024	13.155

RMSEA

Model	RMSE A	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.096	.083	.108	.000
Independence model	.228	.218	.239	.000

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	532.054	558.925	698.925	757.925
Saturated model	506.000	621.228	1221.563	1474.563
Independence model	1770.385	1780.405	1832.608	1854.608

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	4.291	3.849	4.795	4.507
Saturated model	4.081	4.081	4.081	5.010
Independence model	14.277	13.242	15.372	14.358

2. Model Empiris1 (Variabel Intervening : Sumberdaya dan Disposisi)

Assessment of normality (Group number 1)

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
y36	2.000	5.000	-.082	-.372	-.910	-2.077
y35	2.000	5.000	.073	.334	-.693	-1.581
y34	1.000	5.000	-.212	-.967	-.237	-.541
y33	1.000	5.000	.032	.148	-.256	-.584
y32	1.000	5.000	-.064	-.294	-.353	-.805
y31	2.000	5.000	.152	.693	-.708	-1.616
y21	1.000	5.000	-.749	-3.420	.673	1.537
y22	1.000	5.000	-.815	-3.720	.469	1.070
y23	1.000	5.000	-.617	-2.815	.218	.497
y15	2.000	5.000	-.040	-.185	-.608	-1.388
y14	2.000	5.000	-.315	-1.438	-.627	-1.430
y13	2.000	5.000	.111	.505	-.812	-1.854
y12	1.000	5.000	-.220	-1.006	-.356	-.812
y11	1.000	5.000	-.322	-1.468	-.675	-1.540
x32	1.000	5.000	-.576	-2.628	.339	.774
x31	1.000	5.000	-.427	-1.949	.607	1.386
x21	2.000	5.000	-.067	-.308	-.491	-1.120
x22	2.000	5.000	-.935	-4.266	.666	1.521
x23	2.000	5.000	-.627	-2.861	.394	.898
x13	2.000	5.000	.015	.067	-.310	-.708
x12	2.000	5.000	-.166	-.758	.237	.540
x11	2.000	5.000	-.191	-.870	.300	.684
Multivariate					84.775	14.583

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1 <--- X1	,042	,158	,267	,790	par_1
Y2 <--- X3	,538	,177	3,044	,002	par_6
Y1 <--- X3	,400	,152	2,626	,009	par_27
Y1 <--- X2	,431	,135	3,205	,001	par_28
Y2 <--- X2	,553	,153	3,608	***	par_29
Y2 <--- X1	-,332	,186	-1,789	,074	par_30
Y3 <--- X1	,227	,104	2,182	,029	par_2
Y3 <--- X2	,274	,091	3,014	,003	par_3
Y3 <--- Y1	,328	,094	3,470	***	par_4
Y3 <--- Y2	,188	,080	2,332	,020	par_5
Y3 <--- X3	,317	,106	2,980	,003	par_7
x11 <--- X1	1,000				
x12 <--- X1	1,452	,190	7,633	***	par_8
x13 <--- X1	1,073	,149	7,200	***	par_9
x23 <--- X2	1,000				
x22 <--- X2	1,004	,090	11,134	***	par_10
x21 <--- X2	,689	,116	5,918	***	par_11
x31 <--- X3	1,000				
x32 <--- X3	,887	,144	6,147	***	par_12
y14 <--- Y1	1,029	,148	6,972	***	par_13
y15 <--- Y1	,624	,119	5,251	***	par_14
y23 <--- Y2	1,000				
y22 <--- Y2	,989	,098	10,116	***	par_15
y21 <--- Y2	,793	,084	9,464	***	par_16
y31 <--- Y3	1,000				
y32 <--- Y3	1,053	,121	8,715	***	par_17
y33 <--- Y3	,890	,108	8,230	***	par_18
y34 <--- Y3	,897	,113	7,958	***	par_19
y35 <--- Y3	,935	,099	9,441	***	par_20
y36 <--- Y3	,721	,109	6,615	***	par_21
y11 <--- Y1	1,000				
y12 <--- Y1	,930	,131	7,121	***	par_25
y13 <--- Y1	,938	,139	6,762	***	par_26

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
Y1 <--- X1	,025
Y2 <--- X3	,420
Y1 <--- X3	,369
Y1 <--- X2	,363
Y2 <--- X2	,393
Y2 <--- X1	-,166
Y3 <--- X1	,138
Y3 <--- X2	,235
Y3 <--- Y1	,335
Y3 <--- Y2	,227
Y3 <--- X3	,299

	Estimate
x11 <--- X1	,688
x12 <--- X1	,979
x13 <--- X1	,679
x23 <--- X2	,892
x22 <--- X2	,864
x21 <--- X2	,525
x31 <--- X3	,847
x32 <--- X3	,666
y14 <--- Y1	,805
y15 <--- Y1	.553
y23 <--- Y2	,850
y22 <--- Y2	,804
y21 <--- Y2	,783
y31 <--- Y3	,777
y32 <--- Y3	,731
y33 <--- Y3	,713
y34 <--- Y3	,696
y35 <--- Y3	,804
y36 <--- Y3	,597
y11 <--- Y1	,699
y12 <--- Y1	,687
y13 <--- Y1	,725

Covariances: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X1 <--> X2	,050	,025	1,968	,049	par_22	
X2 <--> X3	,170	,044	3,886	***	par_23	
X1 <--> X3	,085	,032	2,672	,008	par_24	
z2 <--> z1	,126	,046	2,731	,006	par_31	

Correlations: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
X1 <--> X2	,213
X2 <--> X3	,469
X1 <--> X3	,331
z2 <--> z1	,393

Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X1	,164	,040	4,069	***	par_32
X2	,331	,056	5,927	***	par_33
X3	,399	,086	4,664	***	par_34
z2	,367	,083	4,426	***	par_35
z1	,279	,071	3,908	***	par_36
z3	,052	,021	2,433	,015	par_37
d1	,183	,028	6,604	***	par_38
d2	,015	,031	,481	,631	par_39
d3	,222	,032	6,929	***	par_40

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
d6	,085	,024	3,568	***	par_41
d5	,114	,026	4,437	***	par_42
d4	,412	,055	7,456	***	par_43
d7	,157	,056	2,808	,005	par_44
d8	,395	,065	6,086	***	par_45
e1	,489	,080	6,143	***	par_46
e2	,452	,071	6,406	***	par_47
e3	,372	,058	6,369	***	par_48
e4	,269	,054	4,979	***	par_49
e5	,414	,058	7,175	***	par_50
e8	,251	,053	4,753	***	par_51
e7	,349	,062	5,624	***	par_52
e6	,260	,045	5,847	***	par_53
e9	,295	,045	6,615	***	par_54
e10	,432	,063	6,876	***	par_55
e11	,342	,048	7,136	***	par_56
e12	,382	,053	7,184	***	par_57
e13	,215	,033	6,447	***	par_58
e14	,421	,057	7,432	***	par_59

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
Y2	,439
Y1	,404
Y3	,885
y36	,356
y35	,646
y34	,485
y33	,509
y32	,535
y31	,603
y21	,613
y22	,647
y23	,723
y15	,306
y14	,648
y13	,525
y12	,472
y11	,489
x32	,443
x31	,718
x21	,276
x22	,746
x23	,796
x13	,461
x12	,959
x11	,474

Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	,538	,553	-,332	,000	,000	,000
Y1	,400	,431	,042	,000	,000	,000
Y3	,549	,519	,179	,188	,328	,000
y36	,396	,374	,129	,135	,236	,721
y35	,514	,486	,167	,176	,307	,935
y34	,492	,466	,160	,168	,294	,897
y33	,488	,462	,159	,167	,292	,890
y32	,578	,547	,188	,198	,345	1,053
y31	,549	,519	,179	,188	,328	1,000
y21	,427	,438	-,263	,793	,000	,000
y22	,532	,546	-,328	,989	,000	,000
y23	,538	,553	-,332	1,000	,000	,000
y15	,250	,269	,026	,000	,624	,000
y14	,411	,444	,043	,000	1,029	,000
y13	,375	,405	,040	,000	,938	,000
y12	,372	,401	,039	,000	,930	,000
y11	,400	,431	,042	,000	1,000	,000
x32	,887	,000	,000	,000	,000	,000
x31	1,000	,000	,000	,000	,000	,000
x21	,000	,689	,000	,000	,000	,000
x22	,000	1,004	,000	,000	,000	,000
x23	,000	1,000	,000	,000	,000	,000
x13	,000	,000	1,073	,000	,000	,000
x12	,000	,000	1,452	,000	,000	,000
x11	,000	,000	1,000	,000	,000	,000

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	,420	,393	-,166	,000	,000	,000
Y1	,369	,363	,025	,000	,000	,000
Y3	,518	,446	,108	,227	,335	,000
y36	,309	,266	,065	,135	,200	,597
y35	,417	,359	,087	,182	,269	,804
y34	,361	,311	,075	,158	,233	,696
y33	,370	,318	,077	,162	,239	,713
y32	,379	,326	,079	,166	,245	,731
y31	,403	,346	,084	,176	,260	,777
y21	,329	,307	-,130	,783	,000	,000
y22	,338	,316	-,134	,804	,000	,000
y23	,358	,334	-,142	,850	,000	,000
y15	,204	,200	,014	,000	,553	,000
y14	,297	,292	,020	,000	,805	,000
y13	,268	,263	,018	,000	,725	,000
y12	,254	,249	,017	,000	,687	,000
y11	,258	,254	,017	,000	,699	,000
x32	,666	,000	,000	,000	,000	,000

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
x31	,847	,000	,000	,000	,000	,000
x21	,000	,525	,000	,000	,000	,000
x22	,000	,864	,000	,000	,000	,000
x23	,000	,892	,000	,000	,000	,000
x13	,000	,000	,679	,000	,000	,000
x12	,000	,000	,979	,000	,000	,000
x11	,000	,000	,688	,000	,000	,000

Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	,538	,553	-,332	,000	,000	,000
Y1	,400	,431	,042	,000	,000	,000
Y3	,317	,274	,227	,188	,328	,000
y36	,000	,000	,000	,000	,000	,721
y35	,000	,000	,000	,000	,000	,935
y34	,000	,000	,000	,000	,000	,897
y33	,000	,000	,000	,000	,000	,890
y32	,000	,000	,000	,000	,000	1,053
y31	,000	,000	,000	,000	,000	1,000
y21	,000	,000	,000	,793	,000	,000
y22	,000	,000	,000	,989	,000	,000
y23	,000	,000	,000	1,000	,000	,000
y15	,000	,000	,000	,000	,624	,000
y14	,000	,000	,000	,000	1,029	,000
y13	,000	,000	,000	,000	,938	,000
y12	,000	,000	,000	,000	,930	,000
y11	,000	,000	,000	,000	1,000	,000
x32	,887	,000	,000	,000	,000	,000
x31	1,000	,000	,000	,000	,000	,000
x21	,000	,689	,000	,000	,000	,000
x22	,000	1,004	,000	,000	,000	,000
x23	,000	1,000	,000	,000	,000	,000
x13	,000	,000	1,073	,000	,000	,000
x12	,000	,000	1,452	,000	,000	,000
x11	,000	,000	1,000	,000	,000	,000

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	,420	,393	-,166	,000	,000	,000
Y1	,369	,363	,025	,000	,000	,000
Y3	,299	,235	,138	,227	,335	,000
y36	,000	,000	,000	,000	,000	,597
y35	,000	,000	,000	,000	,000	,804
y34	,000	,000	,000	,000	,000	,696
y33	,000	,000	,000	,000	,000	,713
y32	,000	,000	,000	,000	,000	,731
y31	,000	,000	,000	,000	,000	,777
y21	,000	,000	,000	,783	,000	,000

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
y22	,000	,000	,000	,804	,000	,000
y23	,000	,000	,000	,850	,000	,000
y15	,000	,000	,000	,000	,553	,000
y14	,000	,000	,000	,000	,805	,000
y13	,000	,000	,000	,000	,725	,000
y12	,000	,000	,000	,000	,687	,000
y11	,000	,000	,000	,000	,699	,000
x32	,666	,000	,000	,000	,000	,000
x31	,847	,000	,000	,000	,000	,000
x21	,000	,525	,000	,000	,000	,000
x22	,000	,864	,000	,000	,000	,000
x23	,000	,892	,000	,000	,000	,000
x13	,000	,000	,679	,000	,000	,000
x12	,000	,000	,979	,000	,000	,000
x11	,000	,000	,688	,000	,000	,000

Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Y1	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Y3	,232	,245	-,049	,000	,000	,000
y36	,396	,374	,129	,135	,236	,000
y35	,514	,486	,167	,176	,307	,000
y34	,492	,466	,160	,168	,294	,000
y33	,488	,462	,159	,167	,292	,000
y32	,578	,547	,188	,198	,345	,000
y31	,549	,519	,179	,188	,328	,000
y21	,427	,438	-,263	,000	,000	,000
y22	,532	,546	-,328	,000	,000	,000
y23	,538	,553	-,332	,000	,000	,000
y15	,250	,269	,026	,000	,000	,000
y14	,411	,444	,043	,000	,000	,000
y13	,375	,405	,040	,000	,000	,000
y12	,372	,401	,039	,000	,000	,000
y11	,400	,431	,042	,000	,000	,000
x32	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x31	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x21	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x22	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x23	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x13	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x12	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x11	,000	,000	,000	,000	,000	,000

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Y1	,000	,000	,000	,000	,000	,000

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y3	,219	,211	-,029	,000	,000	,000
y36	,309	,266	,065	,135	,200	,000
y35	,417	,359	,087	,182	,269	,000
y34	,361	,311	,075	,158	,233	,000
y33	,370	,318	,077	,162	,239	,000
y32	,379	,326	,079	,166	,245	,000
y31	,403	,346	,084	,176	,260	,000
y21	,329	,307	-,130	,000	,000	,000
y22	,338	,316	-,134	,000	,000	,000
y23	,358	,334	-,142	,000	,000	,000
y15	,204	,200	,014	,000	,000	,000
y14	,297	,292	,020	,000	,000	,000
y13	,268	,263	,018	,000	,000	,000
y12	,254	,249	,017	,000	,000	,000
y11	,258	,254	,017	,000	,000	,000
x32	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x31	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x21	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x22	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x23	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x13	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x12	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x11	,000	,000	,000	,000	,000	,000

Covariances: (Group number 1 - Default model)

	M.I.	Par Change
e14 <--> z3	7,457	-,060
e13 <--> X1	4,690	,038
e13 <--> e14	5,110	,067
e12 <--> e14	9,167	-,116
e11 <--> e14	5,848	-,088
e10 <--> z1	4,377	-,076
e10 <--> e13	5,775	-,074
e9 <--> X1	4,150	-,042
e9 <--> e10	19,839	,158
e6 <--> X2	4,104	,058
e7 <--> e13	4,235	-,062
e8 <--> e12	4,836	-,077
e8 <--> e10	8,312	,108
e5 <--> e14	15,900	,157
e5 <--> e12	7,356	-,104
e5 <--> e11	5,426	-,085
e4 <--> e10	6,287	-,092
e4 <--> e5	14,232	,132
e3 <--> e4	4,399	,072
e2 <--> e14	7,413	-,116

	M.I.	Par Change
e2 <--> e12	7,523	,113
e2 <--> e11	6,444	,100
e2 <--> e8	5,270	-,089
e2 <--> e5	15,840	-,169
e1 <--> X3	7,187	,114
e1 <--> e13	5,177	-,076
e1 <--> e4	10,983	-,130
e1 <--> e2	17,475	,199
d8 <--> e9	5,561	-,083
d8 <--> e7	5,848	,099
d7 <--> e1	7,098	,097
d4 <--> z1	4,159	,070
d4 <--> e14	10,013	,124
d4 <--> e13	11,441	,100
d4 <--> e9	5,501	-,080
d5 <--> e13	4,106	-,037
d5 <--> e4	4,766	-,048
d5 <--> e1	12,437	,097
d6 <--> e4	7,428	,056
d6 <--> e1	5,272	-,059
d3 <--> e9	6,909	-,065
d2 <--> e8	4,483	-,042
d2 <--> e4	4,746	,042
d2 <--> e1	5,541	-,057
d2 <--> d7	4,428	-,037
d1 <--> e5	4,433	,055

Model Fit Summary

CMIN

Model	NPA R	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	59	414,054	194	,000	2,134
Saturated model	253	,000	0		
Independence model	22	1726,385	231	,000	7,474

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	,050	,763	,691	,585
Saturated model	,000	1,000		
Independence model	,257	,244	,172	,223

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	,760	,714	,856	,825	,853
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	,000	,000	,000	,000	,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	,840	,638	,716
Saturated model	,000	,000	,000
Independence model	1,000	,000	,000

NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	220,054	165,312	282,547
Saturated model	,000	,000	,000
Independence model	1495,385	1367,028	1631,183

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	3,339	1,775	1,333	2,279
Saturated model	,000	,000	,000	,000
Independence model	13,922	12,060	11,024	13,155

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	,096	,083	,108	,000
Independence model	,228	,218	,239	,000

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	532,054	558,925	698,925	757,925
Saturated model	506,000	621,228	1221,563	1474,563
Independence model	1770,385	1780,405	1832,608	1854,608

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	4,291	3,849	4,795	4,507
Saturated model	4,081	4,081	4,081	5,010
Independence model	14,277	13,242	15,372	14,358

HOELTER

Model	HOELTER	HOELTER
	,05	,01
Default model	69	73
Independence model	20	21

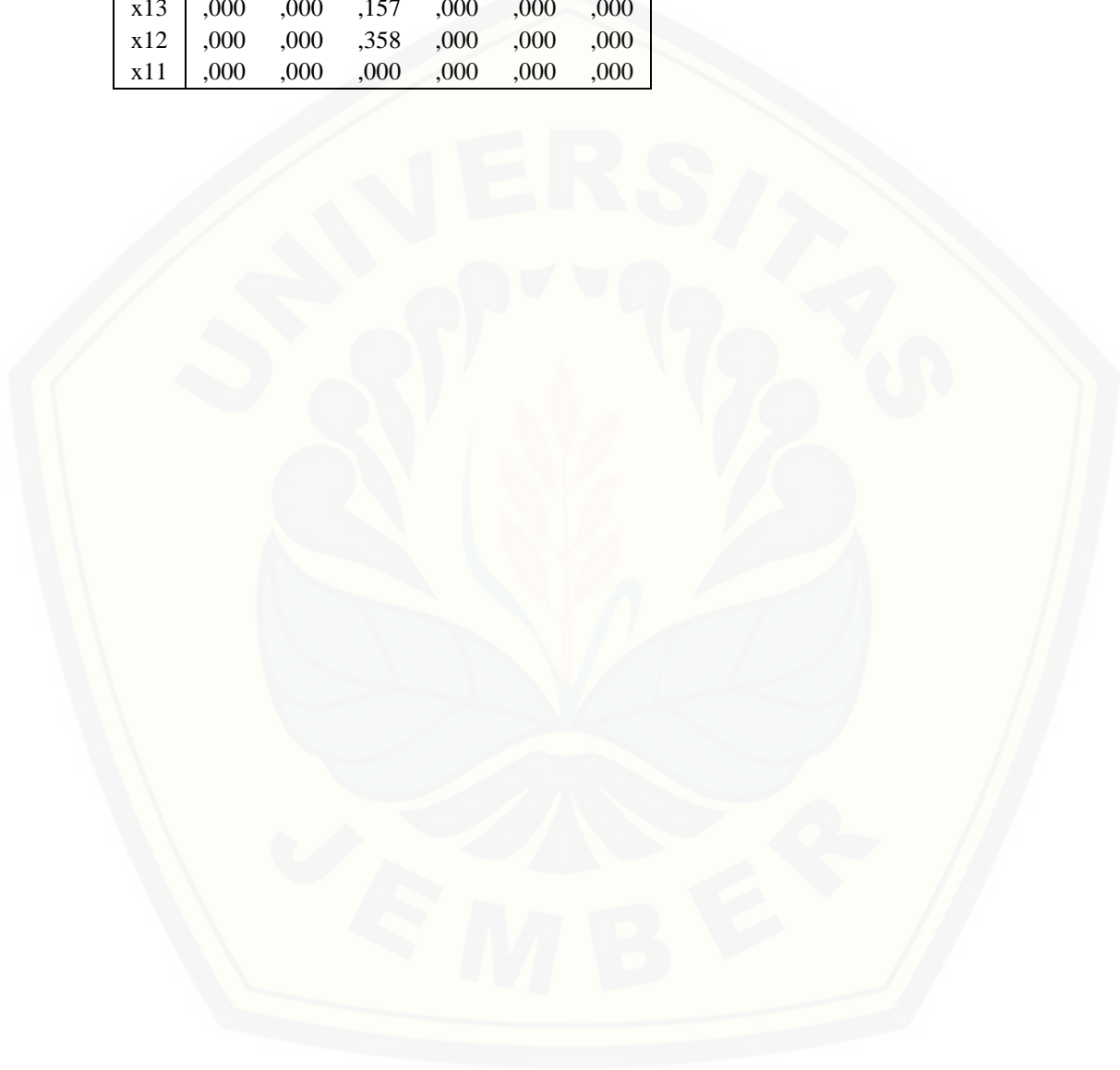
Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	,538	,553	-,332	,000	,000	,000
Y1	,400	,431	,042	,000	,000	,000
Y3	,549	,519	,179	,188	,328	,000
y36	,396	,374	,129	,135	,236	,721
y35	,514	,486	,167	,176	,307	,935
y34	,492	,466	,160	,168	,294	,897
y33	,488	,462	,159	,167	,292	,890
y32	,578	,547	,188	,198	,345	1,053
y31	,549	,519	,179	,188	,328	1,000
y21	,427	,438	-,263	,793	,000	,000
y22	,532	,546	-,328	,989	,000	,000
y23	,538	,553	-,332	1,000	,000	,000
y15	,250	,269	,026	,000	,624	,000
y14	,411	,444	,043	,000	1,029	,000
y13	,375	,405	,040	,000	,938	,000
y12	,372	,401	,039	,000	,930	,000
y11	,400	,431	,042	,000	1,000	,000
x32	,887	,000	,000	,000	,000	,000
x31	1,000	,000	,000	,000	,000	,000
x21	,000	,689	,000	,000	,000	,000
x22	,000	1,004	,000	,000	,000	,000
x23	,000	1,000	,000	,000	,000	,000
x13	,000	,000	1,073	,000	,000	,000
x12	,000	,000	1,452	,000	,000	,000
x11	,000	,000	1,000	,000	,000	,000

Total Effects - Standard Errors (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
Y2	,258	,232	,204	,000	,000	,000
Y1	,242	,194	,182	,000	,000	,000
Y3	,214	,143	,138	,132	,155	,000
y36	,172	,102	,104	,097	,121	,134
y35	,192	,132	,134	,122	,150	,098
y34	,196	,120	,128	,114	,145	,112
y33	,183	,139	,126	,117	,136	,102
y32	,227	,157	,144	,138	,159	,085
y31	,214	,143	,138	,132	,155	,000
y21	,220	,199	,165	,103	,000	,000
y22	,277	,220	,206	,109	,000	,000
y23	,258	,232	,204	,000	,000	,000
y15	,147	,123	,118	,000	,183	,000
y14	,233	,198	,193	,000	,248	,000
y13	,203	,182	,173	,000	,192	,000
y12	,225	,182	,171	,000	,108	,000

	X3	X2	X1	Y2	Y1	Y3
y11	,242	,194	,182	,000	,000	,000
x32	,200	,000	,000	,000	,000	,000
x31	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x21	,000	,167	,000	,000	,000	,000
x22	,000	,115	,000	,000	,000	,000
x23	,000	,000	,000	,000	,000	,000
x13	,000	,000	,157	,000	,000	,000
x12	,000	,000	,358	,000	,000	,000
x11	,000	,000	,000	,000	,000	,000



LAMPIRAN C. TABEL FREKUENSI

x11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2.00	1	.8	.8	.8
3.00	29	23.2	23.2	24.0
Valid 4.00	82	65.6	65.6	89.6
5.00	13	10.4	10.4	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2.00	1	.8	.8	.8
3.00	28	22.4	22.4	23.2
Valid 4.00	81	64.8	64.8	88.0
5.00	15	12.0	12.0	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2.00	1	.8	.8	.8
3.00	37	29.6	29.6	30.4
Valid 4.00	72	57.6	57.6	88.0
5.00	15	12.0	12.0	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1.00	1	.8	.8	.8
2.00	14	11.2	11.2	12.0
Valid 3.00	35	28.0	28.0	40.0
4.00	45	36.0	36.0	76.0
5.00	30	24.0	24.0	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	1.6	1.6	1.6
2.00	16	12.8	12.8	14.4
3.00	44	35.2	35.2	49.6
4.00	47	37.6	37.6	87.2
5.00	16	12.8	12.8	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	11	8.8	8.8	8.8
3.00	51	40.8	40.8	49.6
4.00	40	32.0	32.0	81.6
5.00	23	18.4	18.4	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	9	7.2	7.2	7.2
3.00	33	26.4	26.4	33.6
4.00	53	42.4	42.4	76.0
5.00	30	24.0	24.0	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	3.2	3.2	3.2
3.00	41	32.8	32.8	36.0
4.00	57	45.6	45.6	81.6
5.00	23	18.4	18.4	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x31

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2.00	4	3.2	3.2	3.2
3.00	40	32.0	32.0	35.2
Valid 4.00	60	48.0	48.0	83.2
5.00	21	16.8	16.8	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x32

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2.00	9	7.2	7.2	7.2
3.00	29	23.2	23.2	30.4
Valid 4.00	82	65.6	65.6	96.0
5.00	5	4.0	4.0	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x33

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2.00	6	4.8	4.8	4.8
3.00	36	28.8	28.8	33.6
Valid 4.00	77	61.6	61.6	95.2
5.00	6	4.8	4.8	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x41

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1.00	1	.8	.8	.8
2.00	5	4.0	4.0	4.8
Valid 3.00	41	32.8	32.8	37.6
4.00	65	52.0	52.0	89.6
5.00	13	10.4	10.4	100.0
Total	125	100.0	100.0	

x42

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	1.6	1.6	1.6
2.00	11	8.8	8.8	10.4
3.00	38	30.4	30.4	40.8
4.00	62	49.6	49.6	90.4
5.00	12	9.6	9.6	100.0
Total	125	100.0	100.0	

y11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	.8	.8	.8
2.00	9	7.2	7.2	8.0
3.00	24	19.2	19.2	27.2
4.00	71	56.8	56.8	84.0
5.00	20	16.0	16.0	100.0
Total	125	100.0	100.0	

y12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	5	4.0	4.0	4.0
2.00	9	7.2	7.2	11.2
3.00	28	22.4	22.4	33.6
4.00	58	46.4	46.4	80.0
5.00	25	20.0	20.0	100.0
Total	125	100.0	100.0	

y13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	3	2.4	2.4	2.4
2.00	7	5.6	5.6	8.0
3.00	34	27.2	27.2	35.2
4.00	51	40.8	40.8	76.0
5.00	30	24.0	24.0	100.0
Total	125	100.0	100.0	

y21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	11	8.8	8.8	8.8
3.00	53	42.4	42.4	51.2
4.00	41	32.8	32.8	84.0
5.00	20	16.0	16.0	100.0
Total	125	100.0	100.0	

y22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	3	2.4	2.4	2.4
2.00	16	12.8	12.8	15.2
3.00	52	41.6	41.6	56.8
4.00	36	28.8	28.8	85.6
5.00	18	14.4	14.4	100.0
Total	125	100.0	100.0	

y23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	.8	.8	.8
2.00	5	4.0	4.0	4.8
3.00	54	43.2	43.2	48.0
4.00	44	35.2	35.2	83.2
5.00	21	16.8	16.8	100.0
Total	125	100.0	100.0	

y24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	.8	.8	.8
2.00	9	7.2	7.2	8.0
3.00	44	35.2	35.2	43.2
4.00	51	40.8	40.8	84.0
5.00	20	16.0	16.0	100.0
Total	125	100.0	100.0	

y25


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2.00	4	3.2	3.2	3.2
3.00	46	36.8	36.8	40.0
Valid 4.00	53	42.4	42.4	82.4
5.00	22	17.6	17.6	100.0
Total	125	100.0	100.0	

y26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2.00	3	2.4	2.4	2.4
3.00	39	31.2	31.2	33.6
Valid 4.00	51	40.8	40.8	74.4
5.00	32	25.6	25.6	100.0
Total	125	100.0	100.0	

LAMPIRAN D. BAGAN SOP SLF-BG

BaganD.1 SOP Pelayanan SLF BG

 3.1	Nomor SOP	SOP.DPU.34
	Tgl Pembuatan	20Maret 2014
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	20Maret 2014
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DINAS PEKERJAAN UMUM Jl.HayamWuruk No. 69 Telp.(0335) 421481 PROBOLINGGO	Disahkanoleh	11 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM <u>H. NUR KHAMDANI, ST, MT</u> Pembina Tingkat I NIP. 19570202 198603 1 009
DINAS PEKERJAAN UMUM	Nama SOP	PELAYANAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG (SLF)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 23/PRT/M/2007 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Gedung 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung 3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo.	1. Memahami tata kelola bangunan gedung. 2. Mampu melaksanakan pelayanan tata kelola bangunan gedung.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1. Seperangkat alat tulis 2. Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- SLF diperuntukkan bagi bangunan yang difungsikan untuk public / umum dan bukan rumah tinggal pribadi - Persyaratan permohonan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> o Copy IMB o Gambar bangunan gedung o Rekomendasi hasil pemeriksaan gedung o Surat pernyataan pemeriksa kelayakan fungsi bangunan 	1. Sertifikat laik fungsi gedung

BAGAN D.2 URAIAN PROSEDUR PELAYANAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG (SLF)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Staf (Tim Teknis)	Tim TABG	KepalaSeksi	Kabid	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukanberkaspermohonan (yang sudahdiisidandilengkapisyarat-syaratnya)	1						Berkaspermohonan IMB, Gambar As Built Drawing, Dokumen pelaksanaan konstruksi	5 menit	Berkaspermohonanleengkap
2.	Melakukanverifikasikelengkapadokumenpermohonandanregistrasipermohonan		2					Berkaspermohonanleengkap	15 menit	Berkasleengkap
3.	Melakukan pemeriksaanKelaikanFungsiBangunanGedunguntukbangunangedungkepentinganumdanbefungsikhusus. (struktur bangunan, listrik, pencegahankebakaran, dll)			Tidak				Berkaspermohonan, daftarSimak, As Built Drawing, alatukur	1 hari	BA Pemeriksaan
4.	Melakukanperbaikanuntukmemenuhipe rsyaratan	4		Ya				BA Pemeriksaan	-	Perbaikan
5.	Memberikanpersetujuanbersamaatas : daftarsimak, suratpnyataanpemeriksaankelaikanfungsibangunangedung						5	daftarsimak, suratpnyataanpemeriksaankelaikanfungsibangunangedung	1 hari	Rekomendasi SLF
6.	MembuatdokumenSertifikatLaikFungsi BangunanGedung (SLF)		6					Draft SLF	1 jam	Draft SLF
7.	Memeriksa danmembubuhkanparaf SLF						7	Sertifikat SLF	30 menit	SLF
8.	Memeriksa danmembubuhkanparaf SLF						8	Sertifikat SLF	30 menit	SLF
9.	Menerbitkan BangunanGedungdengankelengkapannya (lampiran) SLF						9	SuratKeteranganbebasbanjir	30 menit	SLF
10.	MenyerahkandokumenSLFkepemohondanmengarsipdokumenpelayanan		10					Sertifikat SLF	30 menit	SLF, arsip
11.	MenerimadokumenSLF BangunanGedung	11						Sertifikat SLF	5 menit	SLF

Lampiran D Daftar Bangunan Gedung ber SLF
Tahun 2008 – 2014

No	Fungsi Bangunan	BG - SLF						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Usaha	Giant Hypermart Jl. Sukarno Hatta			KFC Jl. Sudirman	Hotel Ratna Jl. Sudirman	Ruko IMB : 644/401/2013 Jl. Cokroaminoto	Panin Bank Jl. Sudirman
		Roda Surya Yamaha Jl. Pahlawan				BEE Jay Karoke Jl. D Sutomo	Ruko IMB : 503/229/2012 Jl. Cokroaminoto	Home Stay Family Jl. Diponegoro
		Bank Mega Jl. Sukarno Hatta						PT. Eratex Djaja, Tbk. Jl. Sukarno Hatta 23
		Aneka Elektronika Jl. Gatot Subroto						PT. Bank Cntral Asia, Tbk Jl. Suroyo 28
		Klinik Amanah Jl. Dr. Moch Saleh						
II	Keagamaan	Gereja Kristus Tuhan Jl. Suroyo				Masjid AliKhlis Sudirman 19		
III	Sosial Budaya	Dinas Pendidikan Jl. Basuki Rahmat	Dinas Perizinan Jl. Basuki Rahmat	Rusunawa Bestari Jl. Gajah Mada/JLU	Dinas Pendidikan Jl. Basuki Rahmat	Rusunawa Bayuangga I Jl. Brantas	Rusunawa Semeru Jl. Semeru	Badan Pusat Statistik Jl. Bromo 32
		Kelurahan Sukabumi Jl. Kartini	Dinas PU Jl. Hayam Wuruk		Bappeda Jl. Sukarno Hatta	Rusunawa Bayuangga II Jl. Brantas	Dinas Kesehatan Jl. Suroyo	
		Pusat Oleh-oleh Jl. Basuki Rahmat			GOR Mastrip Jl. Mastrip	Kantor Walikota Sudirman 19	Islamik Center Jl. Basuki Rahmat	
		Puskesmas Ketapang Jl. Bromo				Kantor BKD dan Puri Sudirman 19		
		UPT Studi Lingkungan Jl. Basuki Rahmat				Kantor DPPKA Sudirman 19		
IV	Hunian/Rumah Tinggal	Ibu Tien Jl. Wijaya Kusuma II	1. Heri Wibowo Jl. Basuki Rahmat II				Andre Nirwana Jl. Cokroaminoto VI	Drs. Ec Sunardi, M.Si Jl. Gub Suryo Utara D18
		Pak Jl. Mawar Asri	SLF no : 650/052/SP-SLF /425.101/2009					
		Robby	4 Juni 2009					

		Jl. Mawar Muda	2. Akuwat Bin Yoesoef					
		Pak	Jl. Minak Jinggo SLF no : 650/051/SP-SLF /425.101/2009					
		Jl. Supriyadi I						
	Total 44	15	4	1	4	8	6	6

Lampiran D Hotel yang Memiliki SLF di Kota Probolinggo

No	Nama Hotel		Lokasi	SLF-BG	Keterangan
	Non Bintang	Berbintang			
1		Bromo Park Hotel	Jl. Dr. Sutomo	-	
2	Hotel Moronyoto		Jl. Bromo	-	
3	Hotel Lava-lava		Jl. Bromo	-	
4	Hotel Bromo View		Jl. Bromo	-	
5	Ratna Hotel		Jl. P. Sudirman	-	
6	Hotel Tentrem		Jl. P. Sudirman	-	
7	Hotel Bromo Permai		Jl. P. Sudirman	-	
8	Sinar Harapan Guest House		Jl. Bengawa Solo	-	
9	Hotel Paramita		Jl. Siaman	-	
10	Hotel Tampiarito		Jl. Suroyo	-	
11	Paseban Sena Hotel		Jl. Suroyo	-	
12	Hotel Darma		Jl. KH. Mansur	-	
13	BJ Resort		Jl. PPI Mayangan	-	
14	Diponegoro Guest House		Jl. Diponegoro	Ada	Th. 2014
15	Pink House		Jl. Mawar Permai	Proses	Sejak 2015
16	Surya Guest house		Jl. Gub. Suryo 2	-	
17	Singgah Guest House		Jl. Gub. Suryo	-	
18	Widuri Hostel		Jl. Sukarno Hatta	-	

Sumber: Survei. SLF dasar sertifikat usaha hotel sesuai Permen Ekokraf no 53/HM.001/MPEK/2013

(1. TDU Pariwisata 2. SLF 3. Keterangan Laik Sehat 4. Keterangan Kualitas Air)

Rumah sakit yang Memiliki SLF di Kota Probolinggo

No	Nama Rumah Sakit	Lokasi	Milik	SLF-BG	Keterangan
1	RSUD Dr. Saleh	Jl. Panjaitan	Pemkot	Ada	Tahun 2016
2	RS Husada	Jl. Sukarno hatta	Swasta	-	-
3	Klinik Amanah	Jl. Dr. Saleh	Swasta	-	SLF mati 2013
4	RS Muhammadiyah	Jl. P. Sudirman	Swasta	-	-

Sumber: Survei. SLF dasar penebitan izin operasional Rumah Sakit sesuai Permenkes 56 th 2014

LAMPIRAN E.

DOKUMENTASI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG DIKOTA PROBOLINGGO**Satu Dasawarsa UUBG Cipta Karya Berikan Penghargaan**

Untuk kategori kota besar penghargaan diberikan kepada Kota Bogor, kategori kota sedang untuk Kota Probolinggo dan untuk kategori kabupatendirikan kepada Kabupaten Sukoharjo. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Kota Surabaya yang dalam 10 tahun terakhir menunjukkan prestasi luar biasa di bidang penyelenggaraan BG dengan tiga kali berturut-turut mendapat penghargaan PKPD PU.

Apresiasi juga diberikan kepada Gubernur DIY dimana seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut telah memiliki Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung. Terakhir, 106 pemda yang telah mengimplementasikan UUBG juga mendapat penghargaan yang diwakili oleh Kota Semarang dan DIY. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono secara singkat mengucapkan terimakasih kepada pemda yang telah mengimplementasikan UUBG. Menurut Budi, pemda menjadi garda terdepan dalam pembangunan Cipta Karya. Hal ini dikarenakan tugas-tugas keciptakarya an sangat tergantung komitmen pemda, pusat hanya berfungsi sebagai pengatur, pembinaan dan pengawasan. "Tidak ada kata lain untuk mengimplementasikan UUBG ini selain mempercepatnya. Pemerintah tidak akan lelah untuk terus mensosialisasikan dan melakukan fasilitasi," kata Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Praktisi Arsitektur Gunawan Tjahjonom mengatakan, keterlambatan implementasi UUBG ini dikarenakan masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dan laut juga merupakan kendala implementasi ini. "Namun pemda tidak boleh menyerah dan terus komitmen untuk implementasi perda BG ini. Saya harap implementasi Perda BG di daerah dapat mengikuti nafas perkembangan zaman yang terus berubah dan mengadopsi kearifan lokal," kata Gunawan.

Dalam malam penghargaan UUBG diserahkan pula hadiah dan juga sertifikat untuk lomba karya tulis, lomba menggambar poster, lomba foto jurnalis dan rally foto. Acara tersebut dimeriahkan oleh penyanyi Frans Sisir, Terry, Citra, Saung Angklung Mang Udjo, Babenjo dan dipandu oleh presenter Nico Siahaan dan Sophia Novita. **Baru 21%**

Pemda Sejak diundangkannya Bangunan Gedung 10 tahun lalu, baru 106 kabupaten/kota atau 21% pemda dari 498 kabupaten di Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atau pemda yang berhasil mengimplementasikan Undang-Undang Bangunan Gedung No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Penghargaan diberikan oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam Malam Penghargaan Implementasi UUBG di Jakarta awal Desember lalu. Majalah Buletin Cipta karya Edisi 12 □ Tahun X □ Desember 2012 25

infobaru

yang menindak lanjutinya menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat Perda tersebut penting fungsinya untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, efisien dan tertib penyelenggaraan. "Kalau ada bencana alam atau kerusakan baru kerasa," kata Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta

Karya Guratno Hartono. Guratno menambahkan, lambatnya penyusunan perda itu dikarenakan pemda masih menganggap hal tersebut belum menjadi prioritas. Padahal, saat ini Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang merupakan beberapa implementasi Perda BG semakin penting fungsinya. "IMB dan SLF saat ini menjadi syarat bagi perbankan untuk mendapatkan dana. Selain itu perusahaan suaranya juga tidak mau menjamin apabila suatu bangunan belum ada SLF nya," tambah Guratno.

Untuk mempercepat tersusunnya Perda BG ini, Ditjen Cipta Karya jemput bola dengan melakukan pendampingan penyusunan kepada pemda. Pendampingan dilakukan dengan membuat model rancangan perda untuk kemudian dinilai kelayakannya kepada pemda setempat. Selain pendampingan, sosialisasi melalui seminar, kampanye dan juga pelatihan terus

dilakukan Ditjen Cipta Karya untuk mempercepat terbitnya Perda BG. "Dengan berbagai upaya percepatan tersebut, saya harapkan target 50% di tahun 2014 serta 100% pada tahun 2020 nanti bisa tercapai," tambah Guratno.

Dalam peringatan Satu Dasawarsa Implementasi Bangunan Gedung tersebut, Ditjen Cipta Karya mengadakan seminar nasional dengan mengangkat tema seputar Bangunan Gedung dengan

Mengundang narasumber dari kalangan praktisi dan akademisi.

Beberapa narasumber yang diundang antara lain; Ridwan Kamil, Danang Priatmodjo, Drajat Hidayanto, Suprpto, Hari Nugraha Nurjaman, Jimmy Siswanto dan Oktosa Harahap dengan dipandu oleh presenter cantik Olga Lydia.

Ketua panitia yang juga Kasudit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Dian Irawati mengatakan, topik yang diangkat pada seminar ini merupakan topik-topik pokok yang penting

untuk diulas dan disampaikan seperti, Perencanaan Untuk Kota Berkelanjutan, Keandalan Bangunan Gedung dan Pemeliharaan Gedung Menuju keandalan Bangunan Gedung.

"Keandalan bangunan gedung merupakan elemen pembentuk kota yang merupakan saksi sejarah perkembangan zaman. Melalui seminar ini semoga dapat dipetik manfaat, masukan dan

Rekomendasi untuk penataan bangunan di masa mendatang," kata Dian Irawati. **(dvt)**

**PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO TAHUN 2007 - 2014**

No	Penghargaan	Peringkat	Tahun	Hadiah
1.	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya (PKPD-PU) Sub Bidang Pembinaan Bangunan Gedung	2	2007	Piagam
2.	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya (PKPD-PU) Sub Bidang Pembinaan Bangunan Gedung	2	2008	Piagam
3.	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya (PKPD-PU) Sub Bidang Sanitasi.	3	2009	Trofi
4.	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya (PKPD-PU) Kategori Kota Sedang.	3	2010	Trofi
5.	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya (PKPD-PU) Kategori Kota Sedang.	2	2011	Trofi dan Amroll Truck dan Container.
6.	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya (PKPD-PU) Kategori Kota Sedang.	1	2012	Buldozer
7.	Penghargaan 10 tahun UU Bangunan Gedung bagi Pemda dalam Implementasi Perda Bangunan gedung	-	2012	Piagam
8.	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya (PKPD-PU) Kategori Kota Sedang.	1	2013	Trofi dan Truck Penydot Lumpur
9.	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya (PKPD-PU) Kategori Kota Sedang.	2	2014	Trofi dan Bego

Sumber : Dinas PU Tahun 2015

**Pemerintah Kabupaten / Kota Yang Studi Referensi
Implementasi Perda Bangunan Gedung di Kota Probolinggo**

No.	Instansi	Studi Tentang	Tahun
1.	Dinas PU Kabupaten Bogor	Retribusi IMB	2011
2.	Dinas Perijinan Kota Denpasar	Retribusi IMB	2012
3.	Dinas Perijinan Kabupaten Bantul	Rertibusi IMB	2012
4.	Litbang Bidang Perumahan dan Permukiman. Kementerian PU Bandung	Masukan Pemeriksaan SLF	2012
5.	Dinas Tata Kota, Kota Balikpapan	Implementasi SLF dan TABG	2013
6.	Dinas Tata Kota , Kota Batam	Implementasi SLF dan TABG	2013
7.	Dinas PU Cipta Karya Kota Bandung	Implementasi SLF dan TABG	2012
8	Dinas PU Kota Yogyakarta	Implementasi SLF	2012
9	Litbang Bidang Perumahan dan Permukiman. Kementerian PU Bandung	Kelembagaan dan Implementasi SLF	17-9-2015
10	Dinas Tata Kota, Kota Pangkalpinang Provinsi Bangkabelitung.	Implementasi SLF dan TABG	28-10-2015
11	Dinas PU Cipta Karya Kab Sumenep	Perda BG dan SLF.	2014
12	Dinas PU Tanah Grogot Kalimantan Selatan	Perda IMB	2015
13	Dinas PMK Kab Sidoarjo	PMK dan SLF	2015
14	Dinas PU Kota Madiun	Perda BG dan SLF	2015
15	Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Gresik	Perda BG dan SLF	22-6-2016

Sumber : Dinas PU Tahun 2015

Dinas PU Diundang Sebagai Narasumber Implementasi SLF

No.	Materi	Pembicara/Narasumber	Pengutus /Tempat
1.	Implementasi Perda Bangunan gedung	Kadin PU Ir. Sanusi Sapuwan, MT	Direktorat PBL, Kementerian PU, Palembang, 2010
2.	Implementasi Perda Bangunan gedung	Kabid Fistrana, Bappeda Ir. Dwi Putranto Riau, MT	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Propinsi Jatim, April 2011
3.	Penerapan Retribusi IMB sesuai permen PU	Sekretaris Dinas PU Ir. Dwi Putranto Riau, MT	Dinas Perijinan Pemkot Denpasar, maret 2012
4.	Penyusunan Perda Bangunan gedung	Sekretaris Dinas PU Ir. Dwi Putranto Riau, MT	Direktorat PBL, Kementerian PU Jakarta, Juni 2012
5.	Implementasi Perda Bangunan gedung	Sekretaris Dinas PU Ir. Dwi Putranto Riau, MT	Direktorat PBL, Kementerian PU Jakarta, Nopember 2012
6.	Konferensi Pers Satu Dasawars UU bangunan gedung	Sekretaris Dinas PU Ir. Dwi Putranto Riau, MT	Direktorat PBL, Kementerian PU Jakarta, desember 2012
7.	Implementasi Perda Bangunan gedung.	Sekretaris Dinas PU Ir. Dwi Putranto Riau, MT	Direktorat PBL, Kementerian PU Jakarta, 30 Oktober 2013
8.	Implementasi Perda Bangunan gedung.	Kadin PU Ir. Imanto, MM	Direktorat PBL, Kementerian PU Hotel , Bali, 28-11-2013
9.	FGD Model Implementasi SLF di Daerah	Kadin PU, diwakili Heri, ST Ir. Dwi Putranto Riau, MT	Balitbang Kementerian PUPR Jakarta, 7-8 Desember 2015
10	Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.	Pemerintah Kota Probolinggo Ir. Dwi Putranto Riau, MT	Direktorat PBL, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Baikpapapn, 13-5-2016

Sumber : Dinas PU, Tahun 2016

DOKUMENTASI IMPLEMENTASI SLF BANGUNAN GEDUNG
(Konferensi Pers, FGD, Studi Referensi dan Narasumber)



Konferensi Pers Satu Dasawarsa UU bangunan gedung, 5 Desember 2012



FGD Kadis PU dgn Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPERA, Bandung. 17 September 2015



Studi Referensi tentang Implementasi SLF dan TABG dari Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, 28 Oktober 2015



TABG memeriksa panel listrik dalam penerbitan SLF



FGD Model Implementasi SLF di Daerah oleh Pepen Suhadi, ST dari Balibang PUPR Bandung



Pembukaan FGD Model Implementasi SLF didaerah 8 Desember 2015 di Balitbang Kementerian PUPR, Jakarta



Narasumber Implementasi SLF.Kementerian PUPR di Balikpapan, 13 Mei 2016



Studi Referensi Implementasi SLF & TABG dari Kab Gresik, 22Juni 2016

DOKUMENTASI BANGUNAN GEDUNG ber-SLF di KOTA PROBOLINGGO



BG Ibadah SLF tahun 2008



BG umum SLF Th 2008 (sd 2013)



BG Pemerintah SLF Th 2008



BG Hunian Ibu Liliana Jl. Mawar Asri Tahun 2008 (berlaku 20 th)



BG Pabrik Eratex SLF sebagian Th 2014 dan Tahun 2015



Bank Panin SLF th 2014



BG Bank BCA SLF Th. 2014



BG Homestay Diponegoro SLF
th. 2014



BG Hunian SLF th. 2008 Ibu Tien Jl. Wijaya
Kusuma



BG Hunian SLF Firman
Robbani Th. 2008 Jl. Mawar
Muda

DOKUMENTASI Bangunan Gedung belum Mengajukan SLF di Kota Probolinggo

Bromo
Park Hotel
(7 lantai)
tertinggi di
pusat bisnis
JL Soetomo



BG Homestary Pinkhouse Jl. Mawar Permai sdh mengajukan SLF (persyaratan kurang seperti Penangkal Petir dan ijinGenset)



BG CU Mandiri Belum Mengajukan SLF di Jl. Dr. Moch Saleh

LAMPIRAN F



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI

Probolinggo, Juli 2015

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Pejabat/Staf Pada SKPD Pembina Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung ber-IMB, Stakeholder Bangunan Gedung dan Responden di-TEMPAT

Perihal : Permohonan Pengisian Kuisisioner

Lampiran : 1 (sat) berkas

Dalam rangka memenuhi Tugas Mata Kuliah Disertasi, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuisisioner yang kami lampirkan ini, Kuisisioner berikut semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pengumpulan data penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Judul Penelitian : Pengaruh komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik terhadap Sumberdaya, Disposisi dan Kinerja Implementasi Kebijakan (Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo)

Nama Peneliti : Ir. Dwi Putranto R, MT. NIM : 130 930 101 003

Alamat : Jl. Mawar Permai 19 Probolinggo. No HP : 085236529156

Email : putrantoriau@yahoo.co.id, dwiriau19@gmail.com

Mengingat sangat pentingnya data tersebut, serta tidak ada tujuan lain selain tujuan ilmiah untuk pengembangan ilmu dan pemecahan masalah dibidang kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab kuisisioner ini secara obyektif. Selanjutnya setelah kuisisioner diisi, mohon perkenan Bapak/Ibu kepada Kami untuk mengambil kuisisioner ditempat, kami akan merahasiakan identitas Bapak/Ibu sebagai sumber data.

Atas bantuan dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ALLAH SWT membalas budi baik Bapak/Ibu dengan lebih baik.

Hormat Kami

Ir. Dwi Putranto Riau, MT

Berilah Tanda Silang (X) pada jawaban yang dipilih.

BAGIAN A: Butir-butir pribadi Responden.

1. Nama :(bolehtidakdiisi)
2. Alamat Rumah :(bolehtidakdiisi)
3. Umur :Tahun (boleh tidak diisi)
4. Pekerjaan : a. PNS b. Swasta c. Lain-lain
5. Jabatan :
6. JenisKelamin : a.Laki- Laki() b. Perempuan()
7. Pendidikan : SD (), SMP (), SLTA (), S1 (), S2 (), S3 ().
8. Status Perkawinan : a. Kawin () b. Belum Kawin () c. Duda/Janda ()
9. Pendapatan Perbulan : Rp.
10. Status Bangunan gedung : a. Milik sendiri () b. Kontrak () c. Ikut orang tua/saudara dll ()
11. Fungsi Bangunan gedung yang dimiliki :a. Hunian (Rumah Tinggal) b. Usaha (Kantor, Perdagangan dll) c. Sosial dan Budaya (pendidikan, kesehatan dll).
12. Bangunan gedung memiliki IMB : a. ya () Tahun b. Tidak ()
13. Bangunan gedung memiliki Sertifikat Laik Fungsi (izin pemanfaatan bangunan) :a. Ya () Tahunb. Tidak ()
14. Bila jawaban pada nomor 12 ya dan 13 tidak, apakah akan melaporkan ke Dinas PU untuk meminta Sertifikat Laik fungsi Bangunan Gedung agar segera ditindak lanjuti : a. Ya () b. tidak ()

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI INDONESIA

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - a. Pasal 37 ayat (1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi; ayat (2) bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - a. Pasal 71 Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan laik fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dimanfaatkan meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, terhadap izin mendirikan bangunan gedung yang telah diberikan.
 - b. Pasal 71 ayat (3) Sertifikat laik fungsi bangunan gedung berlaku selama 20 (dua) puluh tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, serta berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya.
3. Perda Nomor 4 Tahun 2008 Kota Probolinggo tentang Bangunan Gedung.
 - a. Pasal 10 ayat (6) Orang pribadi atau badan sebelum memanfaatkan/menggunakan bangunan di wilayah daerah diharuskan memiliki sertifikat laik fungsi bangunan gedung dari kepala daerah atau instansi yang ditunjuk sebagai Pembina penyelenggaraan bangunan gedung.
 - b. Pasal 50 ayat (1) setelah bangunan selesai pemohon wajib menyampaikan secara tertulis dilengkapi dengan
 - a. Berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah terakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan)
 - b. gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing)
 - c. Pasal 52 ayat (1) untuk bangunan baru, pengajuan permohonan sertifikat laik fungsi bangunan dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB)
 - d. Pasal 52 ayat (5) Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dilakukan dengan mengikuti pelayanan prima dan tanpa dipungut biaya.

BAGIAN B : Variabel –Variabel Penelitian**Berilah Tanda Silang (X) pada jawaban yang dipilih.**

1 = SangatTidak Jelas (STJ) 2 = Tidak Jelas (TJ) 3 = Netral(tidak tahu/tidak dapat menentukan pilihan) (N)4 = Jelas (J) 5 = Sangat Jelas (SJ)

X1	Variabel bebas (Independen) : Komunikasi	STJ	TJ	N	J	SJ
X1.1	Menurut saudara : Maksud dan tujuan kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sudah jelas disampaikan kepada stakeholder	1	2	3	4	5
X1.2	Menurut saudara : Publik sudah mengetahui secara jelas maksud dan tujuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	1	2	3	4	5
X1.3	Menurut saudara :Kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilaksanakan secara konsisten pada semua bangunan gedung.	1	2	3	4	5

1 = SangatTidak didukung (STD) 2 = Tidak didukung (TD) 3 = Netral(tidak tahu/tidak dapat menentukan pilihan)(N)4 = didukung (D) 5 = Sangat didukung (SD)

X2	Variabel bebas (Independen): Sumberdaya	STD	TD	N	D	SD
X2.1	Pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan jumlah staf	1	2	3	4	5
X2.2	Pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan fasilitas peralatan yang memadai.	1	2	3	4	5
X2.3	Pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan dana yang cukup supaya sesuai dengan tujuan.	1	2	3	4	5
X2.4	Pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan informasi/data yang akurat	1	2	3	4	5
X2.5	Pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai dengan tujuan maka diberi dengan kewenangan yang kuat	1	2	3	4	5

Berilah Tanda Silang (X) pada jawaban yang dipilih.

1 = SangatTidakSesuai (STS) 2 = TidakSesuai (TS) 3=Netral(tidak tahu/tidak dapat menentukan pilihan)(N)4=Sesuai (S) 5=Sangat Sesuai (SS)

X3	Variabel bebas (Independen): struktur birokrasi	STS	TS	N	S	SS
X3.1	Pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilaksanakan satu seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota.	1	2	3	4	5
X3.2	Dalam pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sudah terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1	2	3	4	5
X3.3	Tata cara pelaksanaan pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai dengan Standar operating Prosedur (SOP)	1	2	3	4	5

Berilah Tanda Silang (X) pada jawaban yang dipilih.

1 = Sangat Tidak sesuai (STS) 2= Tidak sesuai (TS) 3=Netral(tidak tahu/tidak dapat menentukan pilihan) (N)4=Sesuai (S) 5 = Sangat Sesuai (SS)

X4	Variabel bebas (Independen): Dukungan Publik	STS	TS	N	S	SS
X4.1	Selama ini pemerintah kota dalam pelaksanaan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung tidak ada pungutan biaya.	1	2	3	4	5
X4.2	Selama ini pemerintah kota dalam pelaksanaan Sertifikat Laik fungsi bangunan gedung masyarakat dibebani dengan persyaratan yang menghambat (as built drawing, Biaya Konsultan Pengawas/Pengkaji teknis dll)	1	2	3	4	5

1 = Sangat Tidak didukung (STD) 2 = Tidak didukung (TD) 3 = Netral (tidak tahu/tidak dapat menentukan pilihan) (N) 4 = Didukung (D) 5 = Sangat didukung (SD)

Y1	Variabel bebas (Independen): Disposisi	STD	TD	N	D	SD
Y1.1	Birokrasi mempunyai komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	1	2	3	4	5
Y1.2	Birokrasi melakukan mutasi apabila pelaksanaan kebijakan sertifikasi laik fungsi tidak berjalan.	1	2	3	4	5
Y1.3	Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung didukung dengan peningkatan insentif personel (honor, dll)	1	2	3	4	5

1 = Sangat Tidak Puas (STP) 2 = Tidak Puas (TP) 3 = Netral (tidak tahu/tidak dapat menentukan pilihan) (N) 4 = Puas (P) 5 = Sangat Puas (SP)

Y2	Variabel tergantung (dependen) : Kinerja Implementasi Kebijakan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung	STP	TP	N	P	SP
Y2.1	Hasil Kebijakan implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tepat sasaran/sesuai tujuan visi dan misi organisasi.	1	2	3	4	5
Y2.2	Usaha yang dilakukan birokrasi dalam mencapai tujuan kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sudah tercapai.	1	2	3	4	5
Y2.3	Masalah implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sudah diperbaiki.	1	2	3	4	5
Y2.4	Pemerataan manfaat kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung pada seluruh pemohon/pengguna bangunan gedung	1	2	3	4	5
Y2.5	Hasil kebijakan implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung memuaskan pengguna Bangunan Gedung	1	2	3	4	5
Y2.6	Hasil/tujuan kebijakan implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung berguna/bernilai bagi pengguna Bangunan Gedung.	1	2	3	4	5



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI

INDEPT INTERVIEW

BIROKRASI

I. Komunikasi

1. Apakah selama ini dalam implementasi bangunan gedung Kebijakan SLF sudah dikomunikasikan kepada pelaksana lapangan dan masyarakat pemilik IMB ?
2. Apakah kebijakan SLF sudah sering dikomunikasikan kepada masyarakat pemilik IMB ?
3. Apakah kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sudah dilaksanakan secara konsisten pada semua bangunan gedung ?

II. Sumberdaya (SDM, Peralatan, Dana, informasi/data dan Kewenangan).

1. Apakah pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan jumlah staf ?
2. Apakah pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan fasilitas peralatan yang memadai ?
3. Apakah pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan dana yang cukup supaya sesuai target perda bangunan gedung ?
4. Apakah pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung didukung dengan informasi/data yang akurat (Simbversi4) ?
5. Apakah pelaksanaan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai dengan tujuan maka diberi dengan kewenangan yang kuat ?

III. Struktur Birokrasi

1. Apakah pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilaksanakan satu seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota ?
2. Apakah dalam pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sudah terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya ?
3. Apakah tata cara pelaksanaan pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai dengan Standar operating Prosedur (SOP) ?

IV. Disposisi

1. Apakah birokrasi mempunyai komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung ?

2. Apakah Birokrasi melakukan mutasi apabila pelaksanaan kebijakan sertifikasi laik fungsi tidak berjalan.?
3. Apakah keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung didukung dengan peningkatan insentif personel ?

V. Kinerja Implementasi SLF BG

1. Apakah hasil Kebijakan implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tepat sasaran/sesuai tujuan visi dan misi organisasi
2. Apakah usaha yang dilakukan birokrasi dalam mencapai tujuan kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sudah tercapai.
3. Apakah masalah implementasi kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sudah diperbaiki.
4. Apakah pemerataan manfaat kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung pada seluruh pemohon ?
5. Apakah Hasil kebijakan implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung memuaskan pengguna Bangunan Gedung ?
6. Apakah Hasil/tujuan kebijakan implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung berguna/bernilai bagi pengguna Bangunan Gedung. (untuk Jaminan Bank, asuransi bangunan gedung, sertifikasi usaha hotel dll) ?

VI. Dukungan Publik.

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa sebelum bangunan gedung dimanfaatkan diwajibkan mempunyai SLF BG ?
2. Apakah selama ini sudah sering dilakukan sosialisasi SLF BG melalui media masa, Leaflet, brosur, poster di jalan atau tatap muka oleh Pemerintah Kota ?
3. Apakah dalam pengurusan IMB sudah disampaikan setelah bangunan gedung selesai dibangun diwajibkan memiliki SLF BG ?
4. Sesuai dengan pasal 52 perda 4 tahun 2008 dan sejak tahun 2008 formulir pengurusan IMB jadi satu dengan SKRK, IMB dan SLF tetapi setelah SKRK tahun 2012 dikembalikan Ke Dinas PU maka formulir IMB menjadi sendiri. Apakah hal ini yang membuat masyarakat yang mengurus IMB tidak tahu tentang SLF ?
5. Apakah selama ini pemerintah kota dalam pelaksanaan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung tidak ada pungutan biaya ?
6. Apakah selama ini pemerintah kota dalam pelaksanaan Sertifikat Laik fungsi bangunan gedung masyarakat dibebani dengan persyaratan yang menghambat (as built drawing, Biaya Konsultan Pengawas/Pengkaji teknis dll) ?

